



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) PROVINSI BALI TAHUN 2023

PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN 2024



@pemprov_bali



Pemerintah Provinsi Bali



@HumasBali



Pemerintah Provinsi Bali



www.baliprov.go.id



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂ

GOVERNOR BALI

KATA PENGANTAR



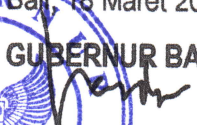
Dengan menghaturkan *puja pangastuti angayubagia* dihadapan *Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa, dan atas *Asung Kerta Wara Nugraha*-Nya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 pada dasarnya dibuat untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 dan Pasal 70, menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 selanjutnya digunakan oleh pemerintah sebagai dasar melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut di atas, paradigma penyelenggaraan pemerintahan juga mengalami pergeseran dimana Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih kuat untuk mengatur urusan pemerintahannya sesuai dengan potensi yang dimiliki serta memperhatikan aspirasi yang bermuara kepada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan di Provinsi Bali telah berjalan dengan baik walaupun masih dijumpai beberapa hambatan, namun berkat kerja keras dan kerja sama seluruh komponen Pemerintah dan masyarakat, hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Sebagai akhir kata, semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam upaya mewujudkan pembangunan Bali menjadi lebih baik dan memiliki arah yang jelas, dengan semangat menjaga, melanjutkan, dan memperkuat, serta meningkatkan capaiannya. Terimakasih.

Bali, 18 Maret 2024
Pi. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA



DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah	1
b. Data Geografis Wilayah	3
c. Jumlah Penduduk	7
d. Jumlah Kabupaten/Kota	8
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintah	8
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	10
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	12
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	12
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	31
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	40
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	53
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	149
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	151
2.1 Capaian Kinerja Makro	151
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	154
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	154
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil	186
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	199
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	202
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	270
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Provinsi Bali	271
3.1.1 Target Kinerja	271

3.1.2 Realisasi	272
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Daerah Kabupaten/Kota	278
3.3 Permasalahan dan Kendala	278
3.4 Saran dan Tindak Lanjut	278
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	279
4.1 Urusan Pendidikan	280
4.2 Urusan Kesehatan	286
4.3 Urusan Pekerjaan Umum	290
4.4 Urusan Perumahan Rakyat	294
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	297
4.6 Urusan Sosial	299
4.7 Program dan Kegiatan	305
4.7.1 Urusan Pendidikan	305
4.7.2 Urusan Kesehatan	305
4.7.3 Urusan Pekerjaan Umum	306
4.7.4 Urusan Perumahan Rakyat	306
4.7.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	306
4.7.6 Urusan Sosial	307
BAB VPENUTUP	310

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Provinsi Bali lahir setelah terjadi penyatuan kembali wilayah Negara Indonesia Timur (NIT) ke dalam pangkuan Republik Indonesia. Pembentukan Provinsi Bali dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Era baru masyarakat Bali diawali dengan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sementara Daerah Bali, lembaga Legislasi ini dilantik pada 25 September 1950 di Bali Hotel Denpasar. Sebelum itu, Pemerintahan Bali dilaksanakan oleh sebuah badan yang bernama Badan Pelaksana Pemerintahan (BPP) di Bali, dengan Ketua BPP adalah AA. Gede Oka (Ketua Dewan Raja Raja) dengan anggota I Gusti Putu Merta (urusan politik), I Gusti Gde Subamia (urusan sosial), I Wayan Daging (urusan ekonomi), dan I Wayan Badra (urusan umum). Baru beberapa hari BPP menjalankan pemerintahan di Bali, Pemerintah NIT mengeluarkan Undang-Undang Nomor 44 tertanggal 15 Juni 1950 untuk mengadakan perubahan ketatanegaraan di Indonesia Timur, sesuai dengan perubahan keadaan saat itu. Sebagai implementasi dari Undang-Undang itu, dibentuklah Panitia Penyelenggaraab Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950, Panitia ini yang membentuk DPR sementara Daerah Bali. Jumlah Anggota DPRD Bali saat itu berjumlah 41 (empat puluh satu) orang terdiri dari wakil-wakli dari PNI, Masyumi, KNPI, GBI, Persatuan Wanita Indonesia, Golongan Tani, dan orang-orang yang terikat oleh Partai/Organisasi. I Gusti Putu Merta dipilih sebagai Ketua dengan Wakil Ketua Ida Bagus Oka, dan Sekretaris I Gusti Putu Gde Kutri.

Sehari setelah pelantikan DPRD Bali, diadakan pemilihan Kepala Daerah Bali. AA. Bagus Sutedja dan Tjokorda Anom Putra ditetapkan sebagai calon terpilih. Selain itu, diadakan pula pemilihan anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah Bali, yaitu I Gusti Made Mudra (urusan politik), I Gusti Gde Subamia (urusan sosial), I Wayan Daging (urusan ekonomi), dan I Gusti Bagus Sugriwa (urusan umum). Bersamaan dengan itu, diadakan pula perubahan struktur pemerintahan di masing-masing swapraja di Bali. Pada Bulan Mei 1951, semua daerah di Bali telah terbentuk DPRD Daerah Bagian (swapraja) serta dilanjutkan dengan pembentukan Dewan Pemerintahan Daerah.

Pasca Pemilu Tahun 1951, munculah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, pemberlakuan Undang-Undang ini diikuti

dengan pembentukan Provinsi Bali pada 14 Agustus 1958. Setelah Provinsi Bali dibentuk, pelaksanaan Pemerintahan di Bali mengalami perubahan, Pemerintah Pusat menunjuk/mengangkat seorang pejabat Kepala Daerah. I Gusti Bagus Oka ditunjuk sebagai pejabat Kepala Daerah Tingkat I Bali yang pertama pasca dibentuknya Provinsi Bali, dan dilantik pada 1 Desember 1958. Setelah diangkatnya pejabat Kepala Daerah Tingkat I Bali, terbentuklah DPRD Bali yang baru. DPRD Bali yang baru terbentuk dan memilih calon Kepala Daerah yang baru. Presiden Soekarno menetapkan AA. Bagus Sutedja sebagai Kepala Daerah Bali dengan Keputusan Presiden Tahun 1959, jadi AA. Bagus Sutedja merupakan Kepala Daerah definitif pertama Provinsi Bali setelah dibentuk Tahun 1958.

Semula Ibukota Provinsi Bali ditetapkan di Singaraja mengikuti Ibukota Provinsi Sunda Kecil, tapi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 52/2/36-B6 tanggal 23 Juni 1960, Ibukota Provinsi Bali dipindahkan ke Denpasar, pemindahan ini atas resolusi DPRD Tingkat I Bali, dan Denpasar menjadi Ibukota Provinsi Bali hingga saat ini.

Dalam menghadapi berbagai perkembangan yang ada, masyarakat Bali meyakini bahwa sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan adalah keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, keharmonisan hubungan antarsesama manusia, dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya sesuai dengan filosofi yang bersumber dari nilai kearifan lokal Bali. Filosofi dan kearifan lokal tersebut harus terus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan secara berkelanjutan oleh masyarakat Bali.

Kedudukan Provinsi Bali sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dimana Undang-Undang tersebut tidak lagi mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat Bali, terutama dalam memelihara kebudayaan yang bersumber dari adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal yang merupakan bagian dari kekayaan nasional yang harus terus dipelihara baik oleh masyarakat maupun Negara.

Sehingga untuk menghadapi dan menjawab permasalahan kebudayaan yang dihadapi Provinsi Bali mencakup adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal yang terus mengalami kemunduran dari segi jumlah dan kualitas kelembagaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia serta sistem nilai dan pranata budaya, serta penyelenggaraan pembangunan Bali yang belum sepenuhnya menjamin keajekan nilai budaya, adat istiadat, aura (taksu) Bali, dan kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Bali, maka pada tanggal 4 Mei 2023 diundangkan **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali** yang memuat penyempurnaan dasar

hukum, penyesuaian cakupan wilayah, pengakuan karakteristik Provinsi Bali serta kontribusi masyarakat dan negara dalam memberikan penguatan pemajuan kebudayaan dan desa adat di Bali.

b. Data Geografis Wilayah

1. Letak, Batas, dan Luas Wilayah

Pulau Bali merupakan satu di antara 34 provinsi di Indonesia yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata (*The Island of God*). Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok dengan Ibu kota Denpasar, yang terletak di bagian selatan pulau ini.

Pulau Bali dengan total luas wilayah 5.636,66 km², terdiri atas beberapa pulau, yakni Pulau Bali sebagai pulau terbesar, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan (terletak di sekitar kaki Pulau Bali), serta Pulau Menjangan yang terletak di bagian barat Pulau Bali.

Secara astronomis, Provinsi Bali terletak pada posisi titik koordinat 08°03'40" – 08°50'48" Lintang Selatan dan 114°25'53" – 115°42'40" Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis, layaknya wilayah lain di Indonesia.

Luas Wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan mencapai 5.636,66 km² atau 0,29% dari luas kepulauan Indonesia. Provinsi Bali terbagi ke dalam delapan kabupaten dan satu kota meliputi Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem, dan Kota Denpasar. Diantara kesembilan kabupaten/kota tersebut, Kabupaten Buleleng memiliki luas terbesar 1.365,88 km² (24,23%) dari luas provinsi, diikuti oleh Jembrana 841,80 km² (14,93%), Karangasem 839,54 km² (14,89%), dan Tabanan 839,33 km² (14,89%). Sisanya berturut-turut adalah Bangli 520,81 km², Badung 418,52 km², Gianyar 368,00 km², Klungkung 315,00 km², dan Kota Denpasar 127,78 km².

Secara administratif, Provinsi Bali terdiri atas 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota, 57 kecamatan, 716 desa/kelurahan, dan 1.493 desa adat/desa pakraman. Jumlah kecamatan tiap Kabupaten/Kota berkisar 4-10 kecamatan.

Batas-batas wilayah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Laut Bali
- Sebelah timur : Selat Lombok
- Sebelah selatan : Samudera Hindia
- Sebelah barat : Selat Bali.

Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Provinsi Bali

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km²)	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Desa Adat
1	Buleleng	1.365,88	9	148	170
2	Jembrana	841,80	5	51	64
3	Tabanan	839,33	10	133	348
4	Badung	418,52	6	62	122
5	Denpasar	127,78	4	43	35
6	Gianyar	368,00	7	70	272
7	Bangli	520,81	4	72	168
8	Klungkung	315,00	4	59	119
9	Karangasem	839,54	8	78	190
BALI		5.636,66	57	716	1.493

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

Jika dilihat dari struktur pemerintahan, Bali memiliki “keunikan” yang berbeda dengan daerah lain. Struktur pemerintahan terbawah di Indonesia umumnya terdiri atas kepala desa/lurah, kepala dusun/kepala lingkungan, ketua RW, lalu ketua RT. Namun struktur pemerintahan desa di Bali justru ada dua, yaitu desa administratif dan desa budaya. Desa administratif lazim disebut *Desa Dinas*, yang berfungsi menjalankan pemerintahan administratif kedinasan sebagaimana halnya desa di luar Bali umumnya. Susunan kelembagannya terdiri atas kepala desa/lurah dan di bawahnya ada kepala dusun/kepala lingkungan. Adapun desa budaya di Bali dinamakan *Desa Adat* atau *Desa Pakraman*. Di bawahnya ada *banjar adat* atau *banjar suka-duka*.

Keberadaan Desa Adat/Desa Pakraman di Bali merupakan suatu entitas yang khas/unik. Desa Adat memiliki adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang menjadi sumber nilai-nilai tata kehidupan Bali. Dengan nilai-nilai tata kehidupan tersebut, *Krama* atau orang Bali di Desa Adat hidup dalam suatu ikatan masyarakat komunal, sebagai satuan kelompok masyarakat yang guyub serta memiliki semangat gotong-royong dalam tata kehidupan yang berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana*, meliputi: *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*.

Filosofi *Tri Hita Karana* ini memberi tuntunan ajaran kepada *Krama* Bali untuk *asih* kepada alam (*Palemahan*), *punia* kepada sesama manusia (*Pawongan*), sebagai wujud *bhakti* kepada Tuhan Yang Mahaesa (*Parahyangan*). Filosofi *Tri Hita Karana* ini selanjutnya dijabarkan dalam kearifan lokal *Sad Kerthi*, meliputi: upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia secara individual (*jana kerthi*).

Masing-masing Desa Adat/Desa Pakraman memiliki *Pura Kahyangan Tiga* (Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem) dan ada pula Desa Adat/Desa Pakraman yang memiliki *Pura Kahyangan Desa* lainnya. Tata kehidupan Krama Bali di Desa Adat/Desa Pakraman diatur dengan *Awig-awig* dan *Pararem* yang hanya berlaku di masing-masing Desa Adat/Desa Pakraman disebut *Desa Mawacara*.

Desa Adat/Desa Pakraman merupakan bentuk Desa yang *genuine* (asli, orisinal, dan asasi) hasil karya para Leluhur/Tetua Bali. Secara keseluruhan di Bali terdapat: *Pura Kahyangan Tiga* sebanyak 4.552 Pura, *Pura Dang Kahyangan* sebanyak 289 Pura, dan *Pura Sat Kahyangan* sebanyak 8 Pura yang menyebar dan mengitari wilayah pinggiran Bali, sehingga Bali dikenal dengan nama Pulau Seribu Pura.

Setidaknya ada 3 (tiga) unsur utama yang harus dipahami secara komprehensif tentang Bali, yaitu: Alam Bali, Manusia Bali (*Krama Bali*), dan Kebudayaan Bali. Ketiga unsur utama tersebut menjadi satu kesatuan tata kehidupan *Krama Bali* yang berkebudayaan tinggi dan religius.

2. Topografi

Kondisi geografis Provinsi Bali merupakan alam yang memiliki daya tarik tersendiri karena keindahannya yang lengkap: berupa laut, sungai, danau, dan gunung. Masyarakat Bali memposisikan gunung di hulu, dan pantai di hilir sehingga terbentuk bentangan alam yang dikenal dalam istilah Bali dengan sebutan *Nyegara-Gunung*.

Sumber daya alam Bali berupa hutan, tanah, dan air sangat terbatas dibandingkan dengan daerah lain. Di wilayah Provinsi Bali terdapat 4 (empat) danau, 246 (dua ratus empat puluh enam) sungai, 24 (dua puluh empat) gunung yang 2 gunung di antaranya merupakan gunung berapi, yaitu Gunung Agung dan Gunung Batur. Pegunungan di Bali terbentang di tengah-tengah Pulau Bali yang memanjang dari Barat ke Timur. Hal ini sekaligus menjadikan daratan Pulau Bali menjadi hamparan saujana yang memesona dengan sawah-sawah dan lembahnya yang berundak-undak.

Berdasarkan peruntukannya lahan di Bali terdiri atas lahan pertanian (sawah dan bukan sawah) seluas 407.534 hektare, lahan bukan pertanian seluas 156.132 hektare, serta kawasan hutan dengan luas 130.686 (23,20%) hektare, yang mencakup hutan lindung, hutan produksi, taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.

3. Geologi

Jenis tanah yang ada di Bali sebagian besar didominasi oleh tanah Regosol dan Latasol serta sebagian kecil saja terdapat jenis tanah Alluvial, Mediteran, dan Andosol. Jenis tanah Latosol yang sangat peka terhadap erosi ini tersebar di Bali bagian barat sampai ke utara, seperti Lokapaksa, Petemon, Ringdikit, dan

Pempatan. Tanah jenis ini juga terdapat di sekitar Gunung Penyu, Gunung Pintu, Gunung Juwet, dan Gunung Seraya yang secara keseluruhan meliputi 44,90% dari luas Pulau Bali.

Jenis tanah Regosol yang sangat peka terhadap erosi terdapat di bagian timur Amlapura sampai Culik. Jenis tanah ini terdapat juga di Pantai Singaraja sampai Seririt, Bubunan, Kekeran di sekitar Danau Tamblingan, Buyan, dan Beratan, sekitar Hutan Batukaru, serta sebagian kecil di Pantai Selatan Desa Kusamba, Sanur, Benoa, dan Kuta. Jenis tanah ini meliputi sekitar 39,93% dari luas Pulau Bali.

Adapun jenis tanah Andosol yang juga peka terhadap erosi terdapat di sekitar Baturiti, Candikuning, Banyuatis, Gobleg, Pupuan, dan sebagian kelompok hutan Gunung Batukaru. Jenis tanah Mediteran yang kurang peka terhadap erosi terdapat di jazirah Bukit Nusa Penida dan kepulauannya, Bukit Kuta, dan Prapat Agung. Jenis tanah yang juga tidak peka terhadap erosi lainnya adalah tanah Alluvial, terdapat di dataran Negara, Sumber Kelampok, Manggis, dan Angantelu di wilayah Kabupaten Karangasem. Ketiga jenis tanah ini, yakni Andosol, Mediteran, dan Alluvial meliputi sekitar 15,49% dari total luas Pulau Bali.

4. Hidrologi

Provinsi Bali memiliki empat danau alam, yaitu Danau Batur di Kabupaten Bangli, Danau Beratan di Kabupaten Tabanan, serta Danau Buyan dan Danau Tamblingan di Kabupaten Buleleng. Danau Batur merupakan danau terbesar dengan luas permukaan 10,22 km².

Danau-danau yang terdapat di Bali merupakan danau vulkanik yang semuanya berada pada rantai pegunungan dengan ketinggian 1.000 – 1.200 mdpl. Dengan posisinya yang demikian, keempat danau ini merupakan penyangga tata air di daerah hilir dan sekitarnya. Total volume air danau seluruhnya sebesar 1.008,10 juta m³, di mana 80,90% bersumber dari Danau Batur, 11,53% dari Danau Buyan, 4,88% dari Danau Beratan, dan 2,68% dari Danau Tamblingan.

Terdapat pula waduk dan embung yang merupakan danau buatan (*man made lake*) dan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti penyediaan air irigasi, air baku air bersih, pengendalian banjir, dan lain sebagainya. Di Provinsi Bali terdapat lima waduk/embung, yaitu Waduk Palasari, Waduk Gerokgak, Waduk Telaga Tunjung, Waduk Muara Nusa Dua, dan Embung Seraya dengan total volume air waduk dan embung seluruhnya sebesar 16,08 juta m³. Di samping itu telah selesai pula dibangun Waduk Titab di Kabupaten Buleleng yang difungsikan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, air baku air minum, sarana pariwisata dan perikanan dengan volume tampungan sebesar 10,08 juta m³.

Provinsi Bali merupakan Wilayah Sungai Strategis Nasional, yakni Sungai Bali-Penida terdiri atas 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) daerah aliran sungai (DAS). Sistem sungai di Bali mengalir dari utara atau selatan sebagai akibat dari terbaginya Pulau Bali oleh pegunungan yang membentang dari barat - timur di tengah-tengah pulau ini. Sungai-sungai yang ada di sebelah selatan pegunungan mengalir ke arah selatan yang umumnya memiliki panjang dua kali lipat dibandingkan sungai yang mengalir ke utara di belahan utara pegunungan.

Menurut Dinas PU Provinsi Bali, terdapat 401 batang sungai dengan panjang 2.776 km, namun yang potensial hanya 66 sungai dengan karakteristik sebagian besar merupakan sungai intermitten dan annual sehingga pemanfaatan sumber air dari sungai-sungai ini tidak dapat diharapkan sepanjang tahun. Kurang dari 11% sungai yang memiliki debit aliran pada musim kemarau. Potensi air sungai menurut Sub Satuan Wilayah Sungai di Bali adalah 196,4 m³/detik atau 6.195,3 juta m³/tahun.

Pada tahun 2017, Total Potensi Air sebesar 7,58 milyar m³ atau 239,69 m³/dt yang bersumber dari: Air permukaan/*run off* 6,55 milyar m³/th, mata air 0,73 milyar m³/th dan Air tanah 285,15 juta m³/th. Total ketersediaan air 3,36 milyar m³/th atau 106,64 m³/dt sedangkan total kebutuhan air 3,7 miliar m³/th atau 119,58 m³/dt.

Pada tahun 2018, total potensi air di Provinsi Bali mengalami penurunan dari tahun 2017 menjadi 6,84 milyar m³ atau 216,87 m³/dt. Sumber dari potensi air ini terdiri dari air permukaan sebesar 6,55 milyar m³ atau 208,83 m³/dt, dan air tanah sebesar 0,29 milyar m³ atau 9,04 m³/dt. Ketersediaan air bersih sebesar 101,23 m³/dt sedangkan kebutuhan air bersih adalah 119,96 m³/dt.

c. Jumlah Penduduk

**Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020**

No	Kabupaten/Kota	Sensus 2020		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Jembrana	158.730	158.334	317.064
2	Tabanan	231.448	230.182	461.630
3	Badung	274.577	273.614	548.191
4	Gianyar	258.455	256.889	515.344
5	Klungkung	103.657	103.268	206.925
6	Bangli	130.307	128.414	258.721
7	Karangasem	249.495	242.907	492.402
8	Buleleng	398.135	393.678	791.813
9	Denpasar	366.301	359.013	725.314
	Provinsi Bali	2.171.105	2.146.299	4.317.404

Sumber: BPS Provinsi Bali 2022

d. Jumlah Kabupaten/Kota

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Provinsi Bali terdiri atas 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu:

- a. Kabupaten Jembrana;
- b. Kabupaten Tabanan;
- c. Kabupaten Badung;
- d. Kabupaten Gianyar;
- e. Kabupaten Klungkung;
- f. Kabupaten Bangli;
- g. Kabupaten Karangasem;
- h. Kabupaten Buleleng; dan
- i. Kota Denpasar.

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Ibu kota Provinsi Bali berkedudukan di Kota Denpasar.

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintah

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dengan susunan sebagai berikut:

- i. Sekretariat Daerah Provinsi;
- ii. Sekretariat DPRD Provinsi;
- iii. Inspektorat Daerah Provinsi;
- iv. Dinas Daerah Provinsi, terdiri dari:
 - 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga
 - 2. Dinas Kesehatan
 - 3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 5. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 - 6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - 7. Dinas Perhubungan
 - 8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - 9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - 10. Dinas Kebudayaan

11. Dinas Pariwisata
 12. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
 13. Satuan Polisi Pamong Praja
 14. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
 15. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 16. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
 17. Dinas Kelautan dan Perikanan
 18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- v. Badan Daerah Provinsi terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 2. Badan Riset dan Inovasi Daerah
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 5. Badan Pendapatan Daerah
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 8. Badan Penghubung

Untuk Sekretariat Daerah Provinsi diatur kembali Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, yang terdiri dari :

- i. Staf Ahli terdiri dari:
 1. Staf Ahli Gubernur Bidang Permukiman dan Sarana Prasarana Wilayah
 2. Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 3. Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian
- ii. Asisten terdiri dari:
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 3. Asisten Administrasi Umum
- iii. Biro terdiri dari:
 1. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 2. Biro Hukum
 3. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian
 4. Biro Organisasi
 5. Biro Umum dan Protokol

Adapun jumlah pegawai di Pemerintah Provinsi Bali yang mendukung semua perangkat daerah dan unit kerja, adalah sebagai berikut:

KEADAAN 1 JANUARI 2024

ASN

• PNS : 9.112

• CPNS : 5

• PPPK : 2.611

JML ASN : 11.728

NON ASN QPD : 8.389

TOTAL SDM : 20.363

FORMASI JABATAN STRUKTURAL

JML FORMASI : 523

- ES I : 1

- ES II : 41

- ES III : 229

- ES IV : 252

JML TERISI : 469

- ES I : 1

- ES II : 37

- ES III : 197

- ES IV : 234

JML LOWONG : 38

- ES I : 0

- ES II : 4

- ES III : 32

- ES IV : 18

PELAKSANA

JML : 2.467

JENIS JABATAN FUNGSIONAL

JML : 103

JENIS JABATAN NON ASN

TENAGA ADMINISTRASI : 4.983

TENAGA GURU : 594

TENAGA KEBERSIHAN : 522

TENAGA KESEHATAN : 923

TENAGA PENGEMUDI : 370

TENAGA PENYULUH BAHASA BALI : 653

TENAGA SATUAN PENGAMANAN : 344

JENIS KELAMIN

JML :

• LAKI-LAKI : 5.841

• PEREMPUAN : 5.887

UMUR

JML :

• 18-30 : 1.631

• 31-40 : 3.734

• 41-50 : 2.641

• >50 Th : 3.722

JML PEJABAT DI INSTANSI INDUK : 320

JML TERISI : 287

• ES I : 1

A : 32

B : 5

• ES II : 37

A : 1

B : 3

• ES III : 155

A : 137

B : 18

• ES IV : 94

A : 94

B : 0

JML LOWONG : 33

• ES I : 0

A : 1

B : 3

• ES II : 4

A : 20

B : 3

• ES III : 23

A : 6

B : 0

• ES IV : 6

A : 6

B : 0

TENAGA GURU

JML : 6.590

JF DILUAR GURU

JML : 2.202

GOL / RUANG

ASN JML :

• GOL IV : 3.095

• GOL III : 4.967

• GOL II : 1.040

• GOL I : 15

PPPK JML :

• GOL X : 82

• GOL IX : 2.334

• GOL VII : 195

JML PEJABAT DI UPTD : 203

JML TERISI : 182

• ES III : 42

A : 0

B : 42

• ES IV : 140

A : 140

B : 0

JML LOWONG : 21

• ES III : 9

A : 0

B : 9

• ES IV : 12

A : 12

B : 0

JENJANG PENDIDIKAN

JML :

• SD : 13

• SLTP : 36

• SLTA : 855

• D.1 : 6

• D.2 : 4

• D.3/SARMUD : 829

• S.1/D.4 : 7.651

• S.2 : 2.198

• S.3 : 51

JENIS PENDIDIKAN UMUM

• AGAMA : 112

• AKUNTANSI : 330

• BAHASASASTRA : 360

• EKONOMI : 815

• HUKUM : 371

• KEDOKTERAN : 172

• KESEHATAN : 1.137

• KOMPUTER : 220

• PEMERINTAHAN : 228

• PENDIDIKAN : 5.472

• PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, KESENIAN : 55

• SOSIAL, POLITIK : 567

• TEKNIK : 492

• LAIN-LAIN : 1.185

AKAN PENSIUN

PENSIUN

Usia 60 tahun

Usia 65 tahun

Jumlah Total

JML : 212 449 661

• ESELON I - - -

• ESELON II 0 4 4

• ESELON III 9 24 33

• ESELON IV 5 13 18

• PPK / STAF 198 408 606

TAHUN 2025**

JML 569

Exelon I -

Exelon II 9

Exelon III 20

Exelon IV 16

PIPKStaf 524

CATATAN :
** : Jumlah Perkiraan

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Bulan Desember 2023

Uraian	Jumlah			
	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
PENDAPATAN DAERAH	7.248.953.175.947,00	6.768.699.641.073,02	(480.253.534.873,98)	93,37
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.041.446.320.153,00	4.623.648.871.938,02	(417.797.448.214,98)	91,71
Pendapatan Pajak Daerah	3.238.968.237.629,00	4.048.571.031.769,00	809.602.794.140,00	125,00
Pendapatan Retribusi Daerah	53.416.681.500,00	15.295.499.618,00	(38.121.181.882,00)	28,63
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	808.120.019.322,00	158.120.019.322,32	(649.999.999.999,68)	19,57
Lain-Lain PAD yang Sah	940.941.381.702,00	401.662.321.228,70	(539.279.060.473,30)	42,69
Zakat		-	-	0,00
PENDAPATAN TRANSFER	2.152.312.055.794,00	2.139.850.791.635,00	(12.461.264.159,00)	99,42
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.084.419.079.794,00	2.071.957.815.635,00	(12.461.264.159,00)	99,40
Dana Bagi Hasil	136.760.061.000,00	156.236.087.531,00	19.476.026.531,00	114,24
Dana Alokasi Umum	1.243.564.753.000,00	1.243.564.745.000,00	(8.000,00)	100,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	115.523.529.794,00	94.198.493.352,00	(21.325.036.442,00)	81,54
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	588.570.736.000,00	577.958.489.752,00	(10.612.246.248,00)	98,20
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	67.892.976.000,00	67.892.976.000,00	-	100,00
Dana Insentif Daerah	67.892.976.000,00	67.892.976.000,00	-	100,00
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	0,00
Dana Keistimewaan	-	-	-	0,00
Dana Desa	-	-	-	0,00
Transfer Pemerintah Daerah	-	-	-	0,00
Dana Bagi Hasil	-	-	-	0,00
Bantuan Keuangan	-	-	-	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	55.194.800.000,00	5.199.977.500,00	(49.994.822.500,00)	9,42
Hibah	55.194.800.000,00	5.199.977.500,00	(49.994.822.500,00)	9,42
Dana Darurat	-	-	-	0,00

Uraian	Jumlah			
	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
Pendapatan Lainnya	-	-	-	0,00
BELANJA DAERAH	7.932.886.363.138,00	6.613.665.437.677,48	(1.319.220.925.460,52)	83,37
OPERASI	4.474.769.277.170,00	3.954.414.302.113,58	(520.354.975.056,42)	88,37
Pegawai	2.002.593.764.620,00	1.810.529.322.554,00	(192.064.442.066,00)	90,41
Barang dan Jasa	1.393.304.098.830,00	1.234.785.037.710,58	(158.519.061.119,42)	88,62
Bunga	-	-	-	0,00
Subsidi	10.025.000.000,00	10.018.140.000,00	(6.860.000,00)	99,93
Hibah	1.068.846.413.720,00	899.081.801.849,00	(169.764.611.871,00)	84,12
Bantuan Sosial	-	-	-	0,00
MODAL	1.409.820.872.741,00	920.204.818.152,90	(489.616.054.588,10)	65,27
Tanah	177.579.673.369,00	154.513.167.813,00	(23.066.505.556,00)	87,01
Peralatan dan Mesin	207.939.759.226,00	140.275.380.622,90	(67.664.378.603,10)	67,46
Gedung dan Bangunan	693.957.200.084,00	361.017.284.271,00	(332.939.915.813,00)	52,02
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	273.674.962.322,00	232.452.964.088,00	(41.221.998.234,00)	84,94
Aset Tetap	55.769.277.740,00	31.050.521.358,00	(24.718.756.382,00)	55,68
Aset Lainnya	900.000.000,00	895500000,00	(4.500.000,00)	99,50
TIDAK TERDUGA	15.828.456.983,00	9.519.788.187,00	(6.308.668.796,00)	60,14
Tidak Terduga	15.828.456.983,00	9.519.788.187,00	(6.308.668.796,00)	60,14
TRANSFER, BANTUAN KEUANGAN, DAN BAGI HASIL	2.032.467.756.244,00	1.729.526.529.224,00	(302.941.227.020,00)	85,09
Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	1.510.092.952.736,00	1.444.364.532.966,00	(65.728.419.770,00)	95,65
Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi	522.374.803.508,00	285.161.996.258,00	(237.212.807.250,00)	54,59
Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota			(522.374.803.508,00)	0,00
Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Atau Kabupaten/Kota Kepada Desa			-	0,00
Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Kepada Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00
SURPLUS/DEFISIT	(683.933.187.191,00)	155.034.203.395,54	838.967.390.586,54	(22,67)
PEMBIAYAAN DAERAH (PEMBIAYAAN NETTO)	683.933.187.191,00	66.746.644.320,37	(617.186.542.870,63)	9,76
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.079.721.253.120,00	408.963.390.625,37	(670.757.862.494,63)	37,88
Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	330.133.723.425,00	330.133.723.425,37	0,37	100,00
Pencairan Dana Cadangan	78.829.667.200,00	78.829.667.200,00	-	100,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	0,00
Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	670.757.862.495,00		(670.757.862.495,00)	0,00
Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain	-	-	-	0,00
Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	0,00
Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	0,00
Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)	-	-	-	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-	-	-	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	395.788.065.929,00	342.216.746.305,00	(53.571.319.624,00)	86,46
Pembentukan Dana Cadangan	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	-	100,00
Penyertaan Modal/Investasi Daerah	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00		100,00
Pembayaran Pinjaman - Pemerintah Pusat	145.788.065.929,00	92.216.746.305,00	(53.571.319.624,00)	63,25
Pembayaran Pinjaman - Pemerintah Daerah Lain	-	-	-	0,00
Pembayaran Pinjaman - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	0,00
Pembayaran Pinjaman - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	0,00
Pembayaran Pinjaman - Masyarakat (Obligasi Daerah)	-	-	-	0,00

Uraian	Jumlah			
	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-	-	-	0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) RASIO KEMANDIRIAN	-	221.780.847.715,91	221.780.847.715,91	-

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis pemerintah Daerah

Pembangunan Bali secara umum telah berlangsung dengan mencapai sejumlah kemajuan yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali, berupa: peningkatan pendapatan perkapita, pengurangan angka kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.

Selain bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Bali, dinamika pembangunan Bali dalam berbagai bidang juga telah menimbulkan permasalahan dan tantangan besar yang berdampak pada keseluruhan aspek kehidupan masyarakat dan wilayah Bali pada masa kini maupun masa mendatang. Munculnya permasalahan tersebut tidak saja bersumber dari masalah lokal di Bali, melainkan juga bersumber dari interaksi kehidupan masyarakat dan dampak pembangunan pada tataran nasional dan global.

Permasalahan utama dan mendasar yang dihadapi Bali saat ini maupun pada masa mendatang mencakup 3 (tiga) area kunci, yakni yang berkaitan dengan:

- (1) Alam Bali;
- (2) *Krama* (manusia) Bali; dan
- (3) Kebudayaan Bali.

a. Permasalahan yang berkaitan dengan Alam Bali mencakup masalah pertanian, subak, air dan sumber mata air, seperti laut, danau, sungai, air terjun, mata air *kelebutan*, dan sumber lainnya, serta masalah lingkungan.

Masalah utama dalam bidang pertanian adalah semakin berkurangnya lahan pertanian (sawah dan bukan sawah) akibat derasnya alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan sarana prasarana pariwisata, perumahan, dan properti lainnya. Selain itu, bidang pertanian juga menghadapi masalah derasnya perpindahan kepemilikan lahan kepada pihak luar Bali. Derasnya alih fungsi lahan pertanian juga mengakibatkan tergerusnya subak sebagai penyangga utama budaya pertanian Bali. Di Kota Denpasar, misalnya, tiga subak telah tereliminasi, yaitu Subak Kreneng, Subak Yang Batu, dan Subak Sanglah, sehingga Kota Denpasar sekarang ini hanya memiliki 36 subak. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Tabanan, yang semula memiliki jumlah subak terbesar di Bali, kini jumlah subak telah menurun drastis, sehingga mengancam posisi Kabupaten Tabanan sebagai

daerah lumbung beras Bali. Penurunan lahan pertanian telah mengakibatkan penurunan produksi pangan serta hilangnya investasi untuk irigasi dan sarana prasarana pertanian lainnya. Selain itu juga mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Pesatnya pembangunan di bidang pariwisata dan industri jasa juga mengakibatkan semakin rusaknya pantai akibat abrasi, terjadinya penggerusan dan pendangkalan danau, berkurangnya jumlah sungai (termasuk *tukad*, *telabah*, *jelinjingan*) yang mengalirkan air, berkurangnya sumber mata air yang aktif mengalirkan air, serta semakin berkurangnya air terjun. Bersamaan dengan itu juga terjadi penurunan kuantitas dan kualitas air, serta rusaknya ekosistem laut, danau, dan sungai. Tidak terkecuali juga muncul masalah-masalah lingkungan lain yang semakin kompleks, seperti perusakan hutan, pencemaran udara yang berupa polusi dan kebisingan suara, kemacetan lalu lintas, serta penumpukan sampah.

Pembangunan kepariwisataan di seluruh wilayah Bali belum tertata dengan baik dari sisi legislasi, kebijakan, maupun program yang berkaitan dengan pengembangan destinasi, promosi, produk, industri, dan jasa pariwisata, serta sumber daya manusia. Hal ini menimbulkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar-Kabupaten/Kota di Bali. Lebih jauh lagi hal ini berdampak pada terjadinya ketidakadilan dan kesenjangan perekonomian antar-Kabupaten/Kota. Kondisi ini secara struktural dan sistematis mengakibatkan terjadinya kesenjangan pendapatan, baik dalam level antar-Kabupaten/Kota di Bali, pendapatan per kapita masyarakat Bali, maupun kesenjangan kesejahteraan masyarakat antara wilayah Bali Utara dengan Bali Selatan.

Demikian juga halnya dengan pembangunan pertanian dan budaya pertanian masyarakat Bali belum tertata dengan baik di seluruh wilayah Bali. Baik legislasi, kebijakan, maupun program pertanian dari hulu sampai ke hilir belum digarap sesuai dengan potensi alamiah yang dimiliki Kabupaten/Kota, khususnya pada bagian hilir masih sangat tertinggal baik dari segi jumlah maupun kualitas produksi/komoditas. Kondisi ini telah mengakibatkan tidak tersedianya pangan untuk beberapa jenis pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat Bali serta para wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang datang ke Bali, sehingga harus didatangkan dari luar Bali. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sarana upacara adat dan keagamaan pun, seperti janur, bunga, dan buah-buahan sebagian sudah mulai didatangkan dari luar Bali.

- b. Permasalahan dalam hubungan dengan sumber daya manusia adalah bahwa *Krama* Bali telah mengalami perubahan secara mendasar dari segi cara berpikir, sikap, dan perilaku kehidupan, baik dalam level individual maupun level sosial kolektif. Perubahan mendasar pada level individual, antara lain, berupa: dekadensi

dan degradasi etika dan moral; pragmatisme; individualisme; materialisme; kehilangan identitas dan jati diri ke-Bali-an; kehilangan rasa percaya diri; dan meningkatnya penyakit gangguan mental. Adapun perubahan pada level sosial, antara lain, berupa: semakin renggangnya kohesi dan solidaritas sosial/*manyama braya*; melemahnya semangat gotong-royong dan rasa kekeluargaan; melemahnya kesadaran kolektif; melemahnya etika sosial; meningkatnya kriminalitas dan premanisme; meningkatnya perilaku asosial, seperti pelacuran, pelecehan seksual, fedofilia. Selain itu juga terjadi peningkatan korban akibat penyalahgunaan narkoba, semakin padatnya penduduk akibat membanjirnya pendatang yang mencari nafkah di Bali, meningkatnya konflik sosial, penyalahgunaan dan ketidakdisiplinan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, dan meningkatnya peluang Bali menjadi target ancaman terorisme.

- c. Eksistensi Kebudayaan Bali yang meliputi adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal juga terus mengalami kemunduran yang mencakup kuantitas dan kualitas, baik dari segi kelembagaan, sarana prasarana, sumber daya manusia, sistem nilai, maupun pranata budaya. Kondisi tersebut disebabkan oleh kurangnya keberpihakan dari sisi politik legislasi dan politik anggaran, serta kurangnya komitmen, arah dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pemajuan kebudayaan Bali. Pembangunan kebudayaan dalam rangka pemajuan kebudayaan Bali yang meliputi perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan secara komprehensif dari hulu sampai ke hilir belum berjalan secara optimal, bahkan masih jauh dari harapan dan potensi besar yang dimiliki Bali.

Dari permasalahan pembangunan Daerah Bali tersebut, teridentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi Bali. Isu-isu strategis dimaksud terutama mencakup tiga hal, yakni kebijakan, regulasi, dan tata kelola.

Dalam hal kebijakan, isu-isu strategis terkait pembangunan daerah yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

- a. Arah kebijakan dan pelaksanaan pembangunan Bali semakin meninggalkan nilai-nilai yang menyatukan Alam Bali, *Krama* (manusia) Bali, dan Kebudayaan Bali sebagai satu kesatuan kehidupan yang menjaga keharmonisan/keseimbangan/keselarasan secara *sakala* dan *niskala* yang bersumber dari filosofi *Tri Hita Karana* dan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal Bali yang dikonsepsikan dalam ajaran *Sad Kerthi*, mencakup: upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya

manusia secara individual (*jana kerthi*). Kondisi demikian telah, sedang, dan akan mengakibatkan pudarnya kesucian, spiritualitas, dan *taksu* Bali sebagai *Padma Bhuwana*, sebagai pusat/muara kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dunia.

- b. Telah terjadi ketidakseimbangan antara pembangunan pertanian dan kepariwisataan; pembangunan pertanian jauh tertinggal, tidak selaras, dibandingkan dengan pembangunan kepariwisataan sehingga sektor pertanian tidak mampu menjadi penopang pembangunan kepariwisataan, selain juga tidak mampu memenuhi kebutuhan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Kondisi ini terlihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang sangat kecil bila dibandingkan dengan kontribusi sektor kepariwisataan yang justru terus meningkat terhadap PDRB.
- c. Pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara yang kurang memadai serta transportasi yang kurang baik, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik lokal masyarakat Bali dan untuk memenuhi standar kualitas pelayanan wisatawan manca negara dan wisatawan domestik yang datang ke Bali. Kondisi ini telah mengakibatkan terjadinya kepadatan lalu lintas dan kemacetan di beberapa wilayah tertentu, seperti di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar yang berakibat pada menurunnya citra Bali sebagai destinasi wisata dunia.

Dalam hal regulasi, isu-isu strategis terkait pembangunan daerah yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

- a. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara nasional khususnya yang berkaitan dengan pengaturan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berdasarkan pendapatan negara dari sumber daya alam kurang mendukung/menguntungkan Pemerintah Bali secara keseluruhan, mengingat Bali tidak memiliki sumber daya alam yang bisa diperhitungkan sebagai hasil berupa sumber pendapatan negara untuk dialokasikan sebagai Dana Bagi Hasil. Oleh karena itu, Bali harus mampu mengelola sumber daya yang dimiliki terutama sumber daya kebudayaan yang kaya raya, khas/unik, indah, dan menarik, agar bisa menjadi sumber perekonomian guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun dalam hal tata kelola, isu-isu strategis terkait pembangunan daerah yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

- a. Bali merupakan wilayah yang sangat kecil dan tidak memiliki sumber daya alam yang menjadi potensi untuk dikelola sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga kondisi fiskal sangat kecil atau jauh dari kebutuhan yang memadai untuk mendukung pembiayaan pembangunan di segala bidang. Kondisi fiskal yang sangat kecil ini tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Provinsi Bali dan APBD Kabupaten/Kota se-Bali, kecuali Kabupaten Badung, di mana besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sumber dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung stagnan, tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Sumber pembiayaan untuk mendukung pembangunan Bali masih sebagian besar mengandalkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kondisi fiskal yang sangat rendah ini mengakibatkan Pemerintah Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali (kecuali Kabupaten Badung) tidak memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk mendukung pembangunan Bali di segala bidang, khususnya untuk: memelihara alam dan lingkungan Bali; memelihara adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan Bali; serta pembangunan sarana prasarana, dan pembangunan infrastruktur Bali secara terintegrasi.

- b. Pembangunan yang dilaksanakan di seluruh wilayah Bali pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali cenderung berjalan sendiri-sendiri; kurang terpolakan, kurang terarah, kurang terintegrasi, dan kurang bersinergi dalam satu kesatuan wilayah Bali. Kondisi yang bersifat distorsi ini diakibatkan oleh adanya ego wilayah dan ego sektoral dalam kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan Kepala Daerah yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya. Selain akibat berlakunya peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah, kondisi distorsi tersebut juga diakibatkan oleh faktor-faktor yang bersifat politis, mengingat Kepala Daerah berasal dari partai politik yang berbeda-beda serta akibat dari kurangnya spirit kebersamaan dalam membangun wilayah Bali secara utuh. Oleh karena itu, maka tata pengaturan dan tata pengelolaan pembangunan Bali tidak dapat dibiarkan terlepas sporadik dalam ego wilayah dan ego sektoral per Kabupaten/Kota, melainkan harus dalam satu kesatuan tata pengaturan dan tata kelola menerapkan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana, satu pulau satu tata kelola satu komando (*one island one management one command*).

Perekonomian Bali yang sangat bergantung pada sektor pariwisata membuatnya sangat rentan akan bencana atau pandemi yang harus memaksa dilakukannya pembatasan aktivitas maupun perjalanan. Beberapa bencana alam maupun tragedy kemanusiaan sempat membuat kepariwisataan Bali terpuruk seperti misalnya Tragedi Bom Bali, Letusan Gunung Agung maupun gunung berapi aktif di sekitar Bali, dan yang terakhir adalah Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 merupakan ancaman paling serius yang dirasakan oleh Bali yang menyebabkan pariwisata Bali lumpuh dari awal

tahun 2020 hingga awal tahun 2022 ini. Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19 yang terkait dengan perekonomian Bali adalah sebagai berikut.

1. Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dan hampir seluruh Kabupaten/Kota di Bali hingga menyentuh minus.
2. Menurunnya jumlah wisatawan domestik dan internasional yang tiba di Bandara Ngurah Rai.
3. Ditutupnya hampir seluruh daerah wisata yang membuat jumlah kunjungan dan tingkat hunian hotel di sekitarnya menjadi anjlok.
4. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka Provinsi Bali akibat banyaknya pekerja sektor pariwisata yang harus dirumahkan.
5. Meningkatnya jumlah dan persentase penduduk miskin Provinsi Bali.

Menindaklanjuti upaya mengembalikan kondisi perekonomian Provinsi Bali yang mengalami kontraksi akibat Pandemi COVID-19, salah satu sektor yang perlu didorong peran dan pertumbuhannya adalah sektor pertanian. Mendorong peran sektor pertanian dalam arti luas agar dapat tumbuh dan berkembang sehingga mampu menopang tumbuhnya gairah ekonomi masyarakat Bali serta dapat merangsang niat generasi muda untuk kembali ke desa dengan menggeluti sektor pertanian.

Adapun identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah berdasarkan urusan, antara lain :

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. Pendidikan

- a) Belum optimalnya pelaksanaan pembelajaran berbasis TIK.
- b) Kompetensi manajerial dan supervise Kepala Sekolah masih kurang.
- c) Belum optimalnya pemahaman peserta didik terhadap nilai nilai kearifan lokal.
- d) Belum optimalnya prestasi, kompetensi, dan profesionalitas peserta didik di tingkat Nasional dan Internasional.
- e) Belum optimalnya akses data tentang kepemudaan dan olahraga Provinsi Bali.
- f) Belum optimalnya pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan, kepramukaan untuk mendukung kemandirian dan daya saing pemuda.
- g) Rendahnya frekuensi kegiatan olahraga, kompetisi/festival olahraga yang melibatkan masyarakat luas.
- h) Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana kepemudaan dan olahraga yang memenuhi standar.

2. Kesehatan

- a) Digitalisasi pelayanan kesehatan.
- b) Jaminan kesehatan semesta.
- c) Pelayanan kesehatan tradisional yang terintegrasi.
- d) Pengembangan industri kesehatan tradisional Bali.
- e) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menuju pelayanan berstandar internasional.
- f) Penanganan stunting.
- g) Percepatan penanganan dan pengendalian kasus Covid-19.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a) Potensi sumber air yang tidak merata antar wilayah.
- b) Makin menurunnya potensi sumber air dan makin meningkatnya kebutuhan air untuk memenuhi berbagai kepentingan sehingga sering terjadi konflik.
- c) Beberapa Sungai dalam kondisi rusak akibat longsor, erosi dan alur sempit;
- d) Abrasi pantai di Bali cukup tinggi.
- e) Masih rendahnya kasiptas dan daya dukung jalan provinsi.
- f) Pembangunan jalan baru tidak seimbang dengan jumlah kendaraan.
- g) Kerusakan jalan diakibatkan oleh kendaraan yang melewati melebihi tonase dari rencana.
- h) Penggunaan prasarana jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya, akibat pengembangan disekitar atau sepanjang jalan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya.
- i) Pelayanan air minum baik diperkotaan dan diperdesaan masih terbatas, mengingat keterbatasan ketersediaan air baku.
- j) Pengelolaan air limbah domestik/ rumah tangga belum sepenuhnya dapat dikelola secara optimal.
- k) Belum optimalnya daya saing para pelaku jasa konstruksi.
- l) Belum ada Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dalam bentuk Peraturan Daerah.
- m) Belum lengkapnya perangkat pengendalian pemanfaatan ruang dan penerapan.
- n) Belum optimalnya pembinaan penataan ruang.
- o) Tingginya pelanggaran pemanfaatan ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a) Perkembangan pembangunan permukiman pada daerah berkembang tidak diimbangi dengan prasarana dan sarana yang memadai.

- b) Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum (PSU).
- c) Keterbatasan penyediaan rumah karena pesatnya pertumbuhan penduduk.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- a) Belum optimalnya peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda/Perkada di Bali..

6. Sosial

- a) Masih adanya masyarakat miskin yang belum mendapatkan penanganan
- b) Masih adanya penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang belum mendapat penanganan rehabilitas Sosial.
- c) Belum optimalnya peran potensi dan sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS).
- d) Belum optimalnya perlindungan kepada korban bencana serta jaminan Sosial bagi masyarakat miskin.
- e) Masih adanya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sandangnya.
- f) Belum optimalnya pelayanan sosial bagi penyandang keterlantaran.

7. Bencana

- a) Masih terdapatnya korban baik jiwa harta maupun benda akibat terjadinya bencana.
- b) Kurangnya pemahaman dan kesadaran aparat pemerintah dan masyarakat tentang Pengurangan Risiko Bencana.
- c) Masih kurangnya kajian Risiko Bencana dan Instrument-instrumen Kesiapsiagaan menghadapi Bencana.
- d) Penyebab risiko bencana belum terkelola dengan baik.
- e) Banyaknya Penduduk rentan baik fisik, sosial dan ekonomi dan
- f) Masih kurangnya sistem peringatan dini untuk semua jenis bencana terutama yang rentan terjadi di Bali.

B. URUSAN WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR

1. Tenaga Kerja

- a) Kurangnya pemahaman tenaga kerja terhadap pentingnya sertifikasi kompetensi dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja.
- b) Terbatasnya sertifikasi profesi selain sektor pariwisata.
- c) Kurang pahamnya tenaga kerja terhadap prosedur bekerja ke luar negeri.

- d) Adanya penempatan PMI tidak sesuai aturan .
- e) Kurang pahamnya tenaga kerja yang berangkat ke luar negeri terhadap perlindungan dan hak-haknya.
- f) Masih banyak perusahaan yang belum memahami pentingnya norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja. Hal ini karena belum optimalnya pembinaan terhadap pengusaha.
- g) Pengusaha belum mampu melaksanakan norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja akibat terbatasnya kemampuan perusahaan secara finansial.
- h) Pengembangan energi terbarukan belum optimal dikarenakan secara perhitungan ekonomi biaya mahal sehingga niat untuk berinvestasi rendah.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

- a) IDG Provinsi Bali pada tahun 2020 adalah sebesar 72,16% masih lebih rendah dari rata-rata nasional yaitu 75,57%.
- b) Keterlibatan Perempuan di lembaga Legislatif, Provinsi Bali Tahun 2020 mencapai 16,36%. Perempuan yang menduduki jabatan struktural sebesar 36,55% dari total 7.198 pejabat struktural.
- c) Partisipasi Angkatan Kerja perempuan tahun 2020 sebesar 67,86% mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 65,67%, namun masih lebih rendah dari laki-laki yaitu sebesar 80,75% (Data Sakernas, 2020).
- d) Belum semua Perangkat Daerah memiliki data terpilah sehingga menyulitkan dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
- e) Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan tahun 2020 sebesar 48,31% lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki sebesar 51,69%.
- f) Partisipasi perempuan di lembaga swasta tahun 2020 sebesar 48,21% lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki sebesar 51,79%.
- g) Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 252 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Pangan

- a) Keterbatasan sarana produksi (pupuk dan bibit), infrastruktur pertanian dan alat mesin pertanian.
- b) Alih fungsi lahan pertanian produktif.
- c) Persaingan pemanfaatan air irigasi.
- d) Penerapan rekomendasi teknologi usahatani belum optimal.
- e) Menurunnya kesuburan lahan.
- f) Untuk tanaman keras/tahunan sebagian besar sudah tidak produktif.

- g) Gangguan iklim dan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).
- h) Belum berkembangnya unit-unit/ kelompok pengolah dan pemasaran hasil.
- i) Kesulitan pemasaran pada saat panen raya (karena produk bersifat musiman) dan belum optimalnya sistim pemasaran hasil.
- j) Akses permodalan usahatani terbatas.
- k) Relatif terbatasnya ketersediaan peralatan/mesin pasca panen dan pengolahan hasil.
- l) Masih adanya pengeluaran sapi antar pulau secara illegal.
- m) Masih ada penyakit hewan menular strategis/zoonosis.
- n) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pakan ternak.

4. Pertanian

- a) belum optimalnya pelaksanaan urusan pertanian di daerah.

5. Lingkungan Hidup

- a) Belum optimalnya pembangunan rendah karbon menuju ekonomi hijau.
- b) Belum optimalnya pengelolaan sampah dan kualitas pelayanan sampah TPA Regional.
- c) Belum optimalnya pelestarian ekosistem perairan danau, terumbu karang, dan mangrove.
- d) Masih adanya pencemaran air sungai, pantai, laut, mata air, dan udara.
- e) Belum optimalnya pengawasan implementasi regulasi pemanfaatan lahan.
- f) Belum terakreditasi UPTD Laboratorium Lingkungan.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a) Belum semua penduduk memiliki dokumen atas peristiwa penting.
- b) Belum semua penduduk memiliki dokumen atas peristiwa kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a) Masih lemahnya kemampuan aparatur dan peran kelembagaan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b) Belum Optimalnya Pengembangan Usaha Ekonomi Desa.
- c) Kondisi prasarana/sarana desa dan Teknologi Tepat Guna (TTG) belum memadai untuk mengembangkan potensi sumber daya perdesaan.
- d) Peran lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa kurang optimal.
- e) Ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk sesuai dengan kearifan lokal Bali.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a) Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang sesuai dengan kearifan lokal Bali.

9. Perhubungan

- a) Terjadi Kemacetan lalu lintas terutama di daerah kawasan Sarbagita dan dan pusat-pusat kegiatan wisata dengan kecepatan rata-rata ruas jalan berada di bawah 40 km/jam.
- b) Masih tingginya kecelakaan lalu lintas di Provinsi Bali, dimana rata-rata korban jiwa meninggal akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 1,5 jiwa/hari;
- c) Rendahnya penggunaan angkutan umum, dimana pangsa pasar angkutan umum sebesar 5% masih berada jauh dibawah prosentase ideal sebesar 70% dari total perjalanan.
- d) Masih terbatasnya kapasitas layanan prasarana transportasi (bandara, pelabuhan, jalan, dan terminal).
- e) Terbatasnya pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi yang handal dan terintegrasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, mewujudkan keseimbangan pembangunan serta konektivitas antar wilayah.

10. Komunikasi dan Informatika

- a) Belum maksimalnya penyebaran informasi Program dan Kebijakan Pemerintah.
- b) Belum maksimalnya keterbukaan informasi publik yang dirasakan oleh masyarakat belum optimal.
- c) Kurangnya pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola pemerintahan secara elektronik.
- d) Rendahnya pengolahan, analisis data dan informasi sektoral.
- e) Rendahnya pengamanan data dan informasi

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- a) Akses permodalan koperasi dan UKM yang masih terbatas.
- b) Belum optimalnya validasi data KUMKM.
- c) Rendahnya kompetensi SDM pengelola KUMK.
- d) Rendahnya daya saing, produktivitas, dan pemasaran koperasi UMKM.
- e) Belum optimalnya jaringan kemitraan KUMKM.

12. Penanaman Modal

- a) Belum meratanya sebaran investasi antar wilayah dan antar sektor.
- b) Belum memadainya insfrastruktur di masing-masing Kabupaten, khususnya di wilayah Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat.
- c) Masalah penyediaan lahan dan insentif daerah bagi penanaman modal.

- d) Belum memadainya informasi tentang peluang dan potensi investasi daerah pada masing – masing Kabupaten/Kota.
- e) Belum optimalnya kegiatan promosi investasi secara terpadu antar Kabupaten/Kota.

13. Kepemudaan dan Olah Raga

- a) Belum optimalnya akses data tentang kepemudaan dan olahraga provinsi Bali.
- b) Belum optimalnya pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan, kepramukaan untuk mendukung kemandirian dan daya saing pemuda.
- c) Rendahnya frekuensi kegiatan olahraga, kompetisi/festival olahraga yang melibatkan masyarakat luas.
- d) Prestasi olahraga belum optimal.
- e) Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana kepemudaan dan olahraga yang memenuhi standar.

14. Statistik

- a) Belum maksimalnya penyebarluasan informasi Program dan Kebijakan Pemerintah.
- b) Belum maksimalnya keterbukaan informasi publik yang dirasakan oleh masyarakat belum optimal.
- c) Kurangnya pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola pemerintahan secara elektronik.
- d) Rendahnya pengolahan, analisis data dan informasi sektoral.
- e) Rendahnya pengamanan data dan informasi.

15. Persandian

- a) Rendahnya pengamanan data dan informasi.

16. Kebudayaan

- a) Kurangnya pelatihan seni dalam rangka memajukan seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat.
- b) Terbatasnya penggalian, revitalisasi, dan restorasi seni tradisi yang sudah punah dan atau hampir punah.
- c) Perlu dikembangkannya pembinaan lembaga seni.
- d) Perlunya pengoptimalan dalam Penggunaan Aksara, Bahasa, dan Sastra Bali serta Busana Adat Bali.
- e) Masih perlu ditingkatkannya pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi lembaga seni.

- f) Masih perlu ditingkatkannya pelaksanaan penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali.
- g) Masih perlu ditingkatkannya kualitas penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali, sekaligus diisi dengan pelaksanaan kegiatan: Jantra Tradisi Bali dan pelaksanaan Perayaan Budaya Dunia (*Bali World Cultural Celebration*).
- h) Masih perlu ditingkatkannya pelaksanaan Festival Seni Bali Jani.
- i) Masih minimnya penyelenggaraan dan/atau memfasilitasi program misi diplomasi kebudayaan ke luar negeri.
- j) Masih minimnya kemitraan lembaga seni dengan PHRI dan ASITA.
- k) Perlu ditingkatkannya kegiatan alih aksara, alih bahasa, dan digitalisasi lontar-lontar Bali.
- l) Perlu ditingkatkannya sistem informasi dan databased mengenai kekayaan seni dan budaya Bali.
- m) Perlu ditingkatkannya usulan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
- n) Perlu ditingkatkannya penguatan dan perlindungan Tari Sakral Bali.

17. Perpustakaan

- a) Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan serta rendahnya minat dan budaya baca masyarakat.

18. Kearsipan

- a) Tingginya dinamika pekerjaan yang butuh atensi cepat dan tepat.
- b) Belum memadai kuantitas dan kualitas SDM di bidang IT pengampu dan pengelola sistem e-office, keuangan, dan BMD/Aset.
- c) Belum memadainya tenaga keprotokolan yang mampu berbahasa Bali dan asing.
- d) Belum optimalnya pengelolaan dan pemahaman terhadap arsip.
- e) Masih kurangnya sarana dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi di bidang kearsipan.

C. URUSAN PILIHAN

1. Kelautan dan Perikanan

- a. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- b. Belum adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zonasi wilayah pesisir.
- c. Masih kurangnya ketersediaan bahan baku ikan untuk produk olahan.
- d. Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan.

2. Pariwisata

- a) Belum optimalnya tata kelola destinasi pariwisata Bali.

- b) Belum optimalnya SDM pariwisata yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidangnya.
- c) Belum optimalnya pemasaran pariwisata.
- d) Belum optimalnya standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali.
- e) Adanya ketimpangan pembangunan kepariwisataan (Bali Utara dan Bali Selatan).
- f) Pandemi Covid-19.

3. Pertanian

- a) Keterbatasan sarana produksi (pupuk dan bibit), infrastruktur pertanian dan alat mesin pertanian.
- b) Alih fungsi lahan pertanian produktif.
- c) Persaingan pemanfaatan air irigasi.
- d) Penerapan rekomendasi teknologi usahatani belum optimal.
- e) Menurunnya kesuburan lahan.
- f) Untuk tanaman keras/tahunan sebagian besar sudah tidak produktif.
- g) Gangguan iklim dan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).
- h) Belum berkembangnya unit-unit/ kelompok pengolah dan pemasaran hasil.
- i) Kesulitan pemasaran pada saat panen raya (karena produk bersifat musiman) dan belum optimalnya sistem pemasaran hasil.
- j) Akses permodalan usahatani terbatas.
- k) Relatif terbatasnya ketersediaan peralatan/mesin pasca panen dan pengolahan hasil.
- l) Masih adanya pengeluaran sapi antar pulau secara illegal.
- m) Masih ada penyakit hewan menular strategis/zoonosis.
- n) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pakan ternak.

4. Kehutanan

- a) Belum optimalnya pemulihan dan peningkatan fungsi hutan dan lahan.
- b) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.
- c) Masih tingginya gangguan keamanan hutan terutama kebakaran hutan, perambahan kawasan hutan, dan penebangan liar (illegal Logging).
- d) Masih banyaknya permasalahan tata batas.
- e) Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya hutan.
- f) Rendahnya kepatuhan terhadap peraturan di bidang tata usaha kayu.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

- a) Pengembangan energi terbarukan belum optimal dikarenakan secara perhitungan ekonomi biaya mahal sehingga niat untuk berinvestasi rendah.
- b) Terbatasnya jumlah SDM yang menangani ESDM.

- c) Terbatasnya kompetensi SDM yang menangani ESDM.
- d) Pengambilan air tanah secara berlebihan mengakibatkan terjadinya intrusi/pencemaran air laut pada air tanah di wilayah pesisir.
- e) Ketahanan sumber daya air di daerah penurunan kualitas hidup.

6. Perdagangan

- a) Kurang berminatnya generasi muda untuk menekuni usaha tenun.
- b) Keterbatasan bahan baku industri.
- c) Kualitas dan harga produk lokal kalah bersaing.
- d) Jumlah produksi masih rendah.
- e) Penguasaan teknologi produksi masih rendah.
- f) Pemanfaatan teknologi informasi pemasaran masih rendah.
- g) Masih banyaknya produk lokal belum memiliki mutu produk.
- h) Masih banyaknya produk kayu yang belum memiliki SVLK.
- i) Kemasan produk masih belum sesuai standar.
- j) Kurangnya inovasi desain produk.
- k) Kurangnya pendampingan.
- l) Kurangnya komitmen menjalankan usaha/jiwa kewirausahaan.
- m) Kurangnya kesadaran tentang HKI.
- n) Belum jelasnya kebijakan hilirisasi produk pertanian pengolahan dan industri kreatif.
- o) Belum optimalnya pengolahan industri hasil produk pertanian.
- p) Belum optimalnya perkembangan industri kreatif.
- q) Belum optimalnya hilirisasi produk industri.

7. Perindustrian

- a) Kurang berminatnya generasi muda untuk menekuni usaha tenun.
- b) Keterbatasan bahan baku industri.
- c) Kualitas dan harga produk lokal kalah bersaing.
- d) Jumlah produksi masih rendah.
- e) Penguasaan teknologi produksi masih rendah.
- f) Pemanfaatan teknologi informasi pemasaran masih rendah.
- g) Masih banyaknya produk lokal belum memiliki mutu produk.
- h) Masih banyaknya produk kayu yang belum memiliki SVLK.
- i) Kemasan produk masih belum sesuai standar.
- j) Kurangnya inovasi desain produk.
- k) Kurangnya pendampingan.
- l) Kurangnya komitmen menjalankan usaha/jiwa kewirausahaan.
- m) Kurangnya kesadaran tentang HKI.

- n) Belum jelasnya kebijakan hilirisasi produk pertanian pengolahan dan industri kreatif.
- o) Belum optimalnya pengolahan industri hasil produk pertanian.
- p) Belum optimalnya perkembangan industri kreatif.
- q) Belum optimalnya hilirisasi produk industri.

D. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Sekretariat Daerah

a) Biro Hukum

- 1) Pengawasan efektifitas produk hukum Daerah belum optimal.
- 2) Penyusunan produk hukum belum sepenuhnya dilaksanakan secara elektronik.
- 3) Kesadaran hukum aparat dan masyarakat masih rendah.
- 4) Kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dan
- 5) Kemampuan aparatur dalam memanfaatkan teknologi informasi yang masih kurang.

b) Biro Pengadaan Barang dan Jasa

- 1) Belum optimalnya kinerja PBJ dalam menunjang terwujudnya tujuan strategis Pemerintahan Provinsi Bali (waktu, kualitas, biaya, dan layanan).
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk menunjang kebutuhan pelayanan pengelolaan pengadaan.
- 3) Pengadaan Barang/Jasa pemerintah menjadi salah satu area rawan korupsi (nilai belanja PBJ antara 30%- sd 40% dari total APBD).
- 4) Belum optimalnya pengelolaan BUMD dan BLUD dalam menghasilkan deviden terhadap pendapatan asli daerah.
- 5) Belum optimalnya kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti oleh daerah.
- 6) Belum optimalnya pelaksanaan administrasi pelaporan pembangunan daerah.

c) Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Bali yang mencakup:
 - Belum optimalnya perolehan nilai/skor penyusunan LPPD.
 - Masih adanya potensi sengketa batas wilayah.
 - Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama daerah dalam mengembangkan potensi daerah.

- 2) Belum optimalnya pelaksanaan *sradha* dan *bhakti* di kalangan Krama Bali.

d) Biro Umum dan Protokol

- 1) Tingginya dinamika pekerjaan yang butuh atensi cepat dan tepat.
- 2) Belum memadai kuantitas dan kualitas SDM di bidang IT pengampu dan pengelola sistem e-office, keuangan, dan BMD/Aset.
- 3) Belum memadainya tenaga keprotokolan yang mampu berbahasa Bali dan asing.
- 4) Belum optimalnya pengelolaan dan pemahaman terhadap arsip.
- 5) Masih kurangnya sarana dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi di bidang kearsipan.

2. Sekretariat DPRD

- a) Belum optimalnya memfasilitasi Anggota DPRD Provinsi Bali terhadap pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD.
- b) Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat terkait Tupoksi DPRD dalam kerangka representasi rakyat.
- c) Jadwal kegiatan yang telah ditetapkan sebagai agenda kerja DPRD Provinsi Bali pada setiap Masa Persidangan sering berubah – ubah, karena dinamika Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali maupun aspirasi masyarakat yang terus berkembang sesuai keadaan atau permasalahan yang terjadi di masyarakat.
- d) Kurang terpublikasinya setiap pembahasan Raperda dan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali sehingga partisipasi masyarakat tidak terfasilitasi dengan baik dan
- e) Sumber daya manusia yang ada saat ini belum memberikan hasil yang maksimal dalam mendukung tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, yang meliputi :
 - 1) Belum ada pegawai yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pejabat pengadaan karena sampai saat ini masih minta bantuan ke SKPD lain.
 - 2) Belum ada pegawai yang mempunyai keahlian khusus sebagai perencanaan/konsultan terutama dalam persiapan pemeliharaan gedung, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- f) Penambahan sub kegiatan penyelenggaraan kajian perundang-undangan pada kegiatan pembentukan Perda dan Peraturan DPRD Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD untuk memfasilitasi pelaksanaan

sosialisasi peraturan daerah yang telah dibahas oleh DPRD kepada masyarakat.

- g) Hasil reses dan pokok pikiran DPRD agar ditindaklanjuti dalam pembahasan RAPBD.

E. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Keuangan Sub Pengelolaan Keuangan dan Aset

- a) Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah.
- b) Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah.

2. Keuangan Sub Pengelolaan Pendapatan

- a) Belum optimalnya pengembangan potensi pendapatan dalam meningkatkan penerimaan PAD Provinsi Bali baik dari sektor pajak maupun retirbusi daerah.
- b) Kurangnya sarana prasarana penunjang dalam peningkatan pelayanan pembayaran pajak khususnya kendaraan operasional samling dan motor untuk optimalisasi razia door to door.
- c) Tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah yang disebabkan masih lemahnya aturan dan sanksi bagi wajib pajak yang tidak tertib.
- d) Masih kurangnya kemampuan dan keterampilan sumber daya aparatur dalam pengelolaan PAD dan pengasaan IT.
- e) Kondisi sosial ekonomi nasional yang menurun akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor dan kemampuan untuk membayar pajak menurun.

3. Kepegawaian

- a) Pengembangan aparatur dan kinerja pengawai belum optimal.
- b) Sistem layanan kepegawaian belum terintegrasi.

4. Pendidikan dan Pelatihan

- a) Pengembangan aparatur dan kinerja pengawai belum optimal.
- b) Sistem layanan kepegawaian belum terintegrasi.

5. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

- a) Belum memadainya sarana dan prasarana seperti bangunan dan fasilitas penginapan/wisma yang representative serta alat transportasi untuk mendukung pelayanan prima baik kepada pimpinan maupun untuk operasional hubungan antar lembaga.
- b) Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM untuk teknis pelaksanaan koordinasi antar lembaga dan teknis promosi seni budaya.

- c) Kurangnya kegiatan-kegiatan pembinaan dan promosi seni budaya Bali di Jakarta.
- d) Pemanfaatan anjungan daerah Bali sebagai Show Window penyebaran informasi dan potensi daerah Bali belum maksimal.

F. UNSUR PENGAWAS

1. Inspektorat Daerah

- a. Pengelolaan keuangan dan asset sering menjadi temuan.
- b. Penanganan tindak lanjut untuk pemeriksaan SKPD terkait belum maksimal.
- c. Adanya potensi penyelewengan dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat kepada desa.
- d. Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah/bansos oleh penerima banyak yang tidak sesuai ketentuan dan tidak sesuai dengan proposal pekerjaan.
- e. Adanya laporan masyarakat terkait penyalahgunaan kewenangan .

G. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

1. Kesejahteraan Bangsa

- a. Radikalisme dan Terorisme masih berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat Bali.
- b. Masih rentannya stabilitas politik dan keamanan di masa Covid-19 dan kecenderungan opini negatif di media sosial serta terbatasnya pendidikan politik pada masyarakat dan generasi muda.
- c. Belum maksimalnya pemahaman masyarakat terhadap 4 konsensus dasar nasional.
- d. Belum maksimalnya kesadaran sebagai sebuah bangsa yang multi culture secara nasional dan akhirnya berimbas ke daerah.

H. UNSUR KEKHUSUSAN

1. Pemajuan Desa Adat

- a. Kapasitas prajuru desa adat dalam pemerintahan desa adat belum optimal.
- b. Masih ada desa adat yang menyampaikan LPJ Desa Adat tidak tepat waktu yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Tahun 2021.
- c. Prajuru Desa Adat belum menyusun awig-awig dan perarem sesuai ketentuan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali sehingga registrasi awig-awig dan perarem desa adat belum berjalan maksimal.
- d. Terjadi penurunan LPD dengan kriteria sehat dibandingkan tahun sebelumnya.

- e. Pengembangan sektor riil sebagai rintisan BUPDA di desa adat belum maksimal.
- f. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di desa adat belum maksimal.
- g. Pendataan subak dan subak abian belum maksimal.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali tahun 2018-2023 adalah penjabaran yang berada pada posisi *intersection* tahapan dan prioritas RPJPD Provinsi Bali tahun 2005-2025 untuk tahap ketiga dan keempat. Tahapan dan prioritas ketiga dan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali tahun 2005-2025 tersebut menjadi salah satu acuan dalam menyusun visi dan misi Provinsi Bali tahun 2018-2023. Adapun visi RPJMD Provinsi Bali tahun 2018-2023 berdasarkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali terpilih tahun 2018-2023 yaitu:

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali”

Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana

Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan *Krama* dan *gumi* Bali yang sejahtera dan bahagia, *sakala-niskala* sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Secara lebih mendalam penjabaran visi di atas yaitu para Leluhur/Tetua Bali telah mewariskan suatu tatanan kehidupan *Krama* Bali yaitu: suatu tata cara kehidupan yang menyatu dan menjaga keseimbangan/ keharmonisan antara Alam Bali, *Krama* (manusia) Bali, dan Kebudayaan Bali yang meliputi adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya bernafaskan agama Hindu secara sakala dan niskala. Inilah tatanan kehidupan *Krama* Bali yang bisa disebut dengan Genuine Bali.

Sebagaimana halnya manusia biasa, *Krama* Bali memerlukan kehidupan layak yang harus dipenuhi dengan tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat berupa kebutuhan dasar, yang meliputi: pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Meningkatnya kebutuhan yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik tersebut, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sejalan dengan meningkatnya aspirasi dan harapan dalam memenuhi kehidupan yang terus berkembang.

Dalam memenuhi kehidupan tersebut Negara telah hadir sebagaimana tujuan kemerdekaan Indonesia yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Orientasi, arah kebijakan dan program pembangunan Bali ke depan merupakan suatu proses pembangunan yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global haruslah bisa memastikan setidaknya menyangkut 3(tiga) hal yang sangat penting dan strategis bagi masa depan *Krama* Bali yaitu: pertama, bisa menjaga/memelihara keseimbangan Alam, *Krama* (manusia), dan Kebudayaan Bali (Genuine Bali); kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi *Krama* Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

Sejalan dengan orientasi dan arah kebijakan tersebut, pembangunan kebudayaan Bali harus ditempatkan sebagai hulu pembangunan Bali dalam berbagai sektor/bidang secara konprehensif atau mengarusutamakan budaya dalam berbagai aspek pembangunan Bali; serta pembangunan pertanian dan kebudayaan Bali harus diposisikan sebagai fundamental atau pilar utama dalam membangun perekonomian Bali. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, ke depan, arah regulasi daerah dan kebijakan pembangunan sumber daya Bali terutama sektor pertanian dan kebudayaan harus mampu menghasilkan dan memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, termasuk kebutuhan dasar air dan listrik bagi *Krama* Bali.

Oleh karena itu, orientasi, arah kebijakan dan program pembangunan Bali ke depan harus ditata kembali yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah Bali yang berpihak dan taat asas pada Genuine Bali yaitu dengan menerapkan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana guna mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang sejahtera dan bahagia serta mewujudkan Gumi /wilayah Bali yang sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno, Bapak Proklamator dan Bapak Bangsa yaitu: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dalam koridor Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Orientasi, arah kebijakan dan Program Pembangunan Bali di masa datang yang diselenggarakan dengan menerapkan Pola Pembangunan Semesta Berencana,

merupakan untaian benang merah yang menghubungkan Bali dalam dimensi waktu menurut konsep *Tri Semaya*: *Atita* (masa lalu), *Nagata* (masa kini), dan *Wartamana* (masa datang), yaitu kondisi Bali di masa lalu, kondisi Bali di masa kini, dan kondisi Bali di masa datang. Bali di masa lalu ditandai oleh masa keemasan kebudayaan Bali, sebagai masa Romantika; Bali di masa kini ditandai oleh dinamika pembangunan yang hasilnya memberi manfaat bagi kesejahteraan *Krama* Bali, namun sekaligus juga menimbulkan masalah dan tantangan baru, sebagai masa Dinamika; dan Bali di masa datang merupakan suatu kondisi baru (sintesis) yang dirumuskan berdasarkan suatu proses dan hasil dari tesis dan antitesis terhadap kondisi Bali di masa lalu, di masa kini, dan kebutuhan serta permasalahan dan tantangan Bali di masa datang, sebagai masa Dialektika.

Dengan pola pembangunan demikian, akan terbangun kondisi yang diyakini mampu mengantarkan Bali menuju Era Baru, yaitu suatu Era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru; Bali yang *Kawista*, Bali *kang tata-titi tentram kerta raharja*, *gemah ripah lohjinawi*, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 (tiga) dimensi utama:

A. Dimensi Pertama: terpeliharanya keseimbangan Alam, *Krama*, dan Kebudayaan Bali (Genuine Bali)

1) Alam Bali :

- i. Memelihara dan melestarikan keagungan, kesucian, dan taksu Alam Bali; tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumber mata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam secara niskala dengan melaksanakan Upakara/Upacara *Pakertih Yadnya* secara periodik, yaitu: *Atma Kertih*, *Segara Kertih*, *Wana Kertih*, *Danu Kertih*, *Jana Kertih* dan *Jagat Kertih*.
- ii. Sedangkan secara *sakala*, upaya memelihara dan melestarikan Alam Bali dilaksanakan dengan regulasi, kebijakan, dan program untuk konservasi alam: perlindungan tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumber mata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam sehingga Alam Bali menjadi hijau, indah, dan bersih.
- iii. Menjadikan Bali sebagai *Padma Bhuwana*, sebagai pusat atau muaranya dunia dan sebagai pusat peradaban dunia.

2) *Krama* Bali :

- i. Mengembangkan tata kehidupan *Krama* Bali berdasarkan nilai-nilai filsafat *Sad Kertih* baik secara *sakala* maupun *niskala*: *Atma Kertih*, *Danu Kertih*, *Wana Kertih*, *Segara Kertih*, *Jana Kertih*, dan *Jagat Kertih*.

- ii. Mengembangkan jatidiri, integritas, dan kualitas *Krama* Bali sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Bali, yaitu: Pertama, tampilnya jatidiri *Krama* Bali dalam bentuk rasa syukur, bahagia, dan bangga dilahirkan sebagai orang Bali; Kedua, tampilnya integritas *Krama* Bali dalam bentuk karakter positif, etika, moralitas, kejujuran, disiplin, ketekunan/keuletan, dan kecintaan dalam setiap aktivitas kehidupan; Ketiga, tampilnya kualitas *Krama* Bali dalam bentuk kompetensi, profesional, kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing dengan semangat pantang menyerah.

3) Kebudayaan Bali:

- i. Memajukan Kebudayaan Bali dari hulu sampai ke hilir yang meliputi: adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal Bali melalui upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan.
- ii. Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai hulu pembangunan Bali yang menjiwai segala aspek pembangunan Bali; mengarusutamakan budaya dalam berbagai aspek pembangunan Bali.
- iii. Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai basis dan pilar utama pembangunan perekonomian masyarakat Bali.

B. Dimensi Kedua, terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi *Krama* Bali dalam berbagai aspek kehidupan.

- 1) Terpenuhinya kebutuhan dasar *Krama* Bali: pangan, sandang, papan, air, listrik, kesehatan, dan pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
- 2) Terpenuhinya jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja *Krama* Bali.
- 3) Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dalam pelaksanaan kehidupan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya bagi *Krama* Bali: sarana-prasarana, transportasi, dan infrastruktur dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
- 4) Terpenuhinya pendapatan per kapita, dan tersedianya lapangan kerja sesuai dengan kebutuhan bagi *Krama* Bali.
- 5) Terpenuhinya rasa aman dan nyaman kehidupan *Krama* Bali.

C. Dimensi Ketiga, memiliki kesiapan yang cukup (suatu manajemen resiko) dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru, dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

- 1) Penguatan dan pelembagaan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya agar tetap kokoh.

- 2) Pengarusutamaan sumber daya lokal Bali dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pengembangan dan pengelolaan perekonomian.
- 3) Peningkatan daya saing *Krama* Bali.
- 4) Membangkitkan kembali rasa jengah sebagai orang Bali dan rasa tindh terhadap Bali.
- 5) Memperkuat rasa kebersamaan, budaya gotong royong, dan sikap-sikap kolektif *Krama* Bali.

Dengan tiga dimensi tersebut akan terwujud kehidupan *Krama* Bali dan Gumi Bali sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan Visi “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, maka ditempuh dengan misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan sebagai berikut:

Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Provinsi Bali Dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
MISI 1. MEMASTIKAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN PANGAN, SANDANG, DAN PAPAN DALAM JUMLAH DAN KUALITAS YANG MEMADAI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI				
T. Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak	1	Meningkatnya Ketahanan pangan bagi Krama Bali	1	Peningkatan kualitas, distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan
			2	Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat
	2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin	1	Membentuk yayasan terintegrasi "Yadnya Dharma Krama Bali" (atau sebutan lain yang lebih tepat) untuk penyediaan sandang terjangkau Krame Bali
			2	Peningkatkan pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat masih menggunakan produk sandang Bali
	3	Meningkatnya rasio rumah tangga Krama Bali memiliki rumah layak huni	1	Mempermudah sistem investasi pembangunan rumah murah layak huni Krama Bali
			2	Memberdayakan Lembaga keuangan /perbankan membangun program kredit rumah terjangkau Krama Bali
	4	Terkendalnya Stabilitas Harga Pangan	1	Menguatkan kebijakan pengendalian stabilitas harga pangan
			2	Pengendalian harga pangan terjangkau oleh Krama Bali
MISI 2. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN, MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING				

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
PERTANIAN, DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI				
T. Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian	1	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumberdaya pangan lokal	1	Peningkatan produktivitas lahan pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan
			2	Sistem subak sebagai tulang punggung irigasi lahan pertanian sawah di Provinsi Bali
			3	Penyediaan bibit unggul pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan yang menjadi potensi pasar lokal dan ekspor
	2	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	1	Pembangunan sistem Standar Kualitas Minimal (SKM) produk hasil pertanian tanaman pangan unggulan pasar lokal dan berorientasi ekspor
			2	Pembangunan sumber daya manusia unggul dibidang pertanian dan agro industri dalam arti luas
	3	Meningkatnya kapasitas SDM pertanian Krama Bali	1	Pemberdayaan petani menjadi produsen industri pangan olahan hasil pertanian
MISI 3. MENGEMBANGKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL DAN BERKUALITAS SERTA DIDUKUNG DENGAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN DATA BASE RIWAYAT KESEHATAN KRAMA BALI BERBASIS KECAMATAN.				
T. Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali	1	Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali	1	Pendataan riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali
	2	Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Krama Bali		
	3	Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat	2	Pemberdayaan komunitas formal dan Informal Krama Bali sebagai mensosialisasikan dan sebagai peserta jaminan kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS)
MISI 4. MEMASTIKAN TERSEDIA NYA PELAYANAN PENDIDIKAN YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL, DAN BERKUALITAS SERTA MELAKSANAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN				
T. Terwujudnya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas	1	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	1	Penyelenggaraan proses pelayanan pendidikan yang berkualitas
	2	Terwujudnya wajib belajar 12 tahun	2	Pendidikan gratis 12 tahun
MISI 5. MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH BERBASIS KEAGAMAAN HINDU DALAM BENTUK PASRAMAN DI DESA PEKRAMAN/DESA ADAT				
T. Terwujudnya karakter Krama Bali unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal	Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pasraman		Mendorong pemerintah pusat pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat sekolah dasar dan Menengah masuk dalam sistem pendidikan	

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
			Nasional	
MISI 6. MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING TINGGI YAITU BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS: BERMUTU, PROFESIONAL DAN BERMORAL SERTA MEMILIKI JATI DIRI YANG KOKOH YANG DIKEMBANGKAN BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL KRAMA BALI				
T. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali sebagai Entrepreneur	
MISI 7. MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL SECARA KONPREHENSIF DAN TERINTEGRASI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI SEJAK MULAI KELAHIRAN, TUMBUH DAN BERKEMBANG SAMPAI AKHIR MASA KEHIDUPANNYA				
T. Terwujudnya kesejahteraan sosial Krama Bali	Meningkatnya kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak Krama Bali		Pemerintah daerah bersama masyarakat mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki sebagai bagian dari jaminan sosial Krama Bali	
MISI 8. MENGHASILKAN TENAGA KERJA YANG KOMPETEN, PRODUKTIF, BERKUALITAS DAN MEMILIKI DAYA SAING TINGGI SERTA MEMPERLUAS AKSES KESEMPATAN KERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI				
T. Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing	1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali mengisi pasar tenaga kerja domestik dan global	
	2	Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri		
MISI 9. MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA YANG KOMPERHENSIF, MUDAH DIJANGKAU, BERMUTU, DAN TERINTEGRASI BAGI KRAMA BALI YANG BEKERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI				
T. Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan	Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan		Peningkatan cakupan layanan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenaga Kerjaan	
MISI 10. MEMAJUKAN KEBUDAYAAN BALI MELALUI PENINGKATAN PELINDUNGAN, PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN NILAI-NILAI ADAT, AGAMA, TRADISI, SENI, DAN BUDAYA KRAMA BALI				
T. Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali	Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali.		1	Melembagakan dan menginternalisasikan nilai nilai tradisi, seni, dan budaya melalui system pendidikan formal, non-formal dan informal
			2	Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra dan budaya masyarakat Bali
			3	Penguatan kedudukan, peran, fungsi, tugas dan wewenang Majelis Kebudayaan
			4	Konservasi dan restorasi peninggalan benda cagar budaya
MISI 11. MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI SECARA SAKALA DAN NISKALA BERDASARKAN NILAI-NILAI FILSAFAT SAD KERTIH YAITU ATMA KERTIH, DANU KERTIH, WANA KERTIH, SEGARA KERTIH, JANA KERTIH, DAN JAGAT KERTIH				

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
T. Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi		1	Merancang kegiatan untuk peningkatan infrastruktur di wilayah kawasan suci Pura
			2	Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama
MISI 12. MEMPERKUAT KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DESA PAKRAMAN/DESA ADAT DAN SUBAK DALAM MENYELENGGARAKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG MELIPUTI PARAHYANGAN, PAWONGAN, DAN PALEMAHAN				
T. Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi	Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak			Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak
MISI 13. MENGEMBANGKAN DESTINASI DAN PRODUK PARIWISATA BARU BERBASIS BUDAYA DAN BERPIHAK KEPADA RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-BALI				
T. Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas	1	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas	1	Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya sebagai objek wisata
	2	Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di kabupaten/kota Provinsi Bali	2	Kebudayaan kabupaten /kota yang beranekaragam Provinsi Bali sebagai produk pariwisata yang terintegrasi
MISI 14. MENINGKATKAN PROMOSI PARIWISATA BALI DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI SECARA BERSINERGI ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-BALI DENGAN MENGEMBANGKAN INOVASI DAN KREATIFITAS BARU				
T. Meningkatnya pasar pariwisata Bali	Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global			Mengkoordinasikan pelaku industri wisata melakukan bauran promosi (promotion mix) untuk meningkatkan pangsa pasar industri pariwisata Bali
MISI 15. MENINGKATKAN STANDAR KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN SECARA KONPREHENSIF				
T. Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan	1	Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan	1	Penyediaan sarana prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pariwisata pada setiap destinasi dan produk pariwisata
	2	Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata	1	Peningkatan kualitas SDM Pariwisata melalui pelatihan-pelatihan sesuai pasar kerja
			2	Memperkuat dukungan regulasi perlindungan tenaga kerja lokal dan mengembangkan kerjasama ketenagakerjaan di sektor pariwisata
MISI 16. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN PUSAT-PUSAT PEREKONOMIAN BARU SESUAI DENGAN POTENSI KABUPATEN/KOTA DI BALI DENGAN MEMBERDAYAKAN SUMBER DAYA LOKAL UNTUK Mendukung PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM ARTI LUAS				
T. Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali	1	Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali	1	Mengembangkan Bali Timur dan Bali Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Bali
	2	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal	1	Mengembangkan Pertokoan Modern berbasis ekonomi lokal
MISI 17. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS BUDAYA				

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
(BRANDING BALI) UNTUK MEMPERKUAT PEREKONOMIAN KRAMA BALI				
T. Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali	1	Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor	1	Mengenalkan, mempromosikan /mengkampanyekan seluruh produk Bali dengan bran Bali di pasar lokal dan ekspor
	2	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah Krama Bali	2	Pengembangan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor
			3	Mengembangkan promosi dan pemasaran produk usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor
MISI 18. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (DARAT, LAUT DAN UDARA) SECARA TERINTEGRASI SERTA KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN SERTA AKSES DAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DI BALI				
T. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi		1	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi Bali
			2	Pembangunan Infrastuktur untuk meningkatkan pelayanan public
MISI 19. MENGEMBANGKAN SISTEM KEAMANAN TERPADU YANG DITOPANG DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAERAH DAN KRAMA BALI SERTA KEAMANAN PARA WISATAWAN				
T. Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	1	Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.	1	Pemberdayaan Krama Bali dan aparat pemerintah daerah sebagai keamanan lingkungan pemukiman
			2	Peningkatan koordinasi antara aparat pemerintah dan Lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan berwisata
MISI 20. MEWUJUDKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN DENGAN MEMPERKUAT BUDAYA HUKUM, BUDAYA POLITIK DAN KESETARAAN GENDER DENGAN MEMPERHATIKAN NILAI-NILAI BUDAYA BALI				
T. Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Meningkatnya peran serta Krama Bali dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis		1	Memperkuat masyarakat Madani dalam sosial kemasyarakatan Krama Bali
			2	Kesetaraan Gender dalam nilai-nilai tata kehidupan Krama Bali
MISI 21. MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI, MENATA WILAYAH DAN LINGKUNGAN YANG BERSIH, HIJAU DAN INDAH				
T1. Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan		1	Pemanfaatan ruang mengacu kepada tataruang yang harmonis dengan tata kehidupan Krama Bali

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
T2. Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan		2	Membangun lingkungan yang sehat dan nyaman
MISI 22. MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF EFISIEN, TERBUKA, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYAN PUBLIK TERPADU YANG CEPAT, PASTI DAN MURAH				
T1. Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik	Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik		1	Membangun sarana prasarana pelayanan publik yang terintegrasi antar instansi lembaga pemerintah daerah
T2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1	Membangun sistem tata kelola yang terintegrasi
	2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan sumber pendapatan lain-lain

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program pembangunan daerah adalah Program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang secara langsung mendukung capaian sasaran pembangunan daerah, sehingga menjadi program yang diprioritaskan untuk dilaksanakan tiap tahunnya. Program dijabarkan sesuai Tujuan dan Sasaran RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali, ter-mapping dalam 38 sasaran dan 24 tujuan. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Semesta Berencana sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2019 (sebelum diubah) disajikan pada tabel 6.3A, sedangkan Perubahan Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Semesta Berencana yang secara umum memuat penyesuaian indikator, perubahan target dan penyesuaian nomenklatur Program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Sesuai dengan penjelasan umum Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 memuat dan menjabarkan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Periode 2018-2023. RPJMD Semesta Berencana merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bali yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 yang menjabarkan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Periode 2018-2023 dan memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah

dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali merupakan dokumen perencanaan pembangunan sebagai pelaksanaan pola pembangunan yang memakai pendekatan satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola. Hal ini bermakna suatu haluan pembangunan yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia secara *sakala niskala* menuju tata kehidupan Bali Era Baru sesuai prinsip Trisakti; berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Fokus utama pembangunan Bali yang dituangkan dalam Perubahan RPJMD Semesta Berencana mencakup upaya dan strategi untuk menjaga keharmonisan dan kesucian alam, manusia, dan kebudayaan Bali dalam menghadapi tantangan dan permasalahan bersifat lokal, nasional, dan internasional. Secara filosofis Perubahan RPJMD Semesta Berencana dilandasi oleh filosofi *Tri Hita Karana* yang selanjutnya dijabarkan dan dioperasionalkan dalam kearifan lokal *Sad Kerthi*, meliputi: upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia secara individual maupun kolektif (*jana kerthi*). Filosofi dan kearifan lokal ini terus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan secara berkelanjutan oleh masyarakat Bali.

Maksud dari perubahan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023 adalah memperbaharui kebijakan pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah 15 Provinsi Bali 2 (dua) tahun kedepan yang holistik, tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap hasil RPJMD serta percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya.

Tujuan perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan akhir periode RPJMD;

3. Menetapkan pedoman untuk perubahan dokumen perencanaan kabupaten/kota se-Bali;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SABARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (a.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PERANGKOTING JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023			
					REALISASI	Rp	REALISASI	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Misi 1 : MEMASTIKAN TERPENUHNYA KEBUTUHAN PANGAN, SANDANG, DAN PAPAN DALAM JUMLAH DAN KUALITAS YANG MEMADAI BAGI KEBUDUPA KRAMA BALI															
	Tujuan : Terpenuhiya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak															
	Indikator Tujuan : 1 Tingkat Infasi Bali	Perentase (%)	3,5% ±1%(yoy)	2,37	-	0,55	-	3,00% ±1%(yoy)	-	3,00% ±1%(yoy)	-	3,00% ±1%(yoy)	-	3,00% ±1%(yoy)	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	: 2 Ketersediaan pangan utama	Perentase (%)	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sasaran 1																
	1 Meningkatkan ketahanan pangan bagi Krama Bali	Perentase stok pangan aman	Perentase (%)	20	20	6,278,257,170	20	3,069,883,949	20	17,206,834,392	20	7,759,692,795	20	10,712,757,063	20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program 1																
	1 Program Peningkatan Kewajiban Pangan	Angka Kecukupan Energi (AKE)	kcal per kapita per hari	2,647 kcal/kapita/hari	2,650 kcal/kapita/hari	310,406,833	2,648 kcal/kapita/hari	93,466,511	2,649 kcal/kapita/hari	377,296,832	2,440 kcal/kapita/hari	523,099,234	2,450 kcal/kapita/hari	549,254,185	2,460 kcal/kapita/hari	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Perentase Fasilitas Penyaluran Sarana Pertanian	Perentase (%)	76,95 Persen	76,95 Persen	647,394,171	77,45 Persen	370,782,551	77,95 Persen	10,324,905,642	90 Persen	362,608,292	90 Persen	380,738,707	90 Persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Perentase Sarana Produksi Pertanian Dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai	Perentase (%)	6,1 ton benih padi, 1,8 ton benih palawija, 25 ton benih sayuran, 10.000 buah-buahan dan tanaman hias	6,1 ton benih padi, 1,8 ton benih palawija, 25 ton benih sayuran, 10.000 buah-buahan dan tanaman hias	3,028,838,505	77 Persen	1,196,150,506	78 persen	939,928,500	-	-	-	79 Persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		Perentase Peningkatan Penyediaan Benih Bernutrisi	Perentase (%)	-	-	-	-	-	-	-	5 persen	1,127,113,210	5 persen	1,183,468,871	5 persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Populasi Ternak	ternak	438.131 (aktuan ternak)	623.915 (aktuan ternak)	592,416,351	446.893 (aktuan ternak)	196,592,622	455.831 (aktuan ternak)	4,384,339,136	-	-	-	455.831 (aktuan ternak)	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Perentase Peningkatan Populasi Ternak	Perentase (%)	-	-	-	-	-	-	-	0,8 persen	4,157,926,867	1 Persen	4,365,823,210	1 Persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	97,157,6	95,642	130,926,100	95,973	36,757,678	103,104	187,475,168	105.166,51	469,284,796	107,269.84 ton	1,581,752,539	107,269.84 ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
	4 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	17,535.7	16,411	28,079,300	31,862,23	42,960,678	18,609.02	59,475,148	18,981.2	0	19,360.82 Ton	1,476,076,125	19,360.82 Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
	5 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah Peningkatan Distribusi Pangan	ton	<10%	<10%	2,269,108,321	55 Ton	556,049,468	70 Ton	170,011,392	-	-	-	-	70 Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	6 Program Penguasaan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumen	Perentase (%)	95.6	95.6	1,105,262,437	95.7	348,033,519	95.8	188,732,592	-	-	-	-	95.8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Perentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumen	Perentase (%)	-	-	-	-	-	-	-	82 persen	358,701,184	83 persen	376,636,243	83 persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Perentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Bersertifikat Keamanan Pangan	Perentase (%)	8,47 Persen	8,47 Persen	165,825,152	22 Persen	247,070,416	27 persen	574,659,982	3 persen	760,959,222	4 persen	799,007,183	4 persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sasaran 1																
	2 Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sandang krama Bali	Perentase pemenuhan kebutuhan sandang krama Bali	Perentase (%)	5.83	N/A	2,864,505,916	N/A	1,209,481,674	10.11	3,013,277,374	9.60	4,178,150,082	8.58	4,349,944,723	8.58	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program 1																
	1 Rehabilitasi Sosial	Perentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan sandang yang layak	Perentase (%)	1	0.00	0	0.00	2,026,000	31.03	102,666,600	34.48	42,249,870	0.06	7,249,500	0.06	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	2 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Perentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	Perentase (%)	15216	4.93%	2,835,915,916	1.50%	1,205,823,949	1.50%	2,860,610,864	1.50%	4,087,383,454	1,50%	4,291,752,627	1,50%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Perentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali	Perentase (%)	25%	25%	28,590,000	25%	1,631,725	30	49,999,910	30	48,516,758	30%	50,942,596	30%	DinasPerindustrian dan Perdagangan
Sasaran 1																
	3 Meningkatkan ratio rumah tangga Krama Bali memiliki rumah layak huni	Rasio rumah tangga Krama Bali yang memiliki rumah layak huni	Perentase (%)	98	N/A	772,665,760	N/A	1,222,265,600	98.60	54,975,044,574	98.80	1,429,125,794	99	1,508,667,894	99	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program 1																
	1 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Perentase berkurangnya jumlah kawasan permukiman kumuh	Perentase (%)	8,2%	7,70%	772,665,760.00	2.88 %	1,001,453,400	8.00%	797,921,310	8.00%	372,454,988	6.62%	685,805,088	6.62%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2 Program Pengembangan Perumahan	Jumlah rumah terbangun kewenangan provinsi	Unit	N/A	N/A	N/A	4.00	200,812,200	20.00	54,177,123,364	N/A	N/A	-	-	20	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Perentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi	Perentase (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70.00%	1,056,670,806	71%	822,862,806	71%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sasaran 1																
	4 Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan	Infasi Pangan Bali	Perentase (%)	5.60	N/A	51,487,378	5.65	249,331,442	5,50%±1%(yoy)	338,905,792	5,40%±1%(yoy)	372,795,742	5,40%±1%(yoy)	557,324,000	5,40%±1%(yoy)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	MISI	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SARAN	3	4	5	2019		2020		2021		2022		2023				
					REALISASI	Ra	REALISASI	Ra	TARGET	Ra	TARGET	Ra	TARGET	Ra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Program : 1. Program Perekonomian dan Pembangunan																
	Persentase kebijakan perekonomian yang diimplementasi		Persentase (%)	N/A	100	51,487,378	100	249,331,442	100	338,905,792	100	372,745,742	100	557,324,000	100	Sekretariat Daerah	
2	Misi 2 : MEWUJUDKAN KEMAJUAN PANGAN, MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAHAB PERTANTAN SERTA MENINGKATKAN KEBERKANTERAAN PETANI.																
	Tujuan : Terselenggaranya swasembada pangan Krasa Bali dan daya saing pertanian																
3	Indikator Tujuan : Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB		Persentase (%)	15	13.45	-	15.11	-	20	-	22	-	25	-	25	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Sasaran : 1. Meningkatkan diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal		Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)	Persentase (%)	25	98.70	9,440,599,015	29	8,158,726,078	31	3,155,878,807	33	3,232,679,057	35	983,658,047	35	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4	Program : 1. Program Pengendalian Dan Peninggalangan Budaya Pertanian		Persentase Pemadatan Teknologi Tepat Guna yang Ramah Lingkungan	Persentase	5 Persen	5 Persen	2,526,313,450	4,5 Persen	2,029,353,506	50 Persen	1,074,387,428	5 Persen	2,295,861,869	5 Persen	0	5 Persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Pasarnya Pertanian		Jumlah Industri Pengolahan Hasil Pertanian Yang Dibangun dan Berproduksi	Komoditi	98,524 ton	98,524 ton	2,259,108,321	1 Unit	1,335,057,416	1 Komoditi	852,674,672	-	-	-	1 Komoditi	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
5			Persentase Peningkatan Pasarnya Kawasan Pertanian	Persentase	-	-	-	-	-	-	15 persen	906,817,188	15 persen	983,658,047	30 persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
			Jumlah Kawasan Pertanian Organik Yang Produktif	kawasan	1 unit, 1 paket, 1 paket, 100 kelompok	1 unit, 1 paket, 1 paket, 100 kelompok	4,645,177,244	1 Kawasan Hidroponik Perikanan dan 1 kawasan pertanian organik	4,794,315,756	1 Kawasan	1,228,816,707	-	-	-	1 Kawasan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
6	Sasaran : 2. Meningkatkan kualitas hasil pertanian Krasa Bali		1. Nilai Tukar Petani (NTP)	Persentase (%)	103.48	104.93	2,330,990,385	93.60	723,386,592	105	4,975,956,176	105.5	4,967,230,306	106	5,215,581,321	106	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			2. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persentase (%)	116	111.44	252,723,870	100.12	48,671,678	117.9	153,571,178	118.5	125,386,916	119.3	290,000,000	119.3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7	Program : 1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		Jumlah Unit Terasa Gumi Banten Yang Produktif	unit	1.000.000 kg/8.000 kg/50.000 row/30.000 phi/1.500 kg/500.000 kg/580.000 row/7.638.500 phi/240.000	1.000.000 kg/8.000 kg/50.000 row/30.000 phi/1.500 kg/500.000 kg/580.000 row/7.638.500 phi/240.000	2,888,302,998	1 Unit	2,081,313,022	1 Unit	2,492,534,282	-	-	-	-	1 Unit	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Persentase Peningkatan Jenis Tanaman Gumi Banten	Persentase	-	-	-	-	-	-	1 Persen	2,797,491,922	1 Persen	2,937,366,518	2 Persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
8			Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	Persentase (%)	59 Kewilata/Ha	1 Persen	1,813,315,142	1 Persen	574,202,893	1 Persen	4,553,685,296	1 persen	1,876,082,946	1 Persen	1,969,887,093	5 Persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Jumlah Kelompok Yang Menerapkan Agribisnis Peternakan Yang Baik	kelompok	27 Kelompok	35 Klp	497,683,243	35 Klp	149,183,099	35 Klp	422,270,880	-	-	-	35 Klp	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
9			Persentase Peningkatan Kelompok Yang Menerapkan Lahan Perikanan dan Pengolah Hasil Perikanan	Persentase (%)	-	-	-	-	-	-	3,73 Persen	293,645,438	4,1 Persen	308,327,710	4,1 Persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Jumlah produk perikanan bersertifikat	Sertifikat	134	277	252,723,870	242	48,671,678	149	153,571,178	149	125,386,916	151 BKP	290,000,000	151 BKP	Dinas Kelautan dan Perikanan
10	Sasaran : 3. Meningkatkan kapasitas SDM pertanian Krasa Bali		Proporsi anggaran kerja di sektor pertanian	Persentase (%)	75	N/A	226,788,139	79.78	77,399,726	77	133,113,344	78	120,903,344	79	126,948,511	79	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Program : 1. Program Penyuluhan Pertanian		Jumlah Kelompok Tani Yang Bersertifikat	kelompok	3 Orang, 57 Unit	3 Orang, 57 Unit	226,788,139	15 Kelompok	77,399,726	20 Kelompok	133,113,344	-	-	-	-	20 Kelompok	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
11			Persentase Peningkatan Skor Kemangrupaan Kelompok	Persentase (%)	-	-	-	-	-	-	15 persen	120,903,344	16 persen	126,948,511	31 persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
12	Misi 3 : MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG TERJANGKAP, MERATA, ADIL DAN BERKUALITAS SERTA DUKUNG DENGAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN DATA BASE RIWAYAT KESEHATAN KRAMA BALI BERBASIS KECAMATAN.																
	Tujuan : Meningkatkan derajat kesehatan Krasa Bali																
13	Indikator Tujuan : Umur Harapan Hidup (UHH)		Dalam tahun	71.4	71.99	-	72.19	-	72.3	-	72.9	-	72.9	-	72.9	Dinas Kesehatan	
	Sasaran : 1. Terjenninya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krasa Bali		Persentase pemadatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh Krasa Bali	Persentase (%)	88	88	13,704,412,700	89.5	5,525,355,223	90	3,427,783,144	90.75	128,982,800	91.47	409,807,160	91.47	Dinas Kesehatan
14	Program : 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan pemenuhan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	Persentase (%)	0	19	211,860,440	60	62,564,300	60	236,332,210	60	34,422,800	70%	153,431,960	70%	Dinas Kesehatan
	2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Persentase kabupaten/kota yang mengembangkan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	Persentase (%)	0	11,11	3,415,385,317	11,11	790,723,748	44	2,718,397,154	44	94,560,000	56%	147,500,000	56%	Dinas Kesehatan
15	3. Program Sediaan Fasilitas, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		Persentase Kab/Kota dengan ketersediaan Obat Esensial	Persentase (%)	85%	83.75	10,077,166,943	80	4,672,067,375	79	479,053,780	81		83%	108,875,200	83%	Dinas Kesehatan
	Sasaran : 2. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kesehatan Krasa Bali		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Persentase (%)	85	85	293,215,711,382	86	167,466,201,462	86	60,703,235,155	86	49,698,162,344	86	178,121,077,362	86	Dinas Kesehatan
16	Program : 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan	Persentase (%)	49%	37,5	8,160,329,892	47,5	18,485,575,130	60	26,228,837,770	60	32,777,513,792	62%	13,955,010	62%	Dinas Kesehatan

NO	MISI		INDIKATOR KINERJA (tujuan/Impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PERANGKOTING JAWAB	
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN					2019		2020		2021		2022		2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan pemenuhan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Persentase (%)	85%	87	281,979,472,916	87	148,205,047,912	87	34,101,104,121	87	16,564,940,308	87%	177,733,628,801	87%	Dinas Kesehatan	
	3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategi dan Zoonosis	Kasus	250 kasus rabies dan 6 kasus flu burung	230 kasus rabies dan 2 kasus flu burung	3,075,908,574	150 kasus rabies dan 5 kasus flu burung	775,578,420	100 kasus rabies dan 4 kasus flu burung	373,293,254	-	-	-	-	100 kasus rabies dan 4 kasus flu burung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategi dan Zoonosis	Persentase	-	-	-	-	-	-	-	-	5 persen	255,708,144	10 persen	373,493,551	10 persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Sasaran																	
	3	Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat	Cakupan kepesertaan Krama Bali Sejahtera (KBS)	Persentase (%)	85	95	20,180,991,832	91.78	14,654,023,578	95	38,637,821,358	100	23,742,713,046	100	29,079,366,291	100	Dinas Kesehatan	
	Program	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan pemenuhan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase jaminan kesehatan masyarakat yang terlayani	Persentase (%)	100%	100	20,180,991,832	100	14,654,023,578	100	38,637,821,358	100	23,742,713,046	100%	29,079,366,291	100%	Dinas Kesehatan
4	Misi 4	MEMASTIKAN TERSEDANYA PELAYANAN PENDIDIKAN YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL DAN BERKUALITAS SERTA MELAKSANAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN.																
	Tujuan	Terselenggaranya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas																
	Indikator Tujuan	1	Rata-rata lama sekolah	Tahun		9.72	8.84	-	8.98	-	10.86	-	10.84	-	11.40	-	11.40	Dinas Pendidikan, Kependidikan dan Olahraga
	Sasaran	1																
	1	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13.21	13.27	1,062,517,200	13.33	347,885,970	13.47	299,999,230	13.61	29,048,850	13.75	62,263,900	13.75	Dinas Pendidikan, Kependidikan dan Olahraga	
	Program	1	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Nilai	84	82,00	1,062,517,200	85.99	347,885,970	85.50	299,999,230	86.00	29,048,850	86.50	62,263,900	86.50	Dinas Pendidikan, Kependidikan dan Olahraga
	Sasaran	2	Terselenggaranya wajib belajar 12 tahun	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 15-18	Persentase (%)	82.35	82.6	207,979,728,817	82.96	235,558,338,954	82.92	631,019,395,415	83.11	606,545,872,638	83.3	627,465,705,967	83.3	Dinas Pendidikan, Kependidikan dan Olahraga
	Program	1	Program Penguatan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	Persentase (%)	73.15	73.21	81,862,163,059	82.51	91,136,128,947	100.00	314,418,395,115	100.00	317,588,560,170	100.00	320,347,905,537	100.00	Dinas Pendidikan, Kependidikan dan Olahraga
			Persentase lulusan siswa SMK yang diterima berkeaja di dunia usaha/dunia industri	Persentase (%)	0	52.73	92,804,144,889	47.96	104,706,643,902	46.5	290,407,896,006	47	264,159,362,318	47.50	280,643,714,074	47.50	Dinas Pendidikan, Kependidikan dan Olahraga	
			Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus	Persentase (%)	15.14	43.46	33,313,420,869	43.73	39,715,566,105	35.35	26,193,104,294	35.45	24,797,950,150	35.55	26,474,086,306	35.55	Dinas Pendidikan, Kependidikan dan Olahraga	
5	Misi 5	MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH BERBASIS KRAGAMAAN HINDU DALAM BENTUK PAKSIAMAN DI DESA ADAT/DESA PAKSIAMAN.																
	Tujuan	Terselenggaranya karakter Krama Bali unggul sebagai individu dan sosial yang berbudaya kearifan lokal																
	Indikator Tujuan	1	Persentase pendidikan formal mengintegrasikan ajaran Hindu	Persentase (%)		2.8	24	-	26	-	72	-	77	-	82	-	82	Dinas Pendidikan, Kependidikan dan Olahraga
		2	Persentase pendidikan formal dalam bentuk paksiaman di Desa Adat	Persentase (%)		0.20	N/A	-	N/A	-	3.64	-	4.29	-	4.93	-	4.93	Dinas Pendidikan, Kependidikan dan Olahraga
	Sasaran	1	Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk paksiaman	Jumlah jajar pendidikan berbasis nilai-nilai Hindu	Jumlah	21	91	N/A	100	N/A	274	26,058,793,926	290	25,240,077,216	312	288,863,300	312	Dinas Pendidikan, Kependidikan dan Olahraga
	Program	1	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase pemahaman Peserta Didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal	Persentase (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50.87	274,997,750	51.37	233,380,850	51.87	209,722,900	51.87	Dinas Pendidikan, Kependidikan dan Olahraga
	2	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Nilai rata-rata bahasa Bali pada satuan pendidikan	Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	69.80	25,783,796,176	70.00	25,006,696,366	70.20	79,140,400	70.20	Dinas Pendidikan, Kependidikan dan Olahraga	
6	Misi 6	MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING TINGGI YAITU BERKUALITAS DAN BERKETERGANTARAN; BERKEMITRA, PROFESIONAL DAN BERMORAL SERTA MEMILIKI JATI DIRI YANG KOKOH YANG DISUMBANGKAN BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL KRAMA BALI																
	Tujuan	Terselenggaranya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi																
	Indikator Tujuan	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persentase (%)		74.77	75.38	-	75.90	-	75.51 (75.41-75.61)	-	76.99 (75.61 - 78.28)	-	77.78 (75.56 - 80.00)	-	77.78 (75.56 - 80.00)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Sasaran	1	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali	Indeks Daya Saing SDM Bali	Persentase (%)	65.45	70.91	13,074,915,878	63.64	834,061,542	69.09	54,149,969,525	69.09	35,336,553,025	74.55	5,274,997,600	74.55	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
	Program	1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	Persentase (%)	34.75	43.99	3,914,345,530	47.93	196,378,600	49.26	149,999,740	0	0	55.21	24,997,800	55.21	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
		2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kependidikan	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persentase (%)	77	77	557,943,248	20	146,323,444	79	199,970,300	80	767,258,585	81.00	0	81.00	Dinas Pendidikan, Kependidikan dan Olahraga
		3	Program Pengembangan Daya Saing Kesehatan	Jumlah Medali yang diperoleh Atlet pelajar ditingkat Regional, Nasional dan Internasional	Daerah	11	98	8,602,627,080	0	491,379,498	90	52,699,999,485	100	34,069,293,440	110	5,000,000,000	480	Dinas Pendidikan, Kependidikan dan Olahraga
		4	Program Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif dalam Satuan Karya Pramuka	Persentase (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	48	1,100,000,000	50	500,000,000	52.00	250,000,000	52.00	Dinas Pendidikan, Kependidikan dan Olahraga

NO	MISI		INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PERANGKOTING JAWAB			
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN					2019		2020		2021		2022		2023						
	REALISASI	Rp				REALISASI	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
7	MISI 7 : MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL SECARA KOMPREHENSIF DAN TERDIFUSI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI SEJAK MULAI KELAHIRAN, TUMBUH DAN BERKEMBANG SAMPAI AKHIR MASA KECERDIPANYA.																			
	Tujuan : Terselenggaranya kesejahteraan sosial Krama Bali																			
	Indikator Tujuan : Persentase Kesejahteraan		Persentase (%)	3,91	3,61	-	4,48	-	3,78 (3,90-4,00)	-	4,28 (4,00-4,50)	-	3,78 (3,90-4,00)	-	3,78 (3,90-4,00)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Isu/tema :																			
	1 Meningkatkan kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak Krama Bali		Indeks kepastian pelayanan perlindungan kesejahteraan sosial	Persentase (%)	75	20,50	1,769,794,616	N/A	611,262,980	78	2,674,559,055	79	4,952,227,600	80	2,772,273,868	80	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak			
	Program :																			
	1 Rehabilitasi Sosial		Persentase Penyandang ketunaan, disabilitas, keterbatasan yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial	Persentase (%)	16,87	9,58%	1,097,887,616	8,87%	433,855,800	21,87%	2,027,303,470	17,91%	4,650,332,465	17,91%	2,470,381,168	17,91%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak			
	2 Penanganan Bencana		Persentase masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Persentase (%)	14,78	14,78%	397,200,000	13,46%	1,955,400	20,62%	380,949,755	100%	255,939,600	100%	255,937,800	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak			
	3 Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase masyarakat miskin yang terduta dan termonitor	Persentase (%)	10,26	1 sepeksi	66,250,000	1 sepeksi	1,384,500	1 sepeksi	51,805,160	100%	3,805,370	100%	3,805,200	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak			
	4 Pemberdayaan Sosial		Persentase Pemasuk Sumber Kesejahteraan Sosial (PKKS) dalam penanganan Pemasuk Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase (%)	95	2,03	298,447,000	1,37%	174,067,280	22,57%	214,599,670	8,22%	42,150,165	8,22%	42,149,700	8,22%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak			
8	MISI 8 : MENGHASILKAN TENAGA KERJA YANG KOMPETEN, PRODUKTIF, BERKUALITAS DAN MEMILIKI DATA BAGNO TINGGI SERTA MEMPERLUAS AKSES KEMEMPATAN KERJA DI DALAM DAN DI LUAR NGERI.																			
	Tujuan : Terselenggaranya tenaga kerja yang kompeten dan berkarya selagi																			
	Indikator Tujuan : Tingkat pengangguran terbuka		Persentase (%)	1,37	1,97	-	8,63	-	8,63 (8,31 - 6,08)	-	3,19 (2,77-3,61)	-	3,32 (1,90-2,74)	-	3,32 (1,90-2,74)	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral				
	Isu/tema :																			
	1 Meningkatkan kompetensi tenaga kerja		Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persentase (%)	76,56	73,77	2,774,060,510	74,32	598,506,219	76,30	199,999,880	76,55	125,150,500	76,80	125,150,500	76,80	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			
	Program :																			
	1 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		Persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat dan menjadi pener kerja sesuai kompetensi	Persentase (%)	51,56	63,06	2,774,060,510	10,80	598,506,219	30	199,999,880	30	125,150,500	30	125,150,500	30	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			
	Isu/tema :																			
	2 Meningkatkan akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri		Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Persentase (%)	98,60	98,43	1,022,201,558	94,37	30,227,450	94,37	199,999,700	98,61	179,010,100	97,68	176,010,100	97,68	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			
	Program :																			
	1 Program Penempatan Tenaga Kerja		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan	Orang	9,638	6,918	1,022,201,558	4,380	26,037,750	5,200	100,000,000	0	0	5,950	3,000,000	22,448	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			
			Jumlah karyawan pekerja sektor informal yang tumbuh dan berkembang sesuai klasifikasi	Karyawan	0	0	0	0	4,189,700	1	99,999,700	4	179,010,100	4	173,010,100	9	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			
9	MISI 9 : MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA YANG KOMPREHENSIF, MUTUAS DIANGKUT, BERMUTU, DAN TERINTEGRASI BAGI KRAMA BALI YANG BEKERJA DI DALAM DAN DI LUAR NGERI.																			
	Tujuan : Terselenggaranya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan																			
	Indikator Tujuan : Persentase kepesertaan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Ketenagakerjaan		Persentase (%)	82,26	81,95	-	41,04	-	38,00	-	38,00	-	38,00	-	38,00	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral				
	Isu/tema :																			
	1 Meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan		Persentase tenaga kerja yang mendapat jaminan sosial Ketenagakerjaan	Persentase (%) BPJS Ketenagakerjaan	52,26	51,95	811,756,159	41,04	430,115,400	35,00	306,070,200	35,00	178,500,000	35,00	165,748,002	35,00	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			
	Program :																			
	1 Program Pengawasan Ketenagakerjaan		Persentase perusahaan yang mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan tenaga kerja	Persentase (%)	4,74	5,23	530,656,159	5,72	73,550,400	6,22	149,999,600	6,71	27,500,000	7,2	11,279,900	7,2	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			
			Persentase Perusahaan yang mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan kerja serta kesehatan kerja	Persentase (%)	100	100	381,100,000	10	356,565,000	100	156,070,600	100	151,000,000	100	158,248,002	100	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			
	2 Program Hubungan Industrial		Persentase Pemenuhan Upah Minimum di Perusahaan dan penyelesaian PHH	Persentase (%)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	100	18,220,100	100	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			
10	MISI 10 : MEMAJUKAN KEBUDAYAAN BALI MELALUI PERINGKATAN PELINDUNGAN, PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN NILAI NILAI ADAT, AGAMA, TRADISI, SENI, DAN BUDAYA KRAMA BALI.																			
	Tujuan : Terselenggaranya Pemajuan Kebudayaan Bali																			
	Indikator Tujuan : Jumlah Jenis Objek Kebudayaan yang Maju		Jumlah	19,782	19,807	-	19,832	-	19,857	-	19,880	-	19,908	-	19,908	Dinas Kebudayaan				
	Isu/tema :																			
	1 Terselenggaranya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemertanian dan pemeliharaan kebudayaan Bali.		1 Jumlah jenis obyek pemajuan kebudayaan (cagar budaya) yang ditetapkan sebagai warisan budaya Bali	Jumlah	19,745	19,765	804,179,598	19,785	2,068,235,900	19,805	4,969,905,620	19,825	661,513,920	19,845	694,589,616	19,845	Dinas Kebudayaan			
			2 Jumlah jenis obyek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan sebagai warisan budaya Takbenda Indonesia	Jumlah	37	42	23,585,009,843	47	7,231,219,333	52	30,307,337,786	55	32,835,292,938	60	34,477,057,585	60	Dinas Kebudayaan			
	Program :																			
	1 Pemajuan Nilai Sejarah dan Tradisi		Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	Persentase	5	5%	1,807,153,775.00	4%	553,908,016.00	5%	2,110,490,220.00	5%	336,500,000.00	5%	353,325,000	24%	Dinas Kebudayaan			
	2 Pemajuan Keamian dan Tenaga Kebudayaan		Persentase Peningkatan Pemajuan Keamian dan Tenaga Kebudayaan	Persentase	5	5%	20,050,050,341.00	3%	3,813,825,805.00	5%	14,244,670,242.00	5%	1,217,138,902.00	5%	1,277,965,847	23%	Dinas Kebudayaan			
	3 Pemajuan Cagar Budaya dan Permusnaan yang Maju		Jumlah Cagar Budaya Dan Permusnaan yang Maju	Jumlah	410	410	804,179,598.00	515	2,068,235,900.00	520	4,969,905,620.00	525	661,513,920.00	1,430	694,589,616	3,400	Dinas Kebudayaan			

47

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SARASAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (a.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PERANGKONG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023			
					REALISASI	Ra	REALISASI	Ra	TARGET	Ra	TARGET	Ra	TARGET	Ra		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
14	MISI 14 : MENINGKATKAN PROMOSI PARTISIPASI BALI DI DALAM DAN DI LUARNEGARA SECARA BERSINERGI ANTAR KAB/KOTABALI DENGAN MENGEKSPANSI KREATIVITAS INOVASI															
Tujuan : Meningkatkan pasar pariwisata Bali																
Indikator Tujuan : Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB		Persentase (%)	23.40	23.26	-	18.76	-	18.34	-	20.86	-	25.93	-	25.93	Dinas Pariwisata	
Sasaran :																
1 Meningkatkan pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global		1 Jumlah desas sektor pariwisata	USD	9,950,080	9,262,390	1,851,845,326	774,020	313,556,156	1,371,680	254,726,459	2,642,000	272,678,644	3,323,470	286,312,576	17,373,460	Dinas Pariwisata
		2 Persentase promosi pariwisata melalui media Elektronik dan online/digital	Persentase (%)	10	0	143,592,545	30	100,000,000	40	1,027,236,149	50	307,534,647	60	322,911,380	60	Dinas Pariwisata
Program :																
1 Program Pemasaran Pariwisata		Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Persentase (%)	9.67	6.27	1,996,437,871	-66,43	413,556,156	-29,16	1,281,962,608	37,50	580,213,291	45,45	436,051,688	45,45	Dinas Pariwisata
15	MISI 15 : MENINGKATKAN STANDAR KUALITAS PELAYANAN KEPARTISIPASIAN SECARA KOMPREHENSIF															
Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan																
Indikator Tujuan : Indeks kepuasan wisatawan		persentase (%)	78	79	-	-	-	81	-	83	-	85	-	85	Dinas Pariwisata	
Sasaran :																
1 Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan		Persentase kunjungan berbilang wisatawan mancanegara dan nusantara	Persentase (%)	40 dan 60	75 dan 80	401,901,641	-	333,130,554	40 dan 60	556,919,830	40 dan 60	235,133,799	40 dan 60	181,213,096	40 dan 60	Dinas Pariwisata
Program :																
1 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemasaran dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		Persentase Pengajuan Usaha Ekonomi Kreatif yang Memonfaatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase (%)	N/A	-	401,901,641	-	333,130,554	1	556,919,830	3	235,133,799	5	181,213,096	9	Dinas Pariwisata
Sasaran :																
2 Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata		Persentase SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikat dan memiliki kompetensi	Persentase (%)	N/A	-	1,087,348,374	-	187,597,167	30	1,213,837,894	30	514,559,014	40	483,354,964	100	Dinas Pariwisata
Program :																
1 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikat	Persentase (%)	N/A	-	1,087,348,374	-	187,597,167	43	1,213,837,894	44	514,559,014	45	483,354,964	45	Dinas Pariwisata
16	MISI 16 : MEMBANGUN DAN MENGEKSPANSI POSAT POSAT PEREKONOMIAN BARU SESUAI DENGAN POTENSI KAB/ROTA DI BALI DENGAN MEMBERDAYAKAN SUMBER DAYA LOKAL UNTUK Mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.															
Tujuan : Terwujudnya pertumbuhan perekonomian Bali																
Indikator Tujuan : Pertumbuhan Ekonomi		Persentase (%)	6.33	5.63	-	-9.33	-	3.00 (2.50-3.50)	-	3.10 (2.70-3.50)	-	5.00 (4.60-5.40)	-	5.00 (4.60-5.40)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
Sasaran :																
1 Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali		Persentase PMA dan PMDN di luar wilayah SARDAGITA	Persentase (%)	2.97	2.22	229,699,540	2.64	258,188,800	3.12	349,876,312	3.7	450,080,316	4.39	450,080,316	16.07	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program :																
1 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Nilai Investasi	Nilai (Triliun)	20.39	17.72	114849770	9.66	129,094,400	15.56	174,938,156.00	-	-	-	-	-	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Program sesuai Pemendagri 90 Tahun 2019)		Persentase Peningkatan Nilai Investasi/Penanaman Modal di Luar SARDAGITA	Persentase (%)	38.38	7.88	114,849,770	13.69	129,094,400	13.80	174,938,156	14	450,080,316	18	450,080,316.00	18	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sasaran :																
2 Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal		1 Persentase Pertokoan Krama Bali milik Desa Adat (KUMda)	Persentase (%)	10	N/A	9,103,254,784	N/A	6,011,828,902	20	8,385,496,464	25	5,086,200,420	30	9,465,017,108	30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		2 Persentase Pertokoan Milik UMKM	Persentase (%)	10	N/A		N/A		20		25		30		30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3 Jumlah Pertokoan Milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)	Jumlah (Toko)	40	40		40		40		40		40		200	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		4 Jumlah Pertokoan Milik Badan Usaha Koperasi	Jumlah (Toko)	100	N/A		N/A		50		50		50		300	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program :																
1 Program Pengembangan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Persentase pengemasan dan pemasaran produk lokal krama Bali	Persentase (%)	25%	25%	28,590,000	25%	1,631,725	30	49,999,910	30	48,516,758	30%	50,942,596	30%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif	Persentase (%)	100%	100%	9,074,664,784.00	100%	6,010,197,177.00	100%	8,235,496,254	100%	5,007,683,662	100%	9,414,074,512	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17	MISI 17 : MEMBANGUN DAN MENGEKSPANSI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS BUDAYA (BRANDING BALI) UNTUK MEMPERKUAT PEREKONOMIAN KRAMA BALI															
Tujuan : Berkeadilan dan berkeadilan ekonomi budaya Bali																
Indikator Tujuan : 1 Persentase nilai ekspor produk UKM Branding Bali		Persentase (%)	2	2	-	3	-	3	-	4	-	4	-	4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2 Persentase KUMKM Menuju Digital		Persentase (%)	10	N/A	-	N/A	-	N/A	-	25.25	-	26.5	-	26.5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

MISI		INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	BATUAN	KONDISI AWAL (a.d. 2018)	2019		2020		TARGET TAHUN RE 2021		2022		2023		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PERANGKUT JAWAB	
1	2	3	4	5	REALISASI	Rp	REALISASI	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
18																	
Misi 18		MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (DARAT, LAUT, DAN UDARA) SECARA TERINTEGRASI DAN TERKONVERSI ANTAR WILAYAH UNTUK MEMDUKUNG PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN SERTA AKSES DAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DI BALI															
Tujuan		Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru															
Indikator Tujuan		Indeks konektivitas	Indeks	2.74	2.7	-	2.6	-	2.8	-	2.4	-	2.3	-	2.3		
Sasaran																	
1		Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	Indeks kepuasan masyarakat (transportasi)	Indeks	60	62	188,041,599,308	63	153,459,383,874	75	101,945,989,552	81.25	296,232,100,702	82	315,234,242,989	82	Dinas Perhubungan
Program																	
1		Program pengkayaan perkeretaapian	Jumlah infrastruktur transportasi publik dalam kualitas baik	Jumlah	9	9	1,404,260,520	9	1,855,910,000	10	637,344,840	-	-	-	10	Dinas Perhubungan	
			Persentase lintasan koridor wilayah seluas yang mendapatkan kapasitas pembiayaan	Persentase (%)	-	-	-	-	-	-	50	242,150,340	50	1,779,625,888	100	Dinas Perhubungan	
2		Program penyempurnaan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem Transportasi Bali	Indeks	N/A	72.07	5,990,059,239	73	5,880,449,401	70	3,640,000,000	75	3,836,802,300	79	3,979,999,540	79	Dinas Perhubungan
			Tingkat Pelayanan Samping	Tingkat	C	C (bantuan samping bersebelah 15-25 detik/ kendaraan)	752,650,000	C (bantuan samping bersebelah 15-25 detik/ kendaraan)	1,956,700,000	C (bantuan samping bersebelah 15-25 detik/ kendaraan)	774,689,960	-	-	-	C (bantuan samping bersebelah 15-25 detik/ kendaraan)	Dinas Perhubungan	
			Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum angkutan	Persentase (%)	-	-	-	-	-	-	66.35	561,848,468	72.51	1,685,999,728	72.51	Dinas Perhubungan	
3		Program pengkayaan pelayanan	Persentase Pedalaman yang menerapkan manajemen keselamatan	Persentase (%)	40	100	1,607,860,520	100	825,738,000	50	1,546,881,405	-	-	-	50	Dinas Perhubungan	
			Persentase Pedalaman Pengiriman Regional yang operasionalnya menerapkan SPM	Persentase (%)	-	-	-	-	-	-	25	1,366,617,510	50	3,052,701,540	50	Dinas Perhubungan	
4		Program Penyempurnaan Jalan	Persentase jalan provinsi dalam kondisi siap	Persentase (%)	80.81%	82.66%	178,286,769,069.07	78.25%	142,940,586,473.00	77.98%	95,247,073,347	76.89%	290,224,682,184	78.67%	304,735,916,293	78.67%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
19																	
Misi 19		MENGEMBANGKAN SISTEM KEAMANAN TERPADU YANG DITOPANG DENGAN SUMBER DATA MANUTUA SERTA SARANA PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAERAH DAN KRAMA BALI SERTA KEAMANAN PARA WISATAWAN															
Tujuan		Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Kramas Bali dan Wisatawan															
Indikator Tujuan		Persentase Penyelesaian keluhan wisatawan, kenyamanan dan ketertarikan umum	Persentase (%)	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	Satuan Polisi Pamong Praja	
Sasaran																	
1		Meningkatnya rasa aman dan nyaman Kramas Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas keahluannya.	1. Angka kriminalitas	Kasus	4,607	4,376	#REPI	2,083	#REPI	3,200	#REPI	2,731	#REPI	2,362	#REPI	2,362	Badan Keamanan Bangsa dan Politik
			2. Indeks kepuasan wisatawan terhadap keamanan	Persentase (%)	70	70	18,636,071,842	74	18,604,036,375	78	21,406,334,453	80	17,801,725,174	82	20,512,092,644	82	Satuan Polisi Pamong Praja
			3. Persentase penanganan bencana	Persentase (%)	100	100	10.555.415.826	100	9,018,563,960	100	6,489,679,971	100	1,971,491,900	100	1,972,017,200	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program																	
1		Program Penanggulangan Bencana	Persentase layanan diinformasi informasi keberamanan	Persentase (%)	100	100	10.555.415.826	100	9,018,563,960	100	6,489,679,971	100	1,971,491,900	100%	1,972,017,200	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	MISI		INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (a.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN					2019		2020		2021		2022		2023				
	REALISASI	Rp				REALISASI	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	2	Program Peningkatan Keterwakilan dan Keterlibatan Perempuan	Presentase Pelaksanaan Perda/Perkada yang diadopsikan sesuai Yustisi & Non Yustisi	Presentase (%)	543	100	869,815,344	100	207,316,456	100	426,664,816	100	168,518,816	100%	168,518,596	100%	Badan Polisi Pemang Praja	
			Presentase Pelaksanaan K3 (keselamatan, kesehatan, kebidanan) yang diadopsikan	Presentase (%)	247	235	17,766,256,498	225	18,396,719,919	215	20,979,669,637	100	17,633,206,358	100%	20,343,574,048	100%		
20	MISI 20 : MEMPERTUHUKAN KEBUDAYAAN KRAMA BALI YANG DEMOKRATIS DAN BERKUALITAS DENGAN MEMPERTUHUKAN BUDAYA BUDAYA POLITIK DAN KEBERAGAMAN GENDER DENGAN MEMPERTUHUKAN KEARIFAN BUDAYA BALI																	
Tujuan 1		Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Modern sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali																
Indikator Tujuan 1		1 Indeks demokrasi		Indeks	78.8	81.83	-	77.89	-	81	-	81	-	81	-	81	Badan Keasman Bangsa dan Politik	
		2 Indeks pemberdayaan gender		Indeks	63.76	N/A	-	N/A	-	64.78	-	64.9	-	65	-	65	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
Sasaran 1		Meningkatnya peran serta Krama Bali dalam kegiatan budaya dan mengadopsi hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis															Badan Keasman Bangsa dan Politik	
Program 1		1 Program Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat		Presentase (%)	77.5	81.58	546,363,702	73.43	560,310,150	78	11,303,522,516	78	16,747,420,284	78	16,757,419,744	78	Badan Keasman Bangsa dan Politik	
		2 Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Presentase (%)	98.45	98.85%	661,442,530	67.29%	47,322,800	98.7%	44,328,400	98.75%	11,100,100	98.8%	11,100,100	98.8%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
21	MISI 21 : MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI, MENATA WILAYAH DAN LINGKUNGAN YANG BERSIH, HILJAI DAN INDAH																	
Tujuan 1		Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis																
Indikator Tujuan 1		Koefisien Wilayah Terbengais (KWT)		Presentase (%)	14.38	N/A	-	N/A	-	15.83	-	15.9	-	16.28	-	16.28	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Sasaran 1		Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan															Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
Program 1		1 Program Penyediaan Perumahan Ruang		Presentase (%)	90%	100%	1,796,170,594	100%	1,011,671,910	93%	1,700,686,923	94%	1,173,557,688	95%	1,232,335,572	95%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		2 Program Pengkayaan Sumber Daya Air (SDA)		Presentase (%)	47.5%	57.46%	2,306,415,901.63	62.47%	46,342,007,150.00	58.06%	61,146,114,606	48.33%	2,901,101,400	48.50%	3,046,156,470	48.50%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		3 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya		Presentase (%)	58%	60%	59,125,764.72	56.31%	152,973,739,408	68%	1,884,568,630,688	72%	427,410,477,402	74%	448,781,001,272	74%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		4 Program Pengkayaan Daerah Aliran Sungai (DAS)		Presentase (%)	5.02	11.14	148,851,162	7.72	46,514,700	4.89	212,476,130	4.83	892,406,000	4.75%	187,661,648	4.75%	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
Tujuan 2		Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah																
Indikator Tujuan 2		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Presentase (%)	61.81	63.62	-	71.98	-	72.02	-	72.21	-	72.40	-	72.40	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
Sasaran 1		Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan																
1		Indeks kualitas udara	Indeks	91.98	94.35	3,272,211,015	88.34	5,289,354,310	87.27	13,176,975,014	87.38	4,436,922,123	87.48	2,451,551,688	87.48	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
				63.17	63.33		64.33		67.93		68.03		68.13		68.13	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
				38.57	40.79		40.58		41.03		41.49		41.95		41.95	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
				-	N/A		69.75		61.72		62.24		62.76		62.76	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
		5 Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)		Presentase (%)	8.38	8.57		8.57		10.16		10.82		11.65		11.65	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
		6 Presentase besaran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)		Presentase (%)	0.40	0.43	1,136,305,480	0.68	227,483,030	0.97	349,905,792	1.2	186,047,592	1.4	36,141,800	1.4	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	
Program 1		1 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Presentase (%)	7.21	6.64	272,902,620	0.00	95,585,966	5.47	49,999,800	4.87	28,292,800	4.31%	0	4.31%	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
		2 Program Pembiayaan dan Pengawasan Terhadap Isu Lingkungan dan Isu Perlindungan dan Pengkayaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Presentase (%)	100	100	183,306,029	48	123,574,166	65	312,429,344	75	0	90%	0	90%	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
		3 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Presentase (%)	18	17.60	175,742,410	11.38	217,359,949	24	349,905,612	26	209,890,467	27%	192,344,292	27%	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
		Presentase penguasaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga		Presentase (%)	73	54.74		51.73		74		73		72%		72%	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
		4 Program Pengkayaan Perumahan		Presentase (%)	100	100	2,638,259,956	100	4,853,834,229	100	12,464,640,258	100	4,198,738,856	100%	2,259,207,396	100%	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	

NO	MISI		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (a.d. 2018)	TARGET TAHUN RE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		(tujuan/impact/ outcome)			2019		2020		2021		2022		2023			
						REALISASI	Re	REALISASI	Re	TARGET	Re	TARGET	Re	TARGET	Re		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	5. Program Pengkajian Energi Terbarukan	Jumlah kapasitas Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan yang sesuai dengan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	MW	4.3	4.3	453,478,000	6.39	100,689,600	9	100,000,000	11	186,047,592	13	25,141,800	13	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	
	6. Program Pengkajian Mineral dan Batubara	Persentase pengusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan	Persentase (%)	55	100	682,827,480	97	126,793,430	55	249,905,792	0	0	80	8,000,000	80	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	
	7. Program Pengkajian Aspek Geologi	Persentase Pemantauan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan	Persentase (%)	55	100	0	97	0	55	0	0	0	80	8,000,000	80	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	
22	MISI 22 : MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF, TERBUKA, TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK TERPADU YANG CEPAT, PASTI DAN MITRAEL																
	Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik																
	Indikator Tujuan : Survey eksternal pelayanan publik		Indeks	75	N/A	-	N/A	-	80	-	81	-	82	-	82	Sekretariat Daerah	
	Sasaran :																
	1. Meningkatkan kualitas pelayanan sektor publik		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks	75	N/A	25,185,286,027	83.17	45,138,060,727	80	42,906,470,846	81	142,459,330,298	82	298,872,739,562	82	Sekretariat Daerah
	Program :																
	1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase Hasil Kelibangan yang diimplementasikan	Persentase (%)	80%	100%	13,831,215,392	100%	15,214,336,931	75%	10,955,294,050	75%	8,653,925,700	80%	8,425,138,482	80%	Badan Eket dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
	2. Program Pengkajian Aplikasi Informatika		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1.22	1.35	7,912,424,098	1.72	8,953,141,482	2.18	12,504,269,221	2.52	116,737,802,736	3	272,574,692,872	3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	3. Program Pengkajian Informasi dan Komunikasi Publik		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	68	85.87	2,653,011,807	92.20	20,624,758,604	92.50	18,597,363,279	93	15,846,130,310	93.20	16,638,436,826	93.20	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	4. Program Pelayanan Penanaman Modal		Indeks Kepuasan masyarakat	Indeks	86	86.429	90,020,230	92.98	15,517,200	87	1,065,693,824	87.5	1,047,798,138	88	1,047,798,138.00	88	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	5. Program Pendaftaran Penduduk		Persentase Isi data penduduk yang memenuhi KTP-el yang mencapai target	Persentase (%)	88.89	88.89	788,634,730	88.89	345,823,710	100	849,544,290	100	173,673,414	100%	186,673,244.00	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan																
	Indikator Tujuan : 1. Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	66.16	68	-	70	-	71	-	72	-	73	-	73	Sekretariat Daerah	
	2. Optis BPK		Status	WTP	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	Inspektorat	
	3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		Persentase (%)	76.37	77	-	78	-	79	-	79.5	-	80	-	80	Sekretariat Daerah	
	Sasaran :																
	1. Terevisidnya tata kelola pemerintahan yang baik		Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	Indeks	75	77	167,411,472,698	79	112,403,682,399	80	1,772,078,367,341	81	1,543,208,413,489	82	1,551,079,244,563	82	Sekretariat Daerah
Program :																	
1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Persentase Peningkatan Kepuasan Pelayanan kepada pemimpin dan anggota DPRD Provinsi Bali	Persentase (%)	82	2%	92,062,373,615	3%	71,159,913,537	5%	77,410,472,010	5%	119,481,630,541	5%	125,185,489,163	20%	Sekretariat DPRD	
2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Persentase data statistik sektoral yang valid	Persentase (%)	100	100	613,455,850	100	305,370,321	100	446,371,968	100	486,822,218	100	511,163,329	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
3. Program Pengkajian Keuangan Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan Perda dan Pengub APBD Provinsi serta SK Rencana Anggaran/Ranperda/Ranperbup/Ranperwal Kab/Kota dan Penyusunan Anggaran Tepat Waktu	Persentase (%)	100%	100%	6,030,875,474	100%	5,877,034,388	100%	1,634,947,954,543	100%	1,388,128,627,499	100%	1,389,553,216,617	100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
4. Program Pengkajian Bawang Miki Daerah		Persentase administrasi pengkajian bawang miki daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan	Persentase (%)	100%	100%	1,666,679,154	100%	4,237,945,056	100%	5,842,165,100	100%	3,664,143,602	100%	3,847,350,782	100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5. Program Pengkajian Arsip		Nilai Evaluasi Karsipnas	Nilai	67	70	210,903,300	71	152,969,711	61	170,329,148	62	37,476,448	63	950,000,000	63	Sekretariat Daerah	
6. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan Daerah	Persentase (%)	100%	100%	3,754,935,643	100%	575,705,076	100%	8,240,848,784	100%	5,561,454,662	100%	5,386,905,872	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali	
7. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase (%)	100%	100%	1,198,675,415	100%	1,631,013,717	100%	1,014,250,645	100%	897,059,160	100%	902,876,728	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali	
		Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam	Persentase (%)	100%	100%	707,859,835	100%	395,476,272	100%	888,783,862	100%	605,640,162	100%	796,354,480	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali	
		Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kesejahteraan	Persentase (%)	100%	100%	1,346,323,633	100%	592,832,380	100%	1,440,440,380	100%	828,975,475	100%	834,007,528	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali	
8. Program Kepegawaian Daerah		Indeks Merit Sistem	Indeks	N/A	0.52	2,088,658,690	0.63	9,860,034,704	0.61	4,109,550,976	0.80	6,399,965,314	0.81	6,399,965,314	0.81	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali	
9. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi	Persentase (%)	100	100	36,804,894,403	100	1,555,906,318	100	16,395,945,624	100	5,482,707,114	100	5,482,707,114	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali	

NO	MISI	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (a.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2019				2020		2021		2022		2023					
	REALISASI				Rp	REALISASI	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	10. Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Persentase fasilitas dan koordinasi hukum yang disediakan dalam rangka kepastian hukum	Persentase (%)	100	100%	5,694,443,356	100%	4,052,359,969	100%	4,541,017,574	100%	3,802,769,888	100%	4,266,987,636	100%	Sekretariat Daerah
	11. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Skor/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali	Nilai/Skor	15	11	535,000,000	2,0	430,485,640	2,2	1,893,481,635	2,4	2,226,585,227	2,6	1,850,000,000	2,6	Sekretariat Daerah
	12. Program Pemataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik	Persentase (%)	75	77	1,775,855,520	79	179,593,200	81	574,949,246	83	271,872,406	85.00%	285,466,026	85.00%	Sekretariat Daerah
	13. Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Kinerja Pengadaan Barang/Jasa minimal Baik	Indeks	70	75	9,051,430,046	80	8,508,818,671	85	7,742,061,400	90	2,016,673,950	95	511,646,000	95	Sekretariat Daerah
	14. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level APIP	Level	3	3	3,180,393,091	3	1,975,101,176	3	4,062,065,981	3	1,774,642,598	Level 3	2,711,256,332	Level 3	Inspektorat
	15. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Maturitas SPIP	Level	3	3	510,394,472	3	564,439,598	3	1,956,396,465	3	1,099,848,465	Level 3	1,528,791,642	Level 3	Inspektorat
	16. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase (%)	50	54	269,421,198	65	348,781,765	76	401,381,900	87	441,518,760	100	75,060,000	100	Sekretariat Daerah
Sasaran :																
	2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase (%)	0.78	8.69	13,532,907,797	-24.21	15,087,984,744	5.13	17,784,511,876	5.54	17,858,594,072	6.24	4,025,790,853	6.24	Badan Pendapatan Daerah
Program :																
	1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase (%)	57.53	60.48	13,018,034,013	56.35	14,961,578,025	53,01	17,347,082,652	60,62	17,677,422,008	60,62%	3,954,038,853	60,62%	Badan Pendapatan Daerah
	2. Program Perencanaan dan Pembangunan	Persentase Dividen terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persentase (%)	5	4.25	514,873,784	5.78	126,406,719	5	437,429,224	5.5	181,172,064	6	71,752,000	6	Sekretariat Daerah

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD Semesta Berencana Provinsi Tahun 2023 disusun mengacu pada sasaran pada Perda Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Penyelarasan pencapaian sasaran pembangunan dilakukan dengan penyesuaian kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan penyesuaian pelaksana Program/Kegiatan sesuai perangkat daerah yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 dilakukan dengan maksud untuk menjadi acuan/pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Bali. RKPD memuat sasaran, prioritas dan program pembangunan serta kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan secara tematik, holistik, integrasi dan spasial.

Tujuan penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 adalah:

1. Menyediakan satu acuan bagi DPRD Provinsi Bali dan seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Bali Tahun 2023;
3. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintah dalam rangka pencapaian target Penetapan Kinerja (Tapkin);
4. Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antara Perangkat Daerah, dan antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Pusat;
5. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
6. Menyediakan tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; serta menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);
7. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
8. Menggerakkan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Provinsi Bali;

9. Menjadi acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Bali, pelaku usaha swasta dan masyarakat, dan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Daerah Lainnya;
10. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81.25	3,829,894,711,024	91.00%	DISDIKPORA
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			100.00%	DISDIKPORA
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas laporan pertanggung jawaban keuangan Perangkat Daerah			100.00%	DISDIKPORA
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas laporan administrasi barang milik daerah			100.00%	DISDIKPORA
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100.00%	DISDIKPORA
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah			100.00%	DISDIKPORA
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya layanan pengadaan barang milik daerah perangkat daerah			100.00%	DISDIKPORA
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah			100.00%	DISDIKPORA
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah			100.00%	DISDIKPORA
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata lama sekolah			85.80%	DISDIKPORA
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah			75.80%	DISDIKPORA
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase lulusan siswa SMK yang diterima berkerja dunia usaha / dunia industri			107.74%	DISDIKPORA
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus			284.75%	DISDIKPORA

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan	86.50	1,770,952,543	116.28%	DISDIKPORA
Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Persentase Guru dan Tenaga Pendidikan yang bersertifikasi			90.54%	DISDIKPORA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				0.00%	DISDIKPORA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang berprestasi			0.00%	DISDIKPORA
Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya prestasi dan daya saing pemuda			100.00%	DISDIKPORA
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah medali yang diperoleh atlet tingkat regional, nasional dan internasional			284.00%	DISDIKPORA
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Meningkatnya prestasi olahraga pendidikan			0.00%	DISDIKPORA
Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kejuaraan olahraga			100.00%	DISDIKPORA
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Meningkatnya prestasi organisasi olahraga			100.00%	DISDIKPORA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi pramuka yang aktif	52	2,125,000,000	94.12%	DISDIKPORA
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan pramuka pada satuan pendidikan			100.00%	DISDIKPORA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0.00%	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			91.00%	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas laporan pertanggung jawaban keuangan Perangkat Daerah			100.00%	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah			100.00%	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah			100.00%	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah			100.00%	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata lama sekolah	75	2,506,624,656	85.80%	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Meningkatnya Pelayanan pendidikan menengah atas			100.00%	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Meningkatnya Pelayanan pendidikan menengah kejuruan			100.00%	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0.00%	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			91.00%	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas laporan pertanggung jawaban keuangan Perangkat Daerah			100.00%	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah			100.00%	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
					Kejuruan
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah			100.00%	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah			100.00%	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pemahaman Peserta Didik terhadap nilai- nilai kearifan lokal	75	2,506,624,656	111.85%	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan berbasis Keagamaan dan kearifan lokal pada satuan pendidikan menengah			100.00%	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan berbasis Keagamaan dan kearifan lokal pada satuan pendidikan khusus			100.00%	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Implementasi penggunaan bahasa, aksara dan sastra bali pada satuan pendidikan	70.2	77,047,526,726	100.00%	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengembangan bahasa, aksara dan sastra Bali pada satuan pendidikan			100.00%	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI					Dinas Kesehatan Provinsi Bali
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84.5	31,742,231,580	105.61%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja			471.80%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Pemerintah Daerah	yang tersedia				Dinas Kesehatan Provinsi Bali
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase persalinan di fasilitas kesehatan			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi			150.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan e- Kesehatan melalui Komunikasi Data			77.78%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar Ketersediaan Tenaga Kesehatan			87.18%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar minimal Ketersediaan Tenaga Kesehatan			125.93%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Surat Tanda Registrasi di Fasyankes Pemerintah			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Kab/Kota Dengan Ketersediaan Obat Esensial	83%	15,755,247,256	121.90%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase Hasil Evaluasi dan Verifikasi Permohonan Sertifikat Distribusi Cabang Farmasi dan Rekomendasi Ijin Cabang Distribusi Alat Kesehatan yang Dikeluarkan Tepat Waktu			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase Hasil Evaluasi dan Verifikasi Permohonan Sertifikat Produksi UKOT yang Dikeluarkan Tepat Waktu			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks Keluarga Sehat	56	7,118,354,219	80.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Kab/Kota yang Memiliki Rumah Tangga BerPHBS > 80%			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Kab/Kota yang Memiliki Desa Siaga Aktif Mandiri			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
UPTD. BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT					Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Sesuai SOP			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pelatihan Sesuai Hasil TNA			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
UPTD. BALAI LABORATORIUM KESEHATAN					Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Sesuai SOP			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Laboratorium Kesehatan			102.48%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Laboratorium Kesehatan			102.48%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Laboratorium Kesehatan			102.48%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
UPTD. KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL					Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI :	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Sesuai SOP			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Sesuai SOP			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana Pelayanan Yang Melaksanakan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Kunjungan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga			300.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
UPTD. RSUD BALI MANDARA					Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSBM)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD RSUD Bali Mandara			110.60%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSBM)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Di Rumah Sakit Sesuai SOP			99.79%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSBM)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia di Rumah Sakit			98.84%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSBM)

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pengelolaan Pelayanan BLUD di UPTD RSUD Bali Mandara Sesuai dengan SOP			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSBM)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pelayanan yang Memenuhi SPO pada UPTD RSUD Bali Mandara			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSBM)
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana di Rumah Sakit Sesuai yang direncanakan			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSBM)
UPTD. RUMAH SAKIT JIWA					Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSBM)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD RS Jiwa Provinsi Bali			104.81%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSBM)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Dikelola Dengan Baik			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSBM)
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pengelolaan Pelayanan BLUD di UPTD RS Jiwa Sesuai dengan SOP			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan ODGJ Berat yang Dilayani			103.54%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ)
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Penunjang Operasional Rumah Sakit di Provinsi Bali			97.33%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ)
UPTD. RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA					Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Mata)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD RS Mata Bali Mandara			101.64%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Mata)

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD RS Mata Bali Mandara			101.64%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Mata)
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal			103.77%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Mata)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pasien yang Dilayani UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara			4456.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Mata)
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Rumah Sakit Sesuai Standar			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Mata)
UPTD. LABOTARIUM DAN PENGUJIAN OBAT TRADISIONAL					Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan sesuai SOP			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai kebutuhan			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD Labpot)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD Labpot)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara sesuai SOP			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD Labpot)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD Labpot)

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan instalasi farmasi sesuai standar			132.86%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD Labpot)
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase sarana pengembangan dan pengujian obat tradisional yang memenuhi standar			100.00%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD Labpot)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85	90,915,015,506	50.00%	DISPUPRKIM
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan			0.00%	DISPUPRKIM
	Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu			56.25%	DISPUPRKIM
	Hasil : Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi			56.25%	DISPUPRKIM
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan			0.00%	DISPUPRKIM
	Keluaran : Persentase pelayanan administrasi keuangan			50.00%	DISPUPRKIM
	Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran			50.00%	DISPUPRKIM
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan				DISPUPRKIM
	Keluaran :Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			100.00%	DISPUPRKIM
	Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran			100.00%	DISPUPRKIM
Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan				DISPUPRKIM

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
	Keluaran :Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			100.00%	DISPUPRKIM
	Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran			100.00%	DISPUPRKIM
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan				DISPUPRKIM
	Keluaran :Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			100.00%	DISPUPRKIM
	Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran			100.00%	DISPUPRKIM
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan				DISPUPRKIM
	Keluaran :Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			100.00%	DISPUPRKIM
	Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran			100.00%	DISPUPRKIM
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi mantap	48.50	117,741,795,528.00	45.06%	DISPUPRKIM
Kegiatan: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Masukan : Dana yang dibutuhkan				DISPUPRKIM
	Keluaran : Jumlah prasarana Sumber Daya Air yang meningkat kondisinya			0.00%	DISPUPRKIM
	Hasil : Persentase Prasarana Sumber Daya Air dalam Kondisi Baik			24.99%	DISPUPRKIM
Kegiatan: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan				DISPUPRKIM

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
	Keluaran : Jumlah prasarana Sumber Daya Air yang meningkat kondisinya			100.00%	DISPUPRKIM
	Hasil : Persentase Prasarana Sumber Daya Air dalam Kondisi Baik			49.22%	DISPUPRKIM
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase cakupan pelayanan infrastruktur dasar provinsi dalam kondisi baik	78.80	43,407,423,328.00	33.33%	DISPUPRKIM
Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Masukan : Dana yang dibutuhkan				DISPUPRKIM
	Keluaran : meningkatnya kapasitas layanan SPAM			60.00%	DISPUPRKIM
	Hasil : Persentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali			33.33%	DISPUPRKIM
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan pelayanan infrastruktur dasar provinsi dalam kondisi baik	100	64,984,205,313.00	0.00%	DISPUPRKIM
Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Masukan : Dana yang dibutuhkan				DISPUPRKIM
	Keluaran : Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani			0.00%	DISPUPRKIM
	Hasil : Persentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali			0.00%	DISPUPRKIM
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan dan lingkungan kewenangan provinsi dalam kondisi baik	74	2,913,792,964,535.00	8.43%	DISPUPRKIM
Kegiatan: Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Masukan : Dana yang dibutuhkan				DISPUPRKIM
	Keluaran : meningkatnya jumlah bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik			0.00%	DISPUPRKIM
	Hasil : Persentase Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang dibangun dapat berfungsi dengan baik			8.43%	DISPUPRKIM
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya persentase jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi	75.50	1,011,435,027,366.00	101.04%	DISPUPRKIM

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
	mantap				
Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Masukan : Dana yang dibutuhkan				DISPUPRKIM
	Keluaran : Meningkatnya jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap				DISPUPRKIM
	Hasil : persentase terlaksananya pekerjaan jalan dan jembatan			78.79%	DISPUPRKIM
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa konstruksi kewenangan provinsi yang bersertifikat	19.64	5,363,328,737.00	100.00%	DISPUPRKIM
Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Masukan : Dana yang dibutuhkan				DISPUPRKIM
	Keluaran : Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 kab/kota			0.00%	DISPUPRKIM
	Hasil : Prosentase tenaga ahli yang memiliki SKA (Sertifikat Keahlian Kerja)			100.00%	DISPUPRKIM
Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Masukan : Dana yang dibutuhkan				DISPUPRKIM
	Keluaran : Jumlah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi			0.00%	DISPUPRKIM
	Hasil : Persentase Masyarakat Jasa Konstruksi yang Memperoleh Sosialisasi Peraturan Perundangan Jasa Konstruksi			0.00%	DISPUPRKIM
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	95	6,914,322,688.00	#VALUE!	DISPUPRKIM
Kegiatan: Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Masukan : Dana yang dibutuhkan				DISPUPRKIM
	Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang ditetapkan			50.00%	DISPUPRKIM

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
	Hasil : Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang			100.00%	DISPUPRKIM
Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Masukan : Dana yang dibutuhkan				DISPUPRKIM
	Keluaran : Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Provinsi			100.00%	DISPUPRKIM
	Hasil : Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang			100.00%	DISPUPRKIM
Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Masukan : Dana yang dibutuhkan				DISPUPRKIM
	Keluaran : Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Provinsi			100.00%	DISPUPRKIM
	Hasil : Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang			100.00%	DISPUPRKIM
Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Masukan : Dana yang dibutuhkan				DISPUPRKIM
	Keluaran : Jumlah kesesuaian pemanfaatan ruang di Provinsi Bali			0.00%	DISPUPRKIM
	Hasil : Persentase meningkatnya tertib tata ruang			100.00%	DISPUPRKIM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					DISPUPRKIM
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah rumah terbangun kewenangan provinsi	20	54,377,935,564.00	27.00%	DISPUPRKIM
Kegiatan: Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Masukan : Dana yang dibutuhkan				DISPUPRKIM

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
	Keluaran : Jumlah ketersediaan database Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang disusun sesuai ketentuan			100.00%	DISPUPRKIM
	Hasil : Persentase ketersediaan database Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			100.00%	DISPUPRKIM
Kegiatan: Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Masukan : Dana yang dibutuhkan				DISPUPRKIM
	Keluaran :Jumlah rumah layak huni kewenangan provinsi yang dibangun			0.00%	DISPUPRKIM
	Hasil : Persentase rumah pasca bencana dan relokasi proyek pemerintah provinsi yang tertangani			0.00%	DISPUPRKIM
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase kawasan kumuh	35%	3,355,573,095.00	0.00%	DISPUPRKIM
Kegiatan: Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Masukan : Dana yang dibutuhkan				DISPUPRKIM
	Keluaran : Bertambahnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Pada Kawasan Permukiman			0.00%	DISPUPRKIM
	Hasil : persentase Jumlah PSU Pemukiman yang dibangun pada kawasan kumuh provinsi			0.00%	DISPUPRKIM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					DISPUPRKIM
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase data informasi pertanahan yang handal	50	779,212,288.00	50.00%	DISPUPRKIM
Kegiatan: Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Masukan : Dana yang dibutuhkan				DISPUPRKIM
	Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah kewenangan provinsi			100.00%	DISPUPRKIM
	Hasil : Persentase data informasi pertanahan yang handal			100.00%	DISPUPRKIM

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi pada UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	85	8,778,077,487.00	50.00%	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan				UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	Keluaran : Persentase layanan administrasi perkantoran			50.00%	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	Hasil : Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi			50.00%	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan				UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tertangani			50.00%	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	Hasil : Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi			50.00%	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan				UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	Keluaran : Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang tertangani			50.00%	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	Hasil : Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi			50.00%	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan				UP UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	Keluaran : Persentase pelayanan administrasi keuangan			50.00%	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
	Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran			50.00%	UP UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi	19.64	5,363,328,737.00	98.00%	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Masukan : Dana yang dibutuhkan				UP UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	Keluaran : Terselenggaranya Informasi dan pelayanan Alat Berat, Pengujian Kualitas Air, Tanah dan Bahan Bangunan			50.00%	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	Hasil : Persentase kepuasan pengguna layanan Alat Berat, Pengujian Kualitas Air, Tanah dan Bahan Bangunan			50.00%	UP UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
					UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi UPTD Pengelolaan Air Minum	85	4,820,097,745.00	50.00%	UPTD. PAM
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan				UPTD. PAM
	Keluaran : Persentase pelayanan administrasi keuangan			100.00%	UPTD. PAM
	Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran			100.00%	UPTD. PAM
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Responden Yang Puas Terhadap Pelayanan Air Minum	100	90,565,446,804.00	91.00%	UPTD. PAM
Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Masukan : Dana yang dibutuhkan				UPTD. PAM
	Keluaran : Jumlah Layanan Air Minum ke PDAM/Pelanggan			100.00%	UPTD. PAM
	Hasil : Terlaksananya produksi dan distribusi air minum pada SPAM Regional			25.00%	UPTD. PAM

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi UPTD Pengelolaan Air Limbah	85	5,517,549,998.00	50.00%	UPTD PAL
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan				UPTD PAL
	Keluaran : Persentase pelayanan administrasi keuangan			50.00%	UPTD PAL
	Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran			50.00%	UPTD PAL
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah	100	64,984,205,313.00	100.00%	UPTD PAL
Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Masukan : Dana yang dibutuhkan				UPTD PAL
	Keluaran : Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional yang dikelola dengan baik			100.00%	UPTD PAL
	Hasil : Persentase Layanan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional yang berfungsi dengan baik			100.00%	UPTD PAL
Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					SATPOL PP
Satuan Polisi Pamong Praja					SATPOL PP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	81,401,320,583.00	100%	SATPOL PP
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	SATPOL PP
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	SATPOL PP
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			100%	SATPOL PP

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	SATPOL PP
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah			50%	SATPOL PP
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusana Pemerintahan Daerah			100%	SATPOL PP
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah			100%	SATPOL PP
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN	Persentase SDA Pol PP yang meningkat kompetensinya	100%	130,000,000.00	00%	SATPOL PP
	Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%	1,849,260,189.00	100%	SATPOL PP
	Rasio Linmas	-	-	100%	SATPOL PP
KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti dengan baik	100%	36,148,073,034.00	100%	SATPOL PP
	Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi	100%	150,000,000.00	0%	SATPOL PP
Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			100%	SATPOL PP
Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi			353%	SATPOL PP
Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina			0%	SATPOL PP
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mengikuti pembinaan			0%	SATPOL PP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A	76,802,298,755.00	92.6%	DISSOS

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
DAERAH PROVINSI					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				77%	DISSOS
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				93%	DISSOS
Administrasi Umum Perangkat Daerah				69%	DISSOS
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				78%	DISSOS
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				90%	DISSOS
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		8.22%	1,159,264,114.00	96%	DISSOS
Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				54%	DISSOS
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi				99%	DISSOS
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		17.91	15,928,956,251.00	93%	DISSOS
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti				99%	DISSOS
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti				97%	DISSOS
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				88%	DISSOS
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				93%	DISSOS
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		100%	488,246,030.00	89%	DISSOS
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi				30%	DISSOS

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
PROGRAM PENANGANAN BENCANA		100%	1,506,044,755.00	99%	DISSOS
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			3	99%	DISSOS
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		0	0	95%	UPTD PEL. SOSIAL
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100%	UPTD PEL. SOSIAL
Administerasi Keuangan Perangkat Daerah				95%	UPTD PEL. SOSIAL
Administerasi Umum Perangkat Daerah				90%	UPTD PEL. SOSIAL
Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah				100%	UPTD PEL. SOSIAL
Penyedia jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				83%	UPTD PEL. SOSIAL
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				95%	UPTD PEL. SOSIAL
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				84%	UPTD PEL. SOSIAL
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti				72%	UPTD PEL. SOSIAL
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				94%	UPTD PEL. SOSIAL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		A	10,599,736,862.00	95%	UPTD. ANAK
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				95%	UPTD. ANAK

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	
Administrasi Umum Perangkat Daerah				95%	UPTD. ANAK
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				99%	UPTD. ANAK
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				94%	UPTD. ANAK
PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		98.80%	874,193,830.00	98%	UPTD. ANAK
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pd Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi				98%	UPTD. ANAK
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		100%	1,953,686,030.00	97%	UPTD. ANAK
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan Lintas Daerah				97%	UPTD. ANAK
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		0	0	80%	UPTD. ANAK
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi.				91%	UPTD. ANAK
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					BPBD
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					BPBD

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82.93%	41,400,389,397.00	100.00%	BPBD
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun			100.51%	BPBD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu			100.00%	BPBD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya sebagai Aparatur Sipil Negara			100.00%	BPBD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu			100.00%	BPBD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan			100.00%	BPBD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu			100.00%	BPBD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan			100.00%	BPBD
Program Penanggulangan Bencana	Persentase peningkatan kapasitas kelompok masyarakat atau aparatur yang dibina dalam menghadapi bencana	80	4,785,987,319.00	100.00%	BPBD
	Persentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	100	2,705,063,689.00	100.00%	BPBD
	Persentase penanganan pasca bencana	100	1,269,187,311.00	100.00%	BPBD
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan				BPBD
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Prosentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana			100.00%	BPBD

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah daerah terpapar bencana yang mendapat respon penanggulangan bencana secara cepat dan tepat sasaran			100.00%	BPBD
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana			100.00%	BPBD
Program Peninjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82.93	21,929,898,120.00	100.00%	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu			100.00%	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum			100.00%	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan			100.00%	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu			100.00%	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara			100.00%	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
Program Penanggulangan Bencana	Persentase layanan diseminasi informasi kebencanaan	100	30,105,218,152.00	100.00%	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan			100.00%	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Prosentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana			100.00%	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah daerah terpapar bencana yang mendapat respon penanggulangan bencana secara cepat dan tepat sasaran			100.00%	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan			100.00%	UPTD PENGENDALIAN BENCANA

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
	bencana				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	97,825,995,238.00	100.00%	DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja			100.00%	DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan			100.00%	DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum			100.00%	DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM
Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.00%	DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.00%	DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi	62.69	4,418,223,617.00	1.03%	DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM
Kegiatan: Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten dan Bersertifikat Kompetensi			100.00%	DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Kawasan Pekerja Sektor Informal yang Tumbuh dan Berkembang Berciri Khas Bali	22.448	1,253,239,308.00	100.00%	DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM
Kegiatan: Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kawasan Pekerja Sektor Informal Berbasis Lokal			100.00%	DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM
Kegiatan: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Presentase Penurunan Jumlah Pencari Kerja			100.00%	DINAS KETENAGAKERJAA N DAN

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	
					ESDM
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan yang Mentaati Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan Tenaga Kerja	7.2	810,581,159.00	100.00%	DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM
Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Terpenuhinya Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan			85.00%	DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Pengusahaan Sumber Daya Mineral yang Sesuai Ketentuan	60	1,321,927,784.00	90.91%	DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM
Kegiatan: Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Persentase Jumlah Pengusahaan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah yang Melaksanakan Kewajiban Sesuai Ketentuan			100.00%	DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Jumlah Kapasitas Energi bersih dan Energi Baru Terbarukan yang Sesuai dengan Dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED)			78.89%	DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM
Kegiatan: Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Energi Bersih/EBT			95.78%	DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM
Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Penatausahaan, penetapan prosedur dan persyaratan, penyusunan Rekomendasi Perijinan serta pengendalian dan pengawasan Izin Operasi Ketenagalistrikan			31.00%	DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM
	IUJPTL yang fasilitas instalasinya dalam provinsi Peningkatan jumlah kapasitas Energi Bersih/ Energi Baru				

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
	Terbarukan				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			100.00%	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan			100.00%	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum			100.00%	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.00%	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.00%	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.00%	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Calon Tenaga Kerja yang Bersertifikat dan Mengisi Pasar Kerja Sesuai Kompetensi	30	3,829,125,134.00	83.33%	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
Kegiatan: Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten			100.00%	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			100.00%	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan			100.00%	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum			100.00%	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0.00%	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.00%	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah Perusahaan yang Mentaati Peraturan Perundangan di Bidang Lingkungan Kerja Serta Kesehatan Kerja	100	1,103,285,600.00	100.00%	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Terwujudnya Kesehatan Kerja Bagi Pekerja dan Aspek Keselamatan Kerja di Perusahaan			100.00%	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Kelompok yang Memanfaatkan Lahan Pekarangan dan Pengolah Hasil Pertanian	4.1	601,973,148.00	100.00%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Peningkatan Kelompok yang Memanfaatkan Lahan Pekarangan dan Pengolah Hasil Pertanian			100.00%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Persentase Peningkatan Distribusi Pangan			100.00%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Angka Kecukupan Energi (AKE)	2,460	1,853,543,585.00	100.00%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Angka Kecukupan Energi (AKE)			100.00%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Angka Kecukupan Energi (AKE)			100.00%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi	83	735,337,427.00	100.00%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi			100.00%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85	1,855,087,937.00	100.00%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			100.00%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			100.00%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			100.00%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			100.00%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik			100.00%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitas Penyaluran Sarana Pertanian	90	12,086,429,363.00	100.00%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persentase Fasilitas Penyaluran Sarana Pertanian			100.00%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian			100.00%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Peningkatan Populasi Ternak			100.00%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana Kawasan Pertanian	30	1,920,475,235.00	100.00%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian			100.00%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	10	729,201,695.00	100.00%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
				100.00%	
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Kesejahteraan Hewan					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Skor Kemampuan Kelompok	31	247,851,855.00	100.00%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85	4,261,146,351.00	100.00%	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			100.00%	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.00%	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik			100.00%	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Benih Padi Bersertifikat yang Beredar di Pasaran	90	3,865,411,310.00	100.00%	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase Benih Padi Bersertifikat yang Beredar di Pasaran			100.00%	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85	2,621,757,184.00	100.00%	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			100.00%	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan			100.00%	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang Ramah Lingkungan	5	10,336,571,215.00	100.00%	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)			100.00%	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85	1,302,362,794.00	100.00%	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			100.00%	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik			100.00%	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penyediaan Benih Bermutu	5	2,310,582,081.00	100.00%	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			100.00%	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85	836,791,436.00	100.00%	UPTD Benih/Bibit Perkebunan

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			100.00%	UPTD Benih/Bibit Perkebunan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.00%	UPTD Benih/Bibit Perkebunan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik			100.00%	UPTD Benih/Bibit Perkebunan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Unit Taman Gumi Banten Yang Produktif	1	7,462,150,302.00	100.00%	UPTD Benih/Bibit Perkebunan
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah sertifikat yang diterbitkan Pengawasan peredaran benih			100.00%	UPTD Benih/Bibit Perkebunan
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah sertifikat yang diterbitkan			100.00%	UPTD Benih/Bibit Perkebunan
	Pengawasan peredaran benih				
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Benih kelapa salak yang berkualitas			100.00%	UPTD Benih/Bibit Perkebunan
	Entres kopi robusta			100.00%	
	Jumlah produksi benih kopi arabika			100.00%	
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi					UPTD Benih/Bibit Perkebunan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85	730,156,589.00	100.00%	UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat daerah			100.00%	UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.00%	UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi Baik			100.00%	UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang Ramah Lingkungan	5	4,646,084,833.00	100.00%	UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi				0.00%	UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85	462,539,900.00	100.00%	UPTD Pertanian Terpadu
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			100.00%	UPTD Pertanian Terpadu
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.00%	UPTD Pertanian Terpadu
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik			100.00%	UPTD Pertanian Terpadu
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Jumlah Kelompok Pertanian Organik yang Produktif	49	0	100.00%	UPTD Pertanian Terpadu
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Kawasan Pertanian Organik yang Produktif				UPTD Pertanian Terpadu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85	1,399,144,381.00	100.00%	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			100.00%	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.00%	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik			100.00%	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Semen	91	3,888,437,688.00	100.00%	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85	524,472,588.00	100.00%	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			100.00%	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah			100.00%	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik			100.00%	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan laboratorium veteriner	85.81	4,783,858,258.00	100.00%	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah laporan hasil uji			100.00%	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			100.00%	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			100.00%	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.00%	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi Baik			100.00%	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Bersertifikat Keamanan Pangan			100.00%	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha PSAT yang tersertifikasi dan Registrasi			100.00%	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85	214,225,644.00	100.00%	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			100.00%	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik			100.00%	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Bibit Ternak	30		100.00%	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
				100.00%	

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			100.00%	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan,	Jumlah jenis HPT yang dipelihara			100.00%	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	Jumlah jenis ternak yang dipelihara				
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP El mencapai target	100%	2,235,000,000	89%	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
Kegiatan: Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	- Output Kegiatan: Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk			0.99%	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	- Hasil Kegiatan: cakupan penerbitan KTP-el di kabupaten/kota			100%	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target	100%	1,890,000,000	76%	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
Kegiatan: Pelayanan Pencatatan Sipil	- Output Kegiatan: Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil			103%	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	- Hasil Kegiatan: cakupan penerbitan akta kelahiran di kabupaten/kota			89%	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.65	38,690,787,776	100%	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Output Kegiatan: Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja			9386%	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	Hasil Kegiatan: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			100%	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Output Kegiatan: Persentase pelayanan administrasi keuangan			100%	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Output Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum			100%	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	- Hasil Kegiatan: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			100%	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Output Kegiatan : Persentase barang milik daerah yang terselesaikan			100%	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	- Hasil Kegiatan: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			100%	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Output Kegiatan : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan			100%	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	- Hasil Kegiatan: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			100%	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Output Kegiatan : Persentase barang milik daerah yang terselesaikan			100%	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	- Hasil Kegiatan: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			100%	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes	50 Desa	940,800,000	100%	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
Kegiatan: Fasilitas Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	- Output Kegiatan: Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan			100%	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	- Hasil Kegiatan: Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes			100%	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Cepat Berkembang	75.94%	6,860,700,000	91%	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	- Output Kegiatan: Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa			91%	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	- Hasil Kegiatan: Persentase Desa Cepat Berkembang			91%	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Usaha Ekonomi Desa (UED) yang aktif	43.08%	32,236,481,470	93%	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat dalam Menunjang			93%	DPMD DUKCAPIL

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
	Pembangunan Desa				Provinsi Bali
Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	- Output Kegiatan: Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif			93%	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	- Hasil Kegiatan: Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang mampu menjalankan tugas, pokok dan fungsi			93%	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana	15 Sektor	1,650,065,897	100%	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
Kegiatan: Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	- Output Kegiatan: Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali			100%	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	- Hasil Kegiatan: Jumlah Kab/Kota yang memahami Program KB Krama Bali			0%	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84	48,408,128,175.00	92%	DISHUB
Kegiatan : Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase peningkatan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi bali			47%	
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan			93%	
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Displin Sumber Daya Aparatur			0%	
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan			78%	

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
	administrasi perkantoran				
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran			100%	
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran			91%	
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran			88%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Lalu Lintas Angkutan Jalan yang Berkeselamatan			109%	
Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	Persentase peningkatan keselamatan pengguna jaringan jalan			99%	
Kegiatan : Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persentase jumlah dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi yang ditindaklanjuti			72%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Pelayanan angkutan			86%	
Kegiatan : Penertiban izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Persentase rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang tertib sesuai SOP			86%	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelabuhan yang menerapkan manajemen keselamatan	50	4,080,479,925.00	99%	
Kegiatan : Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Pelabuhan pengumpan regional yang sudah memiliki rencana induk dan daerah lingkungan kerja(DLKR)/daerah lingkungan kepentingan (DLKP)			99%	
PROGRAM PENGELOLAAN PERKKERETAAPIAN	Jumlah infrastruktur transportasi publik dalam kualitas baik	10	3,897,515,360.00	97%	
Kegiatan : Penetapan rencana induk perkeretaapian	Persentase dokumen rencana induk perkeretaapian yang ditetapkan dengan keputusan gubernur			97%	

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84	5,721,962,967.00	95%	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan			95%	
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran			69%	
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran			100%	
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran			91%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Tingkat Pelayanan Simpang	'C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/kendaraan)	3,484,039,960.0	0%	
Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas jalan dan perangkat ATCS dalam kondisi baik dan siap pakai			88%	
UPTD TRANS SARBAGITA				0%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84	6,634,387,882.00	85%	UPTD TRANS SARBAGITA
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan			100%	
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran			85%	
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan			80%	

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
	administrasi perkantoran				
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran			89%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks kepuasan pelayanan angkutan umum trans sarbagita			97%	
Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	load faktor angkutan umum trans sarbagita			82%	
UPTD PERLENGKAPAN JALAN				96%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84	5,263,949,017.00	96%	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan			97%	
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran			74%	
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran			100%	
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran			88%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	'C (kecepatan rata-rata 60km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)	5,656,374,332.00	C Tingkat	
Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas jalan di jalan Provinsi Bali dalam kondisi baik dan siap pakai			97%	

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN				0%	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84	5,978,725,772.00	93%	
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan			94%	
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran			88%	
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran			100%	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai			100%	
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran			69%	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Waktu Operasional pelabuhan pengumpan regional			100%	
Kegiatan : Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpul Regional	Persentase pelabuhan pengumpan regional yang dibangun sesuai aturan			100%	
URUSAN WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR					
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.5	68,211,442,621.00	0.00%	DISKOMINFOS
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia			100.00%	DISKOMINFOS
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia			100.00%	DISKOMINFOS
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia			50.00%	DISKOMINFOS
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan			100.00%	DISKOMINFOS

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang siap pakai				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan			100.00%	DISKOMINFOS
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	93.2	74,359,700,826.00	121.58%	DISKOMINFOS
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi			121.58%	DISKOMINFOS
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3	268,682,330,409.00	168.81%	DISKOMINFOS
Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Pemerintah berbasis elektronik			100.00%	DISKOMINFOS
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang valid	100	2,362,983,686.00	100.00%	DISKOMINFOS
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dan diseminasi			100.00%	DISKOMINFOS
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Keamanan Transaksi Data Informasi Publik	100	2,583,408,362.00	100.00%	DISKOMINFOS
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan			100.00%	DISKOMINFOS
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun			100.00%	DISKOMINFOS
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA					

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	
KECIL, DAN MENENGAH					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI EVALUASI MANAJEMEN KINERJA	84	18,002,826,416.00	0.00%	DISKOP
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu			100.00%	DISKOP
Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			100.00%	DISKOP
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			83.33%	DISKOP
Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			100.00%	DISKOP
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			100.00%	DISKOP
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			100.00%	DISKOP
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	JUMLAH KOPERASI YANG BANKABLE	86.49	267,817,452.00	17.19%	DISKOP
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang bankable			100.00%	DISKOP
Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang bankable			20.00%	DISKOP
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	JUMLAH KOPERASI YANG SEHAT DAN BERKUALITAS	-	-	34.62%	DISKOP

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas			32.94%	DISKOP
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan KSP/USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas			37.78%	DISKOP
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	JUMLAH KSP/USP KOPERASI YANG SEHAT DAN BERKUALITAS	87.22	124,480,541.00	16.15%	DISKOP
Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP Koperasi yang sehat dan berkualitas			16.15%	DISKOP
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	JUMLAH KOPERASI YANG MENDAPAT PEMBIAYAAN DAN BERMITRA DENGAN BUMN, BUMD/SWASTA	3.13	492,307,505.00	209.52%	DISKOP
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta			209.52%	DISKOP
Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi yang difasilitasi pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta			100.00%	DISKOP
	Jumlah koperasi yang memperoleh program			200.00%	DISKOP
	Jumlah koperasi yang mengikuti kemitraan			100.00%	DISKOP
	Jumlah koperasi yang produk unggulannya dikenal			100.00%	DISKOP
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi berprestasi yang dinilai			100.00%	DISKOP
	Jumlah koperasi nivo provinsi yang baik kelembagaan dan meningkat aset dan omsetnya			100.00%	DISKOP

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
	Jumlah koperasi tenun yang aktif			100.00%	DISKOP
	Jumlah koperasi yang datanya dimutakhirkan			466.67%	DISKOP
	Jumlah subak sebagai koperasi tani			100.00%	DISKOP
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	JUMLAH UMKM YANG BANKABLE	0.13	639,501,345.00	100.00%	DISKOP
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang bankable			100.00%	DISKOP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI EVALUASI MANAJEMEN KINERJA			0.00%	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai evaluasi manajemen kinerja			100.00%	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai evaluasi manajemen kinerja			100.00%	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai evaluasi manajemen kinerja			100.00%	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara			100.00%	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	JUMLAH PENGELOLA KUMKM YANG KOMPETEN DAN BERSERTIFIKAT	0.3	4,036,755,341.00	1980.00%	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	
Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikasi			1980.00%	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				88.50%	DPMPTSP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BALI		78	20,822,366,152.35		DPMPTSP
Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			100.00%	DPMPTSP
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			78.26%	DPMPTSP
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			78.00%	DPMPTSP
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai evaluasi manajemen Kinerja			100.00%	DPMPTSP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja			0.83%	DPMPTSP
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		18	472,584,331.80		
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Nilai Investasi			6.43%	DPMPTSP
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Investor yang Mengajukan Permohonan Penanaman Modal di Provinsi Bali			160.00%	DPMPTSP
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Informasi Peluang Penanaman Modal			40.00%	DPMPTSP
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal					DPMPTSP
Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks pelayanan publik perizinan dan Non Perizinan				DPMPTSP
Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah	Prosentase Jenis Izin dan nonizin yang dilayani sesuai kewenangan Provinsi			106.38%	DPMPTSP

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Provinsi					
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		92	832,482,831.60	-	DPMP TSP
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Penanam Modal yang paham terhadap Peraturan Pelaksanaan Penanaman Modal			119.44%	DPMP TSP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					DISBUD
Dinas Kebudayaan					DISBUD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	155,012,064,765.00	89.79%	DISBUD
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun			100.00%	DISBUD
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Keuangan			100.00%	DISBUD
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana			78.57%	DISBUD
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia			100.00%	DISBUD
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			70.37%	DISBUD
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	24	82,661,859,337.00	57.02%	DISBUD
Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan bahasa, aksara dan sastra Bali			100.00%	DISBUD
Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah	Jumlah pelaku seni yang mendapat penghargaan atas upaya pelestarian kesenian			14.05%	DISBUD

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Provinsi					
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	23	40,612,681,137.00	101.93%	DISBUD
Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM/Lembaga Seni Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Terbina			101.93%	DISBUD
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	24	5,161,377,011.00	0.00%	DISBUD
Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah SDM Tenaga Kesejarahan/Lembaga yang Terbina			0.00%	DISBUD
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya Dan Permuseuman yang Maju	3400	9,198,424,654.00	0.00%	DISBUD
Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Ditetapkan			0.00%	DISBUD
Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Terkelola			0.00%	DISBUD
UPTD Taman Budaya					UPTD TAMAN BUDAYA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			98.96%	UPTD TAMAN BUDAYA
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana			95.83%	UPTD TAMAN BUDAYA
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	UPTD TAMAN BUDAYA
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia			100.00%	UPTD TAMAN BUDAYA
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	UPTD TAMAN BUDAYA
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra			0.00%	UPTD TAMAN BUDAYA

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah pelaku seni yang mendapat penghargaan atas upaya pelestarian kesenian			0.00%	UPTD TAMAN BUDAYA
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan bahasa, aksara dan sastra Bali			100.00%	UPTD TAMAN BUDAYA
UPTD Museum Bali					UPTD MUSEUM BALI
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			27.08%	UPTD MUSEUM BALI
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana			41.67%	UPTD MUSEUM BALI
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0.00%	UPTD MUSEUM BALI
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia			66.67%	UPTD MUSEUM BALI
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0.00%	UPTD MUSEUM BALI
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Museum Bali	75	18,389,590,505	108.33%	UPTD MUSEUM BALI
Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah koleksi museum pada UPTD Museum Bali yang terkelola			108.33%	UPTD MUSEUM BALI
UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali					UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			87.85%	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana			62.50%	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia			100.00%	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			88.89%	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Indeks Kepuasan masyarakat Pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali			100.00%	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Masyarakat yang Mengakses Koleksi Museum			100.00%	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85	101,849,650,361.00	1.004477912	Biro Organisasi
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Target : Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja - Hasil : Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja			1	Biro Organisasi
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Target : Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Hasil : Terwujudnya Administrasi Keuangan yang Baik			0.0023	Biro Organisasi
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Target : Persentase Peningkatan Administrasi Perangkat Daerah Hasil : Terwujudnya Administrasi Umum yang Baik			1	Biro Organisasi
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Target : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Hasil : Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Tepat Waktu			1	Biro Organisasi
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Target : Persentase Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Hasil : Terwujudnya Urusan Pemerintahan yang Baik			1	Biro Organisasi
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Target : Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Hasil : Terwujudnya Barang Milik Daerah yang baik			1	Biro Organisasi

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang tertangani dengan baik	53	5,473,090,141.00	1	Biro Organisasi
Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Standar Pelayanan Perpustakaan			1	Biro Organisasi
Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kegemaran Membaca Masyarakat			1	Biro Organisasi
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Peningkatan Koleksi Perpustakaan	22	1,361,368,998.00	1	Biro Organisasi
Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam yang Disimpan			6.5	Biro Organisasi
Program Pengelolaan Arsip	-Nilai Evaluasi Kearsipan	62	5,086,584,617.00	1	Biro Organisasi
	-Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang tertib arsip	100		1	
Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Arsip Dinamis yang Dikelola			1	Biro Organisasi
Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Persentase Arsip Statis yang Terselamatkan			1	Biro Organisasi
Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan Preservasi dan	Jumlah Khasanah Arsip Statis dan Preservasi Arsip			1	Biro Organisasi
				1.00	
Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase Capaian Standar Pelayanan Kearsipan			1	Biro Organisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.3	51,969,586,898.00	100.00%	DISPERINDAG
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang terselesaikan tepat waktu			1.00%	DISPERINDAG
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan			100.00%	DISPERINDAG

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum			100.00%	DISPERINDAG
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.00%	DISPERINDAG
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah			1.00%	DISPERINDAG
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	1,665,107,929.00	0.00%	DISPERINDAG
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor			-100.00%	DISPERINDAG
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar ber SNI	6	264,198,815.00	0.00%	DISPERINDAG
Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pasar yang dikembangkan			100.00%	DISPERINDAG
Program Pengembangan Ekspor		64.95	444,157,059.00	-100.00%	DISPERINDAG
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang meningkat akses pasarnya			0.00%	DISPERINDAG
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Peningkatan harga barang Pokok	<7%	337,300,473.00	100.00%	DISPERINDAG
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase Perkembangan Harga Bahan Pokok kurang dari			12.50%	DISPERINDAG

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase Pelaku Usaha yang menerapkan tertib niaga			100.00%	DISPERINDAG
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	40.8	1,467,382,652.00	100.00%	DISPERINDAG
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Konsumen Cerdas			100.00%	DISPERINDAG
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Produk yang diawasi sesuai ketentuan			100.00%	DISPERINDAG
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	30	179,680,989.00	100.00%	DISPERINDAG
Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Produk Lokal Terhadap Total Produk yang Terjual di Pasar			100.00%	DISPERINDAG
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kontribusi Industri Terhadap PDRB Provinsi Bali	1.5	15,281,486,810.00	0.00%	DISPERINDAG
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang		920,170,140.00	100.00%	DISPERINDAG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.3	6,566,385,995.00	100.00%	UPTD INDUSTRI OLAHAN PANGAN DAN KEMASAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan			100.00%	UPTD INDUSTRI OLAHAN PANGAN DAN KEMASAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum			100.00%	UPTD INDUSTRI OLAHAN PANGAN DAN KEMASAN

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	UPTD INDUSTRI OLAHAN PANGAN DAN KEMASAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah			100.00%	UPTD INDUSTRI OLAHAN PANGAN DAN KEMASAN
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kontribusi Industri Terhadap PDRB Provinsi Bali	1.5	462,872,380.00	0.00%	UPTD INDUSTRI OLAHAN PANGAN DAN KEMASAN
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang			100.00%	UPTD INDUSTRI OLAHAN PANGAN DAN KEMASAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.3	6,749,613,563.00	100.00%	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan			100.00%	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum			100.00%	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		78,287,632	100.00%	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	40.8	509,158,449.00	100.00%	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Konsumen Cerdas			100.00%	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai evaluasi manajemen kinerja	80	86,132,727,520.00	100.00%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Nilai evaluasi manajemen kinerja			0.00%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai evaluasi manajemen kinerja			100.00%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN			100.00%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai evaluasi manajemen kinerja			100.00%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai evaluasi manajemen kinerja			100.00%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai evaluasi manajemen kinerja			100.00%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			100.00%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi perairan	5	2,502,423,109.00	100.00%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi.	Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi perairan			100.00%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 1 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah kawasan WP3K yang meningkat kualitasnya			100.00%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	107,269.84	24,086,196,281.00	99.68%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap			99.68%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	19360.82	1,606,591,251.00	179.78%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengelolaan Pembudidaya Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya			179.78%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA LAUT DAN PERIKANAN	Jumlah pelaku usaha taat Hukum	200	604,161,400.00	100.00%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 MIL	Jumlah Pelaku usaha taat hukum			100.00%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Pengawasan Sumber daya perikanan di wilayah sungai,danau,waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/kota dalam 1 [satu} daerah provinsi	Jumlah pelaku usaha taat hukum			100.00%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produk yang bersertifikat	151	870,353,642.00	207.38%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	Jumlah produk yang bersertifikat			207.38%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				100.00%	
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produk yang bersertifikat	151	870,353,642.00	207.38%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kegiatan Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah produk yang bersertifikat			207.38%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			100.00%	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			100.00%	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan			100.00%	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Terlaksananya pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan			100.00%	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				100.00%	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan			100.00%	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan pulau- pulau kecil	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	5	3,740,441,886.00	100.00%	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
Pengelolaan Ruang Laut Sampai 12 Mil Diluar minyak dan Gas Bumi	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola			100.00%	UPTD Kawasan Konservasi Perairan

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai evaluasi manajemen kinerja			100.00%	UPTD Pelabuhan Perikanan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai evaluasi manajemen kinerja			100.00%	UPTD Pelabuhan Perikanan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap di Pelabuhan			100.00%	UPTD Pelabuhan Perikanan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Produksi Ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan			100.00%	UPTD Pelabuhan Perikanan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas dan gedung yang terpelihara			100.00%	UPTD Pelabuhan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan	2	316,886,006.00	100.00%	UPTD Pelabuhan Perikanan
Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan			100.00%	UPTD Pelabuhan Perikanan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai evaluasi manajemen kinerja			100.00%	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Administrasi Keuangan	Nilai evaluasi manajemen kinerja			100.00%	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
- Administrasi Umum perangkat daerah	Jumlah ATK yg tersedia, jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan, jumlah barang cetak dan penggandaan yg tersedia			100.00%	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah materai yg tersedia, jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			100.00%	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
- Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala			100.00%	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Hasil Uji yang dikeluarkan	5000	4,203,793,956	102.84%	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
- Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	Rekomendasi hasil uji produk perikanan, terjaganya UPI yang menerapkan persyaratan sertifikasi SNI			100.00%	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			100.00%	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
					Payau/Laut
administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			100.00%	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
Administrasi Umum perangkat Daerah	Presentase penerangan bangunan kantor yang tertangani, presentase upacara keagamaan yang tertangani, presentase pemeliharaan peralatan kantor yang tertangani dan presentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tertangani			100.00%	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli daerah [PAD]			100.00%	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan Pendapatan asli Daerah [PAD]			100.00%	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah [PAD]	3 komoditas (Udang galah, udang vaname dan rumput laut)	8,613,739,320.00	158.28%	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
Pengelolaan pembudidayaan ikan di laut	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah [PAD]			158.28%	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	48,921,048,088.00	98.82%	DISPAR
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah			100.00%	DISPAR
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan			100.00%	DISPAR
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah			100.00%	DISPAR
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan			100.00%	DISPAR

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			100.00%	DISPAR
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Presentase daya tarik wisata yang berdaya saing	11.54	434,135,964.00	100.00%	DISPAR
Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah daya tarik wisata yang berdaya saing			100.00%	DISPAR
Program Pemasaran Pariwisata	Presentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	45.45	4,880,393,882.00	105.00%	DISPAR
Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Masyarakat yang mengakses informasi pariwisata			158.41%	DISPAR
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pengajuan Usaha Ekonomi Kreatif yang memanfaatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	9	1,773,966,313.00	0.00%	DISPAR
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif			100.00%	DISPAR
Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan			0.00%	DISPAR
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat	45	3,543,529,414.00	174.42%	DISPAR
Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan			100.00%	DISPAR
DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP					

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketaatan Terhadap Ijin Lingkungan	80	59,792,514,443.00	100.00%	DISHUT DAN LH
Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			100.00%	DISHUT DAN LH
Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah dokumen pemutakhiran KLHS RPJMD Provinsi Bali dan dokumen KLHS Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disusun			100.00%	DISHUT DAN LH
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	4.31	1,462,393,476.00	0.00%	DISHUT DAN LH
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			100.00%	DISHUT DAN LH
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	27	1,950,398,438.00		DISHUT DAN LH
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/kota dan desa adat/desa/kelurahan yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi dalam rangka pengelolaan sampah berbasis sumber melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah			100.00%	DISHUT DAN LH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			100.00%	DISHUT DAN LH
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan monitoring yang disusun			100.00%	DISHUT DAN LH
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan			100.00%	DISHUT DAN LH
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sumberdaya aparatur yang meningkat kualitasnya				DISHUT DAN LH
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik			100.00%	DISHUT DAN LH

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik			100.00%	DISHUT DAN LH
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik			100.00%	DISHUT DAN LH
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik			100.00%	DISHUT DAN LH
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan	2.41	6,813,749,159.00	98.37%	DISHUT DAN LH
Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			100.00%	DISHUT DAN LH
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Penurunan Lahan Kritis di Dalam dan Diluar Kawasan Hutan	4.75	1,482,530,478.00	332.11%	DISHUT DAN LH
Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			100.00%	DISHUT DAN LH
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	10,101,056,141.00	100.00%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			100.00%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			100.00%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik			100.00%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik			100.00%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan	0.89	6,424,151,500.00	98.37%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			100.00%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Penurunan Lahan Kritis di dalam dan di luar Kawasan Hutan	2.82	3,617,204,040.00	332.11%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan			100.00%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	16,146,534,199	100.00%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			100.00%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			100.00%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik			100.00%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik			100.00%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan	0.25	7,374,175,400.00	98.37%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			100.00%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur					

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	25,383,213,016.00	100.00%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			100.00%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			100.00%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik			100.00%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik			100.00%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan	0.38	8,772,645,800.00	98.37%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			0.00%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Penurunan Lahan Kritis di dalam dan di luar Kawasan Hutan			332.11%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			100.00%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	23,290,917,199.00	100.00%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			100.00%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			100.00%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik			100.00%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik			100.00%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Penurunan Lahan Kritis di dalam dan di luar Kawasan Hutan	0.89	4,395,498,800.00	332.11%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			100.00%	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	7,744,959,544.00	100.00%	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			100.00%	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			100.00%	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik			100.00%	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik			100.00%	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik			100.00%	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan	5.4	1,583,645,575.00	98.37%	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Jumlah Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi			100.00%	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	8,200,201,902.00	100.00%	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			100.00%	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			100.00%	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik			100.00%	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik			100.00%	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan	94	1,378,672,481.00	100.00%	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah parameter uji laboratorium lingkungan mendukung persyaratan akreditasi			200.00%	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
UPTD Pengelolaan Sampah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	14,784,339,941.00	100.00%	UPTD Pengelolaan Sampah
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			100.00%	UPTD Pengelolaan Sampah
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			100.00%	UPTD Pengelolaan Sampah
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik			0.00%	UPTD Pengelolaan Sampah
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik			100.00%	UPTD Pengelolaan Sampah

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik			100.00%	UPTD Pengelolaan Sampah
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	100	40,698,782,949.00	100.00%	UPTD Pengelolaan Sampah
Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional			100.00%	UPTD Pengelolaan Sampah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bali	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	63,337,465,830.00		BAPPEDA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100.00%	BAPPEDA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			80.31%	BAPPEDA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Jenis layanan administrasi umum perangkat daerah			92.96%	BAPPEDA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan			50.00%	BAPPEDA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.00%	BAPPEDA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah jenis barang milik daerah dalam kondisi baik			100.00%	BAPPEDA
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan	100	25,719,853,036.00	96.23%	BAPPEDA
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi			77.78%	BAPPEDA
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah			100.00%	BAPPEDA

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah jenis dokumen hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah			100.00%	BAPPEDA
	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	6,211,698,937.00	100.00%	BAPPEDA
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	3,541,741,149.00		BAPPEDA
	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%	5,655,181,588.00		BAPPEDA
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			100.00%	BAPPEDA
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA			100.00%	BAPPEDA
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen perencanaan Bidang Infratraktur dan Kewilayahan yang sesuai dengan regulasi			100.00%	BAPPEDA
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali		0		92.77%	BARI
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		78	50,063,758,059.00	92.81%	BARI
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH				77.89%	BARI
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				92.15%	BARI
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				79.80%	BARI
KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				85.45%	BARI

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				91.69%	BARI
KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				98.71%	BARI
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		80	70,482,688,868.00	92.71%	BARI
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PENGKAJIAN PERATURAN				92.51%	BARI
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN				96.76%	BARI
KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI				96.11%	BARI
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai evaluasi manajemen kinerja	83	25,828,836,687.00		Banhub
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat			100.00%	Banhub
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan			100.00%	Banhub
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor 1			100.00%	Banhub
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah			100.00%	Banhub
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100.00%	Banhub
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah			100.00%	Banhub

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Pemerintah Daerah					
Program Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	95	5,643,103,578.00	100.00%	
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung			100.00%	Banhub
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
INSPEKTORAT DAERAH					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		95	81,782,450,284.00	0.00%	INSPEKTORAT
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0.00%	INSPEKTORAT
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				0.00%	INSPEKTORAT
Administrasi Umum Perangkat Daerah				0.00%	INSPEKTORAT
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0.00%	INSPEKTORAT
Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0.00%	INSPEKTORAT
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0.00%	INSPEKTORAT
Penyelenggaraan Pengawasan Internal				0.00%	INSPEKTORAT
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				0.00%	INSPEKTORAT
Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi				0.00%	INSPEKTORAT

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan		Level 3	6,456,479,398.00	0.00%	INSPEKTORAT
Pendampingan dan Asistensi				0.00%	INSPEKTORAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BALI					
KEPEGAWAIAN					BKD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Terlaksana Baik	83	149,279,721,159.00	100.00%	BKD
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja			100.00%	BKD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun			100.00%	BKD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang terlaksana			100.00%	BKD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang terlaksana			100.00%	BKD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan kantor yang tersedia			100.00%	BKD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah			100.00%	BKD
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Merit Sistem	0.81	3,810,892,774.00	132.00%	BKD
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kebutuhan ASN yang terpenuhi			100.00%	BKD
Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Layanan Mutasi dan Promosi ASN yang terlaksana			100.00%	BKD
Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah layanan pengembangan Kompetensi ASN			100.00%	BKD
Penilaian dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Layanan penilaian			100.00%	BKD
UPTD. PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI					

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Terlaksana Baik			100.00%	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Merit Sistem			100.00%	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah layanan pengembangan Kompetensi ASN			100.00%	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				0%	KESBANGPOL
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	nilai evaluasi manajemen kinerja	83	35,535,639,570	101%	KESBANGPOL
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	nilai evaluasi manajemen kinerja			101%	KESBANGPOL
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase meningkatnya pelayanan administrasi keuangan			100%	KESBANGPOL
Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tugas administrasi umum terselesaikan			100%	KESBANGPOL
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah terpenuhi			100.00%	KESBANGPOL
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah			100%	KESBANGPOL
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah terpenuhi			100.00%	KESBANGPOL
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	78	46,742,407,950.00	0%	KESBANGPOL
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase capaian kinerja kegiatan			100%	KESBANGPOL

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase menurunnya ancaman kekerasan dari kelompok masyarakat terhadap kebebasan berserikat,berkumpul dan berpendapat	0	2,637,421,108.00	100%	KESBANGPOL
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase capaian kinerja kegiatan			100%	KESBANGPOL
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase sistem keamanan terintegrasi	100	1,925,875,929.00	100%	KESBANGPOL
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase capaian kinerja kegiatan			100%	KESBANGPOL
KEUANGAN SUB PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET					BPKAD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86	72,517,864,199.00	100.00%	BPKAD
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu			100.00%	BPKAD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu			100.00%	BPKAD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi umum yang disusun tepat waktu			100.00%	BPKAD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu			100.00%	BPKAD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun tepat waktu			100.00%	BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyusunan Perda dan Pergub APBD Provinsi serta SK Evaluasi Ranperda/Ranperbup/Ranperwali dan Penyerapan Anggaran Tepat Waktu	100	4,480,611,640,916.00	71.80%	BPKAD
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen rencana anggaran daerah yang disusun tepat waktu			100.00%	BPKAD

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan pembinaan tepat waktu			100.00%	BPKAD
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	persentase laporan pengelolaan perbendaharaan daerah disusun tepat waktu			100.00%	BPKAD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase laporan akuntansi dan keuangan daerah disusun tepat waktu			50.00%	BPKAD
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan penunjang kewenangan pengelolaan keuangan daerah disusun tepat waktu			100.00%	BPKAD
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase implementasi SIPD lingkup Keuangan Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan			1.00%	BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyusunan laporan BMD Provinsi Bali Tepat Waktu	100	13,353,659,484.00	100.00%	BPKAD
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penyusunan laporan BMD Provinsi Bali Tepat Waktu			100.00%	BPKAD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			23.93%	UPTD. Pengelolaan Barang Milik Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi umum yang disusun tepat waktu			50.00%	UPTD. Pengelolaan Barang Milik Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu			100.00%	UPTD. Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun tepat waktu			100.00%	UPTD. Pengelolaan Barang Milik Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyusunan laporan BMD Provinsi Bali Tepat Waktu			100.00%	UPTD. Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penyusunan laporan BMD Provinsi Bali Tepat Waktu			100.00%	UPTD. Pengelolaan Barang Milik Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	26,378,878,964.00	N/A	BIRO HUKUM

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan			100%	BIRO HUKUM
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang diselesaikan			100%	BIRO HUKUM
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang diselesaikan			100%	BIRO HUKUM
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik			98%	BIRO HUKUM
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan dengan kondisi baik			100%	BIRO HUKUM
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dengan kondisi baik			89%	BIRO HUKUM
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	100	22,273,637,764.00	71%	BIRO HUKUM
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum			100%	BIRO HUKUM
Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase bantuan hukum yang dilaksanakan			100%	BIRO HUKUM
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
SEKRETARIAT DAERAH					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)			99.23%	BIRO PBJ

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100.00%	BIRO PBJ
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			99.82%	BIRO PBJ
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			94.96%	BIRO PBJ
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.00%	BIRO PBJ
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.00%	BIRO PBJ
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	95	35,180,995,697.00	99.98%	BIRO PBJ
Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa/Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Tertib			100.00%	BIRO PBJ
Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Rata-rata Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik/ Terlaksananya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Secara Penuh			99.48%	BIRO PBJ
Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan Kelembagaan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa/ Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			100.00%	BIRO PBJ
Sekretariat Daerah					BIRO UMUM DAN PROTOKOL
Biro Umum dan Protokol					BIRO UMUM DAN PROTOKOL

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	100	371,986,618,418.00	100.00%	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100.00%	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100.00%	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100.00%	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah			100.00%	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			100.00%	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	Dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala			100.00%	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Dokumen Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			100.00%	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Dokumen Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan			100.00%	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan			100.00%	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
Sekretariat Daerah					BIRO ORGANISASI
Biro Organisasi					BIRO ORGANISASI
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan Setda Provinsi Bali	85	74,013,474,673.00	100.00%	BIRO ORGANISASI
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai peraturan dan disampaikan tepat waktu			100.00%	BIRO ORGANISASI

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu			100.00%	BIRO ORGANISASI
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu			100.00%	BIRO ORGANISASI
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu			100.00%	BIRO ORGANISASI
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Barang milik daerah pada Biro Organisasi yang terinventaris dengan baik			100%	BIRO ORGANISASI
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik	85	3,858,539,186.00	101.23%	BIRO ORGANISASI
Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran			100.00%	BIRO ORGANISASI
Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik			102.47%	BIRO ORGANISASI
Sekretariat Daerah					BIRO EKBANG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Perekonomian dan Adm Pembangunan Setda Provinsi Bali	83	10,396,119,917.00	100.00%	BIRO EKBANG
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Perekonomian dan Adm Pembangunan Setda Provinsi Bali			100.00%	BIRO EKBANG
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	485,672,099.00	100.00%	BIRO EKBANG
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku			100.00%	BIRO EKBANG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Perekonomian dan Adm Pembangunan Setda Provinsi Bali	85	61,235,451,826.00	100.00%	BIRO EKBANG
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Perekonomian dan Adm			100.00%	BIRO EKBANG

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Perangkat Daerah	Pembangunan Setda Provinsi Bali				
					BIRO EKBANG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Perekonomian dan Adm Pembangunan Setda Provinsi Bali			100.00%	BIRO EKBANG
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Perekonomian dan Adm Pembangunan Setda Provinsi Bali			100.00%	BIRO EKBANG
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti				BIRO EKBANG
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti			100.00%	BIRO EKBANG
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah			100.00%	BIRO EKBANG
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah			100.00%	BIRO EKBANG
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti				BIRO EKBANG
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti				BIRO EKBANG
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku			100.00%	BIRO EKBANG
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku			100.00%	BIRO EKBANG
	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Perekonomian dan Adm			100.00%	BIRO EKBANG

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pembangunan Setda Provinsi Bali				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Perekonomian dan Adm Pembangunan Setda Provinsi Bali			100.00%	BIRO EKBANG
BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BALI				0.00%	Biro Pemerintahan dan Kesra
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	78	8,300,000,000.00	0.00%	Biro Pemerintahan dan Kesra
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100.00%	Biro Pemerintahan dan Kesra
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan			100.00%	Biro Pemerintahan dan Kesra
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum			100.00%	Biro Pemerintahan dan Kesra
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang tertata			100.00%	Biro Pemerintahan dan Kesra
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Persentase Hasil Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	3.2	1,850,000,000.00	0.00%	Biro Pemerintahan dan Kesra
				0.00%	
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kebijakan dan Regulasi yang mendukung penyelenggaraan			#DIV/0!	Biro Pemerintahan dan Kesra
Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti			#DIV/0!	Biro Pemerintahan dan Kesra
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama daerah yang ditindaklanjuti				Biro Pemerintahan dan Kesra
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kepuasan Pelayanan Atma Kerthi	78	15,500,000,000.00	0.00%	Biro Pemerintahan dan Kesra
Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Pengembangan Mental Spiritual				Biro Pemerintahan dan Kesra
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar				Biro Pemerintahan dan Kesra

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Pelayanan Dasar					
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar				Biro Pemerintahan dan Kesra
			341,311,599,616		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		95,158,871,416	0%	BPSDM
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0%	BPSDM
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				0%	BPSDM
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0%	BPSDM
Administrasi Umum Perangkat Daerah				0%	BPSDM
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0%	BPSDM
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0%	BPSDM
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					BPSDM
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi	15	246,152,728,200	0%	BPSDM
Pengembangan Kompetensi Teknis				0%	BPSDM
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				0%	BPSDM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.5	320,085,048,536.00	100.00	Sekretariat DPRD
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja daerah	Persentase kesesuaian perencanaan terhadap penganggaran belanja OPD			100.00	Sekretariat DPRD

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			100.00	Sekretariat DPRD
keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			100.00	Sekretariat DPRD
Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			100.00	Sekretariat DPRD
Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa pelayanan penunjang kantor yang selesai dengan baik dan berkualitas			100.00	Sekretariat DPRD
Keg Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara dengan baik			100.00	Sekretariat DPRD
Keg. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Administrasi Keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD				Sekretariat DPRD
Keg. Layanan Administrasi DPRD	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara dengan baik			100.00	Sekretariat DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase peningkatan kepuasan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali serta masyarakat	20	517,851,674,198.00	100.00	Sekretariat DPRD
Keg. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD untuk Mendukung Kelancaran dan Tugas Fungsi DPRD			100.00	Sekretariat DPRD
Keg. Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase terbentuknya Kebijakan Anggaran untuk Mendukung Kelancaran dan Tugas Fungsi DPRD			100.00	Sekretariat DPRD
Keg. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah untuk menunjang Tugas dan Fungsi DPRD			100.00	Sekretariat DPRD
Keg. Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD untuk menunjang Tugas dan Fungsi DPRD			#VALUE!	Sekretariat DPRD

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Keg. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase terserap dan terhimpunnya Aspirasi Masyarakat untuk menunjang tugas dan Fungsi DPRD			100.00	Sekretariat DPRD
Keg. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD			100.00	Sekretariat DPRD
Keg. Fasilitas Tugas DPRD	Prosentase fasilitasi pelaksanaan tugas pimpinan menunjang tugas dan fungsi DPRD			100.00	Sekretariat DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
KEUANGAN					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		88	309,671,296,590.00		BAPENDA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					BAPENDA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				46.73	BAPENDA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					BAPENDA
Administrasi Umum Perangkat Daerah					BAPENDA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan				BAPENDA
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0.00%	BAPENDA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					BAPENDA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					BAPENDA
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		100	390,422,057.00		BAPENDA
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah					BAPENDA

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Kabupaten/Kota					
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		60.62	13,647,552,016.00		BAPENDA
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					BAPENDA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		78.5	22,688,465,377.00		UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
Administrasi Umum Perangkat Daerah					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		100	15,301,246,282.00		UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		78.5	15,142,935,905.00		UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
Administrasi Umum Perangkat Daerah					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana			70.59%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
				141.18%	
				19.05%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		100	3,767,934,166.00	17.02%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				17.02%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		78.5	23,819,753,852.00		UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		100	4,262,188,677.00		UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		78.5	39,069,368,925.00		UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Administrasi Umum Perangkat Daerah				71.17%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		100	13,587,544,616.00	27.28%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				27.28%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		78.5	41,403,785,890.00	30.64%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				23.47%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
Administrasi Umum Perangkat Daerah				32.52%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		100	13,236,560,921.00		UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		78.5	26,553,713,578.00		UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
Administrasi Umum Perangkat Daerah					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana Jumlah Perjalanan Dinas yang			100.00%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
				100.00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				44.43%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.73%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		100	8,878,531,828.00	23.76%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				23.67%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				25.17%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				25.00%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
Administrasi Umum Perangkat Daerah				36.40%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		100	4,642,324,838.00	23.62%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				23.62%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		87.5	18,172,227,874.00	35.02%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				21.62%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
Administrasi Umum Perangkat Daerah				56.70%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				45.95%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				15.79%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		100	3,590,067,558.00	24.00%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				24.12%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		78.5	17,078,081,268.00	20.54%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				22.19%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Administrasi Umum Perangkat Daerah				21.82%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				30.25%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		100	3,758,694,169.00	16.28%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				16.23%	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					DPMA
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan					DPMA
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai evaluasi manajemen kinerja	83	64,203,454,747.00	100.49%	DPMA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100.00%	DPMA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			265.10%	DPMA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit, Jenis, Bulan, Exsemplar, Kali Administrasi Umum Perangkat Daerah			74.31%	DPMA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			92.86%	DPMA

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2022					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Lembar, Dokumen, Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			97.11%	DPMA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit, Kali, Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			98.80%	DPMA
Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	Persentase Desa Adat berdaya dalam kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	100	1,919,330,942,684.00	100.06%	DPMA
	Persentase Subak berdaya dalam kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	100	2,656,720,584.00	99.25%	
Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	Jumlah Desa Adat, Pedoman, Produk hukum Adat, Wicara Adat, Juknis, Proposal Pembinaan Kelembagaan Desa Adat			87.53%	DPMA
Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Jumlah LPD, BUPDA, Dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat			366.67%	DPMA
Penyelenggaraan Desa Adat	Jumlah Laporan, Desa Adat, Dokumen, Proposal Penyelenggaraan Desa Adat			105.16%	DPMA
Pembinaan Sumber Daya Manusia	Jumlah Orang, Pasraman Non Formal, Pedoman/Juknis, Paiketan/Pasikian, Pembinaan Sumber Daya Manusia			100.00%	DPMA

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 18 menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar. Sedangkan pada pasal 298 menyebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal, dalam penerapannya Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Bali terdapat 6 (enam) bidang urusan meliputi: 1) pendidikan; 2) kesehatan; 3) pekerjaan umum dan penataan ruang; 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 5) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; 6) sosial. Indikator kinerja dari masing-masing bidang/jenis layanan dan target capaiannya untuk Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR YANG AKAN DITETAPKAN DALAM STANDAR TEKNIS	TARGET	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1	2	3	4	5
1	PENDIDIKAN			
1.1	Pendidikan menengah	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	warga negara usia 16 s.d. 18 tahun.
		b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
1.2	Pendidikan khusus	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	warga negara usia 4 s.d. 18 tahun yang berkebutuhan khusus.
		b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
2	KESEHATAN			
2.1	pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
		b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia.	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
2.2	pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.
		b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia.	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
3	PEKERJAAN UMUM			
3.1	pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	Warga Negara.
3.2	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas	b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	Warga Negara.

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR YANG AKAN DITETAPKAN DALAM STANDAR TEKNIS	TARGET	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1	2	3	4	5
	kabupaten/kota.			
4	PERUMAHAN RAKYAT			
4.1	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi.	1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana.
		2. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
4.2	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.	1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Provinsi.
		2. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
5	TRANTIBUMLIMNAS			
5.1	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	100%	warga negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap
		b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi.
6	SOSIAL			
6.1	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	penyandang disabilitas telantar.
6.2	rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti.	b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial.	100%	anak telantar.
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro Provinsi Bali Tahun 2023 menggunakan indikator kinerja makro yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	77,4	78,01	0,79
2	Angka Kemiskinan	4,57	4,25	-0,32
3	Angka Pengangguran	4,80	2,69	-2,11
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,84	5,71	0,87
5	Pendapatan Per-Kapita	56,09	62,29	11,05
6	Ketimpangan Pendapatan	0,363	0,362	-0,001

Keterangan :

- IPM menggunakan umur harapan hidup berdasarkan hasil *long form* sensus penduduk 2020.
- Keterangan PDRB per kapita: Tahun 2020 menggunakan hasil Sensus Penduduk 2020; Tahun 2021-2023 menggunakan proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2020
- Point 5, pendapatan perkapita tidak dirilis di level provinsi, sebagai pendekatan bisa dipakai indikator PDRB perkapita.

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali, peningkatan IPM Bali tahun 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup layak. Dimensi standar hidup layak mengalami peningkatan terbesar. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,88 tahun, meningkat 0,28 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun 2022. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (LF SP2020). Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun ke atas tahun 2023 sebesar 13,58 tahun meningkat 0,10 tahun dibandingkan dengan tahun 2022. Sedangkan, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas sebesar 9,45 tahun, meningkat 0,06 tahun dibandingkan dengan tahun 2022. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 440 ribu rupiah

dibandingkan dengan tahun 2022. Sumber data pengeluaran riil per kapita menggunakan hasil Susenas Maret. Pada tahun 2023, seluruh kabupaten/kota di Bali telah berada pada capaian status pembangunan “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) atau “sangat tinggi” ($\text{IPM} \geq 80$). (Sumber BPS Provinsi Bali)

Angka Kemiskinan, Persentase penduduk miskin di Provinsi Bali pada Maret 2023 sebesar 4,25 persen, turun 0,28 persen poin terhadap September 2022 dan turun 0,32 persen poin terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali pada Maret 2023 sebanyak 193,78 ribu orang, turun 11,58 ribu orang terhadap September 2022 dan turun 11,90 ribu orang terhadap Maret 2022. Persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2023 sebesar 3,77 persen, turun 0,35 persen poin dibandingkan kondisi September 2022 yang tercatat sebesar 4,12 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2023 sebesar 5,50 persen, turun 0,08 persen poin dibandingkan kondisi September 2022 yang tercatat sebesar 5,58 persen. Dibanding September 2022, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2023 turun sebanyak 10,00 ribu orang (dari 133,82 ribu orang pada September 2022 menjadi 123,82 ribu orang pada Maret 2023). Pada periode yang sama jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebanyak 1,59 ribu orang (dari 71,55 ribu orang pada September 2022 menjadi 69,96 ribu orang pada Maret 2023). (Sumber BPS Provinsi Bali)

Angka Pengangguran. Angkatan kerja pada Agustus 2023 tercatat sebanyak 2,69 juta orang, menurun 48,30 ribu orang dibandingkan Agustus 2022. Pada periode yang sama, TPAK mengalami kenaikan sebesar 0,22 persen poin menjadi 77,08% pada Agustus 2023. Pada Agustus 2023, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2,62 juta orang, meningkat 10,75 ribu orang dibandingkan kondisi Agustus 2022. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang meningkat sebanyak 42,92 ribu orang. Sementara sektor dengan penurunan terbesar yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang berkurang sebesar 22,85 ribu orang. Sebanyak 1,25 juta orang (47,65%) bekerja pada kegiatan formal, meningkat 1,08 persen poin dibanding Agustus 2022. Pekerja di Bali pada Agustus 2023 masih didominasi oleh pekerja berpendidikan SD ke bawah dengan persentase sebesar 32,07% (839,49 ribu orang). Dibandingkan dengan Agustus 2022, persentase setengah pengangguran turun sebesar 1,36 persen poin menjadi 2,57%, sementara persentase pekerja paruh waktu sebesar 23,54 persen (turun 6,13 persen poin). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bali pada Agustus 2023 sebesar 2,69%, turun 2,11 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022. TPT tertinggi tercatat di Kabupaten Buleleng sebesar 3,60%. (Sumber BPS Provinsi Bali)

Pertumbuhan Ekonomi. Perekonomian Bali pada triwulan IV-2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp72,28 triliun atau jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK 2010=100), PDRB Bali tersebut tercatat sebesar Rp41,67 triliun. Ekonomi Bali selama periode triwulan IV-2023 tumbuh sebesar 3,60 persen jika dibandingkan dengan capaian triwulan III-2023 (q-to-q). Ditinjau dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicatatkan oleh Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 15,94 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Lembaga Non Profit (Pk-LNPRT) tumbuh sebesar 29,35 persen. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Bali pada periode triwulan IV-2023 tumbuh sebesar 5,86 persen. Dikaji dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi tercatat pada Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 15,66 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Lembaga Non Profit (Pk-LNPRT) tumbuh sebesar 32,85 persen. (*Sumber BPS Provinsi Bali*)

Ketimpangan Pendapatan. Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi Bali yang diukur dengan menggunakan Gini Ratio tercatat sebesar 0,362. Kondisi ini tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya pada September 2022. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,367. Capaian ini turun 0,004 poin jika dibandingkan kondisi Maret 2022 dan September 2022 yang tercatat sebesar 0,371. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,290. Capaian ini naik 0,008 poin jika dibandingkan kondisi September 2022 yang tercatat sebesar 0,282 dan turun sebesar 0,004 poin jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang tercatat sebesar 0,294. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran di Provinsi Bali pada Maret 2023 untuk kelompok 40 persen terbawah tercatat sebesar 18,70 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk di Provinsi Bali pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan tercatat sebesar 18,50 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Begitu juga untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 21,95 persen, yang juga berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah. (*Sumber BPS Provinsi Bali*)

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi	134	Disdikpora	
2	Pendidikan	Jumlah peserta didik sekolah menengah atas yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	133	Disdikpora	
3	Pendidikan	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	352	Disdikpora	
4	Pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas yang menerima pembebasan biaya pendidikan	13283	Disdikpora	
5	Pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	21336	Disdikpora	
6	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas	6310	Disdikpora	
7	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan	6648	Disdikpora	
8	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas	6310	Disdikpora	
9	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan	6648	Disdikpora	
10	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas	22	Disdikpora	
11	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	22	Disdikpora	
12	Pendidikan	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas	2489	Disdikpora	
13	Pendidikan	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	1848	Disdikpora	
14	Pendidikan	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	1848	Disdikpora	
15	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	6180	Disdikpora	
16	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah menengah atas yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	171	Disdikpora	
17	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat	174	Disdikpora	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
18	Pendidikan	Jumlah tenaga laboratium pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	52	Disdikpora	
19	Pendidikan	Jumlah tenaga laboratorium/bengkel/workshp pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	27	Disdikpora	
20	Pendidikan	Jumlah tenaga laboratorium/bengkel/workshp pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	27	Disdikpora	
21	Pendidikan	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	165	Disdikpora	
22	Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi	14	Disdikpora	
23	Pendidikan	Jumlah peserta didik pendidikan khusus yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Disdikpora	Rasionalisasi Anggran
24	Pendidikan	Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1208	Disdikpora	
25	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus	380	Disdikpora	
26	Pendidikan	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus	380	Disdikpora	
27	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khusus	22	Disdikpora	
28	Pendidikan	Jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus	134	Disdikpora	
29	Pendidikan	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	365	Disdikpora	
30	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	14	Disdikpora	
31	Pendidikan	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	29	Disdikpora	
32	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	76	Dinas Kesehatan	
33	Kesehatan	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	11	Dinas Kesehatan	
34	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5	Dinas Kesehatan	
35	Kesehatan	Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	195	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dan/atau berpotensi bencana provinsi			
36	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	48,777	Dinas Kesehatan	
37	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	6	Dinas Kesehatan	
38	Kesehatan	Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	1	Dinas Kesehatan	
39	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	119115	Dinas Kesehatan	
40	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi	25	Dinas Kesehatan	
41	Kesehatan	Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota	0	Dinas Kesehatan	-
42	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	0	Dinas PUPR Perkim	Tidak dilaksanakan (kewenangan BWS)
43	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	0	Dinas PUPR Perkim	Tidak dilaksanakan (kewenangan BWS)
44	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (HA)	0	Dinas PUPR Perkim	Tidak dilaksanakan (kewenangan BWS)
45	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	93,67	Dinas PUPR Perkim	
46	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	1	Dinas PUPR Perkim	
47	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	1	Dinas PUPR Perkim	
48	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	4251	Dinas PUPR Perkim	
49	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	50057	Dinas PUPR Perkim	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	88793,3	Dinas PUPR Perkim	
51	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	140167	Dinas PUPR Perkim	
52	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	0,75	Dinas PUPR Perkim	
53	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi	1	Dinas PUPR Perkim	
54	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaraan SPAM	1	Dinas PUPR Perkim	
55	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0	Dinas PUPR Perkim	Tidak ada Badan Usaha yang mengajukan izin
56	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	5	Dinas PUPR Perkim	
57	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah SPALD Regional	1	Dinas PUPR Perkim	
58	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Total kapasitas SPALD Regional	51000	Dinas PUPR Perkim	
59	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	35646,14	Dinas PUPR Perkim	
60	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik	2	Dinas PUPR Perkim	
61	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik (Ada/Tidak)	0	Dinas PUPR Perkim	Tidak ada
62	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	805,35	Dinas PUPR Perkim	
63	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi	0	Dinas PUPR Perkim	Pada tahun 2023 rencana induk pengembangan jaringan provinsi masih proses penyusunan dengan Bidang Tata Ruang Provinsi
64	Pekerjaan Umum dan	Panjang jalan yang dibangun	0	Dinas PUPR Perkim	Tidak dianggarkan pada Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penataan Ruang				
65	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yg dibangun	0	Dinas PUPR Perkim	Tidak dianggarkan pada Tahun 2023
66	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	0	Dinas PUPR Perkim	Tidak dianggarkan pada Tahun 2023
67	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	35,6	Dinas PUPR Perkim	
68	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	22,3097	Dinas PUPR Perkim	
69	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang direhabilitasi	0	Dinas PUPR Perkim	Tidak ada jembatan yang direhabilitasi Tahun 2023
70	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang dipelihara	805,35	Dinas PUPR Perkim	
71	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang dipelihara	3607,25	Dinas PUPR Perkim	
72	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi	205	Dinas PUPR Perkim	
73	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	174500	Dinas PUPR Perkim	
74	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	3085	Dinas PUPR Perkim	
75	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir	1	Dinas PUPR Perkim	
76	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi	1	Dinas PUPR Perkim	
77	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN	1	Dinas PUPR Perkim	
78	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya	1	Dinas PUPR Perkim	
79	Pekerjaan Umum dan Penataan	Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi	1	Dinas PUPR Perkim	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Ruang				
80	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK)	1	Dinas PUPR Perkim	
81	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	1	Dinas PUPR Perkim	
82	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	1	Dinas PUPR Perkim	
83	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUPR Perkim	Baru akan dilaksanakan pada Tahun 2024
84	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUPR Perkim	Tidak ada kecelakaan
85	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUPR Perkim	Baru akan dilaksanakan pada Tahun 2024
86	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	59886	Dinas PUPR Perkim	Tidak ada kecelakaan
87	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0	Dinas PUPR Perkim	-
88	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0	Dinas PUPR Perkim	-
89	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas PUPR Perkim	Masih tahap proses pendataan
90	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas PUPR Perkim	-
91	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas PUPR Perkim	Kewenangan Pusat
92	Perumahan Rakyat dan Kawasan	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	Dinas PUPR Perkim	-

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemukiman				
93	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	Dinas PUPR Perkim	Tidak mengampu terkait sub kegiatan ini
94	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	Dinas PUPR Perkim	Tidak mengampu terkait sub kegiatan ini
95	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitas ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	529	Dinas PUPR Perkim	
96	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitas penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PUPR Perkim	Tidak mengampu terkait sub kegiatan ini
97	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	2	Dinas PUPR Perkim	
98	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PUPR Perkim	Tidak mengampu terkait sub kegiatan ini
99	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh $\geq$ 10-15 Ha	206,93	Dinas PUPR Perkim	
100	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	0	Dinas PUPR Perkim	Tidak mengampu terkait sub kegiatan ini
101	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0	Dinas PUPR Perkim	Tidak mengampu terkait sub kegiatan ini
102	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU	0	Dinas PUPR Perkim	Tidak mengampu terkait sub kegiatan ini
103	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	Dinas PUPR Perkim	Tidak mengampu terkait sub kegiatan ini
104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah pengembang yang teregistrasi	0	Dinas PUPR Perkim	Tidak mengampu terkait sub kegiatan ini
105	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	Dinas PUPR Perkim	Tidak mengampu terkait sub kegiatan ini

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
106	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	5	Satpol PP	
107	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	9877	Satpol PP	
108	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	43	Satpol PP	
109	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	22	Satpol PP	
110	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	11	Satpol PP	
111	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	2	Satpol PP	
112	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi	1	Satpol PP	
113	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi	1	BPBD	
114	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana kontijensi provinsi	0	BPBD	Tahun 2023 tidak ada penyediaan/pemutakhiran Dokumen Rencana Kontijensi Provinsi
115	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota	2	BPBD	
116	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota	9	BPBD	
117	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi	1	BPBD	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
118	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi	9	BPBD	
119	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi	1	BPBD	
120	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi	14522	BPBD	
121	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanaan di dalam panti sesuai standar gizi	51	Dinas Sosial P3A	
122	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	0	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis baik Panti Pemerintah maupun Swasta
123	Sosial	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	8	Dinas Sosial P3A	
124	Sosial	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	28	Dinas Sosial P3A	
125	Sosial	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis baik Panti Pemerintah maupun Swasta
126	Sosial	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis baik Panti Pemerintah maupun Swasta
127	Sosial	Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis baik Panti Pemerintah maupun Swasta
128	Sosial	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis baik Panti Pemerintah maupun Swasta
129	Sosial	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	0	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis baik Panti Pemerintah maupun Swasta

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
130	Sosial	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	0	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis baik Panti Pemerintah maupun Swasta
131	Sosial	Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis baik Panti Pemerintah maupun Swasta
132	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	0	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis baik Panti Pemerintah maupun Swasta
133	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis baik Panti Pemerintah maupun Swasta
134	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	2	Dinas Sosial P3A	
135	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	2	Dinas Sosial P3A	
136	Sosial	Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	825	Dinas Sosial P3A	
137	Sosial	Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	45	Dinas Sosial P3A	
138	Sosial	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (panti)	82	Dinas Sosial P3A	
139	Sosial	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	5	Dinas Sosial P3A	
140	Sosial	Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	5	Dinas Sosial P3A	
141	Sosial	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis baik Panti Pemerintah maupun Swasta
142	Sosial	Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis baik Panti Pemerintah maupun Swasta
143	Sosial	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali belum memiliki Panti Gelandangan dan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Pengemis baik Pant Pemerintah maupun Swasta
144	Sosial	Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali belum memiliki Pant Gelandangan dan Pengemis baik Pant Pemerintah maupun Swasta
145	Sosial	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	2	Dinas Sosial P3A	
146	Sosial	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	5	Dinas Sosial P3A	
147	Sosial	Jumlah Anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam panti	0	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali belum memiliki Pant Gelandangan dan Pengemis baik Pant Pemerintah maupun Swasta
148	Sosial	Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	45	Dinas Sosial P3A	
149	Sosial	Jumlah Anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulsuran keluarga	11	Dinas Sosial P3A	
150	Sosial	Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	6	Dinas Sosial P3A	
151	Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	92	Dinas Sosial P3A	
152	Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	0	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali belum memiliki Pant Gelandangan dan Pengemis baik Pant Pemerintah maupun Swasta
153	Sosial	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	3	Dinas Sosial P3A	
154	Sosial	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	10	Dinas Sosial P3A	
155	Sosial	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	8	Dinas Sosial P3A	
156	Sosial	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	3	Dinas Sosial P3A	
157	Sosial	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	3	Dinas Sosial P3A	
158	Sosial	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial P3A	
159	Sosial	Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali belum memiliki Pant Gelandangan dan Pengemis baik Pant

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Pemerintah maupun Swasta
160	Sosial	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	2	Dinas Sosial P3A	
161	Sosial	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	1	Dinas Sosial P3A	
162	Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan dan kesehatan dasar	92	Dinas Sosial P3A	
163	Sosial	Jumlah Lanjut Usia terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulisan keluarga	13	Dinas Sosial P3A	
164	Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	6	Dinas Sosial P3A	
165	Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan	27	Dinas Sosial P3A	
166	Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	0	Dinas Sosial P3A	Tidak ada gelandangan dan pengemis
167	Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	0	Dinas Sosial P3A	Tidak ada gelandangan dan pengemis
168	Sosial	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	0	Dinas Sosial P3A	-
169	Sosial	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	0	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis baik Panti Pemerintah maupun Swasta
170	Sosial	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis baik Panti Pemerintah maupun Swasta
171	Sosial	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis baik Panti Pemerintah maupun Swasta
172	Sosial	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	0	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis baik Panti Pemerintah maupun Swasta
173	Sosial	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis baik Panti Pemerintah maupun Swasta

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
174	Sosial	Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis baik Panti Pemerintah maupun Swasta
175	Sosial	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	0	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis baik Panti Pemerintah maupun Swasta
176	Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	0	Dinas Sosial P3A	Tidak ada gelandangan dan pengemis
177	Sosial	Jumlah Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di dalam panti	0	Dinas Sosial P3A	Provinsi Bali belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis baik Panti Pemerintah maupun Swasta
178	Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0	Dinas Sosial P3A	Tidak ada gelandangan dan pengemis
179	Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yg mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	0	Dinas Sosial P3A	Tidak ada gelandangan dan pengemis
180	Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	0	Dinas Sosial P3A	Tidak ada gelandangan dan pengemis
181	Sosial	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	651	Dinas Sosial P3A	
182	Sosial	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	512	Dinas Sosial P3A	
183	Sosial	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	2	Dinas Sosial P3A	
184	Sosial	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	187	Dinas Sosial P3A	
185	Sosial	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	44	Dinas Sosial P3A	
186	Sosial	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	648	Dinas Sosial P3A	
187	Tenaga Kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi.	1	Disnaker ESDM	
188	Tenaga Kerja	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	43,38	Disnaker ESDM	
189	Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja.	0	Disnaker ESDM	Data Belum tersedia/belum melaksanakan kegiatan dimaksud
190	Tenaga Kerja	Jumlah kabupaten/kota yang telah	0	Disnaker	Data Belum

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dibina dalam penyusunan RTK perusahaan.		ESDM	tersedia/belum melaksanakan kegiatan dimaksud
191	Tenaga Kerja	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi KKNI / okupasi.	100	Disnaker ESDM	
192	Tenaga Kerja	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	87,5	Disnaker ESDM	
193	Tenaga Kerja	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan.	4,348	Disnaker ESDM	
194	Tenaga Kerja	Persentase penganggur yang dilatih	0,51	Disnaker ESDM	
195	Tenaga Kerja	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	51,09	Disnaker ESDM	
196	Tenaga Kerja	Persentase penyerapan lulusan.	53,53	Disnaker ESDM	
197	Tenaga Kerja	Persentase LPK yang terakreditasi	58,19	Disnaker ESDM	
198	Tenaga Kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan	0	Disnaker ESDM	Tidak melaksanakan pelatihan bagi CPMI/CTKI
199	Tenaga Kerja	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	0	Disnaker ESDM	Tidak melaksanakan pelatihan bagi CPMI/CTKI
200	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0	Disnaker ESDM	Tidak melaksanakan kegiatan dimaksud
201	Tenaga Kerja	Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	0	Disnaker ESDM	Tidak melaksanakan kegiatan dimaksud
202	Tenaga Kerja	Data tingkat produktivitas total.	0	Disnaker ESDM	Tidak melaksanakan kegiatan dimaksud
203	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP).	5,61	Disnaker ESDM	
204	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yg telah memiliki PKB.	64,6	Disnaker ESDM	
205	Tenaga Kerja	Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh di perusahaan pada tahun n.	252,127	Disnaker ESDM	
206	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	63,33	Disnaker ESDM	
207	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.	58,75	Disnaker ESDM	
208	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit.	0,109	Disnaker ESDM	
209	Tenaga Kerja	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0,184	Disnaker ESDM	
210	Tenaga Kerja	Jumlah mogok kerja	0	Disnaker ESDM	-
211	Tenaga Kerja	Jumlah penutupan perusahaan	0	Disnaker ESDM	-
212	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan kepentingan	0	Disnaker ESDM	-
213	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan hak	53	Disnaker ESDM	
214	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan antar SP/SB di	0	Disnaker	-

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		perusahaan		ESDM	
215	Tenaga Kerja	Jumlah Perselisihan PHK	38	Disnaker ESDM	
216	Tenaga Kerja	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	288	Disnaker ESDM	
217	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	6	Disnaker ESDM	
218	Tenaga Kerja	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	9	Disnaker ESDM	
219	Tenaga Kerja	Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan.	2713672,2 8	Disnaker ESDM	
220	Tenaga Kerja	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	36,264	Disnaker ESDM	
221	Tenaga Kerja	Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi	0	Disnaker ESDM	Tidak ada pengajuan
222	Tenaga Kerja	Jumlah Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi	0	Disnaker ESDM	Tidak ada pengajuan
223	Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi	50	Disnaker ESDM	
224	Tenaga Kerja	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi	10,609	Disnaker ESDM	
225	Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu provinsi	84	Disnaker ESDM	
226	Tenaga Kerja	Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	5	Disnaker ESDM	
227	Tenaga Kerja	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah provinsi.	0	Disnaker ESDM	-
228	Tenaga Kerja	Jumlah Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi.	0	Disnaker ESDM	Tidak mengeluarkan izin LPPRT
229	Tenaga Kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi Pasar Kerja (IPK) online/sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER).	2445	Disnaker ESDM	
230	Tenaga Kerja	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepulangannya.	0	Disnaker ESDM	Kewenangan BP2MI
231	Tenaga Kerja	Jumlah ijin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)/Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang diterbitkan.	82	Disnaker ESDM	
232	Tenaga Kerja	Jumlah Pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) /	0	Disnaker ESDM	Kewenangan BP2MI

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tenaga Kerja Indonesia (TKI)			
233	Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kebebasan Berserikat.	291	Disnaker ESDM	
234	Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat (WKWI).	266	Disnaker ESDM	
235	Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Pengupahan.	266	Disnaker ESDM	
236	Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Jaminan Sosial.	266	Disnaker ESDM	
237	Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja Perempuan.	26	Disnaker ESDM	
238	Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	38,378	Disnaker ESDM	
239	Tenaga Kerja	Jumlah Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan.	2	Disnaker ESDM	
240	Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang mendaftar Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online.	49,554	Disnaker ESDM	
241	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG	33	Dinas Sosial P3A	
242	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi	53	Dinas Sosial P3A	
243	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	4	Dinas Sosial P3A	
244	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	0	Dinas Sosial P3A	
245	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	Dinas Sosial P3A	
246	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	10	Dinas Sosial P3A	
247	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	0	Dinas Sosial P3A	-
248	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	2	Dinas Sosial P3A	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
249	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	0	Dinas Sosial P3A	-
250	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	Dinas Sosial P3A	
251	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan	10	Dinas Sosial P3A	
252	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	0	Dinas Sosial P3A	-
253	Pangan	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	44	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
254	Pangan	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	379987	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
255	Pangan	Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	289,83	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
256	Pangan	Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
257	Pangan	Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
258	Pangan	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi	1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
259	Pangan	Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
260	Pangan	Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
261	Pangan	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	379987	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
262	Pangan	Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	52	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
263	Pertanahan	Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi	0	Dinas PUPR Perkim	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak mengampu terkait sub kegiatan ini

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
264	Pertanahan	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	0	Dinas PUPR Perkim	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak mengampu terkait sub kegiatan ini
265	Pertanahan	SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur	0	Dinas PUPR Perkim	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak mengampu terkait sub kegiatan ini
266	Pertanahan	Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	0	Dinas PUPR Perkim	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak mengampu terkait sub kegiatan ini
267	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	55,17	Dinas KLH	
268	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,99	Dinas KLH	
269	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	45,22	Dinas KLH	
270	Lingkungan Hidup	Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi.	26	Dinas KLH	
271	Lingkungan Hidup	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	1	Dinas KLH	
272	Lingkungan Hidup	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi	1493	Dinas KLH	
273	Lingkungan Hidup	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	1493	Dinas KLH	
274	Lingkungan Hidup	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	1493	Dinas KLH	
275	Lingkungan Hidup	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota	2	Dinas KLH	
276	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Fasilitasi pelayanan Adminduk	100	DPMD Dukcapil	
277	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	32	DPMD Dukcapil	
278	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	27	DPMD Dukcapil	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
279	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	5315	DPMD Dukcapil	
280	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	2	DPMD Dukcapil	
281	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	0	DPMD Dukcapil	Masih dalam proses penyusunan dokumen
282	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	22,9	DPMD Dukcapil	
283	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	17,7	DPMD Dukcapil	
284	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	80,41	DPMD Dukcapil	
285	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	9	DPMD Dukcapil	
286	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	DPMD Dukcapil	
287	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	36,75	DPMD Dukcapil	
288	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	0	DPMD Dukcapil	
289	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	73,64	DPMD Dukcapil	
290	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	57,03	DPMD Dukcapil	
291	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	62,71	DPMD Dukcapil	
292	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B	0	Dinas Perhubungan	Belum ada terminal tipe B yang ditetapkan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
293	Perhubungan	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi	25896	Dinas Perhubungan	
294	Perhubungan	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	52,93	Dinas Perhubungan	
295	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	96,55	Dinas Kominfos	
296	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	96,55	Dinas Kominfos	
297	Komunikasi dan Informatika	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	50	Dinas Kominfos	
298	Komunikasi dan Informatika	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 te	100	Dinas Kominfos	
299	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100	Dinas Kominfos	
300	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	90,24	Dinas Kominfos	
301	Komunikasi dan Informatika	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	90,24	Dinas Kominfos	
302	Komunikasi dan Informatika	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	100	Dinas Kominfos	
303	Komunikasi dan Informatika	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100	Dinas Kominfos	
304	Komunikasi dan Informatika	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	38,46	Dinas Kominfos	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
305	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	96,55	Dinas Kominfo	
306	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	96,55	Dinas Kominfo	
307	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100	Dinas Kominfo	
308	Komunikasi dan Informatika	Persentase data yang dapat berbagi pakai	100	Dinas Kominfo	
309	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100	Dinas Kominfo	
310	Komunikasi dan Informatika	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100	Dinas Kominfo	
311	Komunikasi dan Informatika	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	100	Dinas Kominfo	
312	Komunikasi dan Informatika	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	100	Dinas Kominfo	
313	Komunikasi dan Informatika	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100	Dinas Kominfo	
314	Komunikasi dan Informatika	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	Dinas Kominfo	
315	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	80	Diskop UKM	
316	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	100	Diskop UKM	
317	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	23,39	Diskop UKM	
318	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas	51,45	Diskop UKM	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			
319	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	12,37	Diskop UKM	
320	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkerjasama untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0,03	Diskop UKM	
321	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkerjasama untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	8,6	Diskop UKM	
322	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	60,06	Diskop UKM	
323	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	5,11	Diskop UKM	
324	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	5,91	Diskop UKM	
325	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	9,68	Diskop UKM	
326	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	5,95	Diskop UKM	
327	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	0	Diskop UKM	-
328	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	0	Diskop UKM	-
329	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	0,12	Diskop UKM	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	menengah				
330	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi produk usaha	9,31	Diskop UKM	
331	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	0,26	Diskop UKM	
332	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	0,71	Diskop UKM	
333	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	0,4	Diskop UKM	
334	Penanaman Modal	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	1	DPMPTSP	
335	Penanaman Modal	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	1	DPMPTSP	
336	Penanaman Modal	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	DPMPTSP	-
337	Penanaman Modal	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1	DPMPTSP	
338	Penanaman Modal	Kegiatan pameran penanaman modal	1	DPMPTSP	
339	Penanaman Modal	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	2	DPMPTSP	
340	Penanaman Modal	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	241	DPMPTSP	
341	Penanaman Modal	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	7236	DPMPTSP	
342	Penanaman Modal	Laporan realisasi penanaman modal	17,28	DPMPTSP	
343	Penanaman Modal	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	1	DPMPTSP	
344	Penanaman Modal	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	879	DPMPTSP	
345	Penanaman Modal	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi	7236	DPMPTSP	
346	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0	Disdikpora	-
347	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	Disdikpora	-
348	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kade pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	0	Disdikpora	-
349	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi	0	Disdikpora	-

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kepemudaan			
350	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	0	Disdikpora	-
351	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	21	Disdikpora	
352	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	4	Disdikpora	
353	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	188383	Disdikpora	
354	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	2527	Disdikpora	
355	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	100	Dinas Kominfo	
356	Statistik	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	0	Dinas Kominfo	-
357	Statistik	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1	Dinas Kominfo	
358	Statistik	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	0	Dinas Kominfo	-
359	Statistik	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	1	Dinas Kominfo	
360	Statistik	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	100	Dinas Kominfo	
361	Statistik	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	100	Dinas Kominfo	
362	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	100	Dinas Kominfo	
363	Persandian	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapka prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	100	Dinas Kominfo	
364	Persandian	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	100	Dinas Kominfo	
365	Persandian	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	100	Dinas Kominfo	
366	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	4335	Dinas Kebudayaan	
367	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	186	Dinas Kebudayaan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
368	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	1497	Dinas Kebudayaan	
369	Kebudayaan	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	1023	Dinas Kebudayaan	
370	Kebudayaan	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	231	Dinas Kebudayaan	
371	Kebudayaan	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	0	Dinas Kebudayaan	-
372	Kebudayaan	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	Dinas Kebudayaan	-
373	Kebudayaan	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi),	0	Dinas Kebudayaan	-
374	Kebudayaan	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	0	Dinas Kebudayaan	-
375	Kebudayaan	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	Dinas Kebudayaan	-
376	Kebudayaan	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	0	Dinas Kebudayaan	-
377	Kebudayaan	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	Dinas Kebudayaan	-
378	Kebudayaan	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1	Dinas Kebudayaan	
379	Kebudayaan	Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	1	Dinas Kebudayaan	
380	Kebudayaan	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	9	Dinas Kebudayaan	
381	Kebudayaan	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	0	Dinas Kebudayaan	-
382	Kebudayaan	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	120	Dinas Kebudayaan	
383	Kebudayaan	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	2	Dinas Kebudayaan	
384	Kebudayaan	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	Dinas Kebudayaan	
385	Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	2,958	Biro Organisasi	
386	Perpustakaan	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	0,102	Biro Organisasi	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
387	Perpustakaan	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,003	Biro Organisasi	
388	Perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	6,983	Biro Organisasi	
389	Perpustakaan	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	2	Biro Organisasi	
390	Perpustakaan	Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun	309	Biro Organisasi	
391	Perpustakaan	Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah	435	Biro Organisasi	
392	Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah	10	Biro Organisasi	
393	Perpustakaan	Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah	329	Biro Organisasi	
394	Perpustakaan	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	25	Biro Organisasi	
395	Perpustakaan	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	Biro Organisasi	Tidak ada
396	Perpustakaan	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	162	Biro Organisasi	
397	Kearsipan	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Biro Umpro	
398	Kearsipan	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	81,81	Biro Umpro	
399	Kearsipan	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100	Biro Umpro	
400	Kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	47,05	Biro Umpro	
401	Kearsipan	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	100	Biro Umpro	
402	Kearsipan	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	100	Biro Umpro	
403	Kearsipan	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	100	Biro Umpro	
404	Kearsipan	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	100	Biro Umpro	
405	Kearsipan	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	100	Biro Umpro	
406	Kearsipan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	0	Biro Umpro	LKD Provinsi Bali tidak memiliki arsip yang bersifat tertutup
407	Kelautan dan Perikanan	Jumlah laut pedalaman teritorial dan perairan kepulauan yang dikelola sumber daya ikannya	2	Dinas Kelautan dan Perikanan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(wpp)			
408	Kelautan dan Perikanan	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 - 30 GT	172	Dinas Kelautan dan Perikanan	
409	Kelautan dan Perikanan	Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	50	Dinas Kelautan dan Perikanan	
410	Kelautan dan Perikanan	Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5-30 GT	1	Dinas Kelautan dan Perikanan	
411	Kelautan dan Perikanan	Jumlah kapal yang terdaftar	49	Dinas Kelautan dan Perikanan	
412	Kelautan dan Perikanan	Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan	0	Dinas Kelautan dan Perikanan	Belum dapat mengeluarkan izin terkait usaha perikanan budidaya karena berdasarkan dokumen RZWP3K Provinsi Bali belum mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri
413	Kelautan dan Perikanan	Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	73,57	Dinas Kelautan dan Perikanan	
414	Kelautan dan Perikanan	Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan koservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	4	Dinas Kelautan dan Perikanan	
415	Kelautan dan Perikanan	Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	5	Dinas Kelautan dan Perikanan	
416	Kelautan dan Perikanan	Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan	8	Dinas Kelautan dan Perikanan	
417	Kelautan dan Perikanan	Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku	41	Dinas Kelautan dan Perikanan	
418	Kelautan dan Perikanan	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	0	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tidak mendapatkan anggaran
419	Kelautan dan Perikanan	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	40	Dinas Kelautan dan Perikanan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
420	Kelautan dan Perikanan	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	0	Dinas Kelautan dan Perikanan	-
421	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	472	Dinas Pariwisata	
422	Pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	103	Dinas Pariwisata	
423	Pariwisata	Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi	0	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata Provinsi Bali tidak memiliki data terkait nilai realisasi investasi pariwisata tersebut
424	Pariwisata	Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata	0	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata Provinsi Bali tidak memiliki data terkait nilai realisasi investasi pariwisata tersebut
425	Pariwisata	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi	12257	Dinas Pariwisata	
426	Pariwisata	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	2,87	Dinas Pariwisata	
427	Pariwisata	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi	2,14	Dinas Pariwisata	
428	Pariwisata	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	4790568	Dinas Pariwisata	
429	Pariwisata	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	8673009	Dinas Pariwisata	
430	Pariwisata	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	10	Dinas Pariwisata	
431	Pariwisata	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0	Dinas Pariwisata	Tidak terlaksanakan karena tidak dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023
432	Pariwisata	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	0	Dinas Pariwisata	Tidak ada
433	Pariwisata	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	63,43	Dinas Pariwisata	
434	Pariwisata	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	44	Dinas Pariwisata	
435	Pariwisata	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	9	Dinas Pariwisata	
436	Pertanian	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	139	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
437	Pertanian	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman horikultura	173	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
438	Pertanian	Dokumen pengawasan benih yang beredar	191	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
439	Pertanian	Prasarana pertanian yang digunakan	15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
440	Pertanian	Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	118959	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
441	Pertanian	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana	118693	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
442	Pertanian	Penerbitan izin usaha pertanian	2647	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
443	Pertanian	Persentase sarana pertanian yang digunakan	100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
444	Pertanian	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
445	Pertanian	Persentase jumlah usulan usaha pertanian	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Tidak melaksanakan kegiatan dimaksud

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
446	Kehutanan	Dokumen penataan hutan wilayah KPH	4	Dinas KLH	
447	Kehutanan	Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek	4	Dinas KLH	
448	Kehutanan	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	35068	Dinas KLH	
449	Kehutanan	Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi	1783,91	Dinas KLH	
450	Kehutanan	Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)	0,52	Dinas KLH	
451	Kehutanan	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6	0	Dinas KLH	Tahun 2023 monev industri primer tidak dilaksanakan
452	Kehutanan	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	100	Dinas KLH	
453	Kehutanan	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	6	Dinas KLH	
454	Kehutanan	Pemulihan ekosistem pada Tahura	27,16	Dinas KLH	
455	Kehutanan	Menurunnya gangguan kawasan Tahura	0	Dinas KLH	-
456	Kehutanan	Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan	25	Dinas KLH	
457	Kehutanan	Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan	20	Dinas KLH	
458	Kehutanan	jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan	9	Dinas KLH	
459	Kehutanan	Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan sosial	25	Dinas KLH	
460	Kehutanan	terusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	0,711	Dinas KLH	
461	Kehutanan	Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor	1	Dinas KLH	
462	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi	0	Disnaker ESDM	Tidak melaksanakan karena Kewenangan Pemerintah Pusat
463	Energi dan Sumber Daya Mineral	Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi	1	Disnaker ESDM	
464	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	0	Disnaker ESDM	Tidak melaksanakan karena Kewenangan Pemerintah Pusat
465	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	0	Disnaker ESDM	Tidak melaksanakan karena Kewenangan Pemerintah Pusat
466	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah	0	Disnaker ESDM	Tidak melaksanakan karena Kewenangan Pemerintah Pusat
467	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi	0	Disnaker ESDM	-
468	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	2	Disnaker ESDM	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
469	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait IUJP	2	Disnaker ESDM	
470	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009	0	Disnaker ESDM	Dalam proses penyusunan
471	Energi dan Sumber Daya Mineral	Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan	0	Disnaker ESDM	Tidak melaksanakan kegiatan dimaksud
472	Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun	0	Disnaker ESDM	Tidak melaksanakan kegiatan dimaksud
473	Energi dan Sumber Daya Mineral	SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	0	Disnaker ESDM	Pada tahun 2023 tidak ada menerbitkan izin usaha niaga bahan bakar nabati, hanya ada 1 perusahaan yang terdaftar pada tahun 2018 dan berlaku 10 tahun
474	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan)	0	Disnaker ESDM	Tidak ada
475	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	0	Disnaker ESDM	Kewenangan Pusat
476	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait penetapan tarif tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	0	Disnaker ESDM	Kewenangan Pusat
477	Energi dan Sumber Daya Mineral	Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	0	Disnaker ESDM	Mengikuti tariff dasar pusat
478	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegangan rendah	12	Disnaker ESDM	
479	Energi dan Sumber Daya Mineral	Pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu	0	Disnaker ESDM	Tidak melaksanakan karena sejak Oktober 2018 rasio elektrifikasi rumah tangga di bali sudah 100%
480	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	100	Dinas Perindag	
481	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	100	Dinas Perindag	
482	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ fasilitas peningkatan kapasitas terkait	100	Dinas Perindag	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		ekspor			
483	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru	87,5	Dinas Perindag	
484	Perdagangan	Jumlah kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan citra produk ekspor	1	Dinas Perindag	
485	Perdagangan	Jumlah penanganan pengaduan konsumen	14	Dinas Perindag	
486	Perdagangan	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi	275	Dinas Perindag	
487	Perdagangan	Jumlah komoditi potensial yang dipantau	3	Dinas Perindag	
488	Perdagangan	Indeks Kinerja BPSMB	3	Dinas Perindag	
489	Perdagangan	Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan	0	Dinas Perindag	
490	Perdagangan	Persentase rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang diterbitkan	0	Dinas Perindag	-
491	Perdagangan	Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan	0	Dinas Perindag	-
492	Perdagangan	Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat	0	Dinas Perindag	SIUP MB Gol B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung minum di tempat, diterbitkan oleh Bupati/Walikota
493	Perdagangan	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	100	Dinas Perindag	
494	Perdagangan	Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi	25	Dinas Perindag	
495	Perdagangan	Jumlah barang beredar yang diawasi	103	Dinas Perindag	
496	Perdagangan	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Tersedianya bangunan pusat distribusi	0	Dinas Perindag	Provinsi Bali belum ada Pusat Distribusi
497	Perdagangan	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Telah ditetapkannya badan usaha pengelola pusat distribusi	0	Dinas Perindag	Provinsi Bali belum ada Pusat Distribusi
498	Perdagangan	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Beroperasinya pusat industri	0	Dinas Perindag	Provinsi Bali belum ada Pusat Distribusi
499	Perdagangan	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani	0	Dinas Perindag	Provinsi Bali belum ada Pusat Distribusi
500	Perdagangan	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3	Dinas Perindag	
501	Perdagangan	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga Kemendag	100	Dinas Perindag	
502	Perindustrian	Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	100	Dinas Perindag	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
503	Perindustrian	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan	0	Dinas Perindag	Tidak mengeluarkan izin usaha industri (IUI) besar karena semua sudah melalui OSS RBA dan persetujuan untuk industri besar ada di Kementerian Perindustrian RI
504	Perindustrian	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIU) bagi industri besar yang diterbitkan	0	Dinas Perindag	Tidak mengeluarkan izin usaha perluasan industri (IPIU) besar karena semua sudah melalui OSS RBA dan persetujuan untuk industri besar ada di Kementerian Perindustrian R
505	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	0	Dinas Perindag	Belum memiliki izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi
506	Perindustrian	Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota	100	Dinas Perindag	
507	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0	Disnaker ESDM	Tidak mendapatkan target/kuota penempatan transmigrasi
508	Transmigrasi	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	Disnaker ESDM	Tidak mendapatkan target/kuota penempatan transmigrasi
509	Transmigrasi	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	0	Disnaker ESDM	Tidak mendapatkan target/kuota penempatan transmigrasi

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

No.	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas = 161326. Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang	81,80168	Disdikpora	

No.	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			bersangkutan = 197216			
2	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus = 2200. Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas pada provinsi yang bersangkutan = 5084	43,27301	Disdikpora	
3	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di seluruh provinsi = 9344. Jumlah Penduduk provinsi = 4327276	2,159326	Dinas Kesehatan	
4	Kesehatan	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan provinsi yang terakreditasi = 75. Jumlah RS provinsi = 75	100	Dinas Kesehatan	
5	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun = 1640599. Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana = 1640599	100	Dinas Kesehatan	
6	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar = 0. Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB = 0	0	Dinas Kesehatan	Tidak Terjadi Kejadian Luar Biasa
7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan provinsi (ha) = 0. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan provinsi (ha) = 0	0	Dinas PUPR Perkim	Kewenangan berada di BWS
8	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi (m) = 0. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan provinsi (m) = 0	0	Dinas PUPR Perkim	Kewenangan ada di BWS

No.	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
9	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi danelihara (ha) di tahun eksisting = 6808. luas daerah irigasi kewenangan provinsi = 9271	73,43329	Dinas PUPR Perkim	
10	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota = 402. Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/ kota di provinsi bersangkutan. = 620	64,83871	Dinas PUPR Perkim	
11	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	Total volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik Regional = 35646.14. Total kapasitas pengolahan limbah SPAL Domestik Regional = 51000	69,89439	Dinas PUPR Perkim	
12	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kemantapan jalan	Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap = 592.44. Panjang jalan keseluruhan di wilayah provinsi = 805.35	73,56305	Dinas PUPR Perkim	
13	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli = 3085. jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi = 174500	1,767908	Dinas PUPR Perkim	
14	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 450. Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 450	100	Dinas PUPR Perkim	
15	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 81. Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 81	100	Dinas PUPR Perkim	

No.	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
16	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani = 7.04. Luas kawasan kumuh 10-15 Ha = 206.93	3,402117	Dinas PUPR Perkim	
17	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Jumlah satuan perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 595. Jumlah satuan perumahan = 595	100	Dinas PUPR Perkim	
18	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan = 5. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 5	100	Satpol PP	
19	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 22. Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 22	100	Satpol PP	
20	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun = 2. Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun = 2	100	BPBD	
21	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan pra bencana	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana = 9. Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi = 9	100	BPBD	
22	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana = 9. Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana = 9	100	BPBD	
23	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 206. Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti = 206	100	Dinas Sosial P3A	
24	Sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 3039. Jumlah Anak Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti = 3039	100	Dinas Sosial P3A	
25	Sosial	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 101. Populasi Lanjut Usia Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti =	100	Dinas Sosial P3A	

No.	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			101			
26	Sosial	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 0. Populasi Gelandangan dan Pengemis Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti = 0	0	Dinas Sosial P3A	Sampai saat ini Provinsi Bali belum memiliki Panti gelandangan dan Pengemis
27	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 1769. Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah provinsi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi = 1769	100	Dinas Sosial P3A	
28	Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	Jumlah kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja = 9. Jumlah kabupaten/kota = 9	100	Disnaker ESDM	
29	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 211663. Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 2690237	7,86782	Disnaker ESDM	
30	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 40221338.8. Jumlah tenaga kerja = 2690237	1495,085	Disnaker ESDM	
31	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 29111. Jumlah Perusahaan = 49554	58,74601	Disnaker ESDM	
32	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan = 2890. Jumlah pencaker yang terdaftar = 13541	21,34259	Disnaker ESDM	

No.	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
33	Tenaga Kerja	Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	$\sum$ Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan pada tahun n = 49554. $\sum$ Total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun n = 49554	100	Disnaker ESDM	
34	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD = 271378532050. Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD = 7932886363138	3,420931	Dinas Sosial P3A	
35	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat provinsi yang didampingi = 188. Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 608800	3,088042	Dinas Sosial P3A	
36	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 192. Jumlah penduduk perempuan = 2194500	8,749146	Dinas Sosial P3A	
37	Pangan	Persentase cadangan pangan	Jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi = 289.83. Jumlah target cadangan pangan pemerintah provinsi yang ditetapkan = 289.83	100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
38	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 0. Seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 0	0	Dinas PUPR Perkim	Kewenangan berada di kabupaten/kota
39	Pertanahan	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu = 1364. Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum = 1364	100	Dinas PUPR Perkim	
40	Pertanahan	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota.	Luas pemanfaatan adalah luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) lintas kab/ kota = 0. Luas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan = 0	0	Dinas PUPR Perkim	saat ini belum ada KPPR provinsi yang diterbitkan

No.	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
41	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi		71,38	Dinas KLH	Nilai IKLH sementara (belum ditetapkan dalam SK KLHK oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK RI)
42	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi = 0. usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 10	0	Dinas KLH	
43	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun = 2. 2 kali = 2	100	DPMD Dukcapil	
44	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemanfaatan data kependudukan	PD Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = 6. Jumlah PD Provinsi = 31	19,35484	DPMD Dukcapil	
45	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 2. Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) = 2	100	DPMD Dukcapil	dikarenakan sudah tidak terdapat desa tertinggal, maka sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD 2023, diisi jumlah desa berkembang pada elemen data pembilang dan penyebut
46	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 30. Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = 32	93,75	DPMD Dukcapil	
47	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)		2,07	DPMD Dukcapil	

No.	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
48	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern = 386599. Jumlah Pasangan Usia Subur = 614830	62,87901	DPMD Dukcapil	
49	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 78765. Jumlah Pasangan Usia Subur = 614830	12,81086	DPMD Dukcapil	
50	Perhubungan	Rasio konektivitas Provinsi		0,797	Dinas Perhubungan	-
51	Perhubungan	V/C Ratio di Jalan Provinsi		0,52	Dinas Perhubungan	
52	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 28. Jumlah PD = 29	96,55172	Dinas Kominfos	
53	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 62. Jumlah Layanan Publik = 65	95,38462	Dinas Kominfos	
54	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi = 2795811. Jumlah penduduk = 2795811	100	Dinas Kominfos	
55	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset = 3618. Jumlah seluruh koperasi = 5490	65,90164	Diskop UKM	Banyak SDM Pengelola Koperasi tidak menerapkan prinsip berkoperasi, dan banyak pengelola belum berkompeten dan bersertifikasi

No.	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
56	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha = 28. Jumlah usaha kecil keseluruhan = 36837	0,076011	Diskop UKM	Banya Usaha Kecil yang memilih mandiri untuk mengelola usahanya dan juga UMKM tidak wajib lapor, sehingga Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali Kesulitan untuk mendata berapa usaha kecil di Bali
57	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di provinsi	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di provinsi = 2152000000000. Jumlah investasi tahun n-1 di provinsi = 12453000000000	17,28098	DPMPTSP	Realisasi s/d TW III karena data belum di kirim dari BKPM RI
58	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi = 597388. Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi = 1006892	59,3299	Disdikpora	
59	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di provinsi = 860382. jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi = 1006892	85,44928	Disdikpora	
60	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga		149	Disdikpora	
61	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 29. jumlah PD = 29	100	Dinas Kominfos	
62	Statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 29. jumlah PD = 29	100	Dinas Kominfos	
63	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi = 571. Jumlah area penilaian = 645	88,52713	Dinas Kominfos	
64	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan = 231. Jumlah	100	Dinas Kebudayaan	-

No.	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			cagar budaya yang ditetapkan = 231			
65	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		67,39	Biro Organisasi	
66	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		62,7	Biro Organisasi	
67	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		82,22	Biro Organisasi	Belum optimalnya sarana prasarana dan sumber daya manusia kearsipan
68	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		83,33	Biro Organisasi	Belum optimalnya sarana prasarana dan sumber daya manusia kearsipan
69	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) provinsi = 140448.08. Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan = 126630.66	110,9116	Dinas Kelautan dan Perikanan	
70	Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku		2	Dinas Kelautan dan Perikanan	

No.	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
71	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$(\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1) = 3012097$. Jumlah wisatawan tahun $n-1 = 1778471$	169,3644	Dinas Pariwisata	
72	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	$(\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1) = 620035$. Jumlah wisatawan tahun $n-1 = 8052974$	7,699454	Dinas Pariwisata	
73	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual = 20417736. Jumlah kamar yang tersedia = 29938030	68,2	Dinas Pariwisata	
74	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB = 60262291000000. Total PDRB Berlaku = 2.01956434E+14	29,8392529	Dinas Pariwisata	
75	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 902965. luas panen = 151059	597,7565	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	rumus produktivitas adalah produksi/luas panen dalam satuan ton/Ha tidak dikalikan 100? $902.965/151.059 = 5.98 \text{ ton/ha}$
76	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	jumlah Jumlah kejadian penyakit/kasustahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = -52. Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 690	-7,536232	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	rumus penyakit hewan menular : Jumlah kejadian penyakit/kasustahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)/Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)
77	Kehutanan	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yg diberikan akses legal = 137. jumlah total usulan KTH yang terintegrasi = 137	100	Dinas KLH	
78	Kehutanan	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	Jumlah hutan yang rusak = 9832.77. Jumlah hutan keseluruhan = 132171.47	7,439404	Dinas KLH	

No.	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
79	Kehutanan	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Luas lahan kritis di provinsi yang direhabilitasi (ha) = 2340. Luas Lahan Kritis di provinsi (ha) = 46895	4,989871	Dinas KLH	
80	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda = 4. jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi = 4	100	Disnaker ESDM	
81	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	Jumlah desa yang teraliri listrik = 716. Jumlah desa = 716	100	Disnaker ESDM	
82	Perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Nilai ekspor non migas tahun berjalan – nilai ekspor non migas tahun sebelumnya = - 48447725.66. Nilai ekspor non migas tahun sebelumnya = 361809356.27	-13,3904	Dinas Perindag	
83	Perdagangan	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSKsesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan = 14. Jumlah pengaduan konsumen yang diterimadalam tahun berjalan = 14	100	Dinas Perindag	
84	Perdagangan	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	Jumlah sampel yang sesuai ketentuan = 46. Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun = 46	100	Dinas Perindag	Pengembangan Layanan pengujian belum dapat dilaksanakan akibat dari keterbatasan peralatan dan kompetensi SDM yang belum dapat menyesuaikan dengan perkembangan permintaan ruang lingkup dan parameter pengujian yang membutuhkan anggaran cukup besar.
85	Perdagangan	Tertib Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memiliki SIUP MB TBB = 0. Jumlah pelaku usaha MB TBB = 0	0	Dinas Perindag	Karena tidak ada penerbitan izin SIUP MB TBB
86	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi = 49.115. RDKK = 49.779	98,6661	Dinas Perindag	Proses administrasi dan pelaporan terhadap penebusan pupuk yang kurang fleksibel

No.	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
87	Perdagangan	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan = 66. Jumlah barang beredar yang diawasi = 103	64,07767	Dinas Perindag	Keterbatasan Anggaran
88	Perdagangan	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok		3	Dinas Perindag	
89	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	(Jumlah Industri besar tahun n - Jumlah industri besar tahun n-1) = 6. Jumlah industri besar tahun n-1 = 65	9,230769	Dinas Perindag	
90	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		26,48	Dinas Perindag	
91	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 549. Jumlah izin yang dikeluarkan = 0	0	Dinas Perindag	Disperindag provinsi bali tidak mengeluarkan izin usaha industri besar
92	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Besaryang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 0	0	Dinas Perindag	Saat ini belum melakukan pemantauan terhadap Izin Perluasan Industri (IPIU)
93	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 0	0	Dinas Perindag	RTRW Provinsi Bali sudah menetapkan Kawasan Pengembangan Peruntukan Industri yang berlokasi di Kabupaten Buleleng dan Jembrana (Perda Provinsi Bali No. 8 Tahun 2020)

No.	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait				namun di Kawasan Pengembangan Peruntukan Industri tersebut belum terbangun industry, sehingga belum dilakukan pemantauan dan pengawasan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)
94	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		90	Dinas Perindag	
95	Transmigrasi			0	Disnaker ESDM	Tidak melaksanakan urusan transmigrasi

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No.	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan = 818969605346. Jumlah APBD = 6613665437677	12,38299	BPKAD	
2	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	Jumlah PAD = 4623648871938. Jumlah Pendapatan pada APBD = 6768699641073	68,30926	BPKAD	
3	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures = 3045314360264. jumlah belanja APBD = 6613665437677	46,04579	BPKAD	

No.	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
4	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan		100	Inspektorat	Terbatasnya SDM (sumber Daya Manusia) yang memiliki kualifikasi dan kompetensi terkait dengan akuntansi
5	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		3	Inspektorat	Pemahaman template dan indikator pada masing-masing elemen terlalu sulit untuk bisa dipahami
6	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		3	Inspektorat	Sering terdapat perubahan regulasi/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kapabilitas APIP , serta pemahaman template dan indikator pada masing-masing elemen terlalu sulit untuk bisa dipahami
7	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n = 0. jumlah kontrak keseluruhan tahun n = 26	0	Biro BPJ Perekonomian	Tidak ada pekerjaan insfrastruktur di atas 50M yang ditandatangani pada kuartal pertama
8	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif = 15755. jumlah seluruh pengadaan = 15994	98,505 6896	Biro BPJ Perekonomian	
9	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan = 2817763818942. total belanja operasi dan modal = 5763695796514	48,88814	Biro BPJ Perekonomian	
10	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk	18,54813	Biro BPJ Perekonomian	

No.	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 285242077886. Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 1537848527090			
11	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas = 3064. Seluruh jumlah seluruh pegawai = 4021	76,19995	BKPSDM	Tidak ada masalah
12	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) = 1015. seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 4021	25,24248	BKPSDM	Tidak ada masalah
13	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi = 996. seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 1015	98,12808	BKPSDM	tidak ada masalah
14	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Realisasi Belanja = 6613665437676.5. Total Belanja APBD = 7522393048914	12,0803	BPKAD	Perumusan Pedoman tidak sesuai dengan Sistem & hasil berbeda
15	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Total PAD dalam realisasi = 4623648871937. Total PAD dalam APBD = 4731419182089	2,277759	BPKAD	Perumusan Pedoman tidak sesuai dengan Sistem & hasil berbeda
16	Manajemen Keuangan	Assets management		100	BPKAD	
17	Manajemen Keuangan	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA = 330133723425.37. total belanja anggaran tahun sebelumnya = 6048715842762	5,457914	BPKAD	

No.	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
18	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 3860949757. Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 4568833276	84,50625	BPKAD	
19	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda = 12. total jumlah dokumen yang telah dirinci = 12	100	Dinas Kominfos	

2.2.4. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat isu strategis, kondisi dan permasalahan pembangunan, kerangka makro ekonomi, prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta perkiraan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dana desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2019-2023. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang pada umumnya sering disebut Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam hal ini adalah kegiatan dalam APBD tahun anggaran 2023, disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang : 1) Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; 2) Indikator kinerja sasaran dan target capaiannya.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga penetapan sasaran harus selaras dan mempunyai hubungan logis dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Sasaran bersifat spesifik dan terukur berdasarkan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaiannya. Sasaran yang akan dicapai Pemerintah Provinsi Bali selama Tahun 2023 secara rinci disajikan dalam formulir pengukuran kinerja.

Indikator Kinerja Utama adalah tolok ukur kinerja utama berupa indikator pelaksanaan sasaran/program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-Perangkat Daerah). Indikator Kinerja Utama merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Bali Tahun 2018-2023 melalui kompilasi seluruh sasaran strategis dari seluruh Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama ini memuat aspek, fokus, indikator dan penjelasan tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan dari Pemerintah Provinsi Bali yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*) sebagaimana telah direncanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Bali Tahun 2018-2023, Arah Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Skala Prioritas APBD Provinsi Bali berdasarkan bidang kewenangan pemerintahan. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari 22 (dua puluh dua) aspek yang menjadi prioritas pembangunan daerah Bali.

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Bali ditetapkan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, berisi program utama, sasaran yang hendak dicapai dengan target indikator *output* dan atau *outcome* pada tabel terlampir.

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan. Pencapaian Indikator Sasaran yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Bali selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2023
1	2	3	4
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas layak	Tingkat Inflasi Bali	3.00%
		Persentase Ketersediaan pangan utama	100%
2	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan local	Nilai Tambahan Produk Pertanian (NTPP)	35%
3	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	Nilai Tukar Petani (NTP)	106%
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	119.2%
4	Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali	Umur Harapan Hidup	72,5%
5	Terwujudnya wajib belajar 12 Tahun yang berkualitas	Rata-rata lama sekolah	11.40%
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18 Tahun	83.3%
6	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	Angka harapan lama sekolah	13.75%
7	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi	Indeks Pembangunan Manusia	77,78%
8	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali	Indeks Daya Saing SDM Bali	74.55%
9	Terwujudnya kesejahteraan sosial krama bali	Persentase Kemiskinan	3.75%
10	Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing	Tingkat pengangguran terbuka	2.32%
12	Meningkatnya kompetensi tenaga	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76.80%
13	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Indeks Kebahagiaan	74,98%
14	Meningkatnya pasar Pariwisata Bali	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	25.93%
15	Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global	Jumlah Devisa sektor pariwisata	USD 3.323.470
16	Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan	Indeks Kepuasan wisatawan	85%
17	Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	5%
18	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya bali	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali	2.05%
19	Meningkatnya kuantitas dan kualitas indfrastruktur dasar, laut dan udara secara terintegrasi an terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Indeks konektivitas	2,3 Jam/100km
20	Meningkatnya rasa aman Krama Bali dan	Angka Kriminalitas	2,262 Kasus

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2023
1	2	3	4
	Wisata melakukan aktivitas kehidupannya		
21	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Indeks demokrasi	81%
		Indeks Pemberdayaan gender	65
22	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan	Persentase Daya dukung lingkungan	17,82%
23	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72.40%
		Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	11.65%
		Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	1.4%
24	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	73

Sumber : RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023

b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

Realisasi pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari 22 (dua puluh dua) aspek yang menjadi prioritas pembangunan daerah Bali menuju Target RPJMD Semesta Berncana Provinsi Bali Tahun 2023 dapat disajikan dalam table terlampir, dan pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023
1	2	3	4	5
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas layak	Tingkat Inflasi Bali	3.00%	1,68%
		Persentase Ketersediaan pangan utama	100%	100%
2	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal	Nilai Tambahan Produk Pertanian (NTPP)	35%	35%
3	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	Nilai Tukar Petani (NTP)	106%	99,04%
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	119.2%	101,81%
4	Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali	Umur Harapan Hidup	72,5%	74,88%
5	Terwujudnya wajib belajar 12 Tahun yang berkualitas	Rata-rata lama sekolah	11.40%	9,45%
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18 Tahun	83.3%	84,73%
6	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	Angka harapan lama sekolah	13.75%	13,58%
7	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi	Indeks Pembangunan Manusia	77,78%	78.01%
8	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali	Indeks Daya Saing SDM Bali	74.55%	80,00%
9	Terwujudnya kesejahteraan sosial krama bali	Persentase Kemiskinan	3.75%	4,25%
10	Terwujudnya tenaga kerja yang berkompoten dan berdaya saing	Tingkat pengangguran terbuka	2.32%	2,69%
11	Meningkatnya kompetensi tenaga	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76.80%	77,08%

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023
1	2	3	4	5
12	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Indeks Kebahagiaan	74,98%	71.44%
13	Meningkatnya pasar Pariwisata Bali	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	25.93%	54%
14	Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global	Jumlah Devisa sektor pariwisata	USD 3.323.470	USD 192.492.781
15	Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan	Indeks Kepuasan wisatawan	85%	87,23%
16	Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	5%	5,66%
17	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya bali	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali	2.05%	26,62%
18	Meningkatnya kuantitas dan kualitas indfrastruktur dasar, laut dan udara secara terintegrasi an terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Indeks konektivitas	2,3 Jam/100 km	2,3 Jam/100 km
19	Meningkatnya rasa aman Krama Bali dan Wisata melakukan aktivitas kehidupannya	Angka Kriminalitas	2,262 Kasus	1,470 Kasus
20	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Indeks domokrasi	81%	83,21%
21		Indeks Pemberdayaan gender	65	72,29%
22	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan	Persentase Daya dukung lingkungan	17,82%	45,42
23	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72.40%	70,89
		Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	11.65%	7.44
		Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	1.4%	3,8%
24	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	73	91.41

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023

c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
1	2	3	4	5		
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas layak	Tingkat Inflasi Bali	3.00	5,39	4	5
		Persentase Ketersediaan pangan utama	100	92,11	3.00%	1,68%
2	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)	33	14,81	100%	100%
3	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	Nilai Tukar Petani (NTP)	105.5	97,05	35%	35%
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	118.5	98,13	106%	99,04%
4	Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali	Umur Harapan Hidup	72,5	72,60	119.2%	101,81%
5	Terwujudnya wajib belajar 12 Tahun yang berkualitas	Rata-rata lama sekolah	10.84	9,39	72,5%	74,88%
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk	83.11	83,84	11.40%	9,45%

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
1	2	3	4	5		
		usia 16-18 Tahun				
6	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	Angka harapan lama sekolah	13.91	12,43	83.3%	84,73%
7	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi	Indeks Pembangunan Manusia	76.93	76,44	13.75%	13,58%
8	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali	Indeks Daya Saing SDM Bali	69.09	69.09	77,78%	78.01%
9	Terwujudnya kesejahteraan sosial krama bali	Persentase Kemiskinan	4.25	4,57	74.55%	80,00%
10	Terwujudnya tenaga kerja yang berkompoten dan berdaya saing	Tingkat pengangguran terbuka	3.19	4.80	3.75%	4,25%
11	Meningkatnya kompetensi tenaga	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76.55	76.86	2.32%	2,69%
12	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Indeks Kebahagiaan	73.98	71,44	76.80%	77,08%
13	Meningkatnya pasar Periwisata Bali	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	20.86	17,64	74,98%	71.44%
14	Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global	Jumlah Devisa sektor pariwisata	2.642.000	1.223.000	25.93%	54%
15	Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan	Indeks Kepuasan wisatawan	83	84,5	USD 3.323.470	USD 192.492.781
16	Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	3.10	3.05	85%	87,23%
17	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya bali	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali	12.5	13.5	5%	5,66%
18	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar, laut dan udara secara terintegrasi an terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Indeks konektivitas	2,4	2.5	2.05%	26,62%
19	Meningkatnya rasa aman Krama Bali dan Wisata melakukan aktivitas kehidupannya	Angka Kriminalitas	2.731	1.793	2,3 Jam/100 km	2,3 Jam/100 km
20	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Indeks demokrasi	81	75.35	2,262 Kasus	1,470 Kasus
21		Indeks Pemberdayaan gender	64.9	72.17	81%	83,21%
22	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan	Persentase Daya dukung lingkungan	17,64	45,42	65	72,29%
23	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63.77	70,89	17,82%	45,42
		Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	14.8	7.44	72.40%	70,89
		Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	1.2	1.26	11.65%	7.44
24	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	74	72,16	1.4%	3,8%

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023

d. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2022	2023			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2023 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkat Inflasi Bali	5,39	3.00%	1,68%	179,64%	3,00	179,64%
2	Ketersediaan pangan utama	92,11	100%	100%	100%	100.00	100%
3	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)	14,81	35%	35%	100%	35.00	100%
4	Nilai Tukar Petani (NTP)	97,05	106%	99,04%	93,77%	106.00	93,77%
5	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	98,13	119.2%	101,81%	85,41%	119.20	85,41%
6	Umur Harapan Hidup	72,60	72,5%	74,88%	103,38%	72.5	103,38%
7	Rata-rata lama sekolah	9,39	11.40%	9,45%	82,89%	11,40	82,89%
8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18 Tahun	83,84	83.3%	84,73%	101,71%	83,30	101,71%
9	Angka harapan lama sekolah	12,43	13.75%	13,58%	98,76%	13,75	98,76%
10	Indeks Pembangunan Manusia	76,44	77,78%	78.01%	101,07%	77,78	101,07%
11	Indeks Daya Saing SDM Bali	69.09	74.55%	80,00%	107,31%	74.55	107,31%
12	Persentase Kemiskinan	4,57	3.75%	4,25%	88,23%	3,75	88,23%
13	Tingkat pengangguran terbuka	4.80	2.32%	2,69%	86,24	2,32	86,24
14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76.86	76.80%	77,08%	99,63%	76,80	99,63%
15	Indeks Kebahagiaan	71,44	74,98%	71.44%	96,04%	74,98	96,04%
16	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	17,64	25.93%	54%	208,25%	25.93	208,25%
17	Jumlah Devisa sektor pariwisata	1.223.000	USD 3.323.470	USD 192.492.781	6400%	3,323,470	6400%
18	Indeks Kepuasan wisatawan	84,5	85%	87,23%	103,32%	85	103,32%
19	Pertumbuhan Ekonomi	3.05	5%	5,66%	113,2%	5.00	113,2%

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2022	2023			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2023 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali	13.5	20.05%	26,62%	132,76%	20.05	132,76%
21	Indeks konektivitas	2.5	2,3 Jam/100km	2,3 Jam/100 km	100%	2.3	100%
22	Angka Kriminalitas	1.793	2,262 Kasus	1,470 Kasus	153,87%	2.262	153,87%
23	Indeks demokrasi	75.35	81%	83,21%	102,72%	81	102,72%
24	Indeks Pemberdayaan gender	72.17	65	72,29%	111,21%	65	111,21%
25	Persentase Daya dukung lingkungan	45,42	17,82%	45,42	254,88%	17.82	254,88%
26	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,89	72.40%	70,89	102,72%	64,34	102,72%
27	Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	7.44	11.65%	7.44	156,58%	11.65	156,58%
28	Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	1.26	1.4%	3,8%	271,42%	1.4	271,42%
29	Indeks Reformasi Birokrasi	72.16	73	91.41	125,21%	73	125,21%

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

1. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Bali 2023

Dalam Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023, ada beberapa ada beberapa indikator kinerja utama tidak dijabarkan dibawah, dikarenakan indikator tersebut telah dijelaskan pada Capaian Kinerja Makro pada halaman diatas, seperti : **Inflasi, Gini Ratio, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi**. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2018 s.d 2023 dijabarkan secara umum, mengingat indikator satu dengan yang lain sama-sama mendukung sasaran pada RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 s.d 2023.

Tabel Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas layak, Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan local, Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali” **Perbandingan Capaian/Realisasi Misi RPJMD Semester Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 s.d. Tahun 2023**

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2022	2023			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2023 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ketersediaan pangan utama	92,11	100	100	100%	100.00	100%
2	Nilai Tambahan Produk Pertanian (NTPP)	14,81	35	35	100%	35.00	100%
3	Nilai Tukar Petani (NTP)	97,05	106	99,04	93,04%	106.00	93,04%
4	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	98,13	119.2	101.81	82,89%	119.20	82,89%

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023

Ketersediaan Pangan utama dapat dilihat dari :

1. Komponen peningkatan produktifias tanaman pangan dan holtikultura;
2. Peningkatan Produktivitas Perkebunan;
3. Peningkatan Populasi Ternak;
4. Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan; dan
5. Pertumbuhan Volume Pemasaran Komoditas Pertanian.

1. Komponen peningkatan produktifias tanaman pangan dan holtikultura

Produktivitas Padi pada tahun 2023 dan 2022 untuk Provinsi Bali mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 - 2021, hal ini disebabkan oleh meningkatnya luas panen dari tahun 2022 seluas 112.321 Ha dan pada tahun 2023 seluas 123.707 Ha dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi Padi tahun 2022 dan tahun 2023 dengan jumlah 680.602 ton pada tahun 2022 dan 749.990 ton tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun – tahun sebelumnya, produktivitas pada tahun 2023 6.59 ton/Ha dan 6.63 ton/ha pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun – tahun sebelumnya hal ini disebabkan oleh peningkatan luas panen padi dan inovasi teknologi budidaya pertanian dan penggunaan benih bersertifikat.

Pada Produktivitas komoditas Jagung mengalami penurunan produktivitas pada tahun 2023 sebesar 4.25 ton/Ha dibandingkan tahun 2022 sebesar 4.32 Ku/Ha, hal ini disebabkan oleh adanya penurunan luas panen pada tahun 2022 seluas 15.734 Ha sedangkan pada tahun 2023

seluas 13.476 Ha, serta anomali iklim dan serangan OPT yang menyebabkan panen jagung tidak optimal.

Pada produktivitas komoditas Kedelai mengalami peningkatan produktivitas pada tahun 2023 sebesar 1.65 ton/Ha, dibandingkan tahun 2022 sebesar 1.57 ton/Ha, hal ini disebabkan oleh bertambahnya luas panen yang mana tahun 2023 seluas 2.761 Ha sedangkan pada tahun 2022 seluas 2.076 Ha selain bertambahnya luas panen, penggunaan benih yang bersertifikat yang toleran terhadap perubahan iklim.

Produktivitas komoditas bawang mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 302.32 ton/Ha dibandingkan tahun 2022 sebesar 246.23 ton/Ha, hal ini disebabkan oleh inovasi penerapan teknologi budidaya pertanian, petani bawang melakukan penyesuaian penanaman dengan anomali iklim yang terjadi.

Produktivitas tanaman cabe mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 7.50 ton/Ha dibandingkan tahun 2022 sebesar 7.95 ton/Ha, hal ini disebabkan oleh terjadinya anomali iklim, hal ini berakibat turunya produksi sebesar 4.910 ton, yang mana pada tahun 2023 produksi komoditas cabe sebesar 23.408 ton dan pada tahun 2022 sebesar 28.318 ton.

2. Peningkatan Produktivitas Perkebunan

Pada tahun 2023 produktivitas komoditas perkebunan mengalami peningkatan sebesar 4% dibandingkan tahun 2022 sebesar -1,58% , yang mana produktivitas tahun 2023 sebesar 751 Kg/Ha/Thn, dibandingkan tahun 2022 sebesar 750 Kg/Ha/Thn, hal ini disebabkan oleh terjadinya anomali iklim sepanjang tahun 2023 sehingga mempengaruhi produksi beberapa komoditas penting selain itu faktor lainnya adalah usia tanaman yang lebih dari 20 tahun dan serangan OPT.

3. Peningkatan Populasi Ternak

Populasi Ternak Bali mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 926.754 Satuan Ternak (ST), dibandingkan tahun 2022 sebesar 892.938 Satuan Ternak (ST) atau 3,79% disebabkan oleh berhasilnya cakupan vaksinasi PMK yang dilaksanakan pada tahun 2022 sehingga pada tahun 2023 Provinsi Bali bebas dari penyakit kuku dan mulut (PMK).

4. Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan

Skor pola pangan harapan pada tahun 2023 mengalami peningkatan realisasi sebesar 92,2 dengan capaian 96,04% dibandingkan tahun 2022 sebesar 88,3 hal ini disebabkan oleh

meningkatnya kualitas konsumsi pangan pada kelompok Pangan umbi-umbian, Pangan Hewani, Kacang -kacangan beserta sayur dan buah dan daya beli masyarakat yang sudah membaik dari tahun tahun sebelumnya sehingga bisa memenuhi keberagaman konsumsi pangan yang dibutuhkan.

5. Pertumbuhan Volume Pemasaran Komoditas Pertanian

Pada tahun 2023 volume pemasaran produk pertanian dengan realisasi 50,55% dibandingkan tahun 2022 dengan realisasi -3,56%, pada periode tahun 2022 neraca perdagangan mengalami koreksi sangat tinggi akibat terjadinya pandemic covid 19 yang berlangsung selama 2 tahun, pada periode tahun 2023 peningkatan neraca perdagangan disebabkan oleh meningkatnya permintaan pasar luar negeri sebagai akibat terjadinya elnino di kawasan sentral perkebunan seperti Pantai Gading dan Malaysia sehingga bahan baku untuk pengolahan menjadi sedikit dipasaran. Peningkatan pada variable keberhasilan “**Ketersediaan Pangan Utama**” tidak terlepas dari peningkatan yang terjadi pada komponen diatas, pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 100%, bila dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 92,11% dengan capaian akhir pada RPJMD mencapai target yang ditetapkan.

Perkembangan indeks **Nilai Tukar Petani (NTP)** Provinsi Bali tercatat 99,04 pada bulan Agustus 2023, naik sebesar 0,39 persen dibandingkan kondisi bulan sebelumnya yang tercatat 98,65. Kenaikan ini dipengaruhi oleh kenaikan indeks yang diterima petani (It) sebesar 0,48 persen dari 115,48 menjadi 116,03 pada bulan Agustus 2023, lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks yang dibayar petani (Ib) yang tercatat sebesar 0,08 persen dari 117,06 menjadi 117,16.

Indeks NTP Provinsi Bali pada bulan Agustus 2023 berada di bawah angka 100. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam tingkatan tertentu nilai tukar produk yang dihasilkan petani belum mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga petani, yang terdiri dari konsumsi rumah tangga dan biaya produksi pertanian. Dari lima subsektor yang menjadi komponen penyusun indeks NTP, tiga subsektor yang mampu mencapai angka 100 pada bulan Agustus 2023 yaitu subsektor tanaman perkebunan rakyat, subsektor peternakan, dan subsektor perikanan, sementara dua subsektor lainnya masih berada di bawah angka 100 yaitu subsektor tanaman pangan dan subsektor tanaman hortikultura.

Indeks NTP Januari-Agustus 2023 menggambarkan NTP yang terjadi selama tahun berjalan. Indeks NTP Januari-Agustus 2023 tercatat lebih tinggi 3,68 persen dibandingkan indeks NTP tahun 2022 pada periode yang sama. Kenaikan NTP paling tinggi terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat yang naik setinggi 9,12 persen, diikuti kenaikan pada subsektor tanaman pangan setinggi 6,83 persen, kenaikan indeks NTP subsektor perikanan setinggi 0,77 persen, dan kenaikan subsektor peternakan setinggi 0,77 persen. Sementara itu, indeks NTP berjalan subsektor hortikultura tercatat mengalami penurunan sedalam 3,36 persen dibandingkan indeks NTP tahun 2022 pada periode yang sama. Indeks NTP Januari-Agustus 2023 terbesar tercatat pada Subsektor Perikanan yakni sebesar 101,90 dan terendah terjadi pada Subsektor Tanaman Pangan yakni sebesar 96,51.

Indeks Nilai Tukar Petani Provinsi Bali Januari-Agustus 2023 per Subsektor dan Gabungan (2018=100)

Subsektor	NTP Jan-Des 2022	Jan-Ags 2022			Jan-Ags 2023			% Perubahan
		It	Ib	NTP	It	Ib	NTP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Tanaman Pangan	91,18	100,56	111,32	90,33	112,42	116,49	96,51	6,83
2. Hortikultura	99,33	111,74	111,45	100,26	112,68	116,30	96,89	-3,36
3. Tanaman Perkebunan Rakyat	92,45	101,15	110,10	91,87	115,62	115,34	100,25	9,12
4. Peternakan	99,10	109,67	111,22	98,61	116,08	116,83	99,37	0,77
5. Perikanan	100,60	110,40	109,17	101,12	120,35	118,10	101,90	0,77
a. Perikanan Tangkap	100,62	110,57	109,12	101,33	120,36	118,54	101,53	0,19
b. Perikanan Budidaya	100,42	109,00	109,62	99,43	120,32	114,60	105,00	5,59
Gabungan	95,28	105,32	110,98	94,89	114,46	116,34	98,38	3,68

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2023

Secara nasional, indeks NTP gabungan bulan Agustus 2023 tercatat 111,85 atau naik 1,09 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh naiknya indeks harga yang diterima petani (It) nasional sebesar 1,08 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang tercatat turun sedalam 0,01 persen.

Indeks Nilai Tukar Petani Provinsi Bali dan Nasional serta Persentase Perubahannya, Juli 2023 - Agustus 2023 (2018=100)

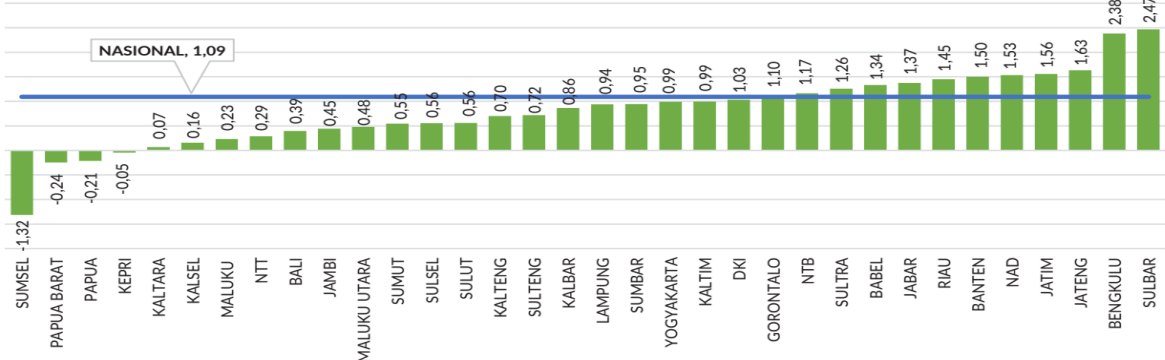
Indeks	Provinsi Bali			Nasional		
	Juli 2023	Agustus 2023	%	Juli 2023	Agustus 2023	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indeks yang Diterima Petani	115,48	116,03	0,48	129,58	130,99	1,08
Indeks yang Dibayar Petani	117,06	117,16	0,08	117,12	117,11	-0,01
NTP	98,65	99,04	0,39	110,64	111,85	1,09

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2023

Jika dilihat perubahan indeks NTP secara nasional menurut provinsi, kenaikan paling tinggi tercatat di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu setinggi 2,47 persen, sedangkan kenaikan paling rendah tercatat setinggi 0,07 persen di Provinsi Kalimantan Utara. Jika dilihat dari penurunan indeks NTP,

penurunan terdalam tercatat di Provinsi Sumatera Selatan sedalam 1,32 persen, sedangkan penurunan paling dangkal tercatat di Provinsi Kepulauan Riau sedalam 0,05 persen.

Perubahan Indeks NTP Menurut Provinsi di Indonesia, Agustus 2023



Bulan Agustus 2023, indeks Nilai Tukar Nelayan (NTN) tercatat sebesar 101,81 atau turun sedalam 0,68 persen dari bulan sebelumnya yang tercatat 102,51. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya Indeks yang diterima petanni (It) sedalam 0,64 persen, sedangkan Indeks yang dibayar petani (Ib) tercatat naik sebesar 0,04 persen.

Penurunan Indeks yang diterima petanni (It) dari 121,92 menjadi 121,14 disebabkan oleh turunnya indeks kelompok penangkapan ikan di perairan umum (khususnya ikan mujair) sedalam 2,38 persen dan turunnya indeks harga pada kelompok penangkapan ikan di laut (khususnya cumi-cumi, ikan tongkol dan ikan layang) sedalam 0,64 persen.

Di sisi lain, Indeks yang dibayar petani (ib) yang tercatat mengalami kenaikan dari 118,94 menjadi 118,99 disebabkan oleh kenaikan indeks konsumsi rumah tangga setinggi 0,08 persen, sedangkan indeks BPPBM turun sedalam 0,02 persen.

Indeks Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Provinsi Bali dan Persentase Perubahannya, Juli 2023 - Agustus 2023 (2018=100)

Subsektor	Bulan		Persentase Perubahan
	Juli 2023	Agustus 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	102,51	101,81	-0,68
a. Indeks Diterima Petani	121,92	121,14	-0,64
- Penangkapan Di Perairan Umum	119,86	117,01	-2,38
- Penangkapan Di Laut	121,93	121,15	-0,64
b. Indeks Dibayar Petani	118,94	118,99	0,04
- Indeks Konsumsi Rumah tangga	118,58	118,68	0,08
- Indeks BPPBM	119,37	119,35	-0,02
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	105,36	106,32	0,91
a. Indeks Diterima Petani	120,96	122,20	1,03
- Budidaya Air Tawar	121,75	123,21	1,20
- Budidaya Air Payau	116,48	116,48	0,00
b. Indeks Dibayar Petani	114,80	114,93	0,11
- Indeks Konsumsi Rumah tangga	117,73	117,77	0,03
- Indeks BPPBM	112,71	112,91	0,18

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2023

2. Faktor Penghambat Ketahanan Pangan, NTP, NTN

Keberhasilan dari pencapaian keberhasilan dari suatu sasaran tidak terlepas pada pemetaan isu strategis yang disusun secara baik, ada beberapa isu yang menjadi focus perhatian Pemerintah Provinsi Bali dalam hal meningkatkan ketahananpangan, NTP dan NTN sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan pangan, terutama pangan pokok, mengakibatkan Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan dapat menyebabkan terjadinya kenaikan inflasi. Isu Pemenuhan kebutuhan pangan meliputi penyediaan pangan (produksi pangan) dan diversifikasi konsumsi pangan yang belum berimbang.
2. Konflik kepentingan pemanfaatan sumber daya air, disebabkan menurunnya potensi sumber daya air dan meningkatnya persaingan pemanfaatan sumber daya air untuk pertanian dan rumah tangga serta bisnis.
3. Kualitas dan daya saing hasil pertanian yang belum optimal sehingga perlunya perbaikan kualitas serta keamanan produk disamping itu berkembangnya trend pola hidup “back to nature” yang menuntut produk ramah lingkungan atau produk organik.
4. Meningkatnya alih fungsi lahan dan menurunnya tingkat kesuburan lahan.
5. Petani dominan berusia lanjut dan kurangnya minat generasi muda berusahatani. serta pendapatan petani relatif rendah.
6. Penyuluh yang ada kebanyakan merupakan tenaga kontrak perlu mendapatkan pendidikan secara berkala.
7. Dampak perubahan Iklim terhadap intensitas serangan OPT.
8. Akses pemasaran dan dampak pasar bebas.

3. Upaya meningkatkan Ketahanan Provinsi Bali, NTN, NTP

adapun langkah Kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah membuat kebijakan *pro poor*, *pro job* dan *pro environmental* diantaranya sebagai berikut :

1. Ketersedian hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok krama Bali.
2. Pengenalan dan penerapan teknologi kepada pertanian, pelaku usaha tanaman pangan dalam arti luas.

3. Modernisasi sistem pertanian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian.
4. Pemberdayaan dan pembinaan komunitas atau lembaga atau organisasi subak untuk memenuhi kebutuhan saluran irigasi untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian sawah
5. Bekerjasama dengan lembaga riset pemerintah/swasta atau perguruan tinggi untuk menghasilkan bibit unggul sesuai dengan kebutuhan pasar lokal dan ekspor.
6. Pembinaan dan pengendalian petani untuk menghasilkan produk hasil pertanian sesuai standar kualitas minimal untuk memenuhi kualitas pada lokal an ekspor.
7. Pengembangan kompetensi Krama Bali di bidang pertanian, agro industri, pasca panen. Sebagai duta pengembangan masnyarakat pertanian yang unggul dan berkelanjutan.
8. Meningkatkan kemampuan petani dengan mengenalkan industri pangan olahan hasil pertanian.
9. Membantu meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor produk hasil pertanian dalam arti luas .
- 10.Menyediakan sumber pendanaan murah untuk pengembangan usaha tani.

Tabel Sasaran : “Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali, Terwujudnya wajib belajar 12 Tahun yang berkualitas, Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas, Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi dan Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali” **Perbandingan Capaian/Realisasi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 s.d. Tahun 2023.**

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2022	2023			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2023 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Umur Harapan Hidup	72,60	72.5	74,88	103,38	72.5	103,38
2	Rata-rata lama sekolah	9,39	11,40	9,45	82,73	11,40	82,73
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18 Tahun	83,84	83,30	84,73	101,71	83,30	101,71
4	Angka harapan lama sekolah	13,48	13,75	13,58	98,76	13.75	98,76
5	Indeks Pembangunan Manusia	76,44	77,55	78,01	101,07	77,55	101,07
6	Indeks Daya Saing SDM Bali	69.09	74,55	80,00	107,31	74,55	107,31

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023

Umur harapan hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus mengalami peningkatan. Selama periode 2020-2023, UHH Bali mengalami peningkatan sebesar 0,61 tahun atau rata-rata meningkat sebesar 0,20 tahun (0,27 persen) per tahun.

UHH Bali tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,28 tahun (0,38 persen) dibandingkan dengan tahun 2022. Peningkatan UHH Bali pada tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan tahun 2022 yang sebesar 0,26 tahun (0,35 persen).

Grafik Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Penduduk Bali (tahun), 2020–2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2023

Dilihat dari Capaian Kinerja pada Tahun 2023, Umur Harapan hidup Provinsi Bali tercapai 74,88%, ini melampaui target yang diperjanjikan pada tahun 2023 sebesar 72,50% dengan tingkat ketercapaian 103,38%, bila diukur dari target tahun 2022 sebesar 72,60% maka realisasi Tahun 2023 sudah menuntaskan target yang perjanjikan di RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 s.d 2023.

Keberhasilan Pemerintah Bali dalam meningkatkan Umur Harapan Hidup Masyarakat dari Tahun ke Tahun tidak terlepas dari kinerja yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Bali seperti menurunkan morbiditas dan mortalitas penduduk seperti menekan Angka Kematian Ibu per 100.000KH, Angka Kesakitan Penyakit Menular, Proporsi Balita Gizi Buruk/Kurang.

Dalam rangka meningkatkan Umur Harapan Hidup di Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan kebijakan strategis diantaranya :

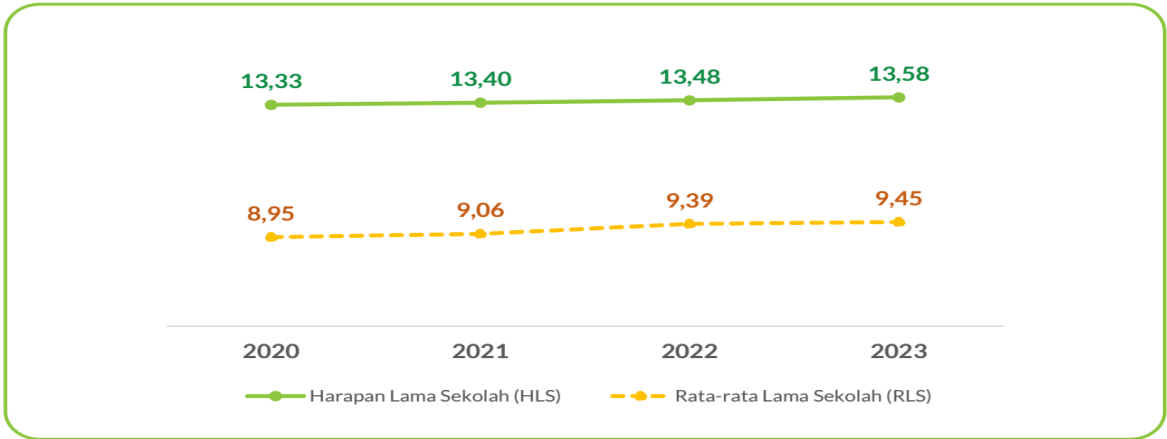
1. Mendorong Pelayanan Kesehatan kea rah Digitalisasi;
2. Memberikan Jaminan Kesehatan kepada seluruh Masyarakat;

- 3. Mengoptimalkan Peran Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan Kesehatan;
- 4. Mengevaluasi dan memonitoring pelayanan Kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Bali;

Dimensi pengetahuan pada **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** dibentuk oleh dua indikator, yaitu **Harapan Lama Sekolah (HLS)** penduduk usia 7 tahun ke atas dan **Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)** penduduk usia 25 tahun ke atas. Selama periode 2020-2023, kedua indikator tersebut di Bali rata-rata meningkat masing-masing sebesar 0,08 tahun (0,62 persen) untuk HLS dan sebesar 0,17 tahun (1,84 persen) untuk RLS. Pada tahun 2023, HLS penduduk Bali mengalami percepatan peningkatan dibandingkan dengan peningkatan tahun 2022, yaitu 0,10 tahun (0,74 persen) pada tahun 2023 dibandingkan dengan 0,08 tahun (0,60 persen) pada tahun 2022.

Sedangkan, RLS penduduk Bali justru mengalami perlambatan peningkatan. RLS penduduk Bali tahun 2023 meningkat sebesar 0,06 tahun (0,64 persen), melambat dibandingkan dengan peningkatan tahun 2022 yang sebesar 0,33 tahun (3,64 persen).

Grafik Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Penduduk Bali (tahun), 2020–2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2023

Rata-rata lama sekolah dilihat dari target yang diperjanjikan pada Tahun 2023 di RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 s.d 2023 dengan target kinerja 11,40%, terealisasi 9,45% dengan tercapaian 82,73% di tahun 2023 dibandingkan dengan capaian realisasi target ditahun 2022 sebesar 9,39%, capaian kinerja ditahun 2023 mengalami peningkatan, walupun pada tahun 2023 tidak mencapai target yang

ditetapkan, dan apabila dibandingkan dengan target pada tahun 2023 sebesar 11,40% bilang dibandingkan dengan realisasi ditahun 2023 dengan tingkat ketercapaian mencapai 82,73%.

Angka Harapan Lama Sekolah pada Tahun 2023 terealisasi sebesar 13.48% dengan tingkat ketercapaian mencapai 98,76%, hal ini menggambarkan bahwa target pada tahun 2023 sebesar 13,75% tidak tercapai, bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar 13,40%, realisasi di Tahun 2023 melampaui realisasi capaian kinerja tahun 2023, capaian kinerja pada Tahun 2023 terbilang meningkat, ini menggambarkan bahwa penduduk Bali berpotensi menempuh pendidikan hingga Diploman II.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun di Provinsi Bali mengalami peningkatan dengan ketercapaian pada Tahun 2023 mencapai 101,71% dengan peningkatan 0,67% dari tahun 2022, bila dibandingkan dengan capaian pada Tahun akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 s.d 2023, realisasi pada Tahun 2023 telah melampaui dengan tingkat ketercapaian sebesar 101,71%. Ini mengidentifikasi bahwa Program Pemerintah Provinsi Bali telah berhasil mendorong wajib belajar 12 Tahun.

Ketidak tercapaian target ini menjadi focus perbaikan pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Bali untuk perbaikan guna meningkatkan capain kinerja, langka yang dilaksanakan diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan fasilitas Pendidikan melalui bantuan sarana prasarana Sekolah (USB, RKB, laboratorium, ruang kantor, perpustakaan, media pendidikan, alat praktek siswa dan mebeler);
2. Pemberian dana pendamping BOSDA untuk menunjang operasional sekolah;
3. Penyaluran dana Pendidikan khususnya bagi siswa kurang mampu (PIP);
4. Peningkatan kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan melalui pelatihan peningkatan kompetensi, pemanfaatan media pembelajaran digital, dan forum guru mata Pelajaran;
5. Distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan yang lebih proporsional sesuai kebutuhan ideal Satuan Pendidik;
6. Melaksanakan sosialisasi untuk mendorong pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Pendidikan;

7. Melaksanakan koordinasi dengan Disdikpora Kabupaten/ Kota yang memiliki kewenangan terhadap pendidikan non formal (Paket A, B, C) untuk menjaring anak yang putus sekolah agar dapat melanjutkan/menuntaskan pendidikannya

Indeks Daya Saing SDM Bali merupakan indikator yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya daya saing SDM Krama Bali, yang diformulasikan melalui **3 pilar utama** yaitu kesehatan, pendidikan dan pemuda olahraga, serta pilar keterampilan. 3 pilar utama Indeks Daya Saing ada 2 indikator yang telah dijelaskan pada keterangan capaian diatas yaitu **Umur Harapan Hidup** mengukur kesehatan masyarakat Bali (Dinas Kesehatan Provinsi Bali) dan **Rata-rata Lama Sekolah** mengukur pendidikan (Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Bali) dan **Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan** mengukur keterampilan (Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM).

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang mencakup 9 (sembilan) indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang sangat mendasar yaitu: perencanaan tenaga kerja; penduduk dan tenaga kerja; kesempatan kerja; pelatihan dan kompetensi kerja; produktivitas tenaga kerja; hubungan industrial; kondisi lingkungan kerja; pengupahan dan kesejahteraan pekerja; dan jaminan sosial tenaga kerja.

Sembilan indikator utama dalam pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) dirinci menjadi subindikator yang dapat mewakili dan menggambarkan keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan pada setiap indikator utama. Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) untuk mengukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan nasional maupun di setiap daerah provinsi. Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 206 Tahun 2017.

Pandemi Covid-19 telah membawa dampak signifikan bagi tatanan social maupun perekonomian dalam skala global tidak terkecuali bagi Bali. Terbatasnya ruang gerak masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas, berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang mengalami

kontraksi, sehingga berimplikasi juga pada sektor ketenagakerjaan. Banyak perusahaan yang mengalami penurunan produksi dan pendapatan, mengurangi jam kerja pekerja, mengurangi gaji karyawan tertentu, merumahkan sebagian pekerja, dan bahkan ada yang dengan sangat terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja.

Berkaitan dengan hal tersebut, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bali pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 74.55. Berbagai strategi/kebijakan melalui program/kegiatan telah dilaksanakan sebagai upaya untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan tersebut, dan realisasi capaian kinerja atas indikator Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bali pada tahun 2023 adalah sebesar 80% dengan Tingkat ketercapaian 107,31%.

Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 69.09 maka pencapaian pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 10,81%. Pencapaian tahun 2023 sangat baik jika dibanding dengan target yang ditetapkan, tetapi pencapaian tersebut masih pada kategori menengah bawah, sehingga strategi/kebijakan melalui program/kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih tepat sasaran untuk menanggulangi dampak pandemi maupun beragam tantangan ke depan di sektor ketenagakerjaan.

Terwujudnya Tenaga Kerja Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saing, melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali salah satunya diupayakan melalui sertifikasi tenaga kerja daerah Bali. Sertifikasi Tenaga kerja daerah Bali dilaksanakan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas; bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal krama Bali.

Secara umum digabungkan oleh 3 Pilar Utama Indeks Daya Saing SDM bali pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar 74.55%, terealisasi sebesar 80% dengan tingkat ketercapaian 107.31%, bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar 69,09%, capaian tahun 2023 mengalami peningkatan, disebabkan pada 3 pilar utama dimasing-masing indikator mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini menggambarkan Daya Saing SDM Bali sangat baik.

Guna meningkatkan Daya Saing SDM bali khusus diketerampilan ada beberapa hal yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali diantaranya :

- 1. Program Pelatihan yang diberikan di Lembaga Pelatihan Kerja mengacu pada SKKNI dan Kebutuhan Industri.
- 2. Memberikan pemahaman Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia (KMPI) kepada LPK agar tata kelola pelatihan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 3. Melaksanakan Akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Kerja yang bertujuan untuk menjaga mutu pelatihan di LPK.
- 4. Pelatihan kerja yang diberikan di LPK diakhiri dengan Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- 5. Penyusunan Program Pelatihan mengikutsertakan asosiasi profesi dan praktisi.

Tabel Sasaran : “Terwujudnya tenaga kerja yang berkompoten dan berdaya saing, Meningkatnya kompetensi tenaga dan Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi” **Perbandingan Capaian/Realisasi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 s.d. Tahun 2023**

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2022	2023			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2023 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkat pengangguran terbuka	4.80	2,32	2,69	86,24	2,32	86,24
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76.86	76,80	77,08	99,63	76,80	99,63
3	Indeks Kebahagiaan	71,44	74,98	71,44	96,04	74,98	96,04

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023

Capaian Kinerja khusus Indikator **Tingkat Pengangguran terbuka** untuk analis keberhasilan dan kegagalan dapat di baca pada capaian makro di atas, disini akan menjelaskan ketercapaian indikator **Tingkat Partisipasi Angkata Kerja (TPAK)** Provinsi Bali.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK pada Agustus 2023 tercatat sebesar 77,08%, mengalami peningkatan sebesar 0,22 persen poin dibandingkan dengan TPAK Agustus 2022.

Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki pada Agustus 2023 tercatat sebesar 83,55%, lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan yang tercatat sebesar 70,63%. Jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2022, TPAK laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,51 persen poin, sedangkan TPAK perempuan mengalami kenaikan sebesar 1,01 persen poin.

Tabel Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2021–Agustus 2023

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Perubahan Ags 2021–Ags 2022		Perubahan Ags 2022–Ags 2023	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	3.509,09	3.563,14	3.490,20	54,05	1,54	-72,94	-2,05
Angkatan Kerja	2.580,52	2.738,54	2.690,24	158,02	6,12	-48,30	-1,76
- Bekerja	2.441,85	2.607,07	2.617,82	165,22	6,77	10,75	0,41
- Pengangguran	138,67	131,47	72,42	-7,20	-5,19	-59,05	-44,91
Bukan Angkatan Kerja	928,57	824,60	799,97	-103,96	-11,20	-24,64	-2,99
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73,54	76,86	77,08	3,32		0,22	
- Laki-Laki	79,44	84,06	83,55	4,62		-0,51	
- Perempuan	67,61	69,62	70,63	2,01		1,01	

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2023

Dalam rangka meningkatkan **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**, Pemerintah Provinsi Bali memiliki Strategi –strategi dalam mendukung hal tersebut seperti :

1. Meningkatkan Kompetensi tenaga kerja, dengan arah kebijakan :
 - a. Program Pelatihan yang diberikan di BLK/LPK menerapkan program tree in one yaitu melatih, menempatkan dan mensertifikasi peserta pelatihan.
 - b. Untuk meningkatkan mutu pelatihan BLK/LPK harus berinovasi sehingga program pelatihan yang diberikan harus mengikuti perkembangan digitalisasi sehingga lulusannya mampu bersaing di dunia kerja.
 - c. Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui sertifikasi tenaga kerja daerah Bali dilaksanakan bersinergi/berkolaborasi/bekerja sama dengan BNSP/LSP, Disnaker Kab/Kota, Asosiasi Profesi ICA, IFBEC, IHKA dan HFLA, dll.
 - d. Pelaksanaan latihan Kerja berdasarkan klaster kompetensi dilaksanakan bersinergi/berkolaborasi/bekerja sama dengan Disnaker Kab/Kota, Perusda, Perguruan Tinggi, dll.

- e. Pengawasan Pelaksanaan norma ketenagakerjaan dilaksanakan bersinergi/berkolaborasi/bekerja sama dengan Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Disnaker Kab/Kota, Biro Hukum, maupun Satpol PP.
2. Pelaksanaan kegiatan Job Fair secara offline maupun online, dilaksanakan bersinergi/berkolaborasi/bekerja sama dengan P3MI, Manning Agency, BP2MI, RRI, Media cetak, Media Elektronik, Disnaker Kab/Kota, Biro Umum dan Protokol, maupun Diskominfos.
- Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri, dengan arah kebijakan :
- a. Membuat / Melaksanakan / Mengevaluasi regulasi / peraturan-peraturan terkait urusan tenaga kerja, seperti Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
 - b. Menerbitkan SE Gub No 562/5305/Disnakeresdm tentang Pendataan PMI Krama Bali
 - c. Telah terbit Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perlindungan PMI Krama Bali

Indeks Kebahagiaan Provinsi Bali merupakan indeks komposit yang dihitung secara tertimbang menggunakan dimensi dan indikator dengan skala 0-100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan penduduk yang semakin bahagia. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka semakin merasa tidak bahagia.

Indeks Kebahagiaan Provinsi Bali tahun 2023 sebesar 71,44. Besarnya indeks masing-masing dimensi penyusun Indeks Kebahagiaan Indonesia, yaitu: (1) Indeks Dimensi Kepuasan Hidup sebesar 72,40, dengan masing-masing Subdimensi Kepuasan Hidup Personal sebesar 68,48 dan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial sebesar 76,32; (2) Indeks Dimensi Perasaan (Affect) sebesar 71,71; dan (3) Indeks Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia) sebesar 73,27. Seluruh indeks diukur pada skala 0-100.

Pada Tahun 2023 indeks kebahagiaan provinsi bali tidak mencapai target dengan ketercapaian 96,56%, bila dibandingkan dengan tahun 2021, indeks kebahagiaan pada Tahun 2023 mengalami peningkatan dan bila dibandingkan dengan tahun 2023 di akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 s.d 2023 tercapai sebesar 95,27%.

Indikator penyusun Indeks Kebahagiaan Provinsi Bali dapat dilihat pada grafik radar (spider chart). Indeks indikator tertinggi adalah

kepuasan terhadap kondisi keamanan 80,16 yang merupakan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial. Sementara indeks indikator terendah adalah Pendidikan dan Keterampilan 63,75 yang merupakan Subdimensi Kepuasan Hidup Personal.

Masih terdapat beberapa indikator lain yang memiliki nilai indeks dibawah 70, yaitu Pekerjaan/Usaha/Kegiatan Utama, Perasaan Tidak Khawatir/Cemas, Pengembangan Diri, dan Pendapatan Rumah Tangga. Pada Dimensi Perasaan (Affect), indikator yang memiliki indeks tertinggi adalah Perasaan Senang/Riang/Gembira dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari pada tingkatan 75,28, sementara yang terendah adalah Perasaan Tidak Khawatir/Cemas pada tingkatan 68,37. Pada Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia), indikator yang memiliki indeks tertinggi adalah Tujuan Hidup (76,23), sebaliknya yang terendah adalah Pengembangan Diri (67,73). Dapat disimpulkan, bahwa penduduk Provinsi Bali pada umumnya telah merasa optimis dengan masa depannya pada level 76,23. Sementara itu, tingkat pengembangan potensi diri melalui upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya relatif rendah yaitu 67,73.

Dari data BPS Nasional Terdapat 10 provinsi yang mengalami penurunan Indeks Kebahagiaan. Provinsi-provinsi tersebut adalah Aceh, Riau, Sumatera Barat, dan Bengkulu untuk kawasan Sumatera. Untuk kawasan Jawa-Bali-Nusa Tenggara yang turut mengalami penurunan Indeks Kebahagiaan yaitu: DKI Jakarta, Banten, Yogyakarta, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Sementara untuk kawasan kalimantan terdapat pada Provinsi Kalimantan Timur.

1. Provinsi Banten : 68,08
2. Provinsi Bengkulu : 69,74
3. Provinsi Papua : 69,87
4. Provinsi Nusa Tenggara Barat : 69,98
5. Provinsi Jawa Barat : 70,23
6. Provinsi Nusa Tenggara Timur : 70,31
7. Provinsi Sumatera Utara : 70,57
8. DKI Jakarta : 70,68
9. Provinsi Aceh : 71,24
10. Provinsi Sumatera Barat : 71,34
- 11. Provinsi Bali : 71,44**

Dari data diatas tergambar bahwa, walaupun Provinsi Bali mengalami penurunan indeks Kebahagiaan, akan tetapi rata-rata nilai dari Provinsi Bali di Seluruh Indonesia masih tinggi, dan bila dibandingkan dengan rata – rata capaian nasional Provinsi Bali masih diatas capaian indeks kebahagiaan nasional.

Dari penurunan itu, akan menjadi acuan Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan capain kinerja ditahun selanjtnya seperti :mendorong pemerataan pembangunan di Provinsi Bali, meningkatkan konektivitas antar daerah di Provinsi Bali, melaksanakan pengimplementasian kebijakan Pemerintah Provinsi Bali ke Pemerintah Kabuptaen Kota se Bali.

Tabel Sasaran : “Meningkatnya pasar Pariwisata Bali, Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global dan Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan” Perbandingan Capaian/Realisasi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 s.d. Tahun 2023

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2022	2023			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2023 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	17,64	25,93	54	208.25	25.93	208.25
2	Jumlah Devisa sektor pariwisata	1.223.000	3,323,470	192.492.781	6400%	3,323,470	6400%
3	Indeks Kepuasan wisatawan	84,5	85	87,23	103.32	85	103.32

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023

Pada periode Januari-Desember 2023, tercatat sebanyak 5.273.258 kunjungan wisman yang datang langsung ke Bali. Jika dibandingkan dengan periode Januari-Desember 2022, jumlah wisman tercatat meningkat hingga 144,61 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel Kumulatif Kedatangan Wisman yang Datang Langsung Ke Bali Menurut Pintu Masuk dan Kebangsaan pada Bulan Januari-Desember 2023 dan Januari-Desember 2022

No.	Kebangsaan	Wisman Januari-Desember 2023				Wisman Jan-Desember 2022 (Orang)	Perubahan Wisman Jan-Desember 23 Thd Jan-Desember 22 (%)
		Bandara (Orang)	Pelabuhan Laut (Orang)	Total (Orang)	Persentase (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	AUSTRALIA	1.314.936	9.474	1.324.410	25,12	605.955	118,57
2	INDIA	440.390	25	440.415	8,35	182.091	141,87
3	TIONGKOK	279.947	164	280.111	5,31	33.085	746,64
4	INGGRIS	251.428	4.931	256.359	4,86	126.892	102,03
5	AMERIKA SERIKAT	244.224	4.759	248.983	4,72	108.131	130,26
6	SINGAPURA	236.108	95	236.203	4,48	129.089	82,98
7	KOREA SELATAN	226.764	25	226.789	4,30	63.353	257,98
8	PERANCIS	208.140	113	208.253	3,95	95.510	118,04
9	MALAYSIA	207.501	72	207.573	3,94	91.064	127,94
10	JERMAN	195.157	570	195.727	3,71	94.516	107,08
11	Lainnya	1.643.518	4.917	1.648.435	31,26	626.061	163,30
Jumlah		5.248.113	25.145	5.273.258	100,00	2.155.747	144,61

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2023

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Bali pada bulan Desember 2023 tercatat sebesar 62,19 persen, naik sebesar 7,30 poin (m-t-m) dibandingkan dengan TPK pada bulan November 2023 yang tercatat sebesar 54,89 persen. Peningkatan TPK (m-t-m) tertinggi tercatat pada TPK Hotel Bintang 5 sebesar 8,77 poin.

Tabel TPK Menurut Klasifikasi Bintang di Bali pada Bulan Desember 2023, November 2023, dan Desember 2022

No.	Klasifikasi Bintang	Tingkat Penghunian Kamar (TPK) (%)			Perubahan Des 23 thd Nov 2023 (Poin)	Perubahan Des 23 thd Des 22 (Poin)
		Desember 2022	November 2023	Desember 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bintang 1	59,53	57,29	65,84	8,55	6,31
2	Bintang 2	48,01	49,86	54,65	4,79	6,64
3	Bintang 3	51,05	53,36	58,31	4,95	7,26
4	Bintang 4	50,69	54,54	62,24	7,70	11,55
5	Bintang 5	59,81	57,00	65,77	8,77	5,96
Seluruh Bintang		53,75	54,89	62,19	7,30	8,44

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2023

Bila dibandingkan dengan TPK pada bulan Desember 2022 year on year (y-o-y), TPK pada bulan Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar 8,44 poin. Peningkatan TPK (y-o-y) tercatat pada seluruh kelas hotel berbintang, dengan peningkatan tertinggi tercatat pada kelas hotel bintang 4 sebesar 11,55 poin.

Tabel TPK Menurut Klasifikasi Bintang di Bali pada Bulan Desember 2023, November 2023, dan Desember 2022

No.	RLMT	Periode			Des 2023 thd Nov 2023 (m-t-m) (Poin)	Des 2023 thd Des 2022 (y-o-y) (Poin)
		Desember 2022	November 2023	Desember 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	RLMT Asing	2,95	2,89	2,97	0,08	0,02
	Bintang 1	2,90	3,42	3,03	-0,39	0,13
	Bintang 2	2,09	1,81	2,15	0,34	0,06
	Bintang 3	3,20	3,00	3,13	0,13	-0,07
	Bintang 4	2,68	2,85	2,92	0,07	0,24
	Bintang 5	3,26	3,08	3,08	0,00	-0,18
2	RLMT Indonesia	2,19	2,11	2,07	-0,04	-0,12
	Bintang 1	1,76	1,73	1,57	-0,16	-0,19
	Bintang 2	1,83	1,75	1,81	0,06	-0,02
	Bintang 3	2,03	1,88	1,93	0,05	-0,10
	Bintang 4	2,22	2,18	2,13	-0,05	-0,09
	Bintang 5	2,53	2,58	2,40	-0,18	-0,13
3	RLMT Total	2,47	2,48	2,49	0,01	0,02
	Bintang 1	1,89	1,98	1,74	-0,24	-0,15
	Bintang 2	1,95	1,78	1,96	0,18	0,01
	Bintang 3	2,34	2,24	2,31	0,07	-0,03
	Bintang 4	2,36	2,48	2,47	-0,01	0,11
	Bintang 5	2,93	2,92	2,85	-0,07	-0,08

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2023

Pada bulan Desember 2023, rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia di hotel berbintang tercatat selama 2,49 hari, naik 0,01 poin dibandingkan dengan rata-rata lama menginap pada bulan November 2023 (m-t-m) yang tercatat selama 2,48 hari. Jika dilihat dari kelompok tamu yang menginap, rata-rata lama menginap tamu asing pada hotel berbintang pada bulan Desember 2023 tercatat selama 2,97 hari, lebih tinggi bila dibandingkan rata-rata lama menginap tamu Indonesia yang tercatat selama 2,07 hari. Bila dilihat menurut kelas hotelnya, rata-rata lama menginap tamu asing di bulan Desember 2023 tertinggi tercatat pada hotel bintang lima yaitu selama 3,08 hari. Sementara itu, rata-rata lama menginap tamu Indonesia tertinggi di bulan Desember 2023 juga tercatat pada hotel bintang lima yaitu selama 2,40 hari.

Peningkatan Wisatawan Mancanegara ke Provinsi Bali dari Tahun 2021 s.d 2023 mengalami kenaikan yang signifikan pasca COVID-19, menandakan bahwa Pariwisata Provinsi Bali hidup Kembali, bila melihat dari kedatangan Wisman ke Provinsi Bali tidak salah lagi kontribusi Bidang Pariwisata menyumbang devisa terbesar di Indonesia dapat dilihat pada indicator dibawah ini antara lain :

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Tahun 2023 terealisasi sebesar 54%, dengan target 25,93% sehingga capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 208,25%, bila dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun 2022 sebesar 17,64%, capaian kinerja di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 23,36%. Dan apabila di bandingkan dengan taget RPJMD tahun 2023 maka ketercapaian telah melebihi target yang ditetapkan di akhir RPJMD 2018-2023.

Jumlah Devisa sektor pariwisata Tahun 2023 terealisasi sebesar USD 192.492.781, dengan target 3.323.470 sehingga capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 6400%, bila dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun 2022 sebesar 1.223.000. Dan apabila di bandingkan dengan taget RPJMD tahun 2023 maka ketercapaian melampaui target.

Indeks Kepuasan wisatawan Tahun 2023 terealisasi sebesar 87,23%, dengan target 85% sehingga capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 103.32%, bila dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun 2022 sebesar 84,5% capaian kinerja di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,73%. Dan apabila di bandingkan dengan taget RPJMD tahun 2023 maka ketercapaian terhadap melampaui target

Sejalan dengan pemerataan pariwisata Provinsi Bali serta pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Provinsi Bali mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung pemerataan Pariwisata Bali diantaranya :

1. Pembangunan Simpul Konektivitas Segitiga Emas Bali yang terdiri dari : Sanur, Nusa Penida, Nusa Ceningan yang menjadi pusat ekonomi baru Bali, mendukung layanan transportasi yang memadai menunjang pariwisata;
2. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sanur dan Kawasan Ekenomi Khusus Kura-Kura Bali yang akan menciptakan destinasi wisata baru pada Provinsi Bali.

Tabel Sasaran : “Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali, Berkembangnya perekonomian berbasis budaya bali, Meningkatnya kuantitas dan kualitas indfrastruktur dasar, laut dan udara secara terintegrasi an terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru, Meningkatnya rasa aman Krama Bali dan Wisata melakukan aktivitas kehidupannya, Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali” **Perbandingan Capaian/Realisasi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 s.d. Tahun 2023.**

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2022	2023			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2023 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pertumbuhan Ekonomi	3.05	5	5,66	113,32	5.00	113,32
2	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali	13.5	20,05	26,62	132,76	20,05	132,76
3	Indeks konektivitas	2.5	2,3	2,3	100	2.3	100
4	Angka Kriminalitas	1.793	2.262	1.470	153,87	2.262	153,87
5	Indeks domokrasi	75.35	81	83,21	102,72	81	102,72
6	Indeks Pemberdayaan gender	72.17	65	72,29	111,21	65	111,21

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023

Kontribusi KUMKM Terhadap PDRB Bali pada tahun 2023 terealisasi 26,62 dari target 20,05 dengan tingkat ketercapaian 132,76%, bila dibandingkan dengan capaian kontribusi KUMKM terhadap PDRB pada tahun 2022, capaian pada tahun 2023 mengalami peningkatan dan apabila dibandingkan dengan capaian target pada tahun 2023 kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali telah melampau target di RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar 132,76%.

Keberhasilan pencapaian tersebut tidak terlepas dari keberhasilan Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan Kinerja KUMKM Provinsi Bali sebagai berikut :

1. Digitalisasi KUMKM dapat dicapai dikarenakan adanya, pendampingan tata kelolakoperasi yang modern dan professional, fasilitasi akses pasar dan kemitraan dengan berbagai stakeholder yang relevan (*off taker/buyer*), dan fasilitasi sarana promosidan kemitraan bagi UKM melalui pameran dan digitalisasi.
2. Peningkatan Produktivitas Koperasi dapat dicapai dikarenakan adanya, PenguatanLiterasi Keuangan melalui Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi, Pembentukan Koperasi Produksi, Pendampingan dan Pemberdayaan Koperasi serta Program Penguatan Kelembagaan (Koperasi) dan Permodalan Usaha.
3. Rasio Kewirausahaan meningkat dikarenakan adanya, pengembangan kewirausahaan melalui dunia pendidikan, peningkatan kapasitas lembaga inkubator, perluasan akses pembiayaan bagi wirausaha dan startup, dan penyelenggaraan pendampingan dan konsultasi bisnis

Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali dengan indikator “Persentase KUMKM Menuju Digital”, target tahun 2023 adalah 26,50% dan Realisasinya 26,62% dengan kategori **Sangat Baik**. Dapat dijelaskan tujuan digitalisasi KUMKM adalah upaya untuk mengubah cara kerja manajemen koperasi pada umumnya menjadi manajemen koperasi secara digital, hal ini akan mempermudah koperasi dalam menjalankan bisnisnya, dan juga dalam memberikan pelayanan bagi seluruh anggotanya melalui Aplikasi Koperasi Digital dan bagi UMKM adanya digitalisasi koperasi akan mempermudah para UMKM untuk mencari tambahan modal dalam pengembangan usahanya, digitalisasi koperasi memberikan kemudahan serta kenyamanan dalam pengajuan pinjaman modal tanpa harus berurusan dengan non bank yang biasanya memiliki bunga yang tinggi.

Selain itu, adanya digitalisasi koperasi akan membuat transparansi penyaluran dana serta catatan mengenai keanggotaan lebih mudah dan jauh lebih aman untuk diakses, pelayanan yang diberikan koperasi kepada para anggotanya pun jauh lebih mudah dengan adanya digitalisasi koperasi. Serta adanya digitalisasi koperasi akan memudahkan dalam menghubungkan antara pelaku UMKM dengan pembelinya melalui

aplikasi berbasis digitalisasi, yang mana dengan adanya hal tersebut para pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas ekonominya dan produksinya. Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam digitalisasi Koperasi dan UMKM adalah membentuk ekosistem Koperasi dan UMKM yang Berkualitas dan sehat dalam menjankan kegiatan dan usahanya dengan Cara baru dan Manajemen Tata Kelola Koperasi yang Baik (*Good Corporate Governance*) Serta Memiliki Daya Saing dan Adaptif terhadap Perkembangan Zaman.

Realisasi indikator sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali 2023 “Persentase peningkatan produktivitas koperasi” adalah 10,12% dari target sebesar 7,50% dengan persentase pencapaian sasaran strategis adalah sebesar 134%. Peningkatan produktivitas koperasi adalah upaya yang ditujukan untuk memberikan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antar pelaku usaha. Melalui pembinaan dan pengembangan sektor koperasi diharapkan upaya peningkatan usaha ekonomi produktif akan lebih efisien dan dapat mencapai target yang telah ditentukan. capaian ini bisa diwujudkan dengan melakukan aktivitas melaksanakan temu konsultasi dengan lembaga keuangan Bank dan Non Bank, sosialisasi dan pemanfaatan KUR dan skim-skim kredit lainnya.

Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri dengan indikator “Rasio Kewirausahaan” , target tahun 2023 adalah 2,90 dengan realisasi 3,50 dengan kategori **Sangat Baik**. Upaya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam meningkatkan Rasio wirausaha sehingga usaha UMKM dapat berkembang dan berkelanjutan adalah :

1. Transformasi pertumbuhan wirausaha produktif dengan membina setiap orang yang memiliki jiwa dan menjalankan kewirausahaan untuk menciptakan ekosistem dan mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan dalam membentuk struktur usaha yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
2. Transformasi digital dan pemanfaatan teknologi dalam menjalankan aktivitas usahanya dengan masuk ke dalam ekosistem digital seperti market place, ecommerce atau platform digital lainnya.

3. Transformasi usaha informal ke formal dengan memfasilitasi UMKM untuk memperoleh izin usaha yang lengkap, memiliki sertifikasi dan standardisasi usaha, dan dapat mengakses pembiayaan formal.

Indeks Konektivitas pada tahun 2023 terealisasi 2.3 jam/100km dari target 2.3 jam/100km dengan tingkat ketercapaian 100%, bila dibandingkan dengan capaian indeks konektivitas pada tahun 2022, capaian pada tahun 2023 mengalami peningkatan dan apabila dibandingkan dengan capaian target pada tahun 2023 indeks konektivitas Bali telah melampaui target di RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar 100%.

Indeks konektivitas berarti **daerah atau wilayah yang dihubungkan oleh jaringan jalan memiliki pola untuk mengetahui interaksi suatu wilayah**. Indeks konektivitas jaringan jalan merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui kekuatan interaksi di suatu wilayah dengan mempertimbangkan jalan dan simpul yang ada. Dalam meningkatkan indeks konektivitas antar wilayah di Provinsi Bali telah melaksanakan langkah sebagai berikut :

1. Membangun Shortcut Singaraja-Mengwitani, shortcut yang mempercepat perjalanan dari Kabupaten Badung dan Kabupaten Buleleng yang berada di ujung Utara Provinsi Bali;
2. Membangun Jembatan Nusa Ceningan, Nusa Penida di Kabupaten Klungkung;
3. Menata Kawasan Pesisir Nusa Penida di Kabupaten Klungkung;
4. Membangun Kawasan Batur Global Geopark di Kabupaten Bangli;
5. Membangun Pasar Singamandawa Kintamani di Kabupaten Bangli;
6. Membangun Pelabuhan Penyebrangan Gunaksa, sebagai Penunjang Kawasan Pusat Kebudayaan di Kabupaten Klungkung;
7. Membangun Pelabuhan Amed di Kabupaten Karangasem; dan
8. Membangun Pelabuhan Sangsit di Kabupaten Buleleng.
9. Pelabuhan Sanur, Kota Denpasar.

Angka Kriminalitas pada tahun 2023 terealisasi 1.793 dari target 2.731 dengan tingkat ketercapaian 152.31%, bila dibandingkan dengan capaian angka kriminalitas pada tahun 2022, capaian pada tahun 2023 mengalami penurunan kasus dan apabila dibandingkan dengan capaian target pada tahun 2022 kontribusi Angka Kriminalitas telah melampaui target di RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar 152.31%.

Angka kriminalitas merupakan indikator yang berbanding terbalik dengan target, dimana ketika capaian indikator lebih rendah dari target maka capaian target kinerja akan berada di atas 100% serta ketika capaian *indicator* lebih tinggi dari target maka capaian kinerja akan dibawah 100%. Hal tersebut dikarenakan *indicator* angka kriminalitas bersifat negative/terbalik, ketika angka kriminalitas lebih rendah maka tingkat keamanan di daerah akan semakin baik. Oleh karena itu ditetapkan capaian *indicator* angka kriminalitas sebesar 153,88% dikarenakan capaian lebih rendah daritarget yang ditetapkan.

Capaian Angka kriminalitas setiap tahunnya dihitung berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dalam melaksanakan Melakukan Pemantauan Deteksi Dini Cegah Dini Ancaman Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) kondisi daerah setiap hari, Koordinasi Penanganan Konflik Sosial di daerah Provinsi Bali dan Pemantauan Orang Asing. Jumlah kriminalitas yang dihitung berdasarkan estimasi target. Kriminal disini dalam arti kasus kasus dalam konflik sosial. Jika dilihat dari capaian tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang terus menurun menggambarkan peran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali untuk turut serta menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Bali dalam melaksanakan aktivitasnya di Daerah.

Keberhasilan pencapaian target Indikator Angka Kriminalitas tersebut menandakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali pada Tahun 2023 sudah berhasil menjadi mata dan telinga dari Bapak Gubernur dalam melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap Ancaman Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) kondisi daerah setiap harinya. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan sinergi dan kolaborasi dengan instansi lain seperti Pengamanan di Provinsi Bali yang dilaksanakan sesuai dengan Tim Kerja yang dibentuk seperti :

1. Tim Kewaspadaan Dini di Daerah;
2. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
3. Tim Pemantauan Orang Asing;
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali.

Pembentukan Tim Kerja tersebut dilakukan bersama Instansi Vertikal yang terkait

seperti : Kodam IX Udayana, Polda Bali, Korem 163 Wira Satya, Kejati Bali, BINDA Bali, Kanwil KumHam Bali, Kanwil Kemenag Bali, Lanal, Lanud, Bais TNI, dan OPD Terkait.

Indeks Demokrasi pada tahun 2023 terealisasi 83.21% dari target 81% dengan tingkat ketercapaian 102.72%, bila dibandingkan dengan capaian indeks demokrasi pada tahun 2022, capaian pada tahun 2023 mengalami kenaikan dan apabila dibandingkan dengan capaian target pada tahun 2023 kontribusi Indeks Demokrasi belum melampau target di RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar 102.72%.

Perlu diketahui bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat untuk mengukur perkembangan demokrasi Indonesia sehingga diperoleh acuan untuk menyusun program pembangunan politik baik untuk pemerintah pusat maupun daerah. Metode pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2022 mengalami perubahan karena terdapat perubahan konsep demokrasi yang digunakan yang digunakan pada Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2009-2020 terbatas pada dimensi politik, sedangkan pada tahun 2021 juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2009-2020 hanya menghasilkan indeks tingkat provinsi dan nasional, sementara Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2022 menghasilkan indeks tingkat Provinsi, Pusat, dan Nasional. Realisasi nilai IDI Tahun 2022.

Tabel Indeks Demokrasi Provinsi Bali Menurut Aspek

Aspek Indeks Demokrasi	Nilai IDI	
	2021	2022
Kebebasan	84.62	85.78
Kesetaraan	77.25	83.90
Kapasitas Lembaga Demokrasi	63.92	79.83
Skor Indeks Demokrasi	75.35	83.21

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2023

Target kinerja Indeks demokrasi yang sudah tercapai di tahun 2023 salah satunya diakibatkan oleh meningkatnya nilai dari ketiga aspek IDI. Peningkatan tertinggi yaitu pada nilai dari Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi yang hanya bernilai 63,92 poin pada IDI Tahun 2021 dan menjadi 79,83 poin pada IDI Tahun 2022. Peningkatan capaian Nilai IDI Tahun 2022 tidak terlepas dari peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali yang telah melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung seperti terlaksananya pencairan bantuan partai politik yang dilakukan tepat waktu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sehingga dengan pencairan bantuan partai politik yang tepat waktu tersebut partai politik dapat memberikan peran yang maksimal dalam pemanfaatan dari bantuan partai politik tersebut salah satunya dengan meningkatkan pendidikan politik baik itu masyarakat maupun kader internal partai politik. Selain itu di Tahun 2023 sudah terlaksananya *Focus Group Discussion (FGD)* IDI, dan juga pelaksanaan pendidikan politik masyarakat. Kedepannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali akan terus melakukan kegiatan untuk mendukung capaian nilai IDI dengan berfokus kepada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi yang sebelumnya memberikan capaian nilai terendah pada IDI Komposit Provinsi Bali Tahun 2023

Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2023 terealisasi 72.29% dari target 65% dengan tingkat ketercapaian 111.21%, bila dibandingkan dengan Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2022, capaian pada tahun 2023 mengalami kenaikan dan apabila dibandingkan dengan capaian target pada tahun 2023 kontribusi Indeks Demokrasi telah melampaui target di RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar 111.21%.

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal, misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan

siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Indeks Pemberdayaan Gender berdasarkan provinsi masih terdapat ketimpangan yang cukup tinggi terutama di daerah-daerah timur Indonesia. nilai IPG tahun 2023 tertinggi terdapat di provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 81,98 sedangkan terendah terdapat di provinsi Kepulauan Nusa Tenggara Barat sebesar 53,47 atau perbedaan sebesar 28,51 poin.

Bali sebagai salah satu wilayah yang sarat dengan nilai-nilai budaya yang amat kental tak dapat meniadakan peran perempuan-perempuan Bali. Kegiatan adat dan agama tentu merupakan ajang eksistensi bagi kesetaraan gender di Bali.

Walau dalam kenyataannya terlihat ada pengkotak-kotakan pekerjaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi mereka selalu bekerja sama dengan baik untuk memperlancar prosesi keagamaan. Sungguh suatu harmonisasi yang harus tetap dijaga.

Langkah nyata Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan perempuan. Semakin tinggi tingkat Pendidikan perempuan, maka akan menekan angka pernikahan dini yang dalam hal ini tentu saja tidak menguntungkan. Pernikahan dini (utamanya yang menikah dengan usia dibawah 18 tahun), selain berefek negatif terhadap kesehatan perempuan itu sendiri, akan berujung pada pembentukan generasi yang tidak lebih baik dari orang tuanya karena minimnya pengetahuan akan berbagai hal mengenai pengasuhan anak, kehilangan masa potensial yang lebih produktif, dan lain sebagainya. Dengan peningkatan

Pemberdayaan yang lebih luas dengan pemberdayaan perempuan pada gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan berguna dan mengembangkan inovasi-inovasi dalam meningkatkan ekonomi keluarga.

Tabel Sasaran : “Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan dan Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan” **Perbandingan Capaian/Realisasi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 s.d. Tahun 2023**

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2022	2023			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2023 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Daya dukung lingkungan	45,42	17,82	45,42	254,88	17.82	254,88
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,89	72,40	70,89	102,72	64,34	102,72
3	Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	7.44	11,65	7.44	156,58	11,65	156,58
4	Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	1.26	1,4	1.26	271,21	1.4	271,21

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023

Persentase Daya dukung lingkungan pada tahun 2023 terealisasi 45.42% dari target 17,82% dengan tingkat ketercapaian 254.88%, bila dibandingkan dengan Persentase daya dukung lingkungan pada tahun 2022, capaian pada tahun 2023 mengalami kenaikan dan apabila dibandingkan dengan capaian target pada tahun 2023 kontribusi Persentase daya dukung lingkungan telah melampaui target di RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar 254.88%.

Ketercapaian pengukuran daya dukung dan daya tampung lingkungan mendapat dukungan penuh dari hasil kajian dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusa Tenggara yang mencakup wilayah Provinsi Bali (Dokumen Status daya Dukung Air Pulau Bali, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya serta keseimbangan antar keduanya. Sementara, daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Salah satu pendekatan dalam perhitungan daya dukung daya tampung adalah daya dukung daya tampung berbasis jasa ekosistem. Jasa ekosistem secara konsep dibedakan menjadi 4 fungsi jasa, yaitu jasa penyediaan, jasa pengaturan, jasa budaya, dan jasa pendukung. Distribusi luas daya dukung daya tampung lingkungan hidup indikatif jasa penyediaan air bersih Pulau Bali dominan berada pada kategori tinggi yaitu sebesar 253.586,19 Ha (45,42% dari total luas Pulau Bali). Kondisi

jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir di Pulau Bali dominan berada pada kategori sedang yaitu sebesar 269.699,94 Ha (45,31% dari total luas Pulau Bali). Kondisi jasa ekosistem pengaturan pemurnian air di Pulau Bali dominan berada pada kategori sedang yaitu sebesar 240.289,44 Ha (43,03% dari total luas Pulau Bali).

Dalam rangka meningkatkan sumber daya lingkungan Pemerintah Provinsi Bali berkerjasama secara Pemerintah Pusat terkait dengan data-data urusan kehutanan dan lingkungan hidup, karena keterbatasan kemampuan daerah untuk menyajikan data yang dimaksud.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2023 terealisasi 70.89% dari target 63.77% dengan tingkat ketercapaian 111.16%, bila dibandingkan dengan Persentase daya dukung lingkungan pada tahun 2022, capaian pada tahun 2023 mengalami kenaikan dan apabila dibandingkan dengan capaian target pada tahun 2023 kontribusi Persentase daya dukung lingkungan telah melampaui target di RPJMD Semester Berencana Provinsi Bali sebesar 110.18%.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Bali terdiri atas komponen Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Tahun 2023 yaitu 70,89. Komponen yang telah melebihi target yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU) 89,19, Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) 88,49 dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) 43,36. Rendahnya capaian Indeks Kualitas Air (IKA) dipengaruhi oleh masih lemahnya pengendalian pencemaran lingkungan serta tindak lanjut pemantauan terhadap kualitas air sungai, danau dan mata air serta air laut. IKLH Tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2021 yaitu 70,70. Meningkatnya capaian IKLH Provinsi masih lebih rendah dibanding dengan capaian IKLH Nasional Tahun 2023 yaitu 72,42. Indikator yang masih di bawah capaian nasional yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Komponen Indeks Kualitas lahan (IKL) berada di bawah target dan capaian nasional, hal ini disebabkan karena ruang terbuka hijau dan tutupan lahan di Bali sangat terbatas dibanding dengan luas Provinsi Bali. Pemantauan kualitas air dilaksanakan terhadap 3 sungai yaitu Tukad Melangit, Tukad Unda dan Tukad Jinah, masing-masing dilakukan pemantauan pada hulu, tengah dan hilir sebanyak 2 (dua) periode. Hasil

pengukuran pemantauan kualitas air berdasarkan data Status Mutu memenuhi yang disyaratkan untuk Kelas 2 dengan status cemar ringan.

Dalam Rangka Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan upaya seperti :

1. Melaksanakan Gerakan kebersihan yang dilaksanakan bersama stakeholder terkait, yang dilaksanakan di sekitar sungai, danau, pantai mangrove dan tempat ibadah;
2. Melaksanakan pemantauan kualitas air secara berkesinambungan.

Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2023 terealisasi 7.44% dari target 14.80% dengan tingkat ketercapaian 198.92%, bila dibandingkan dengan Persentase Mitigasi Gas Rumah Kaca pada tahun 2021, capaian pada tahun 2023 mengalami peningkatan dan apabila dibandingkan dengan capaian target pada tahun 2023 mitigasi gas rumah kaca telah melampaui target di RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar 201.61%. ini mengidentifikasi bahwa mitigasi Gas rumah kaca di Provinsi Bali telah teratasi dengan baik.

Pembangunan Rendah Karbon merupakan Perubahan Paradigma Menuju Ekonomi Hijau. PPRK mengidentifikasi kebijakan pembangunan yang mempertahankan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan membantu pencapaian target pembangunan di berbagai sektor, disisi lain paradigma PRK mampu menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Terdapat lima kebijakan utama dalam pembangunan rendah karbon yakni, terkait energi terbarukan, perlindungan hutan dan restorasi gambut, pengelolaan sampah industri dan sampah rumah tangga, peningkatan produktivitas pertanian, serta perbaikan kelembagaan maupun tata kelola. Kategori sumber emisi/serapan GRK dalam perhitungan PRK yaitu (1) pertanian, kehutanan, penggunaan lahan lain; (2) energi; (3) limbah; (4) ekosistem pesisir dan kelautan.

Berdasarkan perhitungan IGRK menunjukkan bahwa besaran emisi sebelum Covid (2020) ada kecenderungan emisi GRK terus meningkat dan mengalami penurunan tajam pada saat puncak pandemic Covid-19 mencapai puncaknya pada Tahun 2020. Hal ini adalah wajar karena pada saat pandemi Covid-19 sangat berdampak pada kinerja perekonomian Bali yang bertumpu pada sektor pariwisata dan ada berbagai pembatasan kegiatan keluar rumah sehingga menjadikan kontribusi emisi dari sub sektor transportasi juga mengalami penurunan. Sektor energi tetap

menyumbang emisi terbesar, dalam kisaran 80% kemudian disusul oleh sektor pertanian, sektor limbah dan sektor kehutanan.

Dalam mengendalikan Mitigasi Gas Rumah Kaca, Strategi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan dengan kolaborasi dengan UPT Kementerian LHK serta dukungan seluruh stakeholder.
2. Meningkatkan pelaksanaan perlindungan hutan melalui pelaksanaan patrol perlindungan hutan yang dilakukan oleh seluruh UPTD KPH se-Bali.
3. Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi tentang Pergub 97 Tahun 2018 dan Pergub 47 Tahun 2019 kepada seluruh stakeholder di Kabupaten/Kota, Instansi vertikal, Sekolah, Pasar Modern, Toko Retail, Distributor Plastik, Produsen Plastik.
4. Dibentuknya Tim Kerthi Bali Sejahtera di setiap Desa di seluruh Kabupaten/Kota se-Bali, sebagai tindaklanjut pelaksanaan Pergub 97 Tahun 2018, Pergub 47 Tahun 2019 dan Pergub 24 Tahun 2020.
5. Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi pengelolaan sampah berbasis sumber dan melakukan pemilahan sampah di TPS 3R dan TPST di Desa/Kecamatan/ Kabupaten se-Bali, agar meminimalisir pembuangan sampah ke TPA.
6. Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah, serta Instansi Vertikal yang terkait. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan di TPA Sarbagita dengan sarana prasarana yang ada seoptimal mungkin.

Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pada tahun 2023 terealisasi 1.26% dari target 1.2% dengan tingkat ketercapaian 105%, bila dibandingkan dengan Persentase Bauran Energi Baru dan Terbarukan pada tahun 2021, capaian pada tahun 2023 mengalami peningkatan dan apabila dibandingkan dengan capaian target pada tahun 2023 Persentase Bauran Energi Baru dan Terbarukan telah melampaui target di RPJMD Semester Berencana Provinsi Bali sebesar 90%. ini mengidentifikasi bahwa Pemerintah Provinsi Bali ingin dimasa depan Bali Menjadi Mandiri Energi.

Inventarisasi potensi dan realisasi EBT termasuk penyelenggaraan kajian teknis penggunaan pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Indikator yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan

pencapaian tujuan/sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali adalah: Rasio Elektrifikasi; Persentase Bauran EBT; dan Persentase Konservasi Sumber Daya Mineral. Rasio elektrifikasi (RE) adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga. Rasio Elektrifikasi di Bali, semenjak akhir tahun 2018 telah mencapai 100%, dan diharapkan dapat tetap terjaga sebesar 100 %, meskipun ada penambahan jumlah rumah tangga, dan sampai dengan tahun 2023 masih dapat tetap terjaga 100%.

Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) yang merupakan energy bersih, adalah bagian dari kebijakan energi nasional dan daerah dalam rangka mencapai target bauran energi, serta menjaga keberlangsungan aspek lingkungan. Energi Bersih tidak semata bertujuan memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga memelihara ekosistem alam yang sehat, serta menjagakeanekaragaman hayati.

Diupayakan peningkatan bauran energi bersih melalui pengembangan potensi Energi Bersih untuk dapat dimanfaatkan sehingga mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mengurangi gas rumah kaca, serta pemberdayaan potensi daerah dengan optimal. Pada tahun 2023, Jumlah kapasitas Energi Bersih

dan Energi Baru Terbarukan yang sesuai dengan dokumen Rencana Umum Energi

Daerah (RUED) adalah sebesar 10,6 MW, di bawah target yang ditetapkan yaitu 11 MW. Realisasi tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 8,62 MW, akan tetapi persentase Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) justru mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dari 2,27% menjadi 1,26% di tahun 2023. Kondisi tersebut sebagai dampak adanya penambahan kategori pada perhitungan DEN (Dewan Energi Nasional), serta penggunaan bahan bakar fosil (BBM & Batubara) cenderung lebih tinggi dari pada EBT. Walaupun demikian, pada tahun 2023.

Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Bali juga telah menorehkan prestasi di Tingkat Nasional dalam pengelolaan energi terbarukan. Dewan Energi Nasional (DEN) menganugerahkan Penghargaan Peringkat Ketiga Kategori “Pemerintah yang Terfavorit dalam Mengkampanyekan Energi Bersih” Dilaksanakan upaya pembinaan kepada para

pengusaha/pemegang ijin untuk dapat melaksanakan kaidah teknis/rekomendasi teknis yang diterbitkan, seperti konservasi air tanah, pembangunan sumur resapan, maupun terkait jaminan reklamasi. Pada tahun 2023, dilaksanakan Program Pengelolaan Aspek Kegeologian, serta Program Pengelolaan Mineral dan Batubara.

Kebutuhan terhadap sumber daya alam (mineral bukan logam dan batuan serta air tanah) semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan dunia usaha di Bali. Apabila eksploitasi/pemanfaatannya tidak dikendalikan dengan cermat maka akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Tugas ini menjadi tantangan pemerintah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya mineral dalam mewujudkan dan menjaga Alam Bali beserta isinya tetap bersih.

Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, bertujuan untuk melaksanakan pendelegasian perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2022, melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan usaha pertambangan mineral bukan

logam dan batuan, serta evaluasi pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang izinnya sudah berakhir.

Arah Strategi Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan penggunaan energi bersih sebagai berikut :

1. Membuat/menyusun regulasi/peraturan-peraturan, edaran atau instruksi terkait urusan Energi Sumber Daya Mineral.
2. Menyiapkan standar operasional prosedur tata kelola pemanfaatan energi, ketenagalistrikan dan sumber daya mineral
3. Percepatan pelaksanaan Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Bali Energi Bersih
4. Percepatan pelaksanaan Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

Tabel Sasaran : “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan” Perbandingan Capaian/Realisasi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 s.d. Tahun 2023

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2022	2023			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2023 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Reformasi Birokrasi	72.16	73	91.41	125,21	73	125,21

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun 2023 terealisasi 91.41% dengan target yang diperjanjikan 73% dengan ketercapaian 125.21%, realisasi indeks reformasi birokrasi pada tahun 2023 berbeda dengan Indeks Reformasi Birokrasi pada Tahun 2022, pada tahun 2023 Indeks Reformasi Birokrasi dibagi 2 penilaian yaitu Reformasi General dan Reformasi Tematik sesuai dengan Permenpan & RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Pada Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Bali mendapatkan Penghargaan sebagai Pemerintah Provinsi Bali atas prestasinya sebagai instansi pemerintah dengan implementasi RB Tematik Terbaik pada semua Tema Tahun 2023

Tabel Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2016 s.d 2023

NO	Provinsi, Kab/Kota	Nilai Evaluasi AKIP 2017	Nilai Evaluasi AKIP 2018	Nilai Evaluasi AKIP 2019	Nilai Evaluasi AKIP 2020	Nilai Evaluasi AKIP 2021	Nilai Evaluasi AKIP 2022	Nilai Evaluasi AKIP 2023	Predikat
1	Provinsi Bali	66,16	67,29	69,31	69.49	70.10	72.16	91.41	BB

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023

Tren kenaikan Indeks RB dari tahun ke tahun meningkat positif namun kenaikannya kecil, hal ini disebabkan proses penilaian RB yang semakin ketat untuk meningkatkan kualitas Indeks RB di K/L/Pemda. Di tahun 2023 peningkatan kenaikan terjadi signifikan.

Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan upaya perbaikan dan menindaklanjuti rekomendasi evaluasi RB tahun 2023, yaitu sbb:

1. Melaksanakan Akselerasi kepada Indikator Kinerja Utama pada RB General yang dirasa kurang maksimal memperoleh nilai seperti : Indeks Kualitas Kebijakan;
2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi secara maksimal dengan memaparkan langsung ketercapaian secara triwulan di depan Bapak Gubernur Bali;

Guna mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, berikut upaya-upaya yang dapat kami laksanakan sebagai tindak lanjut, sbb:

- Menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik Tahun 2024 dengan menitikberatkan pada hasil LHE Reformasi Birokrasi yang dievaluasi pada Tahun 2023;
- Melaksanakan pendampingan terhadap penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan pada RB Tematik Pemerintah Provinsi Bali sehingga RB Tematik dapat berdampak pada masyarakat Provinsi Bali;
- Menyusun Aplikasi Pemantauan Pencapaian Renaksi yang dapat di patau langsung Gubernur.

4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Pencapaian target kinerja dari 22 Sasaran Strategis 2018-2023 untuk tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp 7.248.953.175.947,- dan terealisasi Rp 6.768.699.641.073,- atau 93,37%, meliputi Belanja Operasi sebesar Rp 4.474.769.277.170,- dengan realisasi Rp 3.954.414.302.113,- atau 88,37%, Belanja Modal sebesar Rp 1.409.820.872.741,- dengan realisasi Rp 920.204.818.152,- atau 65.27% dan Belanja Tidak Terduga Rp. 15.828.456.983,- dengan realisasi Rp. 9.519.788.187,- atau 60,14% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 480.253.534.873,- Data Per 31 Desember 2023

f. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(14)	(16)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase (%)	6.33	5,00 (4,60-5,40)	5,00 (4,60-5,40)
2	Laju Inflasi	Pesentase (%)	3.4	3,00±1%	3,00±1%
3	PDRB per kapita	Jumlah	54,62 juta	66 juta – 71 juta	66 juta – 71 juta
4	Indeks Gini	Persentase (%)	0,3640	0.3740	0.3740
5	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	Persentase (%)	3.91	3,75 (3,50-4,00)	3,75 (3,50-4,00)
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persentase (%)	74,45	77,78 (75,56-80,00)	77,78 (75,56-80,00)
7	Angka Melek Huruf	Persentase (%)	89.17	92.9	90.42

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(14)	(16)
8	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	9.72	11.40	11.40
9	Angka usia harapan hidup	tahun	71.4	72.5	72.5
10	Persentase balita gizi buruk	Persentase (%)	2	1	1
11	Prevalensi balita gizi kurang	Persentase (%)	13.1	5.6	5.6
12	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persentase (%)	100	100	100
13	Angka partisipasi angkatan kerja	Jumlah	2,561,518	#####	#####
14	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persentase (%)	76,56	76,80	76.80
15	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase (%)	1,37	2,32 (1,90-2,74)	2,32 (1,90-2,74)
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	75	82	82
17	Opini BPK	Status	Belum	WTP	WTP
18	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	95.90	96.86	96.86
19	Penguatan cadangan pangan	Persentase (%)	20	20	20
20	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persentase (%)	14.38	14.57	14.57
21	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	Persentase (%)	2.52	1.93	1.93
22	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persentase (%)	1.48	1.43	1.43
23	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	Persentase (%)	16.84	14.38	19,24-20,88
ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Distribusi Pengeluaran Kelompok Penduduk 40% terbawah	Persentase (%)	17.45	15.90	15.59
2	Nilai Tukar Petani	Persentase (%)	103.87	106.00	106.00
3	Angka kriminalitas	Kasus	4607	2262	2262
4	Indeks Kebahagiaan	Indeks	72,48 (2017)	74.98	74.98
5	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persentase (%)	23.40	25.93	25.93
6	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persentase (%)	15	25	25
ASPEK PELAYANAN UMUM					
Layanan Urusan Wajib Dasar					
1 Pendidikan					
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase (%)	79.1	84.1	84.1
1.2	Angka Partisipasi Kasar				
1.2.1	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	Persentase (%)	105.9	109.84	109.84
1.2.2	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	Persentase (%)	106.95	113.75	113.75

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(14)	(16)
1.2.3	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA	Persentase (%)	100.4	104.42	104.42
1.3	Angka Pendidikan yang Ditamatkan				
1.3.1	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI/Paket A	Persentase (%)	24.55	26.02	26.02
1.3.2	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTS/Paket B	Persentase (%)	11.73	13.2	13.2
1.3.3	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C	Persentase (%)	23.41	24.88	24.88
1.4	Angka Partisipasi Murni				
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persentase (%)	96.06	100	100
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persentase (%)	84.54	100	100
1.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Persentase (%)	73.15	100	100
1.5	Angka Partisipasi Sekolah				
1.5.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persentase (%)	99.56	99.56	99.56
1.5.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persentase (%)	97.92	97.92	97.92
1.5.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	Persentase (%)	82.35	82.35	82.35
1.6	Angka Putus Sekolah				
1.6.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persentase (%)	0.05	0	0
1.6.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persentase (%)	0.10	0.05	0.05
1.6.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Persentase (%)	0.25	0.20	0.20
1.7	Angka Kelulusan				
1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persentase (%)	100	100	100
1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persentase (%)	100	100	100
1.7.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Persentase (%)	99.99	100	100
1.8	Angka Transisi (AT)				
1.8.1	Angka Transisi (AT) SMP/MTs	Persentase (%)	96.24	101.53	101.53
1.8.2	Angka Transisi (AT) SMA/SMK/MA	Persentase (%)	95.85	101.53	101.53
1.9	Fasilitas Pendidikan				
1.9.1	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persentase (%)	93.28	97.01	97.01
1.9.2	Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persentase (%)	92.07	95.80	95.8

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(14)	(16)
1.9.3	Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Persentase (%)	96.00	98.33	98.33
1.10	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	Persentase (%)	63.77	64.03	64.03
1.11	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	Persentase (%)	18.12	23,95	23,95
1.12	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	Persentase (%)	60.61	66,09	66,09
1.13	Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah	Persentase (%)	61.27	65,37	65,37
	- SMA/MA (per 1000 murid)		78.88		
	- SMK (per 1000 murid)		70.05		
1.14	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata				
1.14. 1	SD/MI	Persentase (%)	0.03	0.03	0.03
1.14. 2	SMP/MTS	Persentase (%)	0.09	0.09	0.09
1.14. 3	SMA/SMK/MA	Persentase (%)	0.10	0.10	0.10
1.15	Proporsi murid kelas I yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persentase (%)	100.00	109.61	109.61
1.16	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persentase (%)	99.87	99.91	99.91
1.17	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persentase (%)	92.98	93.30	93.30
1.18	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV				
1.18. 1	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (PAUD)	Persentase (%)	87.96	77.95	77.95
1.18. 2	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SD/MI)	Persentase (%)	93.16	97.76	97.76
1.18. 3	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMP/MTS)	Persentase (%)	95.91	98.46	98.46
1.18. 4	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMA/SMK/MA)	Persentase (%)	96.39	97.84	97.84
2 Kesehatan					
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	4,55	10	10
2.2	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	5.17	5.50	5.50

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(14)	(16)
2.3	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	3.2	4.41	4.41
2.4	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	/100.000 KH	54.03	65	65
2.5	Rasio Posyandu per Satuan Balita	Persentase (%)	1.45	1.52	1.52
2.6	Rasio Puskesmas, liklinik, pustu per satuan penduduk				
2.6.1	Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	Persentase (%)	1.17	0.027	0.027
2.6.2	Rasio klinik	Persentase (%)	0.021	0.032	0.032
2.6.3	Rasio Puskesmas Pembantu	Persentase (%)	0.12	0.12	0.12
2.7	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Persentase (%)	0.016	0.0018	0.0018
2.8	Rasio dokter per satuan penduduk	Persentase (%)	0.35	0.97	0.97
2.9	Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk				
2.9.1	Rasio Tenaga Perawat per Penduduk	Persentase (%)	1.85	2.6	2.6
2.9.2	Rasio Tenaga Bidan per Penduduk	Persentase (%)	1.07	1.25	1.25
2.10	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persentase (%)	86.53	88.5	88.5
2.11	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persentase (%)	95.97	96.8	96.8
2.12	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	Persentase (%)	99.16	100	100
2.13	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persentase (%)	100	100	100
2.14	Case Detection Rate TBC	Persentase (%)	30	37	37
2.15	Persentase keberhasilan pengobatan TBC	Persentase (%)	89	90	90
2.16	Cakupan penanganan penderita penyakit DBD	Persentase (%)	100	100	100
2.17	Incidence Rate DBD	/100.000 penduduk	21.1	102	102
2.18	Penderita diare yang ditangani	Persentase (%)	70.20	100	100
2.19	Angka kematian Malaria	Persentase (%)	0	<1	<1
2.20	Annual Parasite Incidence (API)	/1000 penduduk	0.02	< 1	< 1
2.21	Cakupan penemuan kasus HIV/AIDS	Persentase (%)	66.4	90	90
2.22	Persentase Kasus HIV yang diobati	Persentase (%)	57.54	55	55
2.23	Proporsi jumlah	Persentase	21	22.2	22.2

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(14)	(16)
	penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	(%)			
2.24	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persentase (%)	100	100	100
2.25	Cakupan kunjungan bayi	Persentase (%)	102.92	100	100
2.26	Cakupan Kunjungan Puskesmas	Persentase (%)	80	100	100
2.27	Cakupan puskesmas pembantu	Persentase (%)	0.12	0.12	0.12
2.28	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persentase (%)	94.49	96.5	96.5
2.29	Cakupan Pelayanan nifas	Persentase (%)	96.81	99	99
2.30	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persentase (%)	100	100	100
2.31	Cakupan pelayanan anak balita	Persentase (%)	100	100	100
2.32	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Persentase (%)	100	100	100
2.33	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Persentase (%)	100	100	100
2.34	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persentase (%)	100	100	100
2.35	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persentase (%)	100	100	100
2.36	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	Persentase (%)	100	100	100
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
3.1	Persentase cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persentase (%)	71.51	80.27	80.27
3.2	Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	Persentase (%)	68.00	48.50%	48.50%
3.4	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persentase (%)	80.81	78.67	78.67
3.5	Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik	Persentase (%)	58.00	74.00	74.00
3.6	Persentase pelaku jasa	Persentase	70.00	19.64	19.64

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(14)	(16)
	kontruksi yang bersertifikat	(%)			
3.7	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan Pengelolaan air limbah	Persentase (%)	100	100	100
3.8	Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi	Persentase (%)	100	95.00	95.00
3.9	Persentase penyerapan air curah SPAM yang dikelola Provinsi oleh kabupaten/kota	Persentase (%)	100	43.00%	43.00%
3.10.1	Persentase cakupan layanan Air Minum Aman	Persentase (%)	86.00	93.00	93.00
3.10.2	Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak	Persentase (%)	82.00	89.95	89.95
3.11	Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	Persentase (%)	90.00	95.00	95.00
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
4.5	Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi	Persentase (%)	12.00	71.00	71.00
4.6	Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh	Persentase (%)	8.20	6.62	6.62
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persentase (%)	29.83	30.59	30.59
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persentase (%)	100	100	100
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persentase (%)	35.54	35.59	35.59
5.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persentase (%)	44.62	44.67	44.67
5.5	Persentase Penegakan PERDA	Persentase (%)	100	100	100
6	Sosial				

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(14)	(16)
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persentase (%)	0.58	0.33	1,82
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	Persentase (%)	0.67	1.08	5,55
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase (%)	0.41	0.72	3.68
6.4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persentase (%)	0.96	0	0
6.5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persentase (%)	3,8	60	60
6.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase (%)	25	20	20
6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persentase (%)	100	100	100
6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persentase (%)	100	100	100
6.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persentase (%)	60,03	60	60
Layanan Urusan Wajib Non Dasar					
1	Tenaga Kerja				
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Per 1000 Perusahaan	0,006 : 1000 perusahaan	0,003 : 1000 perusahaan	2,26 : 1000 perusahaan
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persentase (%)	100.00	100.00	100.00
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persentase (%)	78.05	100.00	100.00
1.4	Keselamatan dan perlindungan	Persentase (%)	0.94	6.91	25.70
1.5	Besaran pekerja/buruh	Persentase	29.93	39.53	39.53

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(14)	(16)
	yang menjadi peserta program Jamsostek	(%)			
1.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Persentase (%)	0	0	0
1.7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Persentase (%)	4.49	8.17	46.95
1.8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	Persentase (%)	42.26	19.37	19.37
1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persentase (%)	38.4	18.01	24.00
1.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Persentase (%)	100	100	100
1.11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persentase (%)	80	-	80
1.12	Rasio lulusan S1/S2/S3	Per 10.000 Penduduk	0,073: 10.000 Penduduk	0,069 : 10.000 Penduduk	0,069 : 10.000 Penduduk
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persentase (%)	46.03	46.95	46.95
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persentase (%)	9.09	17.90	17.90
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persentase (%)	46.70	49.10	49.10
2.4	Rasio KDRT	Persentase (%)	0.056	0.045	0.045
2.5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	Persentase (%)	-	-	-
2.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persentase (%)	72.55	73	73
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persentase (%)	100	100	100
2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persentase (%)	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(14)	(16)
2.9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Persentase (%)	100	100	100
2.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase (%)	100	100	100
2.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persentase (%)	100	100	100
2.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persentase (%)	100	100	100
2.13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persentase (%)	88.50	88.50	88.50
2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Persentase (%)	1.01	1.00	1.00
2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Persentase (%)	0.97	1.00	1.00
2.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Persentase (%)	0.94	1.00	1.00
2.17	Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi	Persentase (%)	0.93	1.00	1.00
2.18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Persentase (%)	0.93	0.98	0.98
2.19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	Persentase (%)	-	-	-
3	Pangan				
3.1	Ketersediaan Pangan Utama				
3.1.1	Padi	Ton	847,523	#####	#####
3.1.2	Jagung	Ton	43,892	46,000	46,000
3.1.3	Kedelai	Ton	2,500	2,760	2,760
3.1.4	Kacang Tanah	Ton	4,408	4,967	4,967
3.1.5	Ubi Kayu	Ton	53,267	56,000	56,000
3.1.6	Kacang Hijau	Ton	170	181	181
3.1.7	Ubi Jalar	Ton	25,042	27,648	27,648
3.2	Ketersediaan energi dan	Kkal/Kap/Hari	2,646	2,650	2,650

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(14)	(16)
	protein perkapita	Gram/Kap/Hari	63	63	63
3.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persentase (%)	80.00	95.00	95.00
4	Pertanahan				
4.1	Persentase data informasi pertanahan yang handal	Persentase (%)	0	50	50
5	Lingkungan Hidup				
5.1	Tersedianya dokumen RPPLH provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya
5.2	Tersusunnya RPPLH Provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya
5.3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya
5.4	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Dokumen	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
5.5	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ya/Tidak	ya	ya	ya
5.6	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Indeks	91.89	87,48	87,48
5.7	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Indeks	63,17	68,13	68,13
5.8	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	38,57	41,95	41,95
5.9	Peningkatan Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	N/A	62.76	62.76
5.10	Laporan Inventarisasi GRK	Jumlah	6	1	6
5.11	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Jumlah	1	1	6
5.12	Jumlah limbah B3 yang dikelola			9 kab/kota	9 kab/kota
5.13	Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur	Persentase (%)	100	100	100
5.14	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Perusahaan	17 perusahaan	10 Perusahaan	60 Perusahaan
5.15	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di	Orang	1	1	1

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(14)	(16)
	Daerah (PPLHD) di Provinsi				
5.16	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Persentase (%)	100	100	100
5.17	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	Persentase (%)	100	100	100
5.18	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Persentase (%)	100	100	100
5.19	Penetapan hak MHA	Persentase (%)	100	100	100
5.20	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Jumlah (Orang)	30	30	150
5.21	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Persentase (%)	100	100	100
5.22	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Jumlah (Orang)	30	30	30
5.23	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Jumlah	30 Adiwiyata, 2 Kota Adipura, 1 Kalpataru	30 Adiwiyata	30 Adiwiyata
5.24	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	Jumlah (Kasus)	15 Kasus	2 kasus	46 kasus
5.25	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi (potensi timbulan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada)	Ton/tahun	9,305,453	#####	#####
5.26	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di provinsi (penanganan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada)	Persentase (%)	73	72	72
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
6.1	Rasio pendudukan ber- KTP per satuan penduduk	Persentase (%)	0.93	1	1
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	Persentase (%)	84	96.67	96.67
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	Persentase (%)	40	65.38	65.38
6.4	Ketersediaan database kependudukan skala	Ada/Tidak	ada	ada	ada

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(14)	(16)
	provinsi				
6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	sudah	sudah	sudah
6.6	Cakupan penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persentase (%)	94.62	100	100
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persentase (%)	33.64	58	58
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
7.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Persentase (%)	43.78	84.9	84.9
7.2	Persentase PKK desa/kelurahan yang terbina	Persentase (%)	12.29	12.29	12.29
7.3	Persentase LPM Berprestasi	Persentase (%)	14.24	23.02	23.02
7.4	Persentase PKK aktif Desa/Kelurahan	Persentase (%)	60.61	100	100
7.5	Persentase Posyandu aktif	Persentase (%)	69.8	79.8	79.8
7.6	Persentase Swadaya Murni Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persentase (%)	200	325	325
7.7	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Persentase (%)	50	76.92	76.92
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persentase (%)	2.15	2,15	2,15
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	Persentase (%)	2.1	2.3	2.3
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persentase (%)	29	40	40
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persentase (%)	13.73	30	30
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah	1	2	2
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data	Jumlah	3	6	6

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(14)	(16)
	profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan				
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Jumlah	2	12	12
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persentase (%)	2.02	2,3	2,3
8.9	Angka pemakain kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persentase (%)	57,9	56.5	56.5
8.10	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Persentase (%)	36	27.66	27.66
8.11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persentase (%)	35.12	39.75	39.75
8.12	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase (%)	18.56	8.88	8.88
8.13	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase (%)	43.46	41	41
8.14	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persentase (%)	29.6	22.5	22.5
8.15	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persentase (%)	87.80	88,9	88,9
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persentase (%)	85.2	90	90
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persentase (%)	70.48	73	73
8.18	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persentase (%)	77.2	100	100
8.19	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persentase (%)	266	530	530
8.20	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian	Persentase (%)	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(14)	(16)
	penduduk				
8.21	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persentase (%)	88.6	94	94
8.22	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Rasio	1	1	1
8.23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persentase (%)	100	100	100
8.24	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persentase (%)	7	16	16
8.25	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Persentase (%)	22,7	21,64	21,64
8.26	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Persentase (%)	9.4	15.5	15.5
9 Perhubungan					
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum				
9.1.1	Angkutan Darat	Jumlah	351,739	#####	#####
9.1.2	Angkutan Laut	Jumlah	13,958,286	#####	#####
9.1.3	Angkutan Udara	Jumlah	23,779,178	#####	#####
9.2	Jumlah ijin trayek	Jumlah	141	165	165
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah	146,324	#####	#####
9.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis				
9.4.1	Jumlah Pelabuhan	Jumlah	8	9	9
9.4.2	Jumlah Bandara	Jumlah	1	2	2
9.4.3	Jumlah Terminal Bis	Jumlah	20	20	20
9.5	Persentase layanan angkutan darat	Persentase (%)	3	3	3
9.7	Pemasangan Rambu-rambu	Persentase (%)	25.41	60.00	60.00
9.8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	1:470	1:300	1:300
9.9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum				
9.9.1	Angkutan Darat				
	- Orang	Jumlah	351,739	#####	#####
	- Barang	Jumlah		#####	#####

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(14)	(16)
			121,818		
9.9.2	Angkutan Laut				
	- Orang	Jumlah	13,958,286	#####	#####
	- Barang	Jumlah	543,159,485	#####	#####
9.9.3	Angkutan Udara				
	- Orang	Jumlah	23,779,178	#####	#####
	- Barang	Jumlah	313,520,106	#####	#####
9.10	Jumlah orang/ barang melalui dermaga/bandara/termin al per tahun				
9.10. 1	Dermaga				
	- Orang	Jumlah	13,958,286	#####	#####
	- Barang	Jumlah	543,159,485	#####	#####
9.10. 2	Bandara				
	- Orang	Jumlah	23,779,178	#####	#####
	- Barang	Jumlah	313,520,106	#####	#####
9.10. 3	Terminal				
	- Orang / Barang	Jumlah	351739 / 121818	527604/ 155471	527604/ 155471
10	Komunikasi dan Informatika				
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan				
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persentase (%)	50.00	90.00	90.00
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon				
10.3. 1	Persentase rumah tangga yang menggunakan HP	Persentase (%)	93.62	95.00	95.00
10.3. 2	Persentase rumah tangga yang menggunakan Telepon	Persentase (%)	5.34	3.01	3.01
10.4	Proporsi Rumah Tangga dengan akses internet	Persentase (%)	46.42	74.85	74.85
10.5	Proporsi Rumah Tangga yang memiliki komputer pribadi	Persentase (%)	33.25	52.15	52.15
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah				
11.1	Persentase Koperasi Aktif	Persentase (%)	87.42	89.92	89.92

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(14)	(16)
11.2	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah	312,967	#####	#####
11.3	Persentase peningkatan produktifitas koperasi	Persentase (%)	4.1	7.50	7.50
12	Penanaman Modal				
12.1	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	166	176	176
12.2	Jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah (Triliun)	4.46	5.33	5.33
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	Persentase (%)	34.16	28.53	28.53
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Persentase (%)	0.16	0.16	0.16
12.5	Indeks pelayanan publik perijinan dan non perijinan	Indeks	86	86	86
13	Kepemudaan dan Olah Raga				
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persentase (%)	76	81	81
13.2	Persentase Wirausaha Muda	Persentase (%)	0.82	0.87	0.87
13.3	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persentase (%)	51.2	60	60
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persentase (%)	38.88	48	48
13.5	Cakupan Pembinaan atlet muda	Persentase (%)	3.31	15	15
13.6	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah	924 Orang	205 Orang	959 Orang
13.7	Jumlah prestasi Olahraga	Jumlah	20 cabor	30 cabor	30 cabor
14	Statistik				
14.1	Buku "Kabupaten dalam angka"	Jumlah	9	9	9
14.2	Buku "PDRB"	Jumlah	1 Buku	1 Buku	1 Buku
15	Persandian				
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	Persentase (%)	91.30	100.00	100.00
16	Kebudayaan				
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah	3	3	3
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan				
16.2. 1	Benda Cagar Budaya	Jumlah	19,336	19,336	19,336
16.2. 2	Bangunan Cagar Budaya	Jumlah	97	97	97
16.2. 3	Situs Cagar Budaya	Jumlah	611	711	711
16.2. 4	Kawasan Cagar Budaya	Jumlah	5	5	5
16.2.	Struktur Cagar Budaya	Jumlah	328	328	328

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(14)	(16)
5					
16.3	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu				
16.3.1	Benda Cagar Budaya	Jumlah	-	-	-
16.3.2	Bangunan Cagar Budaya	Jumlah	-	-	-
16.3.3	Situs Cagar Budaya	Jumlah	-	-	-
16.3.4	Kawasan Cagar Budaya	Jumlah	-	-	-
16.4	Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	Jumlah	233	368	368
17	Perpustakaan				
17.1	Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun	Persentase (%)	6	8.5	8.244
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah	225.450	3.000	#####
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	-	n/a	n/a
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan /tahun	Jumlah	61.823	42,000	42,000
17.5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Jumlah	9,651	1,500	19,151
17.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Jumlah	124	35	155
18	Kearsipan				
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persentase (%)	42	20%	100%
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Persentase (%)	70	30	150
LAYANAN URUSAN PILIHAN					
1	Pariwisata				
1.1	Kunjungan Wisatawan				
1.1.1	Wisatawan Nusantara	Jumlah	9,757,991	#####	#####
1.1.2	Wisatawan Mancanegara	Jumlah	6,070,473	#####	#####
1.2	Lama Tinggal Wisatawan				
1.2.1	Wisatawan Nusantara	Jumlah	4.00	2.55	2.55
1.2.2	Wisatawan Mancanegara	Jumlah	10.45	3.60	3.60
1.3	PAD Sektor Pariwisata	Persentase (%)	48.51	25.93	25.93
2	Pertanian				
2.1	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB	Persentase (%)	14.38	14.57	14.57
2.2	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB	Persentase (%)	2.52	1.93	1.93
2.3	Kontribusi Sektor	Persentase	1.48	1.43	1.43

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(14)	(16)
	Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB	(%)			
2.4	Kontribusi Produksi Kelompok Pertanian terhadap PDRB	Persentase (%)	13.81	14.38	19,24-20,88
2.5	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar				
2.5.1	Padi	Jumlah	60.70	58.80	61.50
2.5.2	Jagung	Jumlah	43,892	31,22	31,22
2.5.3	Kedelai	Jumlah	2,687	12,92	12,92
2.6	Cakupan Bina Kelompok Petani	Persentase (%)	9,011	9.011	9.011
3	Kehutanan				
3.1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Persentase (%)	1,6%	1,48%	1,48%
3.2	Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah (Ha)	105.5	835	4171,98
3.3	Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan	Persentase (%)	60	60	60
4	Energi dan Sumber Daya Mineral				
4.1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persentase (%)	100	100	100
4.2	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	Persentase (%)	80	100	100
4.3	Persentase Pertambangan Tanpa Ijin	Persentase (%)	-	-	-
5	Perdagangan				
5.1	Ekspor Bersih Perdagangan	Persentase (%)	2	3	3
5.2	Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat	Persentase (%)	15.09	33.96	33.96
6	Perindustrian				
6.1	Cakupan Bina Perajin	Persentase (%)	3.35	4.04	4.04
7	Transmigrasi				
7.1	Persentase Transmigran Swakarsa	Persentase (%)	-	-	-
8	Kelautan dan Perikanan				
8.1	Produksi Perikanan	Jumlah	136,496.55	#####	#####
8.2	Konsumsi Ikan	Jumlah	34.56	36.28	36.28
8.3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Persentase (%)	100	90	100
8.4	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Persentase (%)	107.36	97	100
8.5	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman	Ton	97,157.60	#####	#####
8.6	Rasio Kawasan Lindung	Persentase	80	80	80

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(14)	(16)
	Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	(%)			
8.7	Nilai Tukar Nelayan	Persentase (%)	104.64	119.2	119.2
PENUNJANG URUSAN					
1 Perencanaan Pembangunan					
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Persentase (%)	100	100	100
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA	Persentase (%)	100	100	100
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Persentase (%)	100	100	100
1.4	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persentase (%)	100	100	100
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persentase (%)	100	100	100
1.7	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	Persentase (%)	100	100	100
2 Keuangan					
2.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP
2.2	Persentase SiLPA	Persentase (%)	6	6	6
2.3	Persentase SiLPA terhadap APBD	Persentase (%)	6	6	6
2.4	Persentase Program / Kegiatan yang Tidak Terlaksana	Persentase (%)	0	0	0
2.5	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	Persentase (%)	20	20	20
2.6	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	Persentase (%)	10	10	10
2.7	Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung	Rasio	26,70 : 73,30	30,54 : 69,45	30,54 : 69,45
2.8	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	Jumlah	1,249,485,906,4 61	#####	#####
2.9	Penetapan APBD	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan					
3.1	Rata-rata Lama	Persentase	20	20	20

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(14)	(16)
	Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	(%)			
3.2	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase (%)	32	3	3
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persentase (%)	7.61	38.00	38.00
3.4	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Jumlah	45	52	52
3.5	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	Jumlah	4,355	3981	3981
3.6	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah	Jumlah	6,924	6.869	6.869
4	Penelitian dan Pengembangan				
4.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persentase (%)	100	100	100
4.2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persentase (%)	100	100	100
	Penerapan SIDA:		-	-	-
4.3	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persentase (%)	13,6 6/44	14% 7/50	14% 7/50
4.4	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	Persentase (%)	66,6% 6/9	70% 7/8	70% 7/8
5	Pengawasan				
5.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persentase (%)	9	27	27
5.2	Persentase Pelanggaran Pegawai	Persentase (%)	0.06	5	5
5.3	Jumlah Temuan BPK	Persentase (%)	14	10	10
6	Sekretariat Dewan				
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada
6.2	Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(14)	(16)
	Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)				
6.3	Terintegrasi Program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada

Sumber : Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023

NO	NAMA OPD	URUSAN	JUMLAH			PAGU	Bobot Kinerja per Tahun (%)	JUMLAH REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			KEUANGAN (Rp.)	KEUANGAN (%)	KINERJA (%)
1	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1	2	15	48	245.214.477.367,00	100,00%	160.650.025.881,00	86,00%	98,00%
2	SEKRETARIAT DAERAH	1		2	2	124.206.730.168,00	100,00%	56.763.836.792,00	86,00%	96,00%
	BIRO UMUM DAN PROTOKOL	1		12	23	114.754.695.557,00	100,00%	83.577.899.275,00	83,00%	94,00%
	BIRO ORGANISASI	1		7	19	2.793.509.644,00	100,00%	1.876.931.594,00	87,00%	100,00%
	BIRO HUKUM	1		4	13	5.870.907.752,00	100,00%	5.549.561.221,00	95,00%	100,00%
	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1		8	17	80.314.359.266,00	100,00%	75.238.365.923,00	94,00%	98,00%
	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN	1		11	19	14.404.390.364,00	100,00%	5.718.489.520,00	90,00%	96,00%
2	SEKRETARIAT DAERAH	1	12	44	93	342.344.592.751,00	100,00%	228.725.084.325,00	89,17%	97,33%
3	DINAS KEBUDAYAAN	1		12	31	117.682.634.001,00	100,00%	111.853.439.217,00	95,00%	96,00%
	UPTD TAMAN BUDAYA	1		5	15	7.582.288.168,00	100,00%	6.746.815.441,00	90,00%	92,00%
	UPTD MUSEUM BALI	1		5	16	4.595.573.852,00	100,00%	4.240.654.773,00	92,00%	99,00%
	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI	1		4	15	5.409.891.104,00	100,00%	5.011.597.561,00	93,00%	97,00%
3	DINAS KEBUDAYAAN	1	6	26	77	135.270.387.125,00	100,00%	127.852.506.992,00	92,50%	96,00%
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	3	13	46	24.650.120.464,00	100,00%	20.164.186.635,00	82,00%	100,00%
5	DINAS KESEHATAN	1		15	31	278.983.297.829,00	100,00%	243.819.874.588,00	87,00%	100,00%
	RUMAH SAKIT JIWA	1		3	4	39.462.751.834,00	100,00%	36.716.251.863,00	93,00%	100,00%
	RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA	1		1	1	77.359.291.250,00	100,00%	73.571.729.447,00	95,00%	100,00%
	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN	1		5	8	11.791.795.288,00	100,00%	6.397.901.492,00	84,00%	96,00%
	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT	1		5	8	6.110.175.336,00	100,00%	5.794.839.807,00	95,00%	98,00%
	UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL	1		5	9	2.481.941.344,00	100,00%	2.201.661.876,00	89,00%	98,00%
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA	1		3	4	234.925.875.671,00	100,00%	204.358.785.121,00	87,00%	100,00%
	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN	1		6	11	9.903.354.091,00	100,00%	8.981.321.957,00	91,00%	94,00%
5	DINAS KESEHATAN	1	5	43	76	661.018.482.643,00	100,00%	581.842.366.151,00	90,13%	98,25%

NO	NAMA OPD	URUSAN	JUMLAH			PAGU	Bobot Kinerja per Tahun (%)	JUMLAH REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			KEUANGAN (Rp.)	KEUANGAN (%)	KINERJA (%)
6	DINAS PARIWISATA	1	5	12	28	14.165.518.756,00	100,00%	13.639.016.077,00	96,00%	100,00%
7	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1		13	24	17.580.927.118,00	100,00%	15.516.535.428,00	88,00%	99,00%
	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	1		1	1	3.962.718.006,00	100,00%	3.861.721.812,00	97,00%	97,00%
7	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1	7	14	25	21.543.645.124,00	100,00%	19.378.257.240,00	92,50%	98,00%
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1		14	24	27.404.216.232,00	100,00%	24.442.553.811,00	89,00%	98,00%
	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	1		4	9	406.954.880,00	100,00%	372.965.981,00	92,00%	94,00%
	UPTD RUMAH KREATIF	1		4	7	805.619.292,00	100,00%	731.356.842,00	91,00%	95,00%
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	8	22	40	28.616.790.404,00	100,00%	25.546.876.634,00	90,67%	95,67%
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	2	9	23	44.660.448.129,00	100,00%	43.693.481.519,00	98,00%	98,00%
10	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1		7	14	22.215.513.565,00	100,00%	21.407.570.837,00	96,00%	100,00%
	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	1		3	5	3.565.670.534,00	100,00%	2.832.543.235,00	79,00%	92,00%
	UPTD PELABUHAN PERIKANAN	1		3	5	264.120.792,00	100,00%	181.824.625,00	89,00%	95,00%
	UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI	1		3	5	1.408.486.008,00	100,00%	1.255.075.819,00	89,00%	81,00%
	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	1		3	4	838.377.326,00	100,00%	776.767.468,00	93,00%	95,00%
10	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	6	19	33	28.292.168.225,00	100,00%	26.453.781.984,00	89,20%	92,60%
11	INSPEKTORAT DAERAH	1	3	10	32	43.271.815.993,00	100,00%	33.152.456.157,00	87,00%	97,00%
12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1		7	12	16.446.111.457,00	100,00%	15.401.592.577,00	94,00%	98,00%
	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH	1		6	8	7.704.429.496,00	100,00%	7.210.658.862,00	94,00%	95,00%
12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	2	13	20	24.150.540.953,00	100,00%	22.612.251.439,00	94,00%	96,50%
13	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	5	10	21	113.575.445.756,00	100,00%	112.303.018.855,00	99,00%	100,00%
14	DINAS PERHUBUNGAN	1		13	32	26.553.736.317,00	100,00%	22.533.020.655,00	85,00%	94,00%
	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA	1		4	7	17.904.364.460,00	100,00%	7.000.881.982,00	79,00%	92,00%
	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	1		5	9	550.896.460,00	100,00%	457.878.542,00	83,00%	94,00%
	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN	1		4	11	1.346.819.860,00	100,00%	779.439.257,00	78,00%	92,00%
	UPTD PERLENGKAPAN JALAN	1		4	7	1.956.925.532,00	100,00%	1.633.964.458,00	83,00%	95,00%
14	DINAS PERHUBUNGAN	1	4	30	66	48.312.742.629,00	100,00%	32.405.184.894,00	81,60%	93,40%
15	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		12	38	2.078.864.485.313,00	100,00%	1.766.110.077.099,00	85,00%	100,00%
	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1		3	9	716.030.072,00	100,00%	421.867.961,00	59,00%	100,00%
15	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	3	15	47	2.079.580.515.385,00	100,00%	1.766.531.945.060,00	72,00%	100,00%
16	BADAN PENDAPATAN	1		9	28	135.462.975.786,00	100,00%	127.454.243.738,00	94,00%	93,00%

NO	NAMA OPD	URUSAN	JUMLAH			PAGU	Bobot Kinerja per Tahun (%)	JUMLAH REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			KEUANGAN (Rp.)	KEUANGAN (%)	KINERJA (%)
	DAERAH									
	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG	1		4	17	5.750.315.068,00	100,00%	5.260.154.367,00	91,00%	91,00%
	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM	1		4	16	1.953.686.192,00	100,00%	1.652.696.220,00	85,00%	91,00%
	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG	1		4	16	2.563.600.052,00	100,00%	2.215.742.263,00	86,00%	91,00%
	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI	1		4	17	2.173.265.778,00	100,00%	1.995.553.998,00	92,00%	91,00%
	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR	1		4	17	3.463.858.876,00	100,00%	3.197.957.930,00	92,00%	91,00%
	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA	1		4	15	2.362.056.630,00	100,00%	2.128.159.552,00	90,00%	91,00%
	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN	1		4	16	2.602.964.668,00	100,00%	2.053.756.411,00	79,00%	91,00%
	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG	1		4	16	4.852.995.204,00	100,00%	4.511.664.128,00	93,00%	91,00%
	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR	1		4	17	5.318.388.764,00	100,00%	4.913.561.364,00	92,00%	91,00%
16	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1	3	45	175	166.504.107.018,00	100,00%	155.383.489.971,00	89,40%	91,20%
17	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK	1	5	11	36	470.201.344.430,00	100,00%	221.272.148.793,00	97,00%	100,00%
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1	6	11	22	18.450.969.438,00	100,00%	17.035.892.530,00	92,00%	100,00%
19	BADAN PENGHUBUNG	1	2	7	17	8.696.475.589,00	100,00%	7.873.827.249,00	91,00%	100,00%
20	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	2		15	83	1.824.781.304.468,00	100,00%	1.544.991.565.039,00	95,00%	99,00%
	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN	2		6	16	3.360.618.324,00	100,00%	2.743.741.138,00	92,00%	89,00%
	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN	2		6	9	913.966.544,00	100,00%	700.523.513,00	87,00%	100,00%
20	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	2	8	27	108	1.829.055.889.336,00	100,00%	1.548.435.829.690,00	91,33%	96,00%
21	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	1	2	9	29	25.859.700.589,00	100,00%	19.980.428.417,00	97,00%	100,00%
22	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	2		18	33	27.578.145.616,00	100,00%	23.842.447.952,00	86,00%	99,00%
	UPTD PELAYANAN SOSIAL	2		6	25	7.650.198.435,00	100,00%	6.480.168.674,00	85,00%	96,00%
	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	2		6	10	893.767.784,00	100,00%	620.565.992,00	89,00%	90,00%

NO	NAMA OPD	URUSAN	JUMLAH			PAGU	Bobot Kinerja per Tahun (%)	JUMLAH REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			KEUANGAN (Rp.)	KEUANGAN (%)	KINERJA (%)
22	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	2	11	30	68	36.122.111.835,00	100,00%	30.943.182.618,00	86,67%	95,00%
23	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL	1	7	12	26	33.141.185.895,00	100,00%	31.305.932.203,00	94,00%	100,00%
24	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	2		16	27	76.729.088.501,00	100,00%	75.047.633.050,00	98,00%	98,00%
	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	2		5	13	2.066.709.084,00	100,00%	1.753.387.535,00	85,00%	100,00%
	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK	2		4	10	3.457.256.528,00	100,00%	3.216.689.868,00	93,00%	90,00%
	UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	2		5	13	6.844.306.966,00	100,00%	6.308.468.907,00	92,00%	86,00%
	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	2		4	12	5.699.574.132,00	100,00%	4.967.024.770,00	87,00%	91,00%
24	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	2	9	34	75	94.796.935.211,00	100,00%	91.293.204.130,00	91,00%	93,00%
25	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	2		14	25	30.409.857.524,00	100,00%	28.841.611.047,00	95,00%	80,00%
	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA	2		5	12	1.791.825.656,00	100,00%	1.738.970.274,00	97,00%	97,00%
	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA	2		4	10	445.595.090,00	100,00%	377.119.538,00	85,00%	95,00%
25	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	2	9	23	47	32.647.278.270,00	100,00%	30.957.700.859,00	92,33%	90,67%
26	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT	1	2	9	16	484.496.863.911,00	100,00%	329.018.920.308,00	88,00%	99,00%
27	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	2		11	21	47.534.005.229,00	100,00%	35.385.636.571,00	74,00%	100,00%
	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	2		3	4	663.734.239,00	100,00%	459.526.603,00	79,00%	96,00%
	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH	2		4	8	10.309.941.180,00	100,00%	7.721.533.317,00	85,00%	89,00%
	UPTD TAHURA NGURAH RAI	2		3	6	184.305.596,00	100,00%	141.061.114,00	87,00%	97,00%
	UPTD KPH BALI UTARA	2		3	8	865.313.032,00	100,00%	832.437.363,00	96,00%	97,00%
	UPTD KPH BALI TIMUR	2		4	9	604.251.264,00	100,00%	561.225.995,00	93,00%	94,00%
	UPTD KPH BALI SELATAN	2		3	10	414.556.042,00	100,00%	380.800.404,00	92,00%	97,00%
	UPTD KPH BALI BARAT	2		3	9	301.931.888,00	100,00%	216.276.999,00	87,00%	97,00%
27	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	2	8	34	75	60.878.038.470,00	100,00%	45.698.498.366,00	86,63%	95,88%
28	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2		21	55	854.932.602.156,00	100,00%	768.631.720.790,00	90,00%	90,00%

NO	NAMA OPD	URUSAN	JUMLAH			PAGU	Bobot Kinerja per Tahun (%)	JUMLAH REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			KEUANGAN (Rp.)	KEUANGAN (%)	KINERJA (%)
	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN	2		5	15	2.475.067.834,00	100,00%	2.342.429.885,00	95,00%	94,00%
	UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM	2		1	1	31.814.936.672,00	100,00%	30.878.634.003,00	97,00%	90,00%
	UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH	2		1	1	11.504.884.800,00	100,00%	10.185.596.361,00	89,00%	98,00%
28	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2	11	28	72	900.727.491.462,00	100,00%	812.038.381.039,00	92,75%	93,00%
29	GUBERNUR	0		0	0	0,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	3	12	39	37.253.823.255,00	100,00%	32.825.305.450,00	88,00%	100,00%
	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI	1		5	6	1.709.410.068,00	100,00%	1.144.973.758,00	87,00%	100,00%
	UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA	1		1	1	10.802.824.000,00	100,00%	3.361.127.661,00	85,00%	100,00%
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	3	18	46	49.766.057.323,00	100,00%	37.331.406.869,00	86,67%	100,00%
TOTAL			159	593	1487	8.066.012.140.481,00	100,00%	6.593.519.282.885,00	87,88%	93,82%

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian Tugas Pembantuan yaitu untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah.

Tugas Pembantuan dilaksanakan agar daerah dapat ikut serta membantu Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kewenangannya di daerah. Tugas Pembantuan dilakukan antara lain ketika terdapat kewenangan Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya berada atau berlokasi di daerah, sementara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian memandang tidak efisien dibentuk instansi vertikal untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat tersebut. Atas dasar hal tersebut di atas maka Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mengatur mengenai penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP, penyelenggaraan Tugas Pembantuan, pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah.

Dasar hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494).

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Provinsi Bali

Kementerian/Lembaga Pemerintah pada tahun 2023 yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Provinsi Bali yaitu:

1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Kementerian Pariwisata

3.1.1 Target Kinerja

a) Kementerian Pertanian

Total Dana Tugas Pembantuan APBN yang diterima oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali pada T.A 2023 adalah Rp43.957.946.000,00 dan realisasi keuangannya sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai Rp43.262.934.773,00 (98,42%) dengan sisa anggaran Rp695.011.227,00 (1,58%) dan realisasi fisik terealisasi 100%.

b) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan tugas pembantuan kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali untuk penanganan jalan dan irigasi. Tugas Pembantuan diberikan bertujuan untuk menyelesaikan pembangunan daerah yang tidak dapat dijangkau oleh Pemerintah Pusat. Sumber anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.238.656.337,00 dengan rincian SKPD-TP Sumber Daya Air sebesar Rp15.238.656.337,00 dan SKPD-TP Bina Marga Rp9.404.704.000,00.

c) Kementerian Pariwisata

Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan pagu anggaran Rp 975.000.000,00 realisasi anggaran Rp 953.429.801,00 (97,79%), sisa anggaran Rp 21.570.199,00 realisasi fisik 100%. Program Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran Rp 110.000 .000,00 realisasi anggaran Rp 106.556.774,00 (96,87%), dan realisasi fisik 100%.

3.1.2 Realisasi

a) Kementerian Pertanian

1. Peternakan dan Kesehatan Hewan. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat dengan pagu anggaran Rp25.796.839.000,00 realisasi anggaran Rp25.516.819.977,00 (98,91%), sisa anggaran Rp280.019.023,00 (1,09%), realisasi fisik 100% dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak dengan pagu anggaran Rp620.000.000,00 realisasi anggaran Rp597.306.130,00 (96,34%), realisasi fisik 100%.
- Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dengan pagu Rp18.108.050.000,00 realisasi anggaran Rp18.026.573.668.00 (99,55%), realisasi fisik 100%.
- Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak dengan pagu Rp6.231.177.000,00 realisasi anggaran Rp6.135.629.384.00 (98,47%), realisasi fisik 100%.
- Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan pagu anggaran Rp558.000.000,00 realisasi anggaran Rp486.018.490.00 (87,10%), realisasi fisik 100%.

- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dengan pagu anggaran Rp279.612.000,00 realisasi anggaran Rp271.292.305,00 (97,02%), realisasi fisik 100%.
2. Tanaman Pangan. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan dengan pagu anggaran Rp9.195.704.000,00 realisasi anggaran Rp9.012.138.652,00 (98,00%), sisa anggaran Rp183.565.348,00 (2,00%), realisasi fisik 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
- Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dengan pagu anggaran Rp903.181.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp857.788.925,00 (94,97) realisasi fisik 100%.
 - Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan dengan pagu anggaran Rp4.160.895.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.081.747.282,00 (98,10%), realisasi fisik 100%.
 - Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal Tanaman Pangan dengan pagu Rp882.750.000,00 realisasi anggaran Rp867.319.472,00 (98,25%), realisasi fisik 100%.
 - Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan pada Ditjen Tanaman Pangan dengan pagu anggaran Rp2.632.250.000,00 realisasi anggaran Rp2.623.419.941,00 (99,66%), realisasi fisik 100%.
 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan dengan pagu anggaran Rp616.628.000,00 realisasi anggaran Rp581.863.032,00 (94,36%),realisasi fisik 100%.
3. Hortikultura. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura dengan pagu anggaran Rp2.374.610.000,00 realisasi anggaran Rp2.371.531.294,00 (99,87%), sisa anggaran Rp3.078.706,00 (0,13%), realisasi fisik 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan pagu anggaran Rp.500.000.000,00 realisasi anggaran Rp497.554.690,00 (99,51%), realisasi fisik 100%.
 - Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat pagu anggaran Rp468.635.000,00 realisasi keuangan Rp468.536.000,00 (96,98%) realisasi fisik 100%.

- Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura dengan pagu anggaran Rp1.255.975.000,00 realisasi keuangan Rp1.255.474.500,00 (99,96%), realisasi fisik 100%.
 - Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura dengan pagu anggaran Rp150.000.000,00 realisasi keuangan Rp14.996.610.400,00 (99,98%), realisasi fisik 100%.
4. Perkebunan. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan dengan pagu anggaran Rp3.410.438.000,00 sedangkan realisasi anggaran Rp3.233.285.983,00 (94,81%), dan sisa dana Rp173.702.017,00 (5,09%). realisasi fisik 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
- Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar dengan Pagu Anggaran Rp697.500.000,00 realisasi anggaran Rp630.910.000,00 (90,45%) dan realisasi fisik 100%.
 - Penguatan Perlindungan Perkebunan dengan pagu anggaran Rp1.219.390.000,00 realisasi anggaran Rp1.175.908.432,00 (96,43%), realisasi fisik 100%.
 - (EC.5889) Pasca Panen,Pengolahan (Hilirisasi) dan pemasaran Hasil Perkebunan dengan pagu anggaran Rp781.900.000,00 dan realisasi Rp760.026.960 (97,20%), realisasi fisik 100%.
 - Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan dengan pagu anggaran Rp531.048.000,00 dan realisasi Rp505,517,547,00 (95,19%), realisasi fisik 100%.
 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan dengan pagu anggaran Rp180.600.000,00 dan realisasi Rp160.923.044,00 (89,10%) realisasi fisik 100%.
5. Prasarana dan Sarana Pertanian. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Pagu Keseluruhan Rp3.180.355.000,00 Realisasi Anggaran Rp3.125.708.867,00 (98,28%) dan sisa dana Rp54.646.133,00 (1,72%).Realisasi fisik 100% dengan kegiatan sebagai berikut:
- Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian dengan pagu anggaran Rp1.260.000.000,00 realisasi anggaran Rp1,260,000,000,00 (100%), realisasi fisik 100%, realisasi fisik 100%.

- Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian dengan pagu anggaran Rp720.000.000,00 realisasi Anggaran Rp682.771.656,00 (94,83%), realisasi fisik 100%, realisasi fisik 100 persen.
- Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian dengan pagu anggaran Rp165.000.000,00 realisasi anggaran Rp164.972.662,00 (99,98%), realisasi fisik 100%, dengan realisasi fisik 100 persen.
- Fasilitas Pupuk dan Pestisida dengan pagu anggaran Rp140.010.000,00 realisasi anggaran Rp139.985.175,00 (99,98%), realisasi fisik 100%.
- Fasilitas Pembiayaan Pertanian dengan pagu anggaran Rp168.205.000,00- realisasi anggaran Rp156.502.537,00 (93,04%), realisasi fisik 100%.
- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan pagu anggaran Rp727.140.000,00 realisasi anggaran Rp721.476.837,00 (99,22%), realisasi fisik 100%.

b) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1. Program Ketahanan Sumber Daya Air. Program Ketahanan Sumber Daya Air dan Program Dukungan Manajemen bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi jaringan irigasi dengan tetap menjaga agar sarana dan prasarana irigasi dalam kondisi baik. Target kinerja program ini sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100%. Adapun kegiatan yang mendukung Program Ketahanan Sumber Daya Air adalah:
 - Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana melakukan operasi dan pemeliharaan pada Daerah Irigasi Tukad Ayung untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi jaringan irigasi;
 - Kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air merupakan dukungan administrasi dalam rangka mendukung kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilaksanakan.
2. Program Penyelenggaraan Jalan. Program Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas jalan dalam kondisi mantap. Target kinerja program ini sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100%. Adapun kegiatan yang mendukung Program Penyelenggaraan Jalan adalah:
 - Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
 - Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dilaksanakan bertujuan untuk merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas jalan nasional lintas provinsi serta melakukan pemeliharaan rutin dan berkala ruas-

ruas jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap jalan dan jembatan seperti drainase, trotoar dan fasilitas keselamatan jalan. Target kinerja kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100%.

c) Kementerian Pariwisata

1. Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan pagu anggaran Rp 975.000.000,00 realisasi anggaran Rp 953.429.801,00 (97,79%), sisa anggaran Rp 21.570.199,00 realisasi fisik 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
 - EA. 4308. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata (Bimbingan Teknis Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan) dengan pagu anggaran Rp 87.500.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 86.805.150,00 (99,21) dan realisasi fisik 100%.
 - EA. 4309. Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Ekonomi Kreatif di Bali) dengan pagu anggaran Rp 87.500.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 82.733.274,00 (94,55%) dan realisasi fisik 100%.
 - EA. 4313 Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata (Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional) Rp 300.000.000,00 realisasi anggaran Rp 291.153.577,00 (97,05%), dan realisasi fisik 100%.
 - EA. 4332 Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Pembantuan 4 Events) dengan pagu anggaran Rp 500.000.000,00 realisasi anggaran Rp 492.737.800,00 (98,55%), dan realisasi fisik 100%.
2. Program Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran
 - WA. 5326 Pengembangan Perencanaan dan Keuangan dengan pagu anggaran Rp 110.000.000,00 realisasi anggaran Rp 106.556.774,00 (96,87%), dan realisasi fisik 100%.

Tabel Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pemerintah yang Ditugas-Pembantuan

Dari total pagu dana Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp60.286.161.000 realisasi fisik 100.00% dan realisasi keuangan sebesar Rp59.547.402.839 atau 98,77%, yang rinciannya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	REVISI PAGU	R E A L I S A S I							SISA DANA
				S.D. NOVEMBER	DESEMBER	S.D. DESEMBER	FISIK		KEUANGAN		
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7=(5+6)	8	9	10	11=7/4*100	12=(4-7)
I	KEMENTERIAN PERTANIAN		43.957.946.000	38.994.153.819	4.265.253.859	43.259.407.678	100,00	100,00	100,00	97,98	698.538.322
1	229099	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	9.195.704.000	8.747.489.355	264.649.297	9.012.138.652	100,00	99,98	100,00	98,00	183.565.348
2	229100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	2.374.610.000	2.330.907.794	40.623.500	2.371.531.294	100,00	100,00	100,00	99,87	3.078.706
3	229101	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	3.410.438.000	2.492.058.007	741.227.976	3.233.285.983	100,00	100,00	100,00	94,81	177.152.017
4	229102	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	25.796.839.000	22.502.228.052	3.014.514.830	25.516.742.882	100,00	100,00	100,00	98,91	280.096.118
5	229108	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	3.180.355.000	2.921.470.611	204.238.256	3.125.708.867	100,00	100,00	100,00	98,28	54.646.133
II	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM		15.243.215.000	13.841.563.990	1.386.444.596	15.228.008.586	100,00	100,00	100,00	99,90	15.206.414
6	229032	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali	9.404.704.000	8.608.198.685	785.857.564	9.394.056.249	100,00	100,00	100,00	99,89	10.647.751
7	229172	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali.	5.838.511.000	5.233.365.305	600.587.032	5.833.952.337	100,00	100,00	100,00	99,92	4.558.663
III	KEMENTERIAN PARIWISATA		1.085.000.000	1.012.972.175	47.014.400	1.059.986.575	100,00	100,00	100,00	97,69	25.013.425
8	640018	Dinas Pariwisata Provinsi Bali	1.085.000.000	1.012.972.175	47.014.400	1.059.986.575	100,00	100,00	100,00	97,69	25.013.425
TOTAL TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI			60.286.161.000	53.848.689.984	5.698.712.855	59.547.402.839	100,00	100,00	100,00	98,77	713.744.736

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Tahun Anggaran 2023 di Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali tidak melaksanakan Tugas Pembantuan.

3.3 Permasalahan dan Kendala

1. Kementerian Pertanian

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran pembangunan pertanian dan perkebunan adalah sebagai berikut:

- a. Terjadinya reconfusing anggaran berulang kali
- b. Adanya penambahan anggaran di triwulan III dan IV
- c. Terjadinya revisi anggaran berulang kali
- d. Adanya pemblokiran pagu anggaran di awal tahun

2. Kementerian Pekerjaan Umum

Secara umum Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali pada SKPD-TP Sumber Daya Air maupun SKPD-TP Bina Marga dalam pelaksanaan selama 1 (satu) tahun tidak mengalami permasalahan/hambatan dan realisasi kinerja maupun keuangan sudah sesuai target capaian program.

3. Kementerian Pariwisata

Secara umum Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali pada masa pelaksanaan selama 1 (satu) tahun tidak mengalami permasalahan/hambatan, dan realisasi kinerja maupun keuangan sudah sesuai target capaian program.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

1. Upaya Mengatasi Permasalahan pada Kementerian Pertanian :

- a. Melakukan koordinasi serta percepatan pelaksanaan kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten.
- b. Melakukan koordinasi dengan unit ES II kementrian terhadap pagu yang masih terblokir.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang bertujuan memberikan hak pelayanan wajib bagi masyarakat. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bukanlah merupakan hal yang baru, karena SPM melekat dalam pembagian urusan pemerintahan sesuai UU No. 23 tahun 2014, yakni 6 urusan wajib terkait pelayanan dasar yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, sosial, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggarnya. Hal ini didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 298 ayat 1 yaitu "Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 14 ayat 2 juga disebutkan bahwa Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan SPM dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana.

Berdasarkan Permendagri nomor 59 tahun 2021, Gubernur memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan serta mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di daerah. Bupati/wali kota menyampaikan Laporan Kepada Gubernur dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan Laporan Penerapan SPM di daerah Provinsi dan rekapitulasi penerapan SPM di Daerah Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Laporan Pemerintah Daerah mengenai penerapan SPM tersebut merupakan dasar bagi penetapan insentif dan disinsentif daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah menerapkan SPM dalam rangka pemenuhan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia. Dalam penerapan SPM

tersebut didasarkan pada prinsip sebagai berikut: kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Penerapan SPM tersebut dilakukan dengan tahapan :

- 1) Pengumpulan Data;
- 2) Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar;
- 3) Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- 4) Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.

4.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pada bagian kedua SPM Pendidikan Pasal 5 ayat 2 menyebutkan Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan Daerah Provinsi terdiri atas :

- 1. Pelayanan pendidikan menengah.
- 2. Pelayanan pendidikan khusus.

4.1.2. Target Pencapaian SPM

Tabel 4.1
Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pendidikan Tahun 2023

No	Jenis Layanan Dasar	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Pelayanan pendidikan menengah	100 %	2023
2	Pelayanan pendidikan khusus	100 %	2023

4.1.3. Realisasi

Tabel 4.2
Realisasi Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pendidikan Tahun 2023

No	Indikator SPM	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
JENJANG SMA					
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	100	98,57	98,57	Profil Pendidikan 2023
2	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun	100	84,73	84,73	BPS, 2023
3	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100	81,80	81,80	Profil Pendidikan 2023
4	Kemampuan Literasi	71,53	73,56	102,84	Hasil Rapor

No	Indikator SPM	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
					Pendidikan 2022, Rapor Pendidikan 2023 belum rilis
5	Kemampuan Numerasi	58,47	61,6	105,35	Hasil Rapor Pendidikan 2022, Rapor Pendidikan 2023 belum rilis
6	Perbedaan skor Literasi	2,5	2,98	119,20	Hasil Rapor Pendidikan 2022, Rapor Pendidikan 2023 belum rilis
7	Perbedaan skor Numerasi	1,5	1,05	70	Hasil Rapor Pendidikan 2022, Rapor Pendidikan 2023 belum rilis
8	Indeks iklim Keamanan	89,49	74,13	82,84	Hasil Rapor Pendidikan 2022, Rapor Pendidikan 2023 belum rilis
9	Indeks Iklim Kebinekaan dan Inklusivitas	91,26	64,94	71,16	Hasil Rapor Pendidikan 2022, Rapor Pendidikan 2023 belum rilis
10	Kecukupan Formasi Guru ASN	68,10	38,5	56,53	Hasil Rapor Pendidikan 2022, Rapor Pendidikan 2023 belum rilis
11	Indeks Distribusi Guru	97,87	0,41	0,42	Hasil Rapor Pendidikan 2022, Rapor Pendidikan 2023 belum rilis
12	Proporsi PTK Bersertifikat	100	87,75	87,75	Hasil Rapor Pendidikan 2022, Rapor Pendidikan 2023 belum rilis
13	Proporsi PTK Penggerak	3,91	0,28	7,16	Hasil Rapor Pendidikan 2022, Rapor Pendidikan 2023 belum rilis
14	Pengalaman Pelatihan Guru	100	40,2	40,2	Hasil Rapor Pendidikan 2022, Rapor Pendidikan 2023 belum rilis
JENJANG SMK					
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	100	98,57	98,57	Profil Pendidikan 2023
2	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun	100	84,73	84,73	BPS, 2023
3	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100	81,80	81,80	Profil Pendidikan 2023
4	Kemampuan Literasi	66,41	61,82	93,09	Hasil Rapor Pendidikan 2022, Rapor Pendidikan

No	Indikator SPM	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
					2023 belum rilis
5	Kemampuan Numerasi	54,88	49,82	90,78	Hasil Rapor Pendidikan 2022, Rapor Pendidikan 2023 belum rilis
6	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	88,46	86,11	97,34	Hasil Rapor Pendidikan 2022, Rapor Pendidikan 2023 belum rilis
7	Kepuasan Dunia Kerja terhadap Budaya Kerja lulusan SMK	73,20	67,4	92,08	Hasil Rapor Pendidikan 2022, Rapor Pendidikan 2023 belum rilis
8	Perbedaan Skor Literasi	2,5	3,37	134,8	Hasil Rapor Pendidikan 2022, Rapor Pendidikan 2023 belum rilis
9	Perbedaan Skor Numerasi	1	0,9	90	Hasil Rapor Pendidikan 2022, Rapor Pendidikan 2023 belum rilis
10	Indeks Iklim Keamanan	86,44	72,11	83,42	Hasil Rapor Pendidikan 2022, Rapor Pendidikan 2023 belum rilis
11	Indeks Iklim Kebinekaan dan Inklusivitas	88,41	62,61	70,82	Hasil Rapor Pendidikan 2022, Rapor Pendidikan 2023 belum rilis
12	Kecukupan Formasi Guru ASN	51,68	40	77,4	Hasil Rapor Pendidikan 2022, Rapor Pendidikan 2023 belum rilis
13	Indeks Distribusi Guru	99	0,34	0,34	Hasil Rapor Pendidikan 2022, Rapor Pendidikan 2023 belum rilis
14	Proporsi PTK Bersertifikat	100	86,65	86,65	Hasil Rapor Pendidikan 2022, Rapor Pendidikan 2023 belum rilis
15	Proporsi PTK Penggerak	1,70	0,1	5,88	Hasil Rapor Pendidikan 2022, Rapor Pendidikan 2023 belum rilis
16	Pengalaman Pelatihan Guru	100	31	31	Hasil Rapor Pendidikan 2022, Rapor Pendidikan 2023 belum rilis
JENJANG PENDIDIKAN KHUSUS					
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus	100	48,78	48,78	Profil Pendidikan 2023
2	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Disabilitas Usia 4-	100	43,27	121,71	Profil Pendidikan 2023

No	Indikator SPM	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
	18 Tahun				
3	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus	100	43,27	121,71	Profil Pendidikan 2023
4	Kemampuan Literasi	72,85	81,94	112,48	Hasil Rapor Pendidikan 2022, Rapor Pendidikan 2023 belum rilis
5	Kemampuan Numerasi	67,44	78,16	115,9	Hasil Rapor Pendidikan 2022, Rapor Pendidikan 2023 belum rilis
6	Perbedaan Skor Literasi	2,5	3,89	155,6	Hasil Rapor Pendidikan 2022, Rapor Pendidikan 2023 belum rilis
7	Perbedaan Skor Numerasi	2,5	3,77	150,8	Hasil Rapor Pendidikan 2022, Rapor Pendidikan 2023 belum rilis
8	Indeks Iklim Keamanan	89,56	79,90	89,21	Hasil Rapor Pendidikan 2022, Rapor Pendidikan 2023 belum rilis
9	Indeks Iklim Kebinekaan dan Inklusivitas	89,56	69,06	77,11	Hasil Rapor Pendidikan 2022, Rapor Pendidikan 2023 belum rilis
10	Kecukupan Formasi Guru ASN	92,67	3,3	3,56	Hasil Rapor Pendidikan 2022, Rapor Pendidikan 2023 belum rilis
11	Indeks Distribusi Guru	100	0,49	0,49	Hasil Rapor Pendidikan 2022, Rapor Pendidikan 2023 belum rilis
12	Proporsi PTK Bersertifikat	100	86,6	86,6	Hasil Rapor Pendidikan 2022, Rapor Pendidikan 2023 belum rilis
13	Proporsi PTK Penggerak	6,47	0,14	2,16	Hasil Rapor Pendidikan 2022, Rapor Pendidikan 2023 belum rilis
14	Pengalaman Pelatihan Guru	100	57,2	57,2	Hasil Rapor Pendidikan 2022, Rapor Pendidikan 2023 belum rilis

Penetapan sasaran Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan berdasarkan indikator yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

4.1.4. Alokasi Anggaran

Tabel 4.3
Alokasi Anggaran Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi	Sumber Dana
1	Pelayanan Pendidikan Menengah	Rp. 700.675.884.630	APBDP
2	Pelayanan Pendidikan Khusus	Rp. 34.173.054.027	APBDP
	JUMLAH	Rp. 734.848.938.657	

4.1.5. Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali tahun 2023 total sebanyak 9.526 orang terdiri dari 7.514 orang (78,87%) dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 2.012 orang (21,12%) dengan status tenaga kontrak (Non ASN). Untuk tenaga ASN terdiri dari 5.214 orang (69,39%) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2.300 orang (30,60%) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK). Tenaga ASN terkonsentrasi di lingkungan Kantor Disdikpora Provinsi Bali sebanyak 205 orang (2,73%) dengan status PNS dan tenaga ASN yang terdistribusikan pada Satuan Pendidikan sebanyak 6.760 orang (89,97%) terdiri dari 4.460 orang (59,35%) PNS dan 2.300 orang (34,02%) PPPK dengan tugas sebagai Kepala Sekolah sebanyak 155 orang (2,06%). Tata usaha, Analis SDM, Pelaksana pengadministrasian, pengelola dan lain sebagainya sebanyak 655 orang (8,71%), Guru PNS sebanyak 4.199 orang (55,88%) dan guru PPPK sebanyak 2.300 orang (30,16%). Secara golongan dari 7.514 orang ASN, Golongan IV a/b/c/d sebanyak 2.435 orang (32,41%); Golongan III a/b/c/d/ sebanyak 2.376 orang (31,62%); Golongan II a/b/c/d sebanyak 395 orang (5,25%); Golongan I a/b/c/d sebanyak 8 orang (0,11%) dan Golongan IX (PPPK) sebanyak 2.300 orang (30,61%). Keadaan Tenaga Kontrak sebanyak 2.012 orang yang terdistribusikan di lingkungan kantor Disdikpora Provinsi Bali 219 orang (10,88%) dan ditempatkan pada Satuan Pendidikan (SMA/SMK/SLB Negeri) sebanyak 1.793 orang (89,12%).

Secara administrasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali memiliki tanggungjawab pengelolaan dan urusan pelayanan terhadap satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan total layanan sebanyak 354 sekolah, yang terdiri atas 90 SMA Negeri, 74 SMA Swasta, 58 SMK Negeri dan 118 SMK Swasta, 12 SLB Negeri dan 2 SLB Swasta. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dibantu 2 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yakni UPTD Balai Pengembangan

Teknologi Pendidikan (UPTD BPTEKDIK) dan UPTD. Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan (UPTD BPTKK).

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Belum tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah, Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun dan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah.
- b. Belum tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus, Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk disabilitas usia 4-18 tahun dan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus.
- c. Sejumlah capaian realisasi indikator SPM tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam tabel diatas masih mengacu realisasi capaian Rapor Pendidikan tahun 2022 mengingat Rapor Pendidikan tahun 2023 belum rilis dari Kemendikbudristek.

2. Solusi

- a. Memantapkan peningkatan aksesibilitas pendidikan melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan yang meliputi unit sekolah baru, ruang kelas, ruang kantor, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, sarana utilitas lainnya, media pembelajaran, alat praktek siswa, dan mebeler sekolah, pemberian dana pendamping operasional sekolah (BOSDA), dan penyaluran dana pendidikan bagi siswa kurang mampu (PIP) untuk menekan terjadinya siswa putus sekolah.
- b. Peningkatan kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan melalui pelatihan peningkatan kompetensi, pemanfaatan media pembelajaran digital, forum guru mata pelajaran, dan pendistribusian yang lebih proporsional sesuai kebutuhan ideal Satuan Pendidikan.
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pembinaan ke satuan pendidikan secara berkesinambungan terkait manajemen aparatur, sarana-prasarana, tata kelola sekolah (Manajemen Berbasis Sekolah), pengelolaan dana sekolah, keselarasan kurikulum, penguatan kurikulum kuatan lokal, dan review capaian rapor pendidikan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan mendukung pemenuhan SPM Pendidikan.
- d. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam mendukung ketercapaian Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 13-15 tahun dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang

- Pendidikan Dasar, serta dapat mendorong dan menjangkau siswa putus sekolah agar bersekolah kembali.
- e. Melakukan review terhadap program dan kegiatan serta target yang telah ditetapkan untuk mencapai target pencapaian SPM Pendidikan.
 - f. Berkoordinasi dengan pihak Kemendikbudristek mengupayakan agar rilis Raport Pendidikan dapat lebih awal setiap tahunnya.

4.2. BIDANG URUSAN KESEHATAN

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

- Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), pada bagian ketiga SPM Kesehatan Pasal 6 ayat 2 menyebutkan Jenis Pelayanan Dasar SPM kesehatan Daerah provinsi terdiri atas:
- 1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
 - 2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

4.2.2. Target Pencapaian SPM

Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan Tahun 2022
Tabel 4.4

No	Jenis Layanan Dasar	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Provinsi	100 %	2023
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100 %	2023

4.2.3. Realisasi

Tabel 4.5
Realisasi Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan Tahun 2023

No	Indikator SPM	Sasaran	Capaian	%
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Provinsi	1.640.599 Penduduk	1.640.599 Penduduk	100
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	45.000 orang	0	0

1) Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana provinsi

Berdasarkan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan mengamanatkan penanggulangan krisis kesehatan dilakukan berdasarkan sistem klaster yang melaksanakan fungsi koordinasi, kolaborasi dan integrasi penanggulangan krisis di tingkat daerah yang merupakan bagian integral dari upaya penanggulangan bencana. Klaster kesehatan terdiri dari sub klaster dan tim pendukung yang kegiatannya dikoordinir Dinas Kesehatan Provinsi, kegiatan yang dilakukan oleh Klaster Kesehatan ini mengikuti siklus manajemen bencana yaitu pra krisis (mitigasi dan kesiapsiagaan), tanggap darurat bencana dan pasca krisis (rehabilitasi). Seluruh kegiatan klaster kesehatan dilaporkan oleh koordinator kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kemenkes, 2019).

Dinas Kesehatan Provinsi melakukan serangkaian kegiatan yang mendukung penanggulangan krisis kesehatan. Program penanggulangan krisis kesehatan meliputi kegiatan pra krisis, masa tanggap darurat dan pasca krisis dengan empat siklus manajemen krisis kesehatan yaitu mitigasi (*mitigation*), kesiapsiagaan (*preparedness*), respon (*response*) dan pemulihan (*recovery*). Sehingga kegiatan yang dilaksanakan meliputi keseluruhan siklus ini. Tapi karena sepanjang 2023 tidak ada masa darurat Provinsi maka kegiatan yang dilakukan sebagian besar adalah kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan. Kecuali pada kebakaran hutan dan lahan di beberapa TPA di Bali hingga ditetapkan siaga darurat di Provinsi maka kegiatan respon dilakukan berupa pemantauan situasi lapangan serta persiapan pengiriman EMT serta logistic ke lokasi.

Kegiatan dalam Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan Atau Berpotensi Bencana, berupa rangkaian yang meliputi mitigasi (*mitigation*), kesiapsiagaan (*preparedness*), respon (*response*) dan pemulihan (*recovery*) dengan lokus masyarakat dan fasilitas kesehatan primer serta rujukan pada 9 Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dapat berupa pelayanan kesehatan langsung maupun tidak langsung sesuai dengan siklus manajemen Krisis kesehatan.

Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Bali tahun 2022 terdapat 14 risiko bencana di seluruh wilayah Provinsi Bali dan tidak ada satu wilayah pun yang tidak berisiko terdampak bencana/krisis kesehatan meskipun potensi risiko dan jenis hazard berbeda. Data BPS menunjukkan jumlah penduduk Bali tahun 2023 sebanyak 4.380.824 jiwa yang artinya masyarakat yang

berpotensi terdampak krisis kesehatan juga sejumlah tersebut. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan wajib menjangkau seluruh masyarakat dengan metode pelayanan langsung dan tidak langsung.

FASE/TAHAPAN	KEGIATAN	LOKUS
Mitigasi	Sosialisasi hazard, sosialisasi sistem pelaporan, sosialisasi HSI	Kelompok masyarakat, Desa, Mitra Potensial, faskes
Kesiapsiagaan	Penguatan jejaring, pembentukan EMT, penguatan HEOC, penguatan sub klaster	Jejaring kesehatan, sub klaster
Respon	Hanya dilaksanakan dalam fase darurat dan sepanjang 2023 tidak ada fase darurat di Provinsi Bali	Masyarakat terdampak krisis
Recovery	Hanya dilaksanakan dalam fase darurat dan sepanjang 2023 tidak ada fase darurat di Provinsi Bali	Masyarakat terdampak krisis

2) Pelaksanaan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi.

Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

Pada tahun 2023 tidak terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, namun dalam penerapan SPM Dinas Kesehatan Provinsi Bali telah melakukan beberapa hal berikut :

- 1) Melakukan identifikasi pemetaan risiko penyakit berpotensi KLB pada semua kabupaten kota;
- 2) Melakukan monitoring pada Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) terkait penyakit² yang berpotensi KLB berdasarkan gejala (Suspek);
- 3) Melakukan verifikasi rumor terhadap laporan penyakit berpotensi KLB baik dari faskes maupun masyarakat termasuk melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) serta melakukan pengambilan sampel dan mengirimkan sampel ke Lab Rujukan Nasional;
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi terkait cakupan imunisasi rutin untuk mencegah Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) sehingga cakupan imunisasi tetap tinggi dan merata di semua kab/kota.

4.2.4. Alokasi Anggaran

Tabel 4.6
Alokasi Anggaran Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Sumber Dana
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	2.951.458.880,-	1.021.713.877,-	34,62%	APBD
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	9.012.557.500,-	6.364.565.620,-	70,62%	APBD

Anggaran tahun 2023 yang dialokasikan untuk pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi pada subkegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sebesar Rp. 9.012.557.500,- bersumber anggaran DAK Non Fisik, DAU Bidang Kesehatan, dengan realisasi sebesar 70,62%. Alokasi anggaran pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi pada sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana sebesar Rp. 2.951.458.880,- bersumber anggaran DAK Non Fisik dan DAU Bidang Kesehatan, dengan realisasi sebesar 34,62%.

4.2.5. Dukungan Personil

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.

Pada tahun 2023 fasilitas kesehatan yang dimiliki di Provinsi Bali meliputi 75 Rumah Sakit, 120 puskesmas, 252 klinik, 9 public safety center di 9 kabupaten/kota dan Provinsi. Tetapi data ini belum cukup untuk mengetahui kapasitas kesehatan terutama dalam masa tanggap darurat bencana. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan mengamanatkan penanggulangan krisis kesehatan dilakukan berdasarkan sistem klaster yang melaksanakan fungsi koordinasi, kolaborasi dan integrasi penanggulangan krisis di tingkat daerah yang merupakan bagian integral dari upaya penanggulangan bencana. Klaster kesehatan terdiri dari sub klaster dan tim pendukung yang kegiatannya dikoordinir Dinas Kesehatan Provinsi.

2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Dalam mendukung pencapaian SPM dengan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi, dibentuk Tim Gerak Cepat Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB). Dalam Tim tersebut dinyatakan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan KLB di Provinsi Bali diantaranya adalah Balai Besar Veteriner Denpasar, Fakultas Kedokteran

UNUD, Dinas Peternakan Provinsi Bali, RSUP Sanglah Denpasar, UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Denpasar, KKP Kelas I Denpasar, serta seluruh Seksi/Subbag di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ditemukan :

- 1) Masih adanya masyarakat yang menolak imunisasi rutin
- 2) Tidak semua penyakit berpotensi KLB memiliki tools pemetaan risiko penyakit berpotensi KLB
- 3) Mobilitas penduduk yang tinggi sehingga Provinsi Bali memiliki risiko mengalami KLB baik Penyakit Infeksi *Emerging* maupun *Re Emerging*
- 4) Adanya refokusing anggaran sehingga berpotensi penundaan pengiriman sampel dan pemeriksaan sampel di Lab Rujukan Nasional.

Solusi :

- 1) Pemantauan situasi penyakit potensial KLB melalui sistem kewaspadaan dini dan respon secara berkesinambungan.
- 2) Peningkatan kualitas SDM dalam upaya penanggulangan penyakit baru (*new emerging disease*) melalui pelatihan maupun refresing dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas.
- 3) Melaksanakan komunikasi beresiko kepada masyarakat secara masif dan terus menerus secara berkesinambungan.
- 4) Menyiapkan logistik sesuai dengan jenis penyakit berpotensi KLB
- 5) Melakukan mitigasi sebelum terjadinya KLB
- 6) Menyusun prioritas kegiatan disesuaikan dengan anggaran yang ada.

4.3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagian keempat SPM Pekerjaan Umum pasal 7 ayat 2, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, pada

pasal 5 ayat 1 menyebutkan Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah Provinsi terdiri atas:

- 1. Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota; dan
- 2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota.

4.3.2. Target Pencapaian SPM

Target yang ingin dicapai dari penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2023 adalah seperti tabel berikut:

Tabel 4.7
Jenis Pelayanan Dasar dan Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023

NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	CAPAIAN	
					2021	2022
1	2	3	4	5	7	8
1	Pekerjaan Umum	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100 %	2023	100 %	100 %
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100 %	2023	100 %	100 %

4.3.3. Realisasi Target dan Alokasi Anggaran

Realisasi target dan alokasi anggaran dari standar pelayanan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Realisasi target dan alokasi anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum 2023

NO	BIDANG/ JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	T	R	ALOKASI ANGGARAN		KET.
					2023	2023	APBN	APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pekerjaan Umum	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100 %	2023	100%	63.33 %	-	Rp. 41.491.811.236,-	Secara Kumulatif Kategori Indeks Pencapaian SPM : TUNTAS PRATAMA (78,33%)
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	100 %	2023	100%	93.33 %	-	Rp. 11.686.241.600,-	

4.3.4. Dukungan Personil

Personil yang mendukung pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum berjumlah 296 (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam) orang yang terdiri dari:

No	Jabatan	Golongan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	Eselon II	1 Orang
2.	Sekretaris	Eselon III	1 Orang
Bidang Cipta Karya			
1.	Kepala Bidang	Eselon III	1 Orang
2.	Kepala Seksi	Eselon IV	2 Orang
3.	Staf teknis dan administrasi	PNS dan Non-PNS	45 Orang
UPTD Air Minum			
1.	Kepala UPTD	Eselon III	1 Orang
2.	Kepala Sub Bagian/Seksi	Eselon IV	3 Orang
3.	Staf teknis dan administrasi	PNS dan Non-PNS	160 Orang
UPTD Air Limbah			
1.	Kepala UPTD	Eselon III	1 Orang
2.	Kepala Sub Bagian/Seksi	Eselon IV	3 Orang
3.	Staf teknis dan administrasi	PNS dan Non-PNS	78 Orang
Jumlah Total			296 Orang

4.3.5. Permasalahan dan Solusi

- a. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan SPAM lintas Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat/pelanggan adalah sebagai berikut:
1. Pelayanan air bersih baik diperkotaan dan diperdesaan masih terbatas, mengingat ketidakmerataan sumber air baku dan kurang profesionalnya kondisi pengelolaannya;
 2. Terganggunya pendistribusian air SPAM Penet ke PDAM Kota Denpasar dengan daerah layanan wilayah Denpasar Barat dan PDAM Kabupaten Badung dengan daerah layanan wilayah Petitenget, Kuta yang diakibatkan oleh sering bocornya bendung karet pada *Long Storage* Tukad Penet sehingga SPAM Penet tidak bisa berproduksi;
 3. Distribusi SPAM Guyangan belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal (produksi air kurang dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat) akibat pompa pada mata air guyangan yang bisa beroperasi hanya 1unit disebabkan kurangnya catu daya listrik PLN;
 4. Belum Optimalnya penyerapan air SPAM Petanu oleh PDAM Denpasar, Badung dan Gianyar (*idle capacity* sekitar 50%) karena PDAM Badung dan Denpasar masih mampu menyediakan air melalui Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang dimilikinya. PDAM Gianyar belum secara optimal mengembangkan sambungan rumah khususnya di wilayah Saba dan sekitarnya akibat terkendala elevasi;

5. Terjadi beberapa kali kebocoran pada Jaringan Distribusi Utama SPAM Petanu sehingga mengganggu pendistribusian air wilayah Denpasar Timur, Saba, Ketewel dan wilayah Kuta Selatan.
- b. Permasalahan yang dihadapi dalam mengelola Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota baik pada jaringan perpipaannya maupun instalasi pengolahannya (IPAL) dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat/pelanggan adalah sebagai berikut:
 1. Pengelolaan limbah domestik/rumah tangga dengan sistem setempat sudah tidak sesuai lagi dengan adanya perkembangan penduduk dan pembangunan yang sangat pesat, sehingga perlu pengembangan jaringan & peningkatan kondisi prasarana instalasi pengolahan air limbah terpusat yang ada (*sewerage/lagoon*);
 2. Kesadaran pelanggan kategori rumah tangga untuk membayar tagihan langganan penyaluran air limbah masih sangat kurang (lebih kurang 40 % yang aktif membayar tagihannya), sehingga sampai saat ini tunggakan yang menjadi piutang pada UTPD PAL masih cukup tinggi;
 3. Kepedulian pelanggan untuk memelihara jaringan perpipaan air limbah dari rumah tangga masing-masing sampai ke *House Inlet* (HI) masih perlu ditingkatkan, mengingat kebuntuan atau sumbatan pipa akibat sampah masih sering terjadi yang berakibat meluapnya air limbah di areal rumah atau di jalan. Selain itu pada musim hujan, air hujan yang seharusnya tidak masuk kedalam jaringan perpipaan air limbah sengaja dimasukkan untuk mengatasi genangan di areal perumahan dengan cara membuka bak kontrol atau *manhole* yang berakibat air meluap pada beberapa titik *manhole* di jalan;
 4. Akibat masuknya sampah ke dalam saluran pipa air limbah, pompa-pompa yang berfungsi untuk mengalirkan air limbah mengalami kerusakan, seperti motor pompa terbakar akibat tersangkut sampah sehingga daya kerja pompa tidak optimal.
 5. Kondisi kolam aerasi (*aerasi pond*) dan kolam sedimentasi (*sedimentasi pond*) sudah penuh dengan sedimen sehingga pengolahan air limbah tidak optimal;
 6. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) masih menerima limbah Restoran yang cukup tinggi kandungan lemaknya, karena sampai saat ini belum ada instalasi yang khusus mengolah limbah lemak.

Solusi

- a. Solusi yang sudah diambil untuk mengatasi permasalahan SPAM lintas Kabupaten/Kota tersebut diatas antara lain:

1. Ditjen SDA Kementerian PUPR melalui Balai wilayah sungai Bali Penida (BWS-Bali Penida) telah merencanakan penggantian karet bendung pada *Long Storage* Tukad Penet dan optimalisasi perangkat pendukung;
 2. Ditjen SDA Kementerian PUPR melalui BWS-Bali Penida telah merencanakan optimalisasi SPAM Guyangan diantaranya menaikkan catu daya listrik PLN, pergantian pipa transmisi dari PVC ke GIP, perbaikan beberapa pompa yang tidak optimal;
 3. Percepatan pengkoneksian pipa PDAM Denpasar (Taping Serangan) dengan Jaringan Distribusi Utama SPAM Petanu untuk menambah penyerapan air SPAM Petanu;
 4. Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Bali akan membangun jaringan tersendiri dari IPA Petanu ke Wilayah Guwang untuk menambah penyerapan dari PDAM Gianyar. Peningkatan pemantauan kondisi jaringan dan aksesoris dan menyediakan lebih banyak suku cadang untuk mempercepat penanganan kebocoran/kerusakan.
- b. Solusi yang sudah diambil untuk mengatasi permasalahan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota tersebut diatas antara lain:
1. Mengantarkan *invoice* (tagihan) ke rumah masing-masing pelanggan (*door to door*) sambil memberikan sosialisasi/edukasi terkait fungsi dan kegunaan serta pemeliharaan jaringan pipa air limbah;
 2. Melakukan pemeliharaan dan pembersihan sampah pada *manhole* dan jaringan pipa secara rutin oleh petugas UPTD PAL;
 3. Melakukan rehabilitasi/renovasi pada beberapa jaringan pipa yang mengalami kebocoran;
 4. Mengganti beberapa komponen pompa maupun mengganti pompa yang mengalami kerusakan;
 5. Perlu direncanakan pembangunan instalasi pengolahan untuk menyaring dan mengolah lemak sebelum masuk ke dalam IPLT;
 6. Perlu direncanakan pembangunan permukaan Bak Kontrol di masing-masing rumah agar elevasinya dibuat lebih tinggi dari existing halaman untuk mengurangi lumpur (sendimen masuk ke Bak Kontrol)

4.4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara

secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagian keempat SPM Pekerjaan Umum pasal 7 ayat 2, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada pasal 5 ayat 1 menyebutkan Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi terdiri atas:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

4.4.2. Target Pencapaian SPM

Target yang ingin dicapai dari penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2023 adalah seperti tabel berikut:

Tabel 4.9
Jenis Pelayanan Dasar Dan Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023

NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	CAPAIAN	
					2021	2022
1	2	3	4	5	7	8
1	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi;	100 %	2023	100 %	100 %
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi;	100 %	2023	100 %	100 %

4.4.3. Realisasi Target dan Alokasi Anggaran SPM

Realisasi target dan alokasi anggaran dari standar pelayanan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2023 adalah seperti tabel berikut.

Tabel 4.10
Realisasi target dan alokasi anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat 2023

NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	T	R	ALOKASI ANGGARAN		KET.
					2021	2021	APBN	APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi;	100 %	2023	100 %	100 %	-	Rp. 779,013,152-	Secara Kumulatif Kategori Indeks Pencapaian SPM : TUNTAS PARIPURN A 100%
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi;	100 %	2023	100 %	100 %			

4.4.4. Dukungan Personil

Personil yang mendukung pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat berjumlah 24 (Dua Puluh Empat) orang yang terdiri dari:

Tabel 4.11
Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali tahun 2023

No	Jabatan	Golongan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	Eselon II	1 Orang
2.	Sekretaris	Eselon III	1 Orang
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1.	Kepala Bidang	Eselon III	1 Orang
2.	Kepala Seksi	Eselon IV	1 Orang
3.	Staf teknis dan administrasi	PNS dan Non-PNS	20 Orang
Jumlah Total			24 Orang

4.4.5. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam Pemenuhan Indikator adalah sebagai berikut :

1. Pada indikator Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi, sepanjang tahun 2023 tidak ditemui adanya bencana skala provinsi, namun tetap dilakukan pendataan rumah di kawasan rawan bencana;

2. Pada indikator Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi, sepanjang tahun 2023 tidak dilakukan relokasi melainkan diberikan fasilitas dengan pemberian ganti kerugian sesuai nilai appraisal.

4.5. BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja adalah **Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum**

4.5.2. Target Pencapaian SPM

Target dan Indikator Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Provinsi Bali

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di provinsi	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan SDM	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkara yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan SDM sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di provinsi dan kabupaten/kota

4.5.3. Realisasi

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	JUMLAH PENEGAKAN PERDA / PERKADA SESUAI MUTU			PELAYANAN GANTI RUGI			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH PELAKSANAAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA	JUMLAH PENEGAKAN PERDA /PERKADA YANG SESUAI MUTU LAYANAN DASAR	CAPAIAN (%)	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERLAYANI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi.	207	207	100	0	0	100	100	Tuntas Paripurna

4.5.4. Anggaran

Alokasi anggaran pemenuhan SPM Sub Urusan Trantibum Tahun 2023 seluruhnya bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

4.5.5. Dukungan Personil

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali tahun 2023, didukung oleh sumber daya manusia (SDM) secara keseluruhan sebanyak 198 Orang, dengan status :

PNS = 101 Orang

Non PNS = 97 Orang

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- 1) Tidak bisa mengisi form perkiraan rekapitulasi jumlah warga negarayang berada dalam radius 0-50 meter di lokasi penegakan Perda dan Perkada, oleh karena :
 - Lokasi penegakan Perda dan Perkada sebagian besar jauh dari pemukiman warga (dim lokasi obyek wisata dan lahan galian C)
 - Lokasi patroli wilayah sebagian besar dilaksanakan di seputaran civic center (area pusat pemerintahan)
 - Warga negara yang bermukim di sekitar arena penegakan Perda dan Perkada enggan menyerahkan identitas dirinya karena tidak merasa melakukan pelanggaran (walupun sudah dijelaskan secara humanis oleh petugas Satpol PP)
- 2) Pesatnya dinamika perubahan perilaku masyarakat belum diimbangi dengan terbitnya regulasi, sehingga terdampak terhadap kepastian hukum.
- 3) Kemajuan Teknologi Informasi berdampak pada terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 4) Peran masyarakat belum optimal untuk mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

b) Solusi :

- 1) Melakukan kerjasama (MoU) dengan Disdukcapil Provinsi untuk dapat mengakses data kependudukan warga Negara yang berada dalam radius 0-50 meter di lokasi penegakan Perda dan Perkada.
- 2) Melaksanakan patroli wilayah secara intensif baik secara mandiri maupun gabungan/bersama-sama dengan unsur instansi vertikal (TNI/Polri) maupun

dengan Satpol PP Kab/Kota untuk mengurangi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Bali.

- 3) Memantapkan penegakan hukum dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan menegakkan supremasi hukum dalam pembangunan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia untuk menciptakan rasa aman dan damai lahir batin;
- 4) Meningkatkan kemampuan Sumber daya Pol PP melalui Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Pol PP, sarana dan prasarana, serta anggaran
- 5) Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kelinmasan dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten/Kota.

4.6. BIDANG URUSAN SOSIAL

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

No	Bidang/Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja
1	2	3
6	Bidang Sosial	
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa; b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa; b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa; b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa; b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa; b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

4.6.2. Target Pencapaian SPM

Tabel 4.12
Jenis Pelayanan Dasar Dan Target Pencapaian Spm Bidang Sosial 2023

No	Bidang/Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian 2023
1	2	3	4	5	6
6	Bidang Sosial				
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2023	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas	100%	2023	100%

No	Bidang/Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian 2023
1	2	3	4	5	6
	didalam panti	sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan			
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2023	100%
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2023	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2023	100%
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2023	100%
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2023	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2023	100%
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2023	100%
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2023	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2023	100%
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2023	100%
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2023	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2023	100%
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2023	100%

4.6.3. Realisasi

Berdasarkan data-data di atas dari 5 (lima) jenis pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib bidang sosial terdiri dari 3 indikator kinerja yang masing - masing di SPM kan dan dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali pada Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Indikator yang Sesuai Target dan Tidak Sesuai Target :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
	Kategori Indeks Pencapaian SPM	Tuntas Paripurna			100%
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti				100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah TotalYang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	Jumlah yang Harus Dilayani :	71	71	0	100%
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
	1 . Penyediaan permakanan	51	51	0	100%
	2 . Penyediaan sandang	20	20	0	100%
	3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses **	9	9	0	100%
	4 . Penyediaan alat bantu **	10	10	0	100%
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	20	20	0	100%
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	20	20	0	100%
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	20	20	0	100%
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan**/Bukti kepemilikan NIK	20	20	0	100%
	9 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3	3	0	100%
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga** / Bukti keberadaan keluarga	2	2	0	100%
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	2	2	0	100%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti				100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah TotalYang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	Jumlah yang Harus Dilayani :	822	822	0	100%
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
	1 . Pengasuhan	42	42	0	100%
	2 . Penyediaan permakanan	822	822	0	100%
	3 . Penyediaan sandang	42	42	0	100%
	4 . Penyediaan asrama yang mudah diakses**	82	82	0	100%
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	42	42	0	100%
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	42	42	0	100%
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	42	42	0	100%
	8 . Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak**	77	77	0	100%
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	42	42	0	100%
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga**	42	42	0	100%
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	10	10	0	100%
	12 . Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti**	77	77	0	100%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti				100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah TotalYang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	Jumlah yang Harus Dilayani :	158	158	0	100%
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
	1 . Penyediaan permakanan	81	81	0	100%
	2 . Penyediaan sandang	81	81	0	100%
	3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses**	3	3	0	100%
	4 . Penyediaan alat bantu**	21	21	0	100%
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti Sosial	81	81	0	100%
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	81	81	0	100%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	81	81	0	100%
	8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan**	1	1	0	100%
	9 . Akses ke layanan kesehatan dasar	81	81	0	100%
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga**	77	77	0	100%
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	6	6	0	100%
	12 . Pemulasaraan**	24	24	0	100%
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah TotalYang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	Jumlah yang Harus Dilayani :	344	344	0	100%
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100%
	1 . Penyediaan permakanan	287	287	0	100%
	2 . Penyediaan sandang	65	65	0	100%
	3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses**	65	65	0	100%
	4 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	65	65	0	100%
	5 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	65	65	0	100%
	6 . Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari	65	65	0	100%
	7 . Pemberian bimbingan keterampilan dasar	65	65	0	100%
	8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak**	65	65	0	100%
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	65	65	0	100%
	10 . Pemulangan ke daerah asal**	344	344	0	100%
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi				100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah TotalYang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	Jumlah yang Harus Dilayani :	3212	3212	8	100%
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100%
	1 . Penyediaan permakanan	3212	3212	0	100%
	2 . Penyediaan sandang	540	540	0	100%
	3 . Peyediaan tempat penampungan pengungsi	9	9	0	100%
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	150	150	0	100%
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	629	629	0	100%

4.6.4. Alokasi Anggaran

No.	Bidang/Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	T	R	Alokasi Anggaran
					2023	2023	APBD
1	2	3	4	5	6	7	8
6. Bidang Sosial							
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan	100%	2023	100%	100%	Rp. 56.624.300,-

No.	Bidang/Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	T	R	Alokasi Anggaran APBD
					2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
	disabilitas terlantar didalam panti	atau jasa;					
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2023	100%	100%	
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2023	100%	100%	
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2023	100%	100%	Rp. 1.242.468.568,-
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2023	100%	100%	
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2023	100%	100%	
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2023	100%	100%	Rp. 835.952.655,-
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2023	100%	100%	
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2023	100%	100%	
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2023	100%	100%	Rp. 2.384.397.800,-
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2023	100%	100%	
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2023	100%	100%	
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2023	100%	100%	Rp. 255.937.800,-
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan	100%	2023	100%	100%	

No.	Bidang/Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	T	R	Alokasi Anggaran
					2023	2023	APBD
1	2	3	4	5	6	7	8
		sosial; dan c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2023	100%	100%	

4.6.5. Dukungan Personil

Personil yang mendukung pencapaian SPM Bidang Sosial berjumlah (seratus sepuluh) orang yang terdiri dari:
DINAS dan UPTD terdiri dari:

Pejabat			
1.	Kepala Dinas	Eselon II	1 Orang
2.	Sekretaris	Eselon III	1 Orang
3.	Kepala Bidang	Eselon III	2 Orang
4.	Kepala UPTD	Eselon III	2 Orang
5.	Kepala Sub Bagian	Eselon IV	7 Orang

Fungsional			
1.	Pekerja Sosial	Golongan IV	5 Orang
2.	Arsiparis	Golongan IV	1 Orang
3.	Penyuluh Sosial	Golongan III	9 Orang
4.	Pranata Komputer	Golongan III	1 Orang
Staf			
1.	Umum	Golongan IV	11 Orang
2.	Umum	Golongan III	60 Orang
3.	Umum	Golongan II	22 Orang
4.	Tenaga Administrasi	-	39 rang

4.6.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala :

Terbatasnya sumber daya manusia khususnya Fungsional Kesejahteraan Sosial dalam panti yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.

Permasalahan :

Terbatasnya alokasi anggaran dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, sehingga tidak dapat terlayannya dengan maksimal seluruh sub-sub kegiatan dalam pencapaian SPM tahun 2023.

Solusi :

Dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, namun bersama-sama dengan masyarakat dan swasta untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

4.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

4.7.1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Program dan kegiatan yang mendukung dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali sebagai berikut:

No	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
1.	Pelayanan Pendidikan Menengah	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1. Nilai Standar Pelayanan Pendidikan (SNP) Sekolah Menengah Atas
		2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	2. Persentase SMK yang terevitalisasi
2.	Pelayanan Pendidikan Khusus	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Nilai Standar Nasional Pendidikan (SNP) Sekolah Luar Biasa

4.7.2. BIDANG URUSAN KESEHATAN

Program dan kegiatan yang mendukung dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan tahun 2023 seperti yang tercantum dalam DPA Dinas Kesehatan Tahun 2023 sebagai berikut:

No	Jenis Layanan Dasar	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase jaminan kesehatan masyarakat yang terlayani
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Masyarakat yang terlayani sesuai Standar Pelayanan Minimal
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Provinsi	Subkegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Subkegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

4.7.3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

Program dan kegiatan yang mendukung dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali sebagai berikut :

No	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan air minum layak
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase cakupan layanan air limbah layak

4.7.4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Program dan kegiatan yang mendukung dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali sebagai berikut :

No	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
1.	Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Penyediaan/Rehabilitasi/ Relokasi Rumah Korban Bencana Provinsi dan Dampak Program Pemerintah Daerah Provinsi
2.		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi

4.7.5. BIDANG BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Setelah dilaksanakan Forum Perangkat Daerah Rancangan Renja Satpol PP Provinsi Bali Tahun 2023, yang melibatkan *Stakeholder* terkait, telah ditetapkan Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2023, dimana untuk susunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan secara eksisting tidak mengalami banyak perubahan dari tahun sebelumnya dimana terdapat 2 (dua) Program yang terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan yang telah disertai dengan penerapan efisiensi alokasi anggaran sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai.

Program dan kegiatan yang mendukung dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum melalui Satuan

Polisi Pamong Praja Provinsi Bali pada tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam rencana strategis dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Terintegrasi

4.7.6. BIDANG URUSAN SOSIAL

Program dan Kegiatan yang terkait dengan Penerapan SPM

1. Program Rehabilitasi Sosial dengan kegiatan :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan permakanan
 - Penyediaan sandang
 - Penyediaan asrama yang mudah diakses
 - Penyediaan alat bantu
 - Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti
 - Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social
 - Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
 - Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan**/Bukti kepemilikan NIK
 - Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
 - Pemberian pelayanan penelusuran keluarga / Bukti keberadaan keluarga
 - Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam panti dengan sub kegiatan :
 - Pengasuhan
 - Penyediaan permakanan
 - Penyediaan sandang
 - Penyediaan asrama yang mudah diakses
 - Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti
 - Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial

- Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
 - Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
 - Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
 - Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
 - Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
 - Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di dalam panti dengan sub kegiatan :
- Penyediaan permakanan
 - Penyediaan sandang
 - Penyediaan asrama yang mudah diakses
 - Penyediaan alat bantu
 - Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti Sosial
 - Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social
 - Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
 - Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan
 - Akses ke layanan kesehatan dasar
 - Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
 - Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
 - Pemulasaraan
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis dengan sub kegiatan :
- Penyediaan permakanan
 - Penyediaan sandang
 - Penyediaan asrama yang mudah diakses
 - Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti
 - Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social
 - Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari
 - Pemberian bimbingan keterampilan dasar
 - Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak
 - Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
 - Pemulangan ke daerah asal

2. Program Penanganan Bencana dengan kegiatan :

- a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi dengan sub kegiatan :
- Penyediaan permakanan
 - Penyediaan sandang
 - Penyediaan tempat penampungan pengungsi

- Penanganan khusus bagi kelompok rentan
- Pelayanan dukungan Psikososial

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Bali Tahun 2023, maka secara umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 telah berjalan dengan baik, namun masih perlu untuk ditingkatkan sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Dengan demikian maka kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat pula ditingkatkan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Bali Tahun 2023 ini tidak hanya sekedar merekam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban, baik bagi pemerintah daerah maupun Kepala Daerah yang memimpinnya. Kinerja yang baik dan optimal akan membangun kepercayaan masyarakat dan stakeholder kepada upaya-upaya pemerintah dalam berkinerja untuk menuju ke arah penyelenggaraan pemerintahan *Good Governance* dengan mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 ini disusun, semoga dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah guna peningkatan kinerja pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

Bali, 18 Maret 2024